



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2012 - 2016



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2012 - 2016



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2012 - 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah dilantiknnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Yogyakarta periode 2012-2016, maka untuk menjabarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan Daerah, perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - b. bahwa sesuai Pasal 150 ayat (3) poin e, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 – 2016;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Rancangan Awal, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006 Nomor 14 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 25 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

dan

WALIKOTA YOGYAKARTA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2012 - 2016

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta yang memuat penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJP Nasional dan RPJM Nasional.
7. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Strategis Bisnis (RSB) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah rencana strategis bisnis lima tahunan SKPD yang menerapkan Pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kota Yogyakarta untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
15. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
16. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RPJMD memuat Visi, Misi dan Prioritas Program Pembangunan Walikota Wakil Walikota, berkedudukan dan sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rincian Visi, Misi dan Prioritas Program Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Sistematika RPJMD Tahun 2012-2016, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

- a. Bab I : Pendahuluan
- b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
- c. Bab III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah
- d. Bab IV : Analisis Isu-isu Strategis
- e. Bab V : Penyajian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- f. Bab VI : Strategi dan Arah Kebijakan
- g. Bab VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
- h. Bab VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

- i. Bab IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah
- j. Bab X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan
- k. Bab XI : Penutup

Pasal 4

Penjabaran RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan ditindaklanjuti dalam RKPD, Renstra SKPD dan RSB SKPD atau Unit Kerja yang menerapkan PPK-BLUD yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 Juni 2012



diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 Juni 2012



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 7 TAHUN 2012

TANGGAL : 20 JUNI 2012

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program Walikota yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, program lintas SKPD, program kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif, dan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Kota Yogyakarta terletak pada posisi yang sangat strategis yaitu sebagai pusat pemerintahan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan berada ditengah-tengah 4 (empat) Kabupaten tetangga yaitu Bantul, Sleman, Kulon Progo dan Gunung Kidul. Selain itu juga terletak pada simpul strategis kota-kota di Jawa Tengah bagian selatan yaitu Solo kearah timur, Magelang ke arah Utara serta Purworejo, Purwokerto dan Cilacap ke arah Barat, kemudian juga perlintasan Jawa bagian selatan yang menghubungkan Jawa Timur dan Jawa Barat. Dilihat dari sudut pandang sosial, ekonomi dan budaya, posisi ini cukup strategis untuk mengembangkan peran pelayanan Kota Yogyakarta, tetapi disisi lain juga harus memperkuat daya saing untuk dapat mempertahankan dan memperkuat posisi tersebut.

RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016 merupakan tahap kedua Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025. RPJMD tahap kedua tetap memperkuat unggulan peran Kota Yogyakarta agar memiliki daya saing melalui lokomotif bidang pendidikan dan pariwisata. Oleh karena itu visi pembangunannya masih tetap dalam kerangka visi pembangunan jangka panjang daerah yaitu mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan

Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan, namun lebih dipertegas dengan penekanan pada pendidikan inklusi dan berkarakter serta ekonomi kerakyatan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016 adalah:

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008;
- c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- d. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Rancangan Awal, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014.
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Rancangan Awal, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- l. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;
- m. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
- n. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
- o. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
- p. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 Urusan Pemerintahan Daerah;
- q. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010 – 2029;

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RPJMD merupakan penerjemahan yang tepat dan sistematis atas perspektif pembangunan yang berlaku secara nasional sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan dirumuskan dalam bentuk visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah ke dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah. Penyusunan RPJMD berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kota Yogyakarta dan memperhatikan RPJMN, RPJMD Propinsi DIY, serta akan dijabarkan lebih lanjut dalam RKPD dan Renstra SKPD. Adapun hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan dimaksud adalah sebagai berikut :

a. RPJM Nasional

Hubungan RPJMD dengan RPJM Nasional adalah bahwa penyusunan RPJMD memperhatikan pada RPJMN yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014 . Dalam merencanakan pembangunan daerah memperhatikan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang disesuaikan dengan kondisi

dan kebutuhan daerah. Kebijakan yang perlu diperhatikan khususnya berkaitan dengan standar pelayanan minimal yang harus direncanakan pencapaiannya oleh daerah dan kemudian dilaksanakan.

b. RPJMD Propinsi DIY

Hubungan RPJMD dengan RPJMD Propinsi DIY adalah bahwa penyusunan RPJMD memperhatikan pada RPJMD Propinsi DIY yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009 - 2013. Dalam RPJMD tersebut perencanaan pembangunan daerah Propinsi DIY mengarah pada kemandirian masyarakat berbasis keunggulan daerah. Pada konteks Kota Yogyakarta maka unggulan daerah yang dikembangkan adalah pendidikan dan pariwisata yang menjadi lokomotif perekonomian kota.

c. RPJPD Kota Yogyakarta

Hubungan RPJMD dengan RTRW adalah bahwa penyusunan RPJMD berpedoman pada RPJPD yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta (RPJPD) Tahun 2005 - 2025. RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016 merupakan tahap kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025. Dalam penyusunan visi dan misi masih tetap melanjutkan apa yang diamanatkan dalam RPJPD dengan beberapa penekanan pada visi dan penyederhanaan misi tanpa mengurangi kandungan isinya.

d. RTRW Kota Yogyakarta

Hubungan RPJMD dengan RTRW adalah bahwa penyusunan RPJMD berpedoman pada RTRW yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010 - 2029. Maksudnya adalah bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan terhadap aspek ruang dan lokasi merupakan aspek yang sangat strategis dalam mengarahkan seluruh dinamika pemangku kepentingan dalam keselarasan dan keseimbangan dengan alam dan lingkungan. Keseluruhan dokumen

perencanaan Kota Yogyakarta yang merupakan penjabaran RPJMD apabila menyangkut aspek keuangan tetap berpedoman pada RTRW.

e. **RKPD Kota Yogyakarta**

Hubungan RPJMD dengan RKPD adalah bahwa RPJMD menjadi pedoman dalam RKPD tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Dalam penyusunan RKPD, prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah diselaraskan dengan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Target dan pagu program yang dalam RPJMD yang masih bersifat indikatif dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pada saat penyusunan RKPD.

f. **Renstra SKPD**

Hubungan RPJMD dengan Renstra SKPD adalah bahwa RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD dan bersifat indikatif. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. Renstra SKPD disusun dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang gambaran umum penyusunan RPJMD terdiri dari latar belakang penyusunan, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB II GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah terdiri dari Kinerja Keuangan Masa Lalu, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu, Kerangka Pendanaan

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini berisi penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

BAB V PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini berisi penyajian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan.

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja serta penjelasan tentang hubungan antara program pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang dipilih.

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Bab ini menguraikan hubungan urusan pemerintah daerah dengan SKPD terkait beserta program dan pencapaian target indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab SKPD pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Bab ini berisikan penetapan indikator kinerja daerah.

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

BAB XI PENUTUP

1.5 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016 adalah memberikan pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintahan, masyarakat, dunia usaha/swasta dan pihak-pihak terkait lainnya

untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Kota Yogyakarta secara sinergis.

Adapun tujuan penyusunan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016 adalah :

1. Memberikan penjabaran visi misi, Walikota dan Wakil Walikota terpilih ke dalam perencanaan stratejik yaitu penjabaran lebih lanjut kedalam rumusan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
2. Menyediakan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD agar terjadi keselarsan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD
3. Menyediakan pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi geografis daerah, mencakup karakteristik dan potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana, luas wilayah menurut batas administrasi pemerintahan kabupaten/kota/kecamatan/desa dan kelurahan.

2.1.1 Letak, Luas, dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Kota Yogyakarta adalah 3.250 Ha atau 32,50 Km² (1,02% dari luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) dengan jarak terjauh dari utara ke selatan kurang lebih 7,50 km dan dari barat ke timur kurang lebih 5,60 Km. Secara administratif Kota Yogyakarta terdiri dari 14 Kecamatan, 45 Kelurahan, 614 Rukun Warga (RW) dan 2.524 Rukun Tetangga (RT). Penggunaan lahan paling banyak diperuntukkan bagi perumahan, yaitu sebesar 2.103,27 Ha dan sebagian kecil berupa lahan kosong seluas 20,20 Ha. Kecamatan Umbulharjo merupakan kecamatan yang wilayahnya paling luas yaitu 812,00 Ha atau sebesar 24,98% dari luas Kota Yogyakarta, sedangkan kecamatan yang wilayahnya paling sempit adalah Kecamatan Pakualaman dengan luas 63,00 Ha atau sebesar 1,94% dari luas Kota Yogyakarta. Adapun luas masing-masing kecamatan di Kota Yogyakarta dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Pembagian Administrasi dan Luas Wilayah Kota Yogyakarta

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas Area (km ²)	Jumlah RW	Jumlah RT
1.	MANTRIJERON	1.Gedongkiwo	0.90	18	86
		2.Suryodiningratan	0.85	17	69
		3.Mantrijeron	0.86	20	75
			2.61	55	230
2.	KRATON	1.Patehan	0.40	10	44
		2.Panembahan	0.66	18	78

Lanjutan Tabel 2.1

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas Area (km ²)	Jumlah RW	Jumlah RT
		3.Kadipaten	0.34 1.40	15 43	53 175
3.	MERGANGSAN	1.Brontokusuman 2.Keparakan 3.Wirogunan	0.93 0.53 0.85 2.31	23 13 24 60	83 57 76 216
4.	UMBULHARJO	1.Giwangan 2.Sorosutan 3.Pandeyan 4.Warungboto 5.Tahunan 6.Muja Muju 7.Semaki	1.26 1.68 1.38 0.83 0.78 1.53 0.66 8.12	13 16 12 9 11 12 10 83	42 63 46 38 48 55 34 326
5.	KOTAGEDE	1.Prenggan 2.Purbayan 3.Rejowinangun	0.99 0.83 1.25 3.07	13 14 13 40	57 58 49 164
6.	GONDOKUSUMAN	1.Baciro 2.Demangan 3.Klitren 4.Kotabaru 5.Terban	1.06 0.74 0.68 0.71 0.80 3.99	21 12 16 4 12 65	88 44 63 21 59 275
7.	DANUREJAN	1.Suryatmajan 2.Tegalpanggung 3.Bausasran	0.28 0.35 0.47 1.10	15 16 12 43	45 66 49 160
8.	PAKUALAMAN	1.Purwokinanti 2.Gunungketur	0.30 0.33 0.63	10 9 19	47 36 83
9.	GONDONANAN	1.Prawirodirjan 2.Ngupasan	0.67 0.45 1.12	18 13 31	61 49 110
10.	NGAMPILAN	1.Notoprajan 2.Ngampilan	0.37 0.45 0.82	8 13 21	50 70 120
11.	WIROBRAJAN	1.Patangpuluhan 2.Wirobrajan 3.Pakuncen	0.44 0.67 0.65 1.76	10 12 12 34	51 58 56 165
12.	GEDONGTENGEN	1.Pringgokusuman 2.Sosromenduran	0.46 0.50 0.96	23 14 37	89 55 144

Lanjutan Tabel 2.1

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas Area (km ²)	Jumlah RW	Jumlah RT
13.	JETIS	1.Bumijo	0.58	13	56
		2.Gowongan	0.46	13	52
		3.Cokrodiningratan	0.66	11	60
			1.70	37	167
14.	TEGALREJO	1.Tegalrejo	0.82	12	46
		2.Bener	0.57	7	25
		3.Kricak	0.82	13	61
		4.Karangwaru	0.57	14	56
			2.91	46	188
	Jumlah	45	32,50	614	2.524

Sumber : Kota Yogyakarta Dalam Angka, 2011

Secara administratif, Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan dan 45 kelurahan dengan batas wilayah sebagai berikut:

Batas sebelah Utara : Kabupaten Sleman

Batas sebelah Timur : Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul

Batas sebelah Selatan : Kabupaten Bantul

Batas sebelah Barat : Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul

Letak geografis Kota Yogyakarta di antara 110° 24' 19" dan 110° 28' 53" Bujur Timur, 7° 49' 26" dan 7° 15' 24" Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 114 m diatas permukaan laut. Jarak terjauh dari Utara ke Selatan kurang lebih 7,5 km dan dari Barat ke Timur kurang lebih 5,6 km. Dengan kedudukan tersebut, secara umum Kota Yogyakarta memiliki posisi strategis antara lain sebagai ibukota Propinsi dan pusat kegiatan regional yang mencakup kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Bagian Selatan. Posisi ini membentuk pola aktifitas, potensi dan permasalahan yang khas sebagai wilayah yang bersifat terbuka dengan mobilitas yang tinggi.

Posisi sebagai pusat dari semua aktifitas masyarakat yang berkaitan dengan keseluruhan dari aspek urusan dan kewenangan pemerintahan mendorong Kota Yogyakarta menuju kepada ciri-ciri masyarakat perkotaan (*urban society*) yang mengandalkan pada sektor-sektor pelayanan dan jasa ketimbang sektor-sektor manufaktur dan produksi berskala besar.

2.1.2 Topografi

Wilayah Kota Yogyakarta sebagian besar (88,94%) berada pada kemiringan 0-2%, 9,64% berada pada kemiringan 2-15%, dan 1,09% berada pada kemiringan 15-40%, serta sisanya 0,34% berada pada kemiringan diatas 40 %. Secara rinci dapat terlihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel. 2.2 Luas Wilayah Kota Yogyakarta Berdasarkan Kemiringan Lahan

	KECAMATAN	LUAS BERDASAR LERENG/KEMIRINGAN LAHAN/Ha			
		0 – 2%	2 – 15%	15 – 40 %	>40 %
1.	Mantrijeron	244,4342	12,1800	4,3858	0
2.	Kraton	140,0000	0	0	0
3.	Mergangsan	105,0550	25,9450	0	0
4.	Umbulharjo	764,5430	45,0400	1,6600	0,7300
5.	Kotagede	277,800	23,2600	2,5200	3,9400
6.	Gondokusuman	328,5800	67,7600	2,6600	0
7.	Danurejan	75,8600	27,6400	5,9400	0,5600
8.	Pakualaman	63,0000	0	0	0
9.	Gondomanan	105,9200	6,0800	0	0
10.	Ngampilan	50,9200	31,0800	0	0
11.	Wirobrajan	147,3500	21,2600	6,0600	1,3300
12.	Gedongtengen	84,4400	8,3200	2,8200	0,4200
13.	Jetis	148,3200	20,7400	0,4800	0,4600
14.	Tegalrejo	254,6600	24,0200	8,8200	3,5000
	Jumlah	2.890,3892	313,3200	35,3458	10,9400

Sumber Data : Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta,2011

Sebagian wilayah dengan luas 1.657 Ha terletak pada ketinggian kurang dari 100 meter dan sisanya 1.593 Ha berada pada ketinggian antara 100-119 meter dpa. Ketinggian wilayah Kota Yogyakarta dari permukaan air laut dapat dibagi menjadi dua kelas yaitu ketinggian <100 m dan 100 – 199 m dari permukaan laut. Data ketinggian wilayah secara lengkap tersaji pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Luas Wilayah Kota Yogyakarta Menurut Ketinggian (di atas permukaan laut)

No	Kecamatan	Ketinggian (Ha)	
		50 – 100 m	100 – 700 m
1.	Mantrijeron	261,0000	0
2.	Kraton	140,0000	0
3.	Mergangsan	202,1050	28,8950
4.	Umbulharjo	604,6456	205,3544
5.	Kotagede	302,4915	4,5085
6.	Gondokusuman	0	399,0000
7.	Danurejan	0	110,0000
8.	Pakualaman	0	63,0000
9.	Gondomanan	41,8925	70,1075
10.	Ngampilan	30,7500	51,2500
11.	Wirobrajan	72,4263	103,5737
12.	Gedongtengen	0	96,0000
13.	Jetis	0	170,0000
14.	Tegalrejo	0	291,0000
	Jumlah (Ha)	1.657,3109	1.592,6891

Sumber Data : Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, 2011

Ketinggian <100 m dari permukaan laut seluas 1.657 ha atau 51,98% dari luas wilayah terdapat di Kecamatan Mantrijeron, Kraton, Mergangsan, Umbulharjo, Kotagede, Gondomanan, Ngampilan dan Wirobrajan. Ketinggian 100 – 119 m dari permukaan laut seluas 1.593 Ha atau 49,02% dari luas wilayah, terdapat di Kecamatan Mergangsan, Umbulharjo, Kotagede, Gondokusuman, Danurejan, Pakualaman, Gondomanan, Ngampilan, Wirobrajan, Gedongtengen, Jetis dan Tegalrejo.

2.1.3 Kondisi Tanah dan curah hujan

Kota Yogyakarta yang terletak di daerah dataran lereng gunung berapi Merapi, mempunyai jenis tanah regosal atau vulkanis muda. Formasi geologi yang terdapat di Kota Yogyakarta adalah Batuan Sedimen Old Andesit. Sebagian besar jenis tanahnya adalah regosol. Terdapat 3 sungai yang mengalir dari arah utara ke selatan yaitu Sungai Gajah Wong yang mengalir di bagian timur kota, Sungai Code di bagian tengah dan Sungai Winongo di bagian barat kota.

Rata-rata curah hujan tertinggi pada tahun 2009 terjadi pada bulan Februari, yaitu sebanyak 474 mm dan terendah terjadi pada bulan Juli (0 mm). Rata-

rata hari hujan per bulan adalah 9,92 hari. Kelembaban udara rata-rata cukup tinggi, kelembaban udara tertinggi terjadi pada bulan Februari sebesar 83% dan terendah pada bulan September sebesar 66%. Tekanan udara rata-rata 1.010,3 mb dan suhu udara rata-rata 26,66° C.

2.1.4 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di kota Yogyakarta pada tahun 2007-2010 didominasi oleh lahan permukiman. Sesuai dengan RTRW Kota Yogyakarta yang dominasi guna lahan adalah permukiman, sedang guna lahan yang mengalami peningkatan adalah pada sektor jasa seperti kegiatan perdagangan dan pariwisata. Peningkatan ini menggambarkan dinamika perekonomian kota Yogyakarta yang ditopang oleh sektor jasa, sebaliknya untuk lahan pertanian luasannya sangat rendah yaitu 118,591 Ha, dan sesuai dengan posisi Kota Yogyakarta sebagai daerah perkotaan, maka di RTRW sudah tidak terdapat lahan pertanian. Berikut disajikan data penggunaan lahan di Kota Yogyakarta tahun 2007-2010 pada tabel 2.4 :

Tabel 2.4 Luas Penggunaan Lahan Berdasarkan Status Peruntukan Lahan Tahun 2007-2010 Kota Yogyakarta

Tahun	Jenis Penggunaan Lahan (Ha)							Jml
	Perumahan	Jasa	Perush	Industri	Pertanian	Non Produktif	Lain-Lain	
2007	2.104,357	275,467	275,617	52,234	134,052	20,113	388,160	3.250
2008	2.106,338	275,562	277,565	52,234	130,029	20,041	388,160	3.250
2009	2.105,108	275,713	284,498	52,234	124,166	20,113	388,118	3.250
2010	2.105,391	279,373	286,138	52,234	118,591	20,113	388,160	3.250

Sumber Data : Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta/ Kota Yogyakarta Dalam Angka 2007-2011

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kondisi umum kesejahteraan masyarakat merupakan indikator kinerja pembangunan yang dapat dilihat dari kesejahteraan dan pemerataan perekonomian, kesejahteraan masyarakat dibidang pendidikan, kesehatan, penyediaan perumahan, ketenagakerjaan serta seni budaya dan olah raga.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari perkembangan pertumbuhan PDRB selama 4 (empat) tahun yaitu 2007 – 2010. Nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB Kota Yogyakarta dapat dilihat berdasarkan harga konstan dan harga berlaku. Berdasarkan harga konstan, nilai dan kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran adalah sektor yang memberikan sumbangan yang terbesar bagi PDRB Kota Yogyakarta. Pada tahun 2007 sektor ini memberikan sumbangan sebesar 24,88% dengan nilai Rp1.188.152.000.000,- dan meningkat menjadi 25,30% dengan nilai Rp1.393.111.000.000,- pada tahun 2010. Sedangkan sektor-sektor lain yang memberikan sumbangan yang besar bagi PDRB pada tahun 2010 yaitu sektor jasa-jasa 20,63% , sektor pengangkutan dan komunikasi 19,94% dan sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan 14%.

Dilain pihak terdapat pula sektor yang mengalami penurunan sumbangannya terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Sektor tersebut adalah sektor pertanian. Pada tahun 2007 sumbangan sektor pertanian sebesar 0,4% dan pada tahun 2010 menurun menjadi 0,32%. Penurunan ini disebabkan karena semakin menyempitnya lahan pertanian di Kota Yogyakarta sehingga produksi hasil pertanian juga semakin menurun. Sektor-sektor lain yang mengalami penurunan sumbangan terhadap PDRB pada tahun 2010 antara lain sektor listrik, gas dan air 1,25% , sektor industri pengolahan 10,8% dan sektor konstruksi 7,75%. Terkait dengan nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2. 5 berikut.

Tabel 2.5 Nilai dan Kontribusi dalam PDRB Berdasarkan Harga Konstan Kota Yogyakarta Tahun 2007-2010 (dalam jutaan rupiah)

Sektor	2007		2008		2009		2010	
	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
Pertanian	19.209	0,4	18.140	0,36	17.359	0,33	17.455	0,32
Pertambangan & penggalian	279	0,01	258	0,01	265	0,01	272	0,01
Industri pengolahan	539.154	11,29	543.050	10,82	549.574	10,48	594.845	10,80
Listrik, gas & air bersih	64.197	1,34	65.488	1,3	67.212	1,28	68.726	1,25

Sektor	2007		2008		2009		2010	
	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
Konstruksi	390.323	8,17	412.972	8,22	413.965	7,89	426.739	7,65
Perdagangan, hotel & restoran	1.188.152	24,88	1.253.972	25	1.332.070	25,4	1.393.111	25,30
Pengangkutan & komunikasi	910.568	19,06	984.783	19,61	1.055.067	20,12	1.098.385	19,94
Keuangan, sewa, & jasa Perusahaan	651.968	13,65	696.816	13,88	731.975	13,96	770.658	14
Jasa-jasa	1.012.551	21,2	1.046.615	20,84	1.077.364	20,54	1.135.751	20,63
PDRB	4.776.401	100	5.021.149	100	5.244.851	100	5.505.942	100

Sumber : BPS Kota Yogyakarta, 2010

Sedangkan untuk nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB yang didasarkan pada harga berlaku, sektor jasa-jasa adalah sektor yang memberikan sumbangan terbesar yaitu 24,63% pada tahun 2007 dengan nilai Rp2.118.045.000.000,- dan meningkat menjadi 24,77% pada tahun 2010 dengan nilai Rp2.908.302.000.000,-. Pada tahun 2010 sektor-sektor lain yang memberikan sumbangan yang besar terhadap PDRB Kota Yogyakarta yang didasarkan pada harga berlaku adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran 23,65%, serta sektor pengangkutan dan komunikasi 16,04%.

Sumbangan PDRB terendah berdasarkan harga berlaku berasal dari sektor pertambangan dan penggalian yaitu 0,01% pada tahun 2007 dengan nilai sebesar Rp. 497.000.000,- dan pada tahun 2010 dengan persentase yang sama yaitu 0,01% dengan nilai Rp 566.000.000,-. Dan sektor-sektor lain yang mengalami penurunan pada tahun 2010 yaitu sektor pertanian 0,28% , sektor industri pengolahan 10,01%, sektor konstruksi 8,08%, sektor listrik, gas dan air 1,83%. Nilai dan kontribusi PDRB berdasarkan harga berlaku Kota Yogyakarta tahun 2007 – 2010 selengkapnya dapat dilihat pada pada tabel 2.6.

Tabel 2.6 Nilai dan Kontribusi dalam PDRB Berdasarkan Harga Berlaku Kota Yogyakarta Tahun 2007-2010 (dalam jutaan rupiah)

Sektor	2007		2008		2009		2010	
	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
Pertanian	28.754	0,33	29.893	0,3	30.884	0,29	32.929	0,28

Lanjutan Tabel 2.6

Sektor	2007		2008		2009		2010	
	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
Pertambangan & penggalian	497	0,01	506	0,01	525	0,01	566	0,01
Industri pengolahan	866.747	10,08	964.476	9,83	1.049.608	9,91	1.175.980	10,01
Listrik, gas & air bersih	158.783	1,85	183.821	1,87	202.338	1,91	215.193	1,83
Konstruksi	740.368	8,61	854.814	8,72	896.647	8,47	948.797	8,08
Perdagangan, hotel & restoran	1.908.299	22,19	2.205.216	22,49	2.465.111	23,27	2.777.716	23,65
Pengangkutan & komunikasi	1.508.399	17,54	1.684.221	17,17	1.720.323	16,24	1.833.369	16,04
Keuangan, sewa, & jasa Perusahaan	1.269.579	14,76	1.502.387	15,32	1.628.995	15,38	1.800.227	15,33
Jasa-jasa	2.118.045	24,63	2.381.480	24,28	2.596.831	24,52	2.908.302	24,77
PDRB	8.599.468	100	9.806.813	100	10.591.262	100	11.743.079	100

Sumber : BPS Kota Yogyakarta, 2010

Sektor perdagangan, hotel dan restoran adalah sektor penyumbang PDRB terbesar di Kota Yogyakarta. Keberadaan sektor ini tersebar hampir diseluruh kecamatan di Kota Yogyakarta. Jika melihat sumbangan PDRB pada setiap kecamatan di Kota Yogyakarta, maka, masing-masing kecamatan memiliki nilai dan kontribusi yang berbeda beda terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Berdasarkan pada harga konstan dan harga berlaku, Kecamatan Umbulharjo adalah kecamatan yang memberikan sumbangan yang besar bagi PDRB Kota Yogyakarta. Sektor yang berkembang pesat di Kecamatan Umbulharjo antara lain sektor jasa, sektor pengangkutan dan telekomunikasi, sektor bangunan, serta sekto keuangan, sewa dan jasa perusahaan. Kecamatan Umbulharjo berdasarkan harga berlaku pada tahun 2007 menyumbang 23,089% sedangkan pada tahun 2010 sebesar 23,086%. Dan untuk kecamatan lain yang memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB Kota Yogyakarta yaitu Kecamatan Gondokusuman (17,151% pada tahun 2010) dan Kecamatan Danurejan (9,109% pada tahun 2010). Sedangkan untuk pertumbuhan PDRB Kota Yogyakarta dari tahun 2007 cenderung meningkat yaitu 4,37% pada tahun 2007 dan meningkat menjadi 4,98% pada tahun 2010.

Gambaran distribusi PDRB per kecamatan terhadap total PDRB Kota Yogyakarta dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut.

**Tabel 2.7 Distribusi PDRB per Kecamatan Terhadap Total PDRB
Kota Yogyakarta Tahun 2007-2010 (juta rupiah)**

No	Kecamatan	PDRB							
		2007		2008		2009		2010	
		HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)
1	Mantrijeron	5,006	4,968	4,987	4,916	5,007	4,883	4,992	4,865
2	Kraton	2,597	2,606	2,572	2,595	2,563	2,574	2,584	2,585
3	Mergangsan	4,753	4,805	4,759	4,804	4,796	4,793	4,844	4,818
4	Umbulharjo	23,139	22,550	23,093	22,316	23,086	22,13	23,020	22,512
5	Kotagede	4,559	4,508	4,485	4,417	4,516	4,377	4,534	4,390
6	Gondokusuman	17,110	17,144	16,959	17,177	16,929	17,192	16,584	17,151
7	Danurejan	8,385	8,694	8,63	8,916	8,638	9,078	8,790	9,109
8	Pakualaman	1,219	1,251	1,207	1,25	1,219	1,258	1,222	1,251
9	Gondomanan	7,754	8,310	7,627	8,482	7,418	8,576	7,352	8,516
10	Ngampilan	2,240	2,273	2,221	2,225	2,243	2,206	2,259	2,213
11	Wirobrajan	5,983	5,911	5,931	5,839	5,911	5,785	5,812	5,740
12	Gedongtengen	4,118	3,991	4,25	4,076	4,318	4,135	4,343	4,127
13	Jetis	7,754	7,636	7,867	7,706	7,902	7,744	7,920	7,732
14	Tegalrejo	5,382	5,354	5,412	5,281	5,454	5,269	5,743	5,306
	Kota Yogyakarta	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Data PDRB per Kecamatan 2007-2011

Pertumbuhan PDRB per kecamatan di Kota Yogyakarta antara Tahun 2007-2010 dapat dilihat pada Tabel 2.8 berikut.

**Tabel 2.8 Pertumbuhan PDRB per Kecamatan
Kota Yogyakarta Tahun 2007-2010**

No	Kecamatan	Pertumbuhan PDRB			
		2007 (%)	2008 (%)	2009 (%)	2010 (%)
1	Mantrijeron	3,95	4,03	3,77	4,58
2	Kraton	4,95	4,69	3,58	5,42
3	Mergangsan	4,34	5,08	4,23	5,51
4	Umbulharjo	3,83	4,02	3,59	5,08
5	Kotagede	3,73	3,01	3,5	5,39
6	Gondokusuman	5,01	5,32	4,55	4,73
7	Danurejan	4,27	7,80	6,36	5,33
8	Pakualaman	4,62	5,03	5,16	4,40
9	Gondomanan	7,07	7,30	5,61	4,78
10	Ngampilan	2,45	2,91	3,55	5,34
11	Wirobrajan	4,57	3,85	3,49	4,16
12	Gedongtengen	4,79	7,37	5,98	4,75

Lanjutan Tabel 2.8

No	Kecamatan	Pertumbuhan PDRB			
		2007 (%)	2008 (%)	2009 (%)	2010 (%)
13	Jetis	4,73	6,07	4,96	4,83
14	Tegalrejo	2,97	3,67	4,24	5,71
	Kota Yogyakarta	4,46	5,12	4,46	4,98

Sumber : Data PDRB per Kecamatan 2007-2011

PDRB per kapita dapat digunakan sebagai gambaran rata-rata pendapatan yang dihasilkan oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah atau daerah. PDRB per kapita diperoleh dari hasil pembagian antara PDRB dengan jumlah penduduk. Gambaran PDRB perkapita per kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.9 berikut.

Tabel 2.9 PDRB Perkapita per Kecamatan Kota Yogyakarta Tahun 2007-2010

No	Kecamatan	PDRB perkapita (dalam juta rupiah)			
		2007	2008	2009	2010
1	Mantrijeron	6,417.50	6,592.50	8,018.10	8,567.40
2	Kraton	5,580.80	5,787.00	7,032.60	8,145.20
3	Mergangsan	6,438.00	6,715.10	8,229.10	9,056.00
4	Umbulharjo	13,751.30	14,126.70	17,162.80	15,893.40
5	Kotagede	6,775.80	6,865.90	9,304.30	7,759.60
6	Gondokusuman	14,880.90	15,481.30	18,997.50	20,849.90
7	Danurejan	18,565.50	19,737.70	24,617.50	27,343.00
8	Pakualaman	4,960.90	5,332.10	6,779.70	7,394.90
9	Gondomanan	25,118.80	26,631.50	32,996.10	36,177.10
10	Ngampilan	5,422.20	5,522.00	6,772.90	7,466.70
11	Wirobrajan	9,237.30	9,426.20	11,375.60	12,723.30
12	Gedongtengen	9,443.30	10,021.70	12,464.40	13,221.40
13	Jetis	12,225.80	12,701.70	15,559.50	18,150.30
14	Tegalrejo	6,359.50	6,461.30	7,859.60	8,365.80
	Kota Yogyakarta	10,588.80	10,989.20	13,459.60	14,167.76

Sumber : BPS Kota Yogyakarta

2.2.1.2. Laju Inflasi, Ketimpangan Pendapatan dan Angka Kemiskinan

Inflasi merupakan perubahan tingkat harga (barang dan jasa) umum yang terjadi secara terus menerus. Inflasi yang tinggi tingkatnya tidak akan

menggalakkan perkembangan ekonomi. Biaya yang terus menerus naik menyebabkan kegiatan produktif sangat tidak menguntungkan. Inflasi berdampak secara umum pada kegiatan ekonomi negara yang lebih lanjut berdampak pada pengangguran. Selain itu juga menimbulkan efek-efek kepada individu masyarakat diantaranya adalah menurunkan pendapatan riil masyarakat berpendapatan tetap, mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang dan memperburuk pembagian kekayaan. Secara umum laju inflasi dapat ditekan pada kisaran dibawah 10%.

Tabel 2.10 Perkembangan Laju Inflasi, Ketimpangan Pendapatan dan Angka Kemiskinan Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011

No	Indikator	2007	2008	2009	2010
1	Laju Inflasi (%)	7,99	9,88	2,93	7,38
2	Indeks Gini	0,2899	0,2798	0,2772	0,2717
3	Indeks ketimpangan Williamson dan pemerataan pendapatan (versi Bank Dunia)	NA	20,98	22,17	18,95
4	Penduduk diatas Garis Kemiskinan (%)	90,22	89,19	89,95	90,25
	- Jumlah Penduduk miskin (%)	9,78	10,81	10,05	9,75

Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2011

Tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dapat diukur salah satunya adalah dengan indeks gini. Distribusi pendapatan makin merata jika nilai Koefisien Gini mendekati nol (0). Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan makin tidak merata jika nilai Koefisien Gini mendekati satu. Secara umum dalam kurun lima tahun, maka Kota Yogyakarta mempunyai tingkat ketimpangan pendapatan < 0,4, hal ini menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta berada pada tingkat ketimpangan rendah berarti pula bahwa distribusi pendapatan cukup merata. Hal ini didukung data tingkat ketimpangan berdasarkan perhitungan Indeks ketimpangan versi Bank Dunia, Kota Yogyakarta berada pada kelompok ketimpangan rendah.

2.2.2. Kesejahteraan Masyarakat

2.2.2.1. Pendidikan

Tabel 2.11 Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat di Bidang Pendidikan Kota Yogyakarta Tahun 2007-2010

No	Indikator Pendidikan	2007	2008	2009	2010
1.1	Angka melek huruf	99,76	99,78	99,81	99,95
	Jumlah penduduk usia diatas 15 yang bisa baca/tulis	362.514	370.175	373.616	376.143
	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	363.386	370.991	376.331	376.331
1.2	Angka rata-rata lama sekolah	11,00	11,40	11,50	11,50
1.3	Angka partisipasi kasar				
	Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/Paket A	142,91	143,29	139,31	137,80
	Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTS/Paket B	125,74	124,97	121,01	120,86
	Angka partisipasi kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	115,33	108,82	106,99	106,03
1.4	Angka pendidikan yang ditamatkan	379.931	384.814	389.730	327.302

Sumber: BPS Kota Yogyakarta (Yogyakarta Dalam Angka)

Dilhat dari pendidikan masyarakat Kota Yogyakarta sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari angka melek huruf yang mendekati 100 % dan rata-rata lama sekolah sudah di atas wajib belajar 9 tahun. Selain itu dilihat dari Angka Partisipasi Kasar menunjukkan bahwa seluruh penduduk usia sekolah sudah menikmati pendidikan dari tingkat SD dan yang sederajat sampai dengan SMA dan yang sederajat.

2.2.2.2 Kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat dilihat dari usia harapan hidup yang semakin meningkat yaitu di atas 73 tahun. Namun, di sisi lain berkaitan dengan angka

kematian bayi dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan, sehingga ke depan perlu mendapat perhatian yang lebih serius termasuk penanganan gizi.

Tabel 2.12 Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat di Bidang Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2007-2010

No	Indikator Kesehatan	2007	2008	2009	2010
2.1	Angka kelangsungan hidup bayi:				
	- Angka kematian bayi/Infant Mortality Rate (IMR) /1000 KH	3,04	5,56	6,79	8,77
	- Jumlah kematian bayi pada tahun tertentu		38	15	40
	- Jumlah kelahiran bayi pada tahun tertentu		4904	4872	4559
2.2	Angka usia harapan hidup (thn)	73,2	73,3	73.4	73.4
2.3	Persentase balita gizi buruk	1.10%	0.98%	1.04%	1.01%
	- Jumlah balita gizi buruk	214	188	198	178
	- Jumlah balita	19.424	19.236	19.027	17.676

Sumber: Dinas Kesehatan, 2011

2.2.2.3 Ketenagakerjaan

Jumlah penduduk kota dari tahun ke tahun meningkat, tetapi jumlah angkatan kerja dan angka pengangguran terbuka dari tahun ke tahun terlihat menurun. Jumlah penduduk yang tidak bekerja juga ada kecenderungan semakin menurun. Kurangnya lapangan kerja merupakan permasalahan di Kota Yogyakarta yang harus ditangani secara sungguh-sungguh, dengan demikian upaya yang berkaitan dengan penyediaan lapangan pekerjaan yang dilakukan oleh sektor-sektor terkait perlu terus ditingkatkan.

Tabel 2.13 Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat di Ketenagakerjaan Kota Yogyakarta Tahun 2007-2010

No	Indikator	2007	2008	2009	2010
1	Angka partisipasi angkatan kerja	62,90	61,76	67,68	58,89
2	Angka pengangguran terbuka	9,65	7,68	8,07	6,21

Sumber: BPS Kota Yogyakarta

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Berkaitan dengan perkembangan seni budaya di kota Yogyakarta dari tahun 2007 sampai tahun 2010 ada kecenderungan meningkat, kecuali di tahun 2010.

Tabel 2.14 Perkembangan Seni Budaya dan Olah Raga
Kota Yogyakarta Tahun 2007-2010

No	Capaian Pembangunan	2007	2008	2009	2010
1	Jumlah Grup Kesenian per 10.000 penduduk	0,019	0,079	0,080	0,068
2	Jumlah Klub Olah Raga per 10.000 penduduk	0,061	0,061	0,061	0,0611

Sumber: Dinas Parbud, 2011 dan Kantor Kesbang 2011

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Pendidikan

2.3.1.1 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Berikut disajikan data APM Kota Yogyakarta.

Bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan, sesuai lampiran I peraturan ini, dapat ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus urusan layanan wajib dan fokus urusan layanan pilihan.

Tabel 2.15 Angka Partisipasi Murni
Kota Yogyakarta Tahun 2007-2010

No	Jenjang Pendidikan	2007	2008	2009	2010
1.	SD/MI	123,52%	125,52%	122,36%	119,42%
2.	SMP/MTS	95,8%	92,71%	84,40%	90,12%

3.	SMA/SMK/MA	86,97%	84,29%	80,85%	78,91%
----	------------	--------	--------	--------	--------

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta,2011

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa APM Kota Yogyakarta untuk jenjang pendidikan SD pada tahun 2007 sebesar 128% dan pada tahun 2010 mengalami penurunan 9% menjadi 119%. Demikian halnya dengan jenjang pendidikan SMP dimana pada tahun 2007 sebesar 96% dan tahun 2010 menjadi 89%. Sedangkan untuk pendidikan SMA, juga mengalami penurunan yaitu pada tahun 2007 sebesar 87% dan pada tahun 2010 menjadi 78%. Penurunan APM tersebut disebabkan karena penambahan sekolah negeri di wilayah sekitar Kota Yogyakarta.

Oleh karena itu untuk meningkatkan pelayanan pendidikan di Kota Yogyakarta dilakukan beberapa langkah antara lain adanya program Konsultasi Belajar Siswa (KBS) On line secara interaktif melalui media kbs.jogjakarta.go.id, Radio Anak, serta konsultasi langsung bagi siswa pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS) sebagai media bimbingan belajar bagi siswa serta peningkatan kinerja pembelajaran guru yang bermuara pada peningkatan daya serap siswa melalui program pembelajaran berbasis teknologi informasi (E-learning). Untuk memfasilitasi pelaksanaan program ini, telah dibangun situs “jogjacerdas.org” yang berisi materi pembelajaran dari jenjang sekolah dasar sampai dengan pendidikan menengah.

Pada dasarnya kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta secara umum dirasa sudah baik, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan, antara lain adalah pendidikan karakter dan pola penerapan pendidikan inklusif. Pengembangan pendidikan karakter diharapkan menghasilkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa dalam sistem yang berakar pada budaya lokal dan menghormati kemajemukan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasar Pancasila dan UUD 1945.

2.3.1.2 Ketersediaan Sekolah dan Rasio Murid

Salah satu indikator meningkatnya kualitas pendidikan di suatu wilayah adalah meningkatnya sarana pendidikan seperti sekolah dan meningkatnya

jumlah tenaga pendidik. Di Kota Yogyakarta, jumlah tenaga pendidik untuk jenjang pendidikan TK/RA pada tahun 2007 sebanyak 972 dan pada tahun 2011 menjadi 1081 orang. Untuk pendidikan SD/MI pada tahun 2007 sebanyak 3244 pada tahun 2011 menurun menjadi 2904 orang. Untuk tenaga pendidik SMA/SMK pada tahun 2007 sebanyak 3549 dan pada tahun 2011 menjadi 3594 orang. Peningkatan jumlah tenaga pendidik juga diikuti dengan meningkatnya jumlah pendidik yang bersertifikat sehingga dapat menghasilkan siswa siswi yang berkualitas dan berprestasi. Berikut disajikan data ketersediaan sekolah dan tenaga pendidik Kota Yogyakarta.

**Tabel 2.16 Data Pelayanan Pendidikan
Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011**

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2007	2008	2009	2010	2011 *
1.	Banyaknya tenaga pendidik/ guru					
	a. TK/RA	972	979	1034	1.033	1.081
	b. SD/MI	3243	3025	2909	2.932	2.925
	c. SMP/MTs	1968	1.809	1.998	1.852	1.933
	d. SMA/MA	2043	2081	1944	1947	1945
	e. SMK	1504	1526	1517	1652	1679
2.	Banyaknya sekolah (unit)					
	a. TK/RA	212	212	211	208	211
	b. SD/MI	192	192	184	175	174
	c. SMP/MTs	65	65	64	64	65
	d. SMA/MA	54	53	53	53	52
	e. SMK	27	29	29	28	32
3.	Banyaknya murid/siswa (anak)					
	a. TK/RA	11.799	11.987	11.567	11.374	11.684
	b. SD/MI	46.489	46.518	46.280	46.182	46.112
	c. SMP/MTs	24.476	24.386	24.430	23.941	23.598
	d. SMA/MA	20.393	19.666	18.905	18.826	19.052
	e. SMK	14.911	16.070	16.705	16.492	16.570
4.	Rasio murid : guru (negeri & swasta)					
	a. TK/RA	82,38	81,67	89,39	90,82	92,52
	b. SD/MI	69,76	65,03	62,86	63,49	63,43
	c. SMP/MTs	80,41	74,18	81,78	77,36	81,91
	d. SMA/SMK/MA	100,18	105,82	102,83	103,42	102,09
	e. SMK	100,87	94,96	90,81	100,17	101,33

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, 2011

* : data hingga juni 2011

2.3.2 Kesehatan

Ketersediaan sarana kesehatan dan tenaga kesehatan sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pada tahun 2011 jumlah puskesmas di Kota Yogyakarta telah tersebar di 14 kecamatan, dan saat ini telah terdapat puskesmas rawat inap sebanyak 4 unit. Selain itu pelayanan kesehatan juga dilakukan oleh klinik swasta dan dokter praktek.

Salah satu indikator meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan di suatu wilayah adalah meningkatnya indikator di Kota Yogyakarta pelayanan kunjungan dan status gizi, sedangkan untuk sarana kesehatan yang ada telah mencakup seluruh wilayah yang ada di Kota Yogyakarta. Penurunan indikator derajat kesehatan akan ditanggulangi dengan beberapa program dari Pemerintah Kota Yogyakarta dengan dokter siaga di wilayah maupun penambahan tenaga medis maupun anggaran perlindungan kesehatan masyarakat. Tantangan ke depan perlu keterlibatan masyarakat dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat, sehingga penekanan pelaksanaan kesehatan dititikberatkan pada tindakan preventif, promotif, dan rehabilitatif.

Tabel 2.17 Data Pelayanan Kesehatan
Kota Yogyakarta Tahun 2008-2010

INDIKATOR	Tahun			Ukuran
	2008	2009	2010	
Pelayanan Kesehatan				
Kunjungan Ibu Hamil (K1)	87,49	102,59	100	%
Kunjungan Ibu Hamil (K4)	87,49	86,78	89,75	%
Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan	100	93,46	99,98	%
Anak Balita Mendapat Vit.A 2x	99,53	97,77	98,48	%
Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100	100,00	100	%
Ibu Hamil Mendapat Tablet Fe3	68,69	79,67	86,94	%
Jumlah Posyandu	620	625	622	Psyd

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2011

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.4.1.1 Sistem Transportasi Darat

Jaringan jalan merupakan salah satu infrastruktur penunjang kegiatan sosial, ekonomi, politik, budaya dan aktivitas manusia yang lainnya. Dengan adanya jaringan jalan maka kegiatan manusia yang menghubungkan antara satu lokasi

dengan lokasi yang lainnya dapat terhubung dengan baik. Panjang jalan terpanjang di Kota Yogyakarta adalah jalan non kelas yaitu 174,8 km² yang merupakan jalan lingkungan dan jalan permukiman. Dengan makin meningkatnya kuantitas moda angkutan maka diperlukan pemeliharaan jalan secara berkala yang dilakukan terus menerus, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel kelas jalan berikut ini :

Tabel 2.18 Data Panjang Jalan Menurut Kelas Jalan Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011

NO	Uraian Kelas Jalan	Jalan Kota				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Kelas I	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8
2	Kelas II	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77
3	Kelas III	26,22	26,22	26,22	26,22	26,22
4	Kelas III A	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
5	Kelas III B	14,39	14,39	14,39	14,68	14,68
6	Kelas III C	14,39	14,39	14,39	14,39	14,39
7	Non Kelas (Tidak dirinci)	174,8	174,8	174,8	174,8	174,8
	Jumlah	247,8	247,8	247,8	248,09	248,09

Sumber : Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta 2007-2011

Tidak ada perubahan panjang jalan yang signifikan di Kota Yogyakarta sejak tahun 2007 hingga tahun 2011. Tetapi volume kendaraan di Kota Yogyakarta setiap tahunnya mengalami kenaikan. Dengan panjang jalan yang sama pada tahun 2007 panjang jalan yaitu 247,8 km² dan jumlah kendaraan 290.466. Sedangkan pada tahun 2010 jumlah kendaraan meningkat menjadi 344.078. Didalam RTRW Kota Yogyakarta tahun 2009-2029, terdapat rencana pengembangan sistem transportasi darat untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat Kota Yogyakarta sehingga tidak memunculkan permasalahan seperti kemacetan dan kesemrawutan sistem transportasi darat. Data jumlah kendaraan dan panjang jalan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.19 Data Panjang Jalan dan jumlah kendaraan Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011*
1	Panjang Jalan	247,8	247,8	247,8	248,09	248,09
2	Jumlah Kendaraan	290466	308426	327378	344078	243849
3	Rasio	0,000853	0,000803	0,000757	0,000721	0,001017

Sumber : Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta 2007-2011

*: data hingga Juni 2011

Sedangkan untuk pengembangan moda angkutan masal Kota Yogyakarta, sekarang sedang dikembangkan moda transportasi trans Yogyakarta. Pengembangan moda ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat Kota Yogyakarta akan sarana transportasi perkotaan. Hingga tahun 2011, Kota Yogyakarta sudah memiliki 76 shelter aktif (Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, 2011).

2.4.1.2 Infrastruktur Perumahan

Untuk memenuhi kebutuhan perumahan di Kota Yogyakarta pada tahun 2007 Pemerintah Kota Yogyakarta membangun Rumah Susun Sewa (RUSUNAWA). Pembangunan Rusunawa ini dilakukan karena kondisi lahan yang semakin sempit dan kebutuhan akan perumahan yang meningkat, sehingga pembangunan perumahan secara vertikal merupakan alternatif yang paling baik.

Rumah layak huni di Kota Yogyakarta dari tahun ke tahun semakin meningkat persentasenya, yang mayoritas berlokasi di daerah bantaran sungai. Dalam memperoleh air bersih, masyarakat dilayani oleh sistem perpipaan PDAM dan non perpipaan yang dikelola oleh masyarakat. Hal ini berarti, hampir seluruh masyarakat Kota Yogyakarta mendapatkan kemudahan akses terhadap air bersih. Sedangkan untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat akan sanitasi yang baik telah dibangun MCK Komunal sebanyak 716 buah. Tantangan ke depannya adalah peningkatan fasilitas masyarakat dalam pemeliharaan bangunan fasilitas infrastruktur permukiman yang sudah dibangun oleh pemerintah dan dilimpahkan kepada masyarakat.

Tabel 2.20 Data Perumahan Kota Yogyakarta Tahun 2007-2010

No	Uraian	2007	2008	2009	2010
1.	Pembangunan Rusunawa	1			
2.	Persen rumah layak huni dibandingkan seluruh rumah	95%	95,20%	95,50%	95,64%
3.	Persen penduduk berakses air minum (perpipaan)	49,73%	49,40%	51,40%	51,40%
4.	Persen RT pengguna air bersih (non perpipaan)	99,58%	99,61%	99,66%	99,70%
5.	Jumlah MCK	716	716	716	716

Sumber : Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta 2007-2010

2.4.1.3 Infrastruktur Pariwisata

Kota Yogyakarta sebagai salah satu kota tujuan pariwisata di Indonesia terkenal dengan aktivitas pariwisatanya. Banyak wisatawan baik lokal maupun internasional yang datang ke Kota Yogyakarta menjadikan kota ini harus siap dengan segala infrastruktur pendukung kegiatan pariwisatanya. Infrastruktur pendukung pariwisata tersebut antara lain hotel, rumah makan, tempat parkir dan lain sebagainya. Berikut disajikan data usaha jasa akomodasi sebagai berikut :

Tabel 2.21 Data Jenis, Kelas dan Jumlah Usaha Jasa dan Akomodasi (UJA)
Kota Yogyakarta Tahun 2007-2010

No	Uraian	2007	2008	2009	2010
1	Hotel Bintang 5	2	2	2	2
2	Hotel Bintang 4	4	4	4	4
3	Hotel Bintang 3	3	4	4	6
4	Hotel Bintang 2	3	3	2	1
5	Hotel Bintang 1	10	8	10	9
6	Hotel Non Bintang/Melati	234	264	270	277

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta 2011

Banyaknya kemudahan akses bagi wisatawan dalam memilih alternatif akomodasi, jasa makanan dan minuman, penginapan yang ditawarkan merupakan daya tarik wisatawan untuk tinggal lebih lama di Kota Yogyakarta. Tantangan di bidang pariwisata antara lain bagaimana meningkatkan jejaring pariwisata dan meningkatkan Obyek Daya Tarik Wisata di Kota Yogyakarta. Untuk melihat banyaknya usaha jasa makanan dan minuman dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.22 Data Jenis, Kelas dan Jumlah Usaha Makanan dan Minuman (UMM)
Kota Yogyakarta Tahun 2007-2010

No	Uraian	2007	2008	2009	2010
1	Restoran/Rumah Makan	146	240	218	403
2	Jasa Boga	47	46	61	75

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta 2011

**Tabel 2.23 Jumlah Wisatawan
Kota Yogyakarta Tahun 2007-2010**

No	Uraian	Tahun			
		2007	2008	2009	2010
1	Rata-rata Lama menginap Wisatawan Hotel bintang	1,66	1,71	1,76	1,69
2	Rata-rata Lama menginap Wisatawan Hotel non bintang	1,70	1,37	1,50	1,47
3	Prosentase Tingkat Hunian Hotel Bintang	45,97	55,27	50,65	50,00
4	Prosentase Tingkat hunian Hotel Non Bintang	30,86	36,36	36,42	33,78

Sumber : BPS Kota Yogyakarta

2.4.1.4 Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pembangunan Ruang Terbuka Hijau merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan Yogyakarta yang nyaman bagi warga masyarakat. Pada tahun 2011 persentase RTH di Kota Yogyakarta mencapai 32,86% yang terdiri dari 14% RTH private dan 17% RTH umum. Persentase ini meningkat sejak tahun 2007 hingga tahun 2011 dan diharapkan setiap tahunnya luasannya meningkat. Pada tahun 2007 luas taman yaitu 56.000 m² dan pada tahun 2011 menjadi 62.305 m² dimana terdapat sebanyak 8.158 pohon perindang, banyaknya RTH di kota akan menjadikan kota menjadi lebih nyaman dan dapat menyerap CO₂, sehingga udara menjadi lebih segar. Tantangan ke depan adalah pencapaian prosentase RTH terhadap luasan Kota Yogyakarta sebesar 20% untuk RTH publik, sehingga perlu fasilitasi pembangunan RTH di masing-masing wilayah. Berikut disajikan data RTH Kota Yogyakarta Tahun 2007 hingga 2011 serta komposisi RTH publik dan privat tahun 2009:

**Tabel 2.24 Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Kota Yogyakarta Tahun 2007-2010**

No	Tahun	Luas Taman (m2)	Jumlah Pohon Perindang (batang)	Luasan RTH (%)
1	2007	56.000	4.287	26,80%
2	2008	56.000	4.708	26,80%
3	2009	56.862	5.058	31,65%
4	2010	60.659	8.158	31,99%
5	2011	62.305	10.341	32,86%

Sumber Data : Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2011

**Tabel 2.25 Komposisi RTH Publik dan Privat
Kota Yogyakarta tahun 2009**

Kecamatan	Luas wilayah (Ha)	RTH (Ha)	RTH Publik (Ha)	RTH Privat (Ha)
Danurejan	110,06	20,66	12,91	11,6
Gedongtengen	96,04	21,70	17,90	12,36
Gondokusuman	398,99	129,53	99,70	29,83
Gondomanan	112,04	26,86	14,88	12,21
Jetis	170,11	30,26	26,30	10,76
Kotagede	306,91	118,02	72,18	71,96
Kraton	140,09	24,06	18,38	10,10
Mantrijeron	260,92	100,56	48,22	52,34
Mergangsan	231,09	52,32	26,30	26,02
Ngampilan	82,07	10,48	5,90	4,58
Pakualaman	63,05	10,31	4,61	5,70
Tegalrejo	290,96	102,34	31,69	70,65
Umbulharjo	811,69	300,99	144,79	156,70
Wirobrajan	175,99	56,73	37,94	18,79
Total	3250,01	1004,82	561,70	493,60

Sumber Data : Olah data studio BAPPEDA, 2009

2.4.2 Fokus Iklim Berinvestasi

Kota Yogyakarta adalah salah satu kota yang nyaman untuk melakukan investasi. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya jumlah investor yang datang di Kota Yogyakarta untuk menanamkan modalnya baik itu pada kegiatan pariwisata, perdagangan, transportasi dan kegiatan jasa yang lainnya. Salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya investor yang datang ke Kota Yogyakarta adalah kondisi kota yang aman dan nyaman. Hal ini bisa dilihat dari angka kriminalitas yang menurun sejak tahun 2007 hingga tahun 2011. Jumlah kasus narkoba pada tahun

2007 sebanyak 93 kasus, meskipun kasus ini sempat mengalami kenaikan, tetapi pada tahun 2011 kasus narkoba mengalami penurunan menjadi 11 kasus. Tantangan ke depan adalah perlunya menjaga stabilitas keamanan dan penurunan angka kriminalitas dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah. Berikut disajikan data angka kriminalitas yang terjadi di Kota Yogyakarta tahun 2007 hingga 2011.

Tabel 2.26 Jumlah Kriminalitas Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011

No	Jenis Kriminal	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Jumlah kasus Narkoba	93	100	91	85	11
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	1	2	3	1	1
3.	Jumlah Kejahatan Seksual (Kesusilaan/Cabul)	16	12	19	19	2
4.	Jumlah kasus Penganiayaan	122	265	293	276	65
5.	Jumlah kasus Pencurian	168	497	608	690	170
6.	Jumlah kasus Penipuan	224	365	426	425	119
7.	Jumlah kasus Pemalsuan uang		3	2	1	1
8.	Total Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	624	1244	1442	1497	369
9.	Jumlah Penduduk	434212	444236	455946	457668	435874
10.	Angka Kriminalitas (8)/(9)	0,0014	0,0028	0,0032	0,0033	0,0008

Sumber : Data Dinas Ketertiban Tahun 2007-2011 dan Data penduduk Dindukcapil 2007-2011

Kemudahan berinvestasi juga juga didukung dengan dibentuknya Dinas Perizinan yang merupakan bentuk pelayanan perizinan satu pintu. Pelayanan perizinan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai, yaitu didukung dengan teknologi informasi dan terjaminnya kepastian waktu dan biaya. Untuk investasi skala rumah tangga/kecil yang berlokasi di perkampungan proses perizinan sudah didelegasikan pada SKPD Kecamatan, sehingga akan mempercepat dan memperpendek jalur birokrasi.

2.4.3 Fokus Sumber Daya Manusia

2.4.3.1 Penduduk

Jumlah penduduk Kota Yogyakarta dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, pada tahun 2010 sebanyak 457.668, dibandingkan dengan tahun 2007 sebesar 434.212 jumlah penduduk Kota Yogyakarta tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 23.456 orang, jadi selama 4 (empat) tahun mengalami peningkatan 5,13 %. Sedangkan prediksi jumlah penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2011 adalah sebesar 523.191 orang. Tingginya laju pertumbuhan ini diduga karena banyaknya urbanisasi yang terjadi ke Kota Yogyakarta dengan alasan mencari pekerjaan dan sekolah. Mengingat Kota Yogyakarta disamping sebagai pusat pemerintahan juga merupakan pusat perekonomian (perdagangan dan jasa) serta pusat pariwisata.

Untuk mengetahui perkembangan penduduk Kota Yogyakarta selama tahun 2007-2010 secara rinci, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.27
DISTRIBUSI JUMLAH PENDUDUK KOTA YOGYAKARTA
MENURUT KECAMATAN TAHUN 2007-2011

No	Kecamatan	2007	2008	2009	2010
1	Tegalrejo	38.844	39.947	40.789	41.128
2	Jetis	31.196	31.307	31.883	31.690
3	Gondokusuman	50.355	51.442	52.545	52.586
4	Danurejan	23.149	23.617	24.114	24.327
5	Gedongtengen	22.490	22.739	23.180	23.181
6	Ngampilan	20.818	21.128	21.601	21.492
7	Wirobrajan	29.005	29.558	30.513	30.428
8	Mantrijeron	35.501	37.145	38.296	38.363
9	Kraton	23.765	24.083	24.607	24.803
10	Gondomanan	16.569	16.863	17.119	17.056
11	Pakualaman	11.870	12.077	12.320	12.078
12	Mergangsan	35.663	36.413	37.102	36.879
13	Umbulharjo	63.905	65.975	68.674	69.635
14	Kotagede	31.082	31.942	33.203	34.022
	Jumlah	434.212	444.236	455.946	457.668

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta

Dari tabel diatas kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi adalah Kecamatan Umbulharjo. Sedangkan Kecamatan Pakualaman merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terendah.

2.4.3.2 Kualitas Tenaga Kerja

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan kunci dari keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Kualitas sumber daya manusia memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi daerah. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya. Kota Yogyakarta memiliki sarana dan prasarana pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Tantangan ke depan adalah mempertahankan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan berbasis masyarakat.

Tingkat pendidikan masyarakat Kota Yogyakarta beragam. Berikut disajikan tabel tingkat pendidikan masyarakat Kota Yogyakarta tahun 2008 hingga 2010.

Tabel 2.28 Tingkat Pendidikan Masyarakat Kota Yogyakarta Tahun 2007-2010

No	Jenis Pendidikan	2008 (%)	2009 (%)	2010(%)
1	Belum tamat SD	10,67	15,78	15,78
2	SD/ sederajat	16,4	18,17	18,17
3	SLTP/ sederajat	15,65	16,4	16,4
4	SLTA/ sederajat	41,05	37,59	37,59
5	Diploma I/II	1,27	0,89	0,89
6	Akademi/DIII	4,49	3,87	3,87
7	Perguruan tinggi	10,47	7,3	7,3

Sumber : BPS Kota Yogyakarta 2008-2010

Berdasarkan tabel tersebut, persentase masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan hingga perguruan tinggi termasuk rendah yaitu 7,3%. Dan persentase terbesar yaitu 37,59% masyarakat Kota Yogyakarta memiliki tingkat pendidikan hingga SLTA. Meskipun demikian pemerintah kota akan terus meningkatkan tingkat pendidikan masyarakatnya hingga menempuh pendidikan tinggi.

2.4.3.3 Angka ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Rasio ini digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Di Kota Yogyakarta angka rasio ketergantungannya termasuk rendah. Hal ini menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Berikut disajikan data rasio ketergantungan Kota Yogyakarta tahun 2008 hingga 2010.

Tabel 2.29 Angka Ketergantungan Kota Yogyakarta Tahun 2007-2010

No	Uraian	2008	2009	2010
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	85924	86421	75696
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	28169	28530	27686
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) & (2)	114093	114951	103382
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	342822	347801	283704
5.	Rasio ketergantungan (3) / (4)	0,332805363	0,330507963	0,364400925

Sumber : BPS Kota Yogyakarta 2008-2010

2.5 Telaah Terhadap Dokumen RPJM Nasional (2010–2014)

Tahapan kedua dari RPJP Nasional dalam RPJM (2010–2014) mempunyai prioritas utama untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan iptek serta penguatan daya saing perekonomian

2.5.1. Telaah Terhadap Visi Pembangunan

Visi Indonesia 2014 adalah :

“Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan”

Penjelasan untuk kata kunci dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

- **Kesejahteraan Rakyat.** Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- **Demokrasi.** Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia.
- **Keadilan.** Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.

2.5.2. Telaah Terhadap Misi Pembangunan

Misi 1: Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera

Pembukaan UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia yang sejahtera merupakan tujuan akhir dari pembentukan negara Indonesia. Kesejahteraan rakyat tidak hanya diukur secara material, tetapi juga secara rohani yang memungkinkan rakyat Indonesia menjadi manusia yang utuh dalam mengejar cita-cita ideal, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif, dan konstruktif.

Misi 2: Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi

Indonesia telah tumbuh sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Proses demokrasi yang berjalan dalam lima tahun terakhir ini menunjukkan proses demokrasi yang makin matang dan makin dewasa. Meskipun demikian, masih diperlukan penyempurnaan struktur politik yang dititikberatkan pada proses pelembagaan demokrasi dengan menata hubungan antara kelembagaan politik dan kelembagaan pertahanan keamanan dalam kehidupan bernegara. Penyempurnaan struktur politik, juga harus dititik-beratkan pada peningkatan kinerja lembaga-lembaga penyelenggara negara dalam menjalankan kewenangan dan fungsi-fungsi yang diberikan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Misi 3: Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang

Pembangunan yang adil dan merata, serta dapat dinikmati oleh seluruh komponen bangsa di berbagai wilayah Indonesia akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, mengurangi gangguan keamanan, serta menghapuskan potensi konflik sosial untuk tercapainya Indonesia yang maju, mandiri dan adil.

Pendekatan pembangunan ke depan harus dilakukan dengan mengedepankan rasa keadilan dan pemerataan, selain dengan pemberdayaan masyarakat secara langsung melalui skema pemberian dana alokasi khusus, termasuk jaminan pelayanan publik dan keperintisan.

2.5.3. Telaah Terhadap Agenda Pembangunan

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2010-2014, ditetapkan lima agenda utama pembangunan nasional tahun 2010-2014, yaitu:

Agenda I : Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Agenda peningkatan kesejahteraan rakyat tetap menjadi prioritas dari pemerintah mendatang. Wujud akhir dari perbaikan kesejahteraan akan tercermin pada peningkatan pendapatan, penurunan tingkat pengangguran dan perbaikan kualitas hidup rakyat. Perbaikan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan melalui sejumlah program pembangunan untuk penanggulangan kemiskinan dan penciptaan kesempatan kerja, termasuk peningkatan program di bidang pendidikan, kesehatan, dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar.

Agenda II : Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

Perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi isu yang penting dalam konteks nasional dan internasional. Krisis ekonomi yang lalu tidak terlepas dari buruknya tata kelola pemerintahan, baik di sektor pemerintahan maupun swasta. Krisis keuangan global, juga tidak terlepas dari masalah ini. Oleh karena itu, negara-negara yang tergabung dalam G-20 sepakat untuk menempatkan perbaikan tatakelola pemerintahan menjadi salah satu agenda perbaikan untuk mencegah krisis berulang. Wujud dari perbaikan tata kelola pemerintahan ini antara lain dapat

dilihat dari penurunan tingkat korupsi, perbaikan pelayanan publik, dan pengurangan ekonomi biaya tinggi

Agenda III : Penegakan Pilar Demokrasi

Transisi dari kehidupan demokrasi masa lalu dengan segala keberhasilan dan kegagalannya menuju Indonesia masa depan yang lebih sejahtera, demokratis, dan adil menuntut penegakan pilar-pilar demokrasi yang lebih konsisten. Oleh karena itu agenda penegakan pilar demokrasi merupakan agenda yang tetap penting dalam periode 2010-2014. Wujud dari Indonesia yang demokratis adalah penghargaan terhadap hak asasi manusia, terjaminnya kebebasan berpendapat, adanya checks and balances, jaminan akan keberagaman yang tercermin dengan adanya perlindungan terhadap segenap warga negara tanpa membedakan paham, asal-usul, golongan, dan gender.

Agenda IV : Penegakkan Hukum Dan Pemberantasan Korupsi

Sistem yang demokratis juga harus disertai tegaknya "rule of law." Oleh karena itu, agenda penegakan hukum masih merupakan agenda yang penting dalam periode 2010-2014. Wujud dari penegakan hukum adalah munculnya kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Kepastian hukum akan memberikan rasa aman, rasa adil dan kepastian berusaha bagi masyarakat. Terkait dengan kepastian usaha, salah satu persoalan yang dianggap kerap mengganggu masuknya investasi ke Indonesia adalah lemahnya kepastian hukum. Karenanya penegakan hukum akan membawa dampak yang positif bagi perbaikan iklim investasi yang pada gilirannya akan memberi dampak positif bagi perekonomian Indonesia.

Agenda dalam bidang hukum juga mencakup proses pembuatan undang-undang, proses penjabarannya, proses pengawasan, dan juga penegakan aturan hukum. Selain itu, wujud dari agenda hukum adalah menjamin proses peradilan yang bebas. Hal ini semua akan membantu di dalam upaya konsolidasi demokrasi. Penegakan hukum merupakan elemen yang sangat penting di dalam pemberantasan korupsi.

Agenda V: Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan

Peningkatan kualitas pembangunan yang inklusif dan berkeadilan terus menjadi agenda prioritas dalam pemerintahan 2010-2014 mengingat pelaksanaan agenda keadilan sampai saat ini belum mampu mewujudkan sepenuhnya hasil yang diinginkan. Penyebabnya antara lain proses pembangunan yang tidak partisipatif belum banyak diterapkan sehingga keadilan dan keikutsertaan secara luas belum diterapkan.

Perwujudan keadilan keikutsertaan dapat diwujudkan dalam berbagai dimensi. Dalam bidang ekonomi, keadilan dapat diwujudkan dalam bentuk perbaikan, atau terjadinya proses afirmasi terhadap kelompok yang tertinggal, orang cacat, dan terpinggirkan. Dalam bidang sosial-politik, perwujudan keadilan keikutsertaan (inklusif) dapat berupa perbaikan akses semua kelompok terhadap kebebasan berpolitik, kesetaraan gender dalam politik dan penghapusan segala macam bentuk diskriminasi.

2.5. Telaah Terhadap RPJMD Provinsi DIY (2009 -2013)

2.5.1. Telaah Terhadap Visi Pembangunan

Visi Pembangunan Provinsi DIY

“Pemerintah Daerah yang katalistik dan masyarakat mandiri yang berbasis keunggulan daerah serta sumberdaya manusia yang berkualitas unggul dan beretika”.

2.5.2. Telaah Terhadap Misi Pembangunan

Untuk mewujudkan visi pembangunan ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- 1. Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, profesional, humanis dan beretika dalam mendukung terwujudnya budaya yang adiluhung.**
- 2. Memperkuat fondasi kelembagaan dan memantapkan struktur ekonomi daerah berbasis pariwisata yang didukung potensi lokal dengan semangat kerakyatan menuju masyarakat yang sejahtera.**
- 3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan yang berbasis *Good Governance*.**

4. Memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.

2.5.3. Telaah Terhadap Tujuan Pembangunan

Mengacu kepada visi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas.
2. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
4. Mengoptimalkan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik.

2.5.4. Telaah Terhadap Sasaran Pembangunan

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut:

1. Misi: *Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, profesional, humanis dan beretika dalam mendukung terwujudnya budaya yang adiluhung*, dengan sasaran:
 - a. Terwujudnya peningkatan kualitas lulusan di semua jenjang dan jalur pendidikan.
 - b. Terwujudnya peningkatan aksesibilitas pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif.
 - c. Berkembangnya pendidikan yang berbasis multikultur untuk meningkatkan wawasan, keterbukaan dan toleransi.
 - d. Terwujudnya peningkatan budaya baca masyarakat.
 - e. Terwujudnya peningkatan kapasitas pemuda, prestasi dan sarana olahraga.
 - f. Berkembang dan lestarnya budaya lokal, kawasan budaya dan benda cagar budaya.
 - g. Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat.
 - h. Terwujudnya peningkatan kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat.

2. Misi: *Menguatkan fondasi kelembagaan dan memantapkan struktur ekonomi daerah berbasis pariwisata yang didukung potensi lokal dengan semangat kerakyatan menuju masyarakat yang sejahtera*, dengan sasaran:
 - a. Terwujudnya kepariwisataan yang berdaya saing tinggi.
 - b. Terwujudnya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat.
 - c. Terciptanya tata kelola perekonomian daerah yang responsif dan adaptif.
 - d. Terwujudnya ketersediaan dan pemerataan energi untuk masyarakat.

3. Misi: *Meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan yang berbasis Good Governance*, dengan sasaran:
 - a. Terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel.
 - b. Terwujudnya hubungan yang harmonis antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah.
 - c. Terwujudnya kesetaraan gender, keadilan dan kepastian hukum.
 - d. Terwujudnya sinergi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta.

4. Misi: *Memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik*, dengan sasaran:
 - a. Terwujudnya ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas.
 - b. Terwujudnya pemerataan prasarana dan sarana publik.
 - c. Terwujudnya ketahanan masyarakat terhadap bencana.
 - d. Terwujudnya pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

2.6. Telaah Terhadap Dokumen RPJPD Kota Yogyakarta (2005 – 2025)

2.5.1 Telaah terhadap Visi Pembangunan

Berdasarkan kondisi masyarakat Kota Yogyakarta saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan serta pemerintah kota, maka Visi Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2005 – 2025 adalah:

“Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan”

Visi Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2005–2025 ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kota Yogyakarta dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Kota Yogyakarta. Visi Pembangunan Kota Yogyakarta tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat Keberhasilannya.

2.5.2 Telaah terhadap Misi Pembangunan

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Yogyakarta tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi pembangunan sebagai berikut:

- 1) Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan
- 2) Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan
- 3) Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa
- 4) Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan
- 5) Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya
- 6) Mewujudkan Kota Yogyakarta yang *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), *clean government* (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum
- 7) Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai
- 8) Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas
- 9) Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat

2.5.3 Telaah Terhadap Sasaran Pembangunan Kota Yogyakarta

Sebagai ukuran tercapainya Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan, maka pembangunan jangka panjang dalam 20 tahun mendatang difokuskan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut :

- A. Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, ditunjukkan oleh:
 - 1) Meningkatnya kualitas pendidikan pada tingkat pendidikan dasar hingga menengah.

- 2) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan formal dan non formal.
 - 3) Tingginya tingkat kelulusan peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
 - 4) Tercapainya program wajib belajar 12 tahun sehingga pendidikan minimal masyarakat Kota Yogyakarta adalah setara dengan Sekolah Menengah.
 - 5) Rendahnya tingkat buta aksara.
 - 6) Tersedianya fasilitas pendidikan yang modern dan lengkap serta dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
- B. Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan, ditunjukkan oleh:
- 1) Meningkatnya jumlah dan lama tinggal kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara.
 - 2) Meningkatnya infrastruktur dan layanan wisata yang profesional.
 - 3) Berkembangnya obyek wisata potensial sebagai bagian dari paket wisata yang terintegrasi.
 - 4) Terselenggaranya kegiatan-kegiatan kesenian dan budaya secara berkesinambungan yang berbasis pada budaya lokal.
 - 5) Meningkatnya rasa aman dan nyaman bagi wisatawan.
- C. Terwujudnya Daya Saing Kota Yogyakarta yang Unggul dalam Pelayanan Jasa, ditunjukkan oleh:
- 1) Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 direncanakan minimal sama atau melebihi target nasional.
 - 2) Tingkat pengangguran 4 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 3 persen.
 - 3) Kualitas SDM yang semakin meningkat, termasuk peran perempuan (partisipasi, akses dan kontrol perempuan) dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas SDM di Kota Yogyakarta ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks

Pembangunan Gender (IPG), serta tercapainya pertumbuhan penduduk yang rendah di bawah 1 persen.

- 4) Terbangunnya struktur perekonomian kota yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Sektor jasa yang meliputi jasa penunjang pendidikan dan pariwisata, perdagangan, pemerintahan, keuangan, kesehatan, transportasi dan komunikasi diharapkan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien dan menghasilkan komoditi berkualitas dengan produktivitas yang tinggi serta sektor jasa yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing tinggi.

D. Terwujudnya Kota Yogyakarta yang Nyaman dan Ramah Lingkungan, ditandai oleh:

- 1) Meningkatnya kenyamanan dan kualitas kehidupan sosial masyarakat.
- 2) Rendahnya tingkat pencemaran air, tanah dan udara.
- 3) Meningkatnya kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.

E. Terwujudnya Masyarakat Kota Yogyakarta yang Bermoral, Beretika, Beradab dan Berbudaya, ditandai oleh:

- 1) Terwujudnya karakter masyarakat yang tangguh, kompetitif, dan bermoral tinggi yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat yang beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran, bergotong royong, patriotik, dinamis, dan berorientasi iptek.
- 2) Makin mantapnya budaya masyarakat yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat dan martabat manusia, dan memperkuat jati diri dan kepribadian.
- 3) Diterapkannya nilai-nilai luhur yang berasal dari budaya dan agama dalam praktek kehidupan sehari-hari.

F. Terwujudnya Kota Yogyakarta yang *Good Governance, Clean Government, Berkeadilan, Demokratis dan Berlandaskan Hukum*, ditunjukkan oleh:

- 1) Terciptanya supremasi hukum dan penegakan HAM yang bersumber pada peraturan perundangan yang berlaku yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif, aspiratif dan perspektif gender.
- 2) Terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik lokal yang dapat diukur dengan adanya pemerintah yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang mandiri dan berkeadilan gender.
- 3) Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah kota untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, bebas KKN, berwibawa, dan bertanggung jawab serta profesional, mempunyai kompetensi tinggi sehingga mampu mendukung pembangunan kota.
- 4) Terwujudnya akuntabilitas publik penyelenggaraan pemerintahan.
- 5) Terwujudnya pelayanan umum berkualitas tinggi dengan didukung aparatur pemerintah yang profesional dan berkompentensi tinggi.
- 6) Terwujudnya tata pemerintahan yang mencerminkan komitmen dan integritas terhadap kesetaraan dan keadilan gender.

G. Terwujudnya Kota Yogyakarta yang Aman, Tertib, Bersatu dan Damai, yang ditandai oleh:

- 1) Rendahnya tingkat kriminalitas.
- 2) Rendahnya intensitas dan frekuensi konflik sosial yang ditimbulkan karena isu SARA dan kesenjangan sosial ekonomi.
- 3) Tingkat keyakinan masyarakat yang tinggi akan rasa aman, tentram dan damai.
- 4) Tingkat partisipasi kuat masyarakat dalam bidang keamanan dan ketertiban.
- 5) Berkurangnya/menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak baik di dalam maupun di luar rumah tangga, baik fisik, seksual maupun psikis.

H. Terwujudnya Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas, ditandai oleh:

- 1) Tersusunnya jaringan infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi antar moda berbasis pada efisiensi dan berkeadilan.

Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan, termasuk tingkat elektrifikasi rumah tangga dan dunia usaha yang tinggi. Terselenggaranya teknologi komunikasi yang efisien dan modern guna terciptanya Kota Yogyakarta sebagai *cyber city* terkemuka di Indonesia.

- 2) Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana publik yang mantap di sektor transportasi, telekomunikasi, fasilitas umum, perumahan, pendidikan dan energi.
- 3) Tingkat aksesibilitas sarana dan prasarana publik berdasarkan asas keadilan sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata ke segenap lapisan masyarakat.
- 4) Terwujudnya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasuk berkurangnya kesenjangan kesejahteraan antar kelompok masyarakat, termasuk laki-laki dan perempuan.
- 5) Terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel serta terwujud kota tanpa permukiman kumuh.
- 6) Tersedianya Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) dan ruang publik yang cukup nyaman dan indah sebagai tempat bermain dan rekreasi keluarga.

I. Terwujudnya Kota Yogyakarta Sehat, ditandai oleh:

- 1) Meningkatnya gaya hidup sehat dan kualitas kesehatan masyarakat yang diukur dari rendahnya angka kematian bayi dan ibu melahirkan, meningkatnya usia harapan hidup, meningkatnya status gizi masyarakat, rendahnya tingkat prevalensi penyakit degeneratif dan penyakit menular termasuk HIV/AIDS.
- 2) Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan serta perlindungan kesehatan (*universal coverage insurance*) terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan kesehatan reproduksi perempuan.
- 3) Meningkatnya kebersihan dan kesehatan lingkungan perumahan serta ketersediaan sarana dan prasarana kebersihan rumah tangga.

4) Rendahnya tingkat penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (Napza). Rendahnya tingkat pelanggaran terhadap peredaran obat-obatan, kosmetika, alat-alat kesehatan dan makanan

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

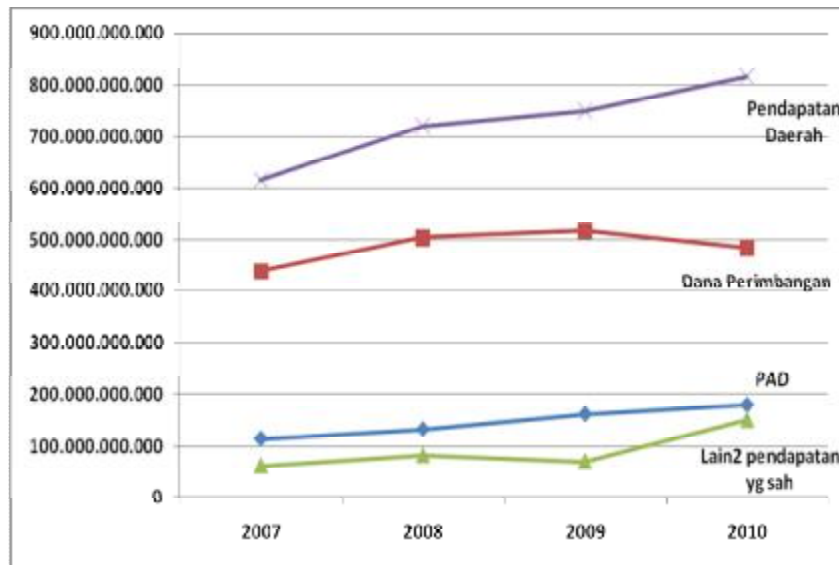
3.1.1.1 Sumber Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam perencanaan APBD terdapat target pendapatan daerah yang merupakan capaian yang harus diperoleh, sedangkan pada akhir tahun anggaran, diketahui realisasi penerimaan atas pendapatan daerah. Berdasarkan data tahun 2010, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta dalam realisasinya mampu menyumbangkan sebesar 22% dari total realisasi pendapatan daerah. Sementara porsi terbesar berasal dari Dana Perimbangan sebesar 59,43% dari total pendapatan daerah, sedangkan sisanya merupakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 18,57%.

Proporsi Dana Perimbangan cenderung menurun dari tahun 2007-2010. Pada tahun 2007, proporsi Dana Perimbangan mencapai 71,33% dan pada tahun 2010 turun menjadi 59,43%. Penurunan proporsi dana perimbangan ini belum menunjukkan kemandirian daerah. Penurunan proporsi dana perimbangan yang relatif besar tidak diikuti peningkatan proporsi PAD yang sebanding. Selama tahun 2007-2010, pergeseran proporsi PAD hanya berkisar 3,4%. Proporsi PAD pada tahun 2007 adalah sebesar 18,5% dan pada tahun 2010 menjadi 22%. Pergeseran proporsi pendapatan yang signifikan bersumber dari Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pada tahun 2007, proporsinya hanya sebesar 10,13% dan pada tahun 2010 mencapai 18,57%. Pergeseran yang besar ini disebabkan karena adanya peningkatan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus terkait dengan dana transfer daerah untuk tunjangan profesi guru PNSD dan tambahan penghasilan untuk guru PNSD.

Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selama tahun 2007-2010, rata-rata pertumbuhannya mencapai 9,83%/tahun.

Pertumbuhan yang tertinggi adalah Lain-lain Pendapatan Yang Sah, yang rata-rata pertumbuhannya mencapai 34,39%/tahun. Tingginya pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan pendapatan dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta Pendapatan Hibah. Sementara itu, pertumbuhan PAD dan Dana Perimbangan masing-masing sebesar 16,29%/tahun dan 3,34%/tahun.



Gambar 3.1 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007-2010

Tabel 3.1 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007-2010

Uraian	2007		2008		2009		2010		Pertumbuhan
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	
PENDAPATAN ASLI DAERAH	114.098.350.942	18,53	132.431.571.515	18,39	161.473.838.210	21,53	179.423.640.058	22,00	16,29
1. Pajak	54.783.202.892	8,90	62.452.770.490	8,67	71.852.539.011	9,58	78.254.579.242	9,60	12,62
2. Retribusi	29.197.466.013	4,74	34.940.602.210	4,85	23.497.748.962	3,13	32.214.650.779	3,95	3,33
3. Hasil perusahaan daerah	8.783.239.360	1,43	8.454.823.854	1,17	10.218.454.601	1,36	11.031.304.700	1,35	7,89
4. Lain lain PAD	21.334.442.678	3,47	26.583.374.960	3,69	55.905.095.636	7,45	57.923.105.336	7,10	39,51
DANA PERIMBANGAN	439.159.224.538	71,33	504.741.154.863	70,08	517.366.876.957	68,98	484.628.282.720	59,43	3,34
1. Dana bagi hasil pajak & Bukan Pajak	47.329.224.538	7,69	61.245.922.863	8,50	66.530.546.957	8,87	75.585.120.720	9,27	16,89
2. Dana Alokasi Umum (DAU)	365.042.000.000	59,29	411.257.232.000	57,10	414.345.330.000	55,25	395.444.062.000	48,49	2,70
3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	26.788.000.000	4,35	32.238.000.000	4,48	36.491.000.000	4,87	13.599.100.000	1,67	-20,23
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	62.391.277.000	10,13	83.080.206.970	11,53	71.148.301.200	9,49	151.444.001.874	18,57	34,39
1. Pendapatan Hibah	6.288.730.100	1,02	20.332.060.000	2,82	144.825.000	0,02	13.849.280.000	1,70	30,10
2. Dana Darurat	0	0	962.407.471	0,13	0	0	0	0	0
3. Dana bagi hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah daerah lainnya	37.579.816.500	6,10	43.333.111.500	6,02	46.059.402.800	6,14	48.991.022.874	6,01	9,24
4. Dana Penyesuaian & otonomi kusus	2.917.756.400	0,47	5.140.227.999	0,71	10.831.673.400	1,44	81.353.699.000	9,98	203,23
5. Bantuan Keuangan dr Prop/ Pemda Lainnya	15.604.974.000	2,53	13.312.400.000	1,85	14.112.400.000	1,88	7.250.000.000	0,89	-22,55
PENDAPATAN DAERAH	615.648.852.480	100,00	720.252.933.348	100,00	749.989.016.367	100,00	815.495.924.652	100,00	9,82

Sumber: Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta

3.1.1.2 Pendapatan Daerah

3.1.1.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

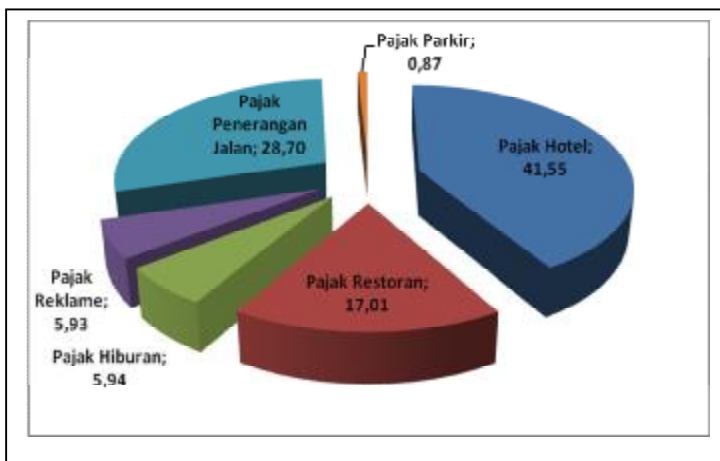
Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 22 ayat (1), ada 4 (empat) sumber Pendapatan Asli Daerah yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu: (i) Pajak Daerah; (ii) Retribusi Daerah; (iii) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan (iv) Lain-lain PAD yang sah.

Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah di Kota Yogyakarta cenderung mengalami peningkatan, namun tingkat ketergantungan kepada Pemerintah Pusat, khususnya terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) masih besar. Jika dilihat dari tingkat pertumbuhan PAD dari tahun 2007 hingga 2010 maka angka pertumbuhannya selalu positif. Artinya dari sisi daya tumbuh sudah besar, hanya kontribusinya ke Pendapatan Daerah masih relatif kecil. Penerimaan dari Pajak Daerah bertumbuh rata-rata sebesar 12,62%/tahun dan Retribusi Daerah hanya bertumbuh rata-rata 3,33%/tahun sedangkan kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah pada tahun 2010 masing-masing sebesar 9,60% dan 3,95% (lihat tabel 3.1).

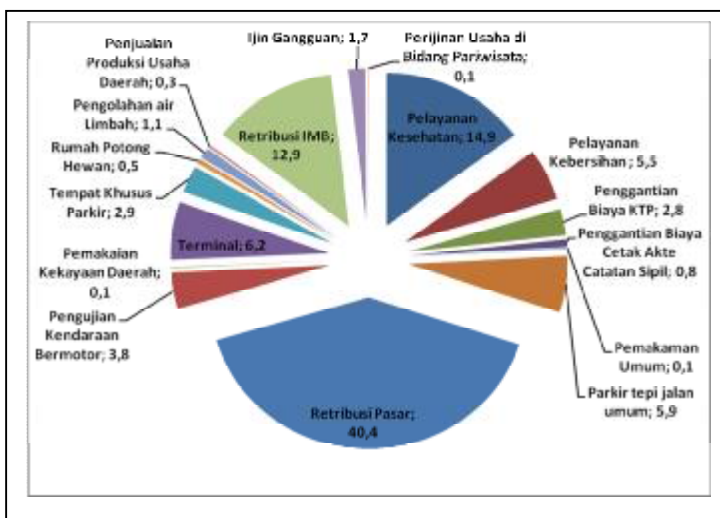
Realisasi PAD pada tahun 2010 mencapai nilai sebesar Rp179.423.640.058,00 atau 102,02 persen dari target yang ditetapkan yaitu Rp175.872.008.293,00. Realisasi penerimaan dari seluruh sumber Pendapatan Asli Daerah dapat memenuhi dan bahkan melebihi target, kecuali yang bersumber dari Lain-lain PAD. Penerimaan Pajak Daerah mencapai sebesar Rp 78.254.579.242,00 atau 104,06% dari target yang ditetapkan. Untuk Retribusi Daerah tercapai penerimaan sebesar Rp 32.214.650.779 atau 109,23% dari target yang ditetapkan. Untuk Hasil Perusahaan Daerah tercapai penerimaan sebesar Rp 11.031.304.700,00 atau sebesar 100,00% dari target yang ditetapkan. Untuk realisasi Lain-lain PAD Yang Sah tercapai penerimaan sebesar Rp 57.923.105.336,00 atau baru mencapai 96,3% dari target yang ditetapkan (lihat tabel 3.2).

Jika dilihat dari strukturnya, maka pos pembentuk PAD cenderung mengalami sedikit pergeseran selama dua tahun terakhir. Pada tahun-tahun awal pengamatan (2007-2008), pembentuk PAD terbesar kedua adalah retribusi daerah, namun di tahun-tahun akhir pengamatan, pembentuk PAD terbesar kedua adalah Lain-lain PAD Yang Sah. Pergeseran ini akibat kecenderungan berkurangnya

penerimaan retribusi daerah terutama dari Retribusi Pelayanan RSUD, yang mulai tahun 2009 diperhitungkan masuk ke dalam pos Lain-lain PAD Tang Sah. Namun pembentuk PAD yang utama tetap berasal dari Pajak Daerah. Pada tahun 2010, penerimaan Pajak Daerah mencapai Rp 78.254.579.242,00 atau 43,61% dari total PAD (lihat tabel 3). Penerimaan pajak ini terutama berasal dari Pajak Hotel serta Pajak Penerangan Jalan. Adanya jenis Pajak Daerah yang baru dipungut mulai tahun 2011 (pajak sarang burung walet dan pajak BPHTBB) diharapkan akan meningkatkan pendapatan daerah. Untuk retribusi, pada tahun 2010, penerimaan retribusi yang utama adalah retribusi pasar. Pendapatan dari retribusi pasar mencapai lebih dari 13 milyar rupiah. Sementara itu, Hasil Perusahaan Daerah berasal dari tiga perusahaan daerah yang ada, yaitu BPD DIY, PDAM, dan Bank Jogja. Penerimaan dari Bank BPD DIY merupakan yang terbesar, yaitu lebih dari 7 triliun rupiah.



Gambar 3.2.
Jenis Pajak Daerah
(dalam persen)



Gambar 3.3
Jenis Retribusi Daerah
(dalam persen)

Tabel 3.2
Capaian PAD Kota Yogyakarta Tahun 2007-2010

Uraian	2007			2008		
	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1. Pajak	49.274.000.000	54.783.202.892	111,18	59.343.591.000	62.452.770.490	105,24
2. Retribusi	29.092.692.000	29.197.466.013	100,75	32.885.227.754	34.940.602.210	106,25
3. Hasil perusahaan daerah	8.799.505.000	8.783.239.360	99,82	8.454.823.854	8.454.823.854	100,00
4. Lain lain PAD	16.996.685.000	21.334.442.678	125,52	16.211.593.443	26.583.374.960	163,98
Pendapatan Asli Daerah	104.162.882.000	114.098.350.942	109,54	116.895.236.051	132.431.571.515	113,29

Lanjutan tabel 3.2

Uraian	2009			2010		
	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1. Pajak	66.969.000.000	71.852.539.011	107,29	75.200.000.000	78.254.579.242	104,06
2. Retribusi	22.158.537.725	23.497.748.962	106,04	29.492.761.000	32.214.650.779	109,23
3. Hasil perusahaan daerah	10.159.369.381	10.218.454.601	100,58	11.031.304.700	11.031.304.700	100,00
4. Lain lain PAD	46.159.491.000	55.905.095.636	121,11	60.147.942.593	57.923.105.336	96,30
Pendapatan Asli Daerah	145.446.398.106	161.473.838.210	111,02	175.872.008.293	179.423.640.058	102,02

Sumber: Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta

Tabel 3.3 Struktur dan Pertumbuhan PAD Kota Yogyakarta Tahun 2007-2010

Uraian	Struktur (%)				Pertumbuhan (%)			
	2007	2008	2009	2010	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2007-2010
1. Pajak	48,01	47,16	44,50	43,61	14,00	15,05	8,91	12,62
2. Retribusi	25,59	26,38	14,55	17,95	19,67	-32,75	37,10	3,33
3. Hasil perusahaan daerah	7,70	6,38	6,33	6,15	-3,74	20,86	7,95	7,89
4. Lain lain PAD	18,70	20,07	34,62	32,28	24,60	110,30	3,61	39,51
Pendapatan Asli Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	16,07	21,93	11,12	16,29

Sumber: Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta

3.1.1.2.2 Dana Perimbangan

Dalam penjelasan UU Nomor 33 Tahun 2004 telah dinyatakan bahwa Dana Perimbangan merupakan pendanaan Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh. Proporsi dana perimbangan terhadap APBD relatif besar, mencapai 59,43 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta dalam pendanaan daerah masih relatif bergantung pada pemerintah pusat.

Hingga akhir tahun anggaran 2010, realisasi penerimaan Dana Perimbangan mencapai 98,48% atau sebesar Rp 484.628.282.720,00. Capaian realisasi untuk DAU dan DAK sebesar 100%, namun realisasi penerimaan dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak hanya sebesar 91,01%. Capaian penerimaan yang paling rendah, yaitu kurang dari 60%, berasal dari SDA Perikanan dan Provisi Sumberdaya Hutan. Dari tahun ke tahun, penerimaan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak memang lebih sering tidak mencapai realisasi 100%. Data selengkapnya mengenai Dana Perimbangan tersaji dalam tabel 3.4.

Dana Alokasi Umum memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan dari Dana Perimbangan. Kontribusinya mencapai lebih dari 80% dari total Dana Perimbangan yang diperoleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Sementara itu, pada tahun 2010 penerimaan dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak adalah sebesar Rp 75.585.120.720,00. Walaupun sumber penerimaan ini bukan merupakan yang dominan, namun pertumbuhannya merupakan yang tertinggi dengan rata-rata 16,89%/tahun.

**Tabel 3.4 Struktur dan Pertumbuhan Dana Perimbangan
Kota Yogyakarta Tahun 2007-2010**

Uraian	Struktur (%)				Pertumbuhan (%)			
	2007	2008	2009	2010	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2007-2010
1. Dana bagi hasil pajak & Bukan Pajak	10,78	12,13	12,86	15,60	29,40	8,63	13,61	16,89
+Bagi Hasil Pajak	10,67	12,10	12,84	15,16	30,40	8,76	10,58	16,18
- PBB	5,35	6,03	5,78	6,77	29,55	-1,77	9,66	11,74
- BPHTB	3,04	3,46	3,59	4,61	30,60	6,37	20,20	18,64
- PPH 21	2,27	2,61	3,47	3,78	32,13	36,28	2,16	22,53
+ Bagi Hasil bukan pajak (SDA)	0,11	0,03	0,02	0,44	-66,15	-40,86	2.081,15	63,45
- Provisi SD Hutan	0,00	0,00	0,00	0,00	26,93	-40,08	-49,85	-27,48
- SDA Perikanan	0,11	0,03	0,02	0,03	-66,38	-40,86	38,15	-35,00
- Cukai tembakau	0,00	0	0	0,41	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum (DAU)	83,12	81,48	80,09	81,60	12,66	0,75	-4,56	2,70
3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	6,10	6,39	7,05	2,81	20,34	13,19	-62,73	-20,23
DANA PERIMBANGAN	100,00	100,00	100,00	100,00	14,93	2,50	-6,33	3,34

Sumber: Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta

**Tabel 3.5 Capaian Dana Perimbangan
Kota Yogyakarta Tahun 2007-2010**

Uraian	2007			2008		
	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1. Dana bagi hasil pajak & Bukan Pajak	50.258.480.671	47.329.224.538	94,17	56.154.903.866	61.245.922.863	109,07
+Bagi Hasil Pajak	49.705.420.217	46.842.560.104	94,24	56.154.903.866	61.081.198.662	109,46
- PBB	22.006.323.073	23.504.741.664	106,81	28.321.767.437	30.449.247.481	107,51
- BPHTB	18.135.535.308	13.367.380.555	73,71	14.712.057.193	17.457.595.397	118,66
- PPH 21	9.563.561.836,00	9.970.437.885	104,25	12.770.139.875	13.174.355.784	103,17
+ Bagi Hasil bukan pajak (SDA)	553.060.454	486.664.434	87,99	350.939.361	164.724.201	46,94
- Provisi SD Hutan	98.515.000	1.190.454	1,21	829.952	1.511.040	182,06
- SDA Perikanan	454.545.454	485.473.980	106,80	350.109.409	163.213.161	46,62
- Cukai tembakau	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum (DAU)	365.042.000.000	365.042.000.000	100,00	411.257.230.000	411.257.232.000	100,00
3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	26.788.000.000	26.788.000.000	100,00	32.238.000.000	32.238.000.000	100,00
Dana Perimbangan	442.088.480.671	439.159.224.538	99,34	499.650.133.866	504.741.154.863	101,02

Lanjutan tabel 3.5

Uraian	2009			2010		
	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1. Dana bagi hasil pajak & Bukan Pajak	71.292.159.869	66.530.546.957	93,32	83.055.062.251	75.585.120.720	91,01
+Bagi Hasil Pajak	71.042.879.869	66.433.124.320	93,51	80.998.335.726	73.460.190.158	90,69
- PBB	34.043.636.458	29.909.059.691	87,86	36.232.638.162	32.796.978.958	90,52
- BPHTB	23.472.203.411	18.569.784.278	79,11	21.673.623.708	22.321.414.068	102,99
- PPH 21	13.527.040.000	17.954.280.351	132,73	23.092.073.856	18.341.797.132	79,43
+ Bagi Hasil bukan pajak (SDA)	249.280.000	97.422.637	39,08	2.056.726.525	2.124.930.562	103,32
- Provisi SD Hutan	830.000	905.360	109,08	830.000	454.080	54,71
- SDA Perikanan	248.450.000	96.517.277	38,85	248.450.000	133.334.511	53,67
- Cukai tembakau	0	0	0	1.807.446.525	1.991.141.971	110,16
2. Dana Alokasi Umum (DAU)	414.345.330.000	414.345.330.000	100,00	395.444.062.000	395.444.062.000	100,00
3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	36.491.000.000	36.491.000.000	100,00	13.599.100.000	13.599.100.000	100,00
Dana Perimbangan	522.128.489.869	517.366.876.957	99,09	492.098.224.251	484.628.282.720	98,48

Sumber: Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta

3.1.1.2.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD di Kota Yogyakarta terdiri dari pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya. Proporsi Lain-lain Pendapatan Yang Sah terhadap pendapatan daerah Kota Yogyakarta mencapai 18,57% pada tahun 2010. Proporsi ini cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010, ditargetkan lain-lain pendapatan yang sah memperoleh Rp150.082.084.441,00, dan pada akhir tahun terealisasi sebesar Rp151.444.001.874,00 atau tercapai 100,91% dari target. Data selengkapnya mengenai Lain-lain Pendapatan yang Sah tersaji dalam tabel 3.7.

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya serta Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan dari Lain-lain Pendapatan yang Sah. Kontribusi masing-masing bervariasi setiap tahunnya. Selama tahun 2007-2010, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus untuk Kota Yogyakarta meningkat setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan 203%/tahun. Peningkatan besaran Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus ini terkait dengan adanya dana transfer daerah untuk tunjangan profesi guru PNSD dan tambahan penghasilan untuk guru PNSD yang mencapai Rp81.353.699.000,00. Selama tahun 2009-2010, Pendapatan Hibah juga meningkat terkait dengan adanya Pengalihan Bantuan Keuangan untuk program BOS ke Pendapatan Hibah (lihat tabel 3.6).

Tabel 3.6 Struktur dan Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Kota Yogyakarta Tahun 2007-2010

Uraian	Struktur (%)				Pertumbuhan (%)			
	2007	2008	2009	2010	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2007-2010
1. Pendapatan Hibah	10,08	24,47	0,20	9,14	223,31	-99,29	9.462,77	30,10
2. Dana Darurat	0	1,16	0	0	0	0	0	0
3. Dana bagi hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah daerah lainnya	60,23	52,16	64,74	32,35	15,31	6,29	6,36	9,24
4. dana Penyesuaian & otonomi khusus	4,68	6,19	15,22	53,72	76,17	110,72	651,07	203,23
5. Bantuan Keuangan dr Prop/ Pemda Lainnya	25,01	16,02	19,84	4,79	-14,69	6,01	-48,63	-22,55
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	100,00	100,00	100,00	100,00	33,16	-14,36	112,86	34,39

Sumber: Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta

**Tabel 3.7 Capaian Lain-lain Pendapatan Yang Sah
Kota Yogyakarta Tahun 2007-2010**

Uraian	2007			2008		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1. Pendapatan Hibah	4.988.769.000	6.288.730.100	126,06	20.332.060.000	20.332.060.000	100,00
2. Dana Darurat	0	0	0	925.274.588	962.407.471	104,01
3. Dana bagi hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah daerah lainnya	36.069.500.300	37.579.816.500	104,19	43.333.111.500	43.333.111.500	100,00
-Dana bagi hasil pajak dari Propinsi :	36.069.500.300	37.579.816.500	104,19	43.333.111.500	43.333.111.500	100,00
- BH PKB	12.911.673.000	14.782.755.500	114,49	16.914.947.000	16.914.947.000	100,00
-BH BBNKB	7.616.441.000	8.172.716.600	107,30	12.777.366.900	12.777.366.900	100,00
- BH Pajak bahan bakar	14.595.990.000	13.530.588.500	92,70	12.164.367.300	12.164.367.300	100,00
- BH Pajak A B T	424.010.000	479.062.000	112,98	564.371.700	564.371.700	100,00
- BH penyisihan PBB	297.659.300	380.231.900	127,74	403.470.200	403.470.200	100,00
- BH Retribusi Daerah	223.727.000	234.462.000	104,80	508.588.400	508.588.400	100,00
4. dana Penyesuaian & otonomi kusus	0	2.917.756.400	0	1.904.296.000	5.140.227.999	269,93
- Dana penyesuaian adhoc	0	2.917.756.400	0	0	0	0
- DPIP	0	0	0	1.788.840.000	1.788.840.000	100,00
-DP Cukai tembakau	0	0	0	115.456.000	115.455.999	100,00
-DPPIP	0	0	0	0	0	0
- DP Tunjangan Pendidikan/ DT DAU guru	0	0	0	0	3.235.932.000	0
- Dana tambahan penghasilan PNSD/guru	0	0	0	0	0	0
-Dana Tunjangan Profesi Guru	0	0	0	0	0	0
- DP insentip Daerah	0	0	0	0	0	0
-BOS	0	0	0	0	0	0
5. Bantuan Keuangan dr Prop/ Pemda Lainnya	7.780.120.000	15.604.974.000	200,57	13.312.400.000	13.312.400.000	100,00
- Bantan keu dr Propinsi	7.780.120.000	15.604.974.000	200,57	13.312.400.000	13.312.400.000	100,00
- bantuan keu kpd kelurahan	0	0	0	0	0	0
- bantuan dr propinsi untuk Taman Pintar	6.000.000.000	6.000.000.000	100,00	0	0	0
-bantuan dr prop. Untk pemberdayaan masyarakat	1.250.120.000	9.074.974.000	725,93	0	0	0
-bantuan dr prop. Untk rehabilitasi puskesmas	530.000	530.000	100,00	0	0	0
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	48.838.389.300	62.391.277.000	127,75	79.807.142.088	83.080.206.970	104,10

Lanjutan tabel 7

Uraian	2009			2010		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1. Pendapatan Hibah	144.825.000	144.825.000	100,00	12.649.280.000	13.849.280.000	109,49
2. Dana Darurat	0	0	0	0	0	0
3. Dana bagi hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah daerah lainnya	46.059.402.500	46.059.402.800	100,00	48.986.880.441	48.991.022.874	100,01
- Dana bagi hasil pajak dari Propinsi :	46.059.402.500	46.059.402.800	100,00	48.986.880.441	48.991.022.874	100,01
- BH PKB	17.237.603.000	17.237.603.100	100,00	19.890.628.000	19.890.628.000	100,00
- BH BBNKB	12.292.723.900	12.292.723.900	100,00	12.320.787.000	12.320.787.000	100,00
- BH Pajak bahan bakar	15.136.819.600	15.136.819.600	100,00	15.493.770.800	15.493.770.800	100,00
- BH Pajak A B T	521.828.800	521.828.800	100,00	458.582.614	458.583.000	100,00
- BH penyisihan PBB	436.253.300	436.253.400	100,00	422.007.047	422.007.048	100,00
- BH Retribusi Daerah	434.173.900	434.174.000	100,00	401.104.980	405.247.026	101,03
4. dana Penyesuaian & otonomi khusus	929.264.600	10.831.673.400	1.165,62	81.195.924.000	81.353.699.000	100,19
- Dana penyesuaian adhoc	0	0	0	0	0	0
- DPIP	0	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00
- DP Cukai tembakau	929.264.600	1.010.123.400,-	108,70	0	0	0
- DPPIP	0	0	0	1.000.000.000	900.000.000	90,00
- DP Tunjangan Pendidikan/ DT DAU guru	0	9.821.550.000,-	0	0	0	0
- Dana tambahan penghasilan PNSD/guru	0	0	0	4.683.225.000	4.941.000.000	105,50
- Dana Tunjangan Profesi Guru	0	0	0	55.707.186.000	55.707.186.000	100,00
- DP insentip Daerah	0	0	0	18.805.513.000	18.805.513.000	100,00
- BOS	0	0	0	0	0	0
5. Bantuan Keuangan dr Prop/ Pemda Lainnya	14.112.400.000	14.112.400.000	100,00	7.250.000.000	7.250.000.000	100,00
- Bantan keu dr Propinsi	11.862.400.000	11.862.400.000	100,00	5.000.000.000	5.000.000.000	100,00
- bantuan keu kpd kelurahan	2.250.000.000	2.250.000.000	100,00	2.250.000.000	2.250.000.000	100,00
- bantuan dr propinsi untuk Taman Pintar	0	0	0	0	0	0
- bantuan dr Prop. Untk pemberdayaan masyarakat	0	0	0	0	0	0
- bantuan dr prop. Untk rehabilitasi puskesmas	0	0	0	0	0	0
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	61.245.892.100	71.148.301.200	116,17	150.082.084.441	151.444.001.874	100,91

Sumber: Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta

3.1.1.3 Belanja Daerah

Struktur belanja dalam APBD mengalami perubahan dari kelompok belanja aparatur dan belanja pelayanan publik berdasar Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 menjadi kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung berdasar Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan juga Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Belanja daerah terdiri dari:

1. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja bunga, (c) Belanja Subsidi, (d) Belanja Hibah, (e) Belanja Bantuan Sosial, (f) Belanja Bagi Hasil, (g) Belanja Bantuan Keuangan, dan (h) Belanja Tidak Terduga.
2. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja (a) Belanja pegawai, (b) Belanja barang dan jasa, dan (c) Belanja modal.

Pada tahun 2010, belanja Kota Yogyakarta mencapai Rp.839.866.480.661,00. Besaran belanja ini meningkat dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan 13,85%/tahun. Walaupun besaran belanja mengalami peningkatan namun proporsi masing-masing pos belanja relatif tidak banyak mengalami perubahan. Proporsi Belanja Tidak Langsung merupakan yang terbesar, yaitu 63,76%, sedangkan proporsi Belanja Langsung hanya 36,24%. Dari pos Belanja Tidak Langsung, pengeluaran Belanja Pegawai merupakan yang terbesar jumlahnya. Proporsinya terhadap Belanja mencapai 55,71% dan proporsinya terhadap Belanja Tidak Langsung mencapai 87,38%. Belanja pegawai ini merupakan penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya bagi pegawai negeri di lingkungan Kota Yogyakarta. Tingginya alokasi belanja untuk pegawai ini perlu diperhatikan, karena sebagian besar berupa belanja aparatur untuk pelayanan publik bidang pendidikan dan kesehatan.

Besaran belanja langsung yang terkait langsung dengan program dan kegiatan dengan masyarakat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan 7,63%/tahun. Proporsi belanja barang dan jasa merupakan yang terbesar (52,27%), sedangkan belanja modal untuk pengadaan aset tetap berwujud merupakan yang terkecil (17,75%). Besaran belanja barang dan jasa

cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sedangkan besaran belanja modal justru mengalami penurunan dari tahun ke tahun. (lihat tabel 3.8).

Realisasi belanja untuk Kota Yogyakarta tidak pernah memenuhi target. Pada tahun 2010, realisasi belanja hanya mencapai 91,58%. Walaupun pencapaiannya meningkat dari tahun ke tahun, namun masih selalu di bawah 100%. Realisasi untuk Belanja Tidak Langsung adalah sebesar 95,85% dan untuk Belanja Langsung adalah sebesar 84,94%. Realisasi belanja yang paling baik adalah untuk Belanja Pegawai dalam pos Belanja Tidak Langsung. Realisasi belanja pegawai merupakan yang paling tinggi dibandingkan dengan realisasi belanja lainnya karena sifatnya rutin. (lihat tabel 3.9)

Bila dilihat berdasarkan urusan, maka belanja dapat dibagi menjadi belanja untuk Urusan Wajib dan belanja untuk Urusan Pilihan. Proporsi yang terbesar adalah untuk Urusan Wajib karena terkait dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Belanja urusan Otonomi daerah, Pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian mencapai 40% dari total belanja, sedangkan belanja urusan pendidikan mencapai 30% dari total belanja. (lihat tabel 3.10).

**Tabel 3.8 Struktur dan Pertumbuhan Belanja Daerah
Kota Yogyakarta Tahun 2007-2010**

Uraian	Struktur (%)				Pertumbuhan (%)			
	2007	2008	2009	2010	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2007-2010
1. Belanja Tidak Langsung	57,10	59,45	60,58	63,76	27,79	14,34	12,77	18,11
- Pegawai	46,34	49,09	48,53	55,71	30,02	10,94	23,01	21,06
- Bunga	0,12	0,08	0,06	0,05	-18,11	-20,69	-17,33	-18,72
- Subsidi	0,05	0	0	0,00	0	0	0	-100,00
- Hibah	0	3,18	6,37	3,64	0	125,04	-38,84	0
- Bantuan sosial	10,15	7,10	5,40	4,21	-14,12	-14,67	-16,48	-15,10
- belanja tidak terduga	0,45	0,01	0,23	0,16	-97,62	2.800,46	-25,78	-19,97
2. Belanja langsung	42,90	40,55	39,42	36,24	16,03	9,09	-1,49	7,63
- Pegawai	12,03	12,21	10,31	10,86	24,54	-5,26	12,93	10,04
- Barang & jasa	15,05	12,98	0,02	18,95	5,88	-99,84	112.372,07	22,92
- Modal	15,81	15,36	11,07	6,43	19,23	-19,15	-37,70	-15,63
BELANJA	100,00	100,00	100,00	100,00	22,74	12,21	7,15	13,85

Sumber: Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta

Tabel 3.9 Capaian Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007-2010

Uraian	2007			2008		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1. Belanja Tidak Langsung	400.988.256.599	324.993.963.074	81,05	491.660.890.986	415.300.348.549	84,47
- Pegawai	313.551.176.304	263.728.387.186	84,11	387.708.293.898	342.891.947.474	88,44
- Bunga	707.120.555	707.120.554	100,00	579.027.700	579.027.616	100,00
- Subsidi	307.192.000	306.876.000	99,00	0	0	0
- Hibah	0	0	0	28.216.140.900	22.180.860.900	78,61
- Bantuan sosial	62.875.796.994	57.742.224.630	91,76	55.960.226.694	49.587.684.559	88,61
- belanja tidak terduga	23.546.970.746	2.554.951.274	10,85	19.197.201.794	60.828.000	0,32
2. Belanja langsung	282.293.131.476	244.126.409.488	86,48	323.708.329.056	283.266.315.572	87,51
- Pegawai	79.172.400.934	68.476.752.847	86,49	96.474.067.282	85.279.523.296	88,40
- Barang & jasa	102.454.936.051	85.667.260.473	83,61	109.285.272.225	90.700.730.390	82,99
- Modal	100.665.794.491	89.982.396.168	89,39	117.948.989.549	107.286.061.886	90,96
BELANJA	683.281.388.075	569.120.372.562	83,29	815.369.220.042	698.566.664.121	85,67

Lanjutan tabel 3.9

Uraian	2009			2010		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1. Belanja Tidak Langsung						
- Pegawai	509.884.774.585	474.846.213.226	93,13	558.668.026.672	535.464.145.542	95,85
- Bunga	399.664.500.318	380.394.869.904	95,18	484.205.172.499	467.904.710.054	96,63
- Subsidi	459.221.795	459.221.795	100,00	554.537.870	379.637.470	68,46
- Hibah	0	0	0	0	0	0
- Bantuan sosial	51.671.837.850	49.915.246.350	96,60	31.026.861.150	30.530.575.535	98,40
- belanja tidak terduga	45.130.701.000	42.312.581.054	93,76	40.000.495.725	35.339.698.475	88,35
2. Belanja langsung	12.958.513.622	1.764.294.123	13,61	2.880.959.428	1.309.524.008	45,45
- Pegawai	351.089.991.266	309.005.479.534	88,01	358.386.143.508	304.402.335.119	84,94
- Barang & jasa	90.615.588.703	80.794.926.619	89,16	100.528.294.020	91.242.263.994	90,76
- Modal	165.888.063.878	141.474.807	85,28	182.135.924.939	159.119.638.920	87,36
BELANJA	860.974.765.851	783.851.692.760	91,04	917.054.170.180	839.866.480.661	91,58

Sumber: Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta

Tabel 3.10 Realisasi Belanja Menurut Urusan Kota Yogyakarta Tahun 2007-2009

Uraian	2007			2008			2009			Pertumbuhan (%/tahun)
	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Struktur (%)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Struktur (%)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Struktur (%)	
I. UR WAJIB	550.531.608.610	83,12	96,73	679.481.120.555	85,59	97,27	763.378.143.875	91,00	97,39	17,75
1. Ur. Pendidikan	176.274.696.447	83,61	30,97	232.599.186.594	89,86	33,30	249.316.020.088	94,98	31,81	18,93
2. Ur. Kesehatan	48.532.382.954	82,75	8,53	57.080.777.430	84,28	8,17	79.578.687.798	92,03	10,15	28,05
3. Ur. Pekerjaan Umum	36.480.898.629	91,37	6,41	42.807.254.781	92,34	6,13	40.539.212.536	92,63	5,17	5,42
4. Ur. Perumahan	3.004.284.602	89,24	0,53	3.516.227.299	87,61	0,50	4.539.900.483	89,42	0,58	22,93
5. Ur. Perencanaan Pemb	3.413.939.115	84,59	0,60	3.309.979.692	84,62	0,47	4.318.061.204	90,97	0,55	12,46
6. Ur. Perhubungan	8.103.324.818	86,00	1,42	9.917.696.961	86,63	1,42	10.240.224.690	91,04	1,31	12,41
7. Ur. Lingkungan hidup	22.280.994.286	91,54	3,91	25.900.430.963	89,98	3,71	27.674.653.805	92,34	3,53	11,45
8. Ur. Kepdk & Capil	4.714.575.851	87,40	0,83	5.355.844.620	93,57	0,77	3.332.428.097	92,04	0,43	-15,93

Lanjutan tabel 3.10

Uraian	2007			2008			2009			Pertumbuhan (%/tahun)
	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Struktur (%)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Struktur (%)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Struktur (%)	
9. Ur. Pemberdayaan perempuan + perlindungan anak	0	0	0	0	0	0	1.741.505.596	89,42	0,22	0
10. Ur. KB + kesejahteraan Masy	0	0	0	0	0	0	2.346.803.779	96,59	0,30	0
11. Ur. Sosial	4.734.965.379	82,56	0,83	5.084.291.826	79,67	0,73	9.212.818.399	91,60	1,18	39,49
12. Ur. Tenaga Kerja	3.137.077.667	90,75	0,55	3.532.196.136	89,24	0,51	0	0	0	0
13. Ur. Kop. Ush kecil+men	4.949.437.265	85,06	0,87	5.242.587.931	87,39	0,75	12.762.386.703	89,66	1,63	60,58
14. Kebudayaan	3.044.346.744	88,76	0,53	5.673.053.121	88,08	0,81	0	0	0	0
15. Pemuda + olah raga	952.782.976	83,29	0,17	1.096.905.208	85,81	0,16	1.377.654.189	83,38	0,18	20,25
16. Kesbang Pol dlm negri	6.872.655.334	85,17	1,21	7.907.132.419	82,84	1,13	0	0	0	0
17. Ur. Otonomi daerah, Pemerintahan umum, adm keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	0	0	0	0	0	0	313.689.828.791	87,59	40,02	0
18. Pemerintahan umum	186.615.707.898	80,21	32,79	215.631.729.234	79,29	30,87	0	0	0	0
19. Kepegawaian	28.965.129.428	78,97	5,09	45.527.999.587	89,18	6,52	0	0	0	0
20. Komunikasi dan informasi	8.454.409.217	89,94	1,49	9.287.027.476	88,95	1,33	0	0	0	0
21. Ur Perpustakaan	0	0	0	0	0	0	2.707.957.717	90,38	0,35	0
II. UR PILIHAN	18.588.763.952	88,85	3,27	19.085.543.566	88,78	2,73	20.473.548.885		2,61	4,95
1. Ur. Pertanian	7.595.291.865	92,42	1,33	7.526.706.149	90,03	1,08	0	0	0	0
2. Ur. Pariwisata	0	0	0	0	0	0	5.668.569.392	89,53	0,72	0
2. Ur. Perdagangan	10.993.472.087	86,54	1,93	11.558.837.417	87,99	1,65	14.804.979.493	93,70	1,89	16,05
JUMLAH	569.120.372.562	83,29	100,00	698.566.664.121	85,67	100,00	783.851.692.760	91,04	100,00	17,36

Sumber: Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta

3.1.2 Neraca Keuangan

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas (perusahaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah) yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan Neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah, pihak legislatif daerah maupun para Kreditur/Pemberi Pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca Pemerintah Daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci.

3.1.2.1 Aset

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (i) aset lancar, (ii) investasi jangka panjang, (iii) aset tetap, (iv) dana cadangan, dan (v) aset lainnya. Pada tahun 2009, Kota Yogyakarta memiliki aset senilai Rp3.263.259.725.362,00. Pertumbuhan aset selama 2007-2009 tercatat 4,79% per tahun. Yang terbesar nilainya adalah aset tetap.

Aset Lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Aset lancar untuk Kota Yogyakarta pada tahun 2009 mencapai Rp121.583.627.653, menurun sebesar Rp39.642.533.049 dari tahun 2008. Rata-rata penurunan aset lancar ini sebesar 9,79%/tahun. Penurunan aset lancar ini dapat disebabkan oleh menurunnya Kas dan Setara Kas sebesar Rp36.285.226.706,83.

Investasi jangka panjang dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi atau manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Untuk Kota Yogyakarta, investasi jangka panjang bertumbuh dengan rata-rata 21,58%/tahun. Pada tahun 2007, investasi jangka panjang baru sebesar Rp58.920.061.953 namun tahun 2009 mencapai Rp87.474.598.117,00. Investasi jangka panjang ini didominasi oleh investasi permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Aset Tetap adalah adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun anggaran yang digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Pada tahun 2009, nilai aset tetap di Kota Yogyakarta mencapai Rp3.000.006.617.938,00. Yang tertinggi nilainya adalah aset tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan.

3.1.2.2 Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

Jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2009 adalah sebesar Rp 5.103.448.488,00. Kewajiban jangka pendek, yang diharapkan harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan, bertumbuh rata-rata 12,28%/tahun. Peningkatan utang jangka pendek ini didorong adanya peningkatan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK). Sementara itu, kewajiban jangka panjang, yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan, mengalami penurunan rata-rata 13,52%/tahun. Kewajiban jangka panjang yang arus diselesaikan berupa Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat.

3.1.2.3 Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana meliputi (i) Ekuitas Dana Lancar, (ii) Ekuitas Dana Investasi, dan (iii) Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk Dana cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam Dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Nilai ekuitas dana Kota Yogyakarta mencapai Rp3.258.156.276.873,00. Nilai ekuitas dana yang terbesar adalah berupa ekuitas dana investasi.

Data neraca daerah tersaji dalam tabel 3.11 berikut.

**Tabel 3.11 Neraca Keuangan Daerah
Kota Yogyakarta Tahun 2007-2009**

No	Uraian	2007	2008	2009	Pertumbuhan
I	ASET LANCAR				
	Kas dan Setara Kas	135.648.225.130	145.521.438.467	99.362.998.423	-14,41
	Piutang Pajak	1.115.976.469	1.471.590.558	1.937.897.779	31,78
	Putang Retribusi	917.186.871	2.119.961.631	970.354.939	2,86
	Bagian Lancar Tagihan Pemberian Pinjaman	0	211.450.000	335.483.000	
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	3.826.579.872	0	0	-100,00
	Bagian Lancar Tagihan Bagi Hasil Kemitraan	0	694.000.000	729.000.000	
	Bagian Lancar Tagihan Sewa	0	3.160.651.011	3.347.190.075	
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	18.906.410	60.809.854	51.357.623	64,82
	Piutang Lainnya	250.000.000	289.863.911	3.583.147.143	278,58
	Persediaan	7.615.986.876	7.696.395.270	11.266.198.671	21,63
	Jumlah Aset Lancar	149.392.861.628	161.226.160.701	121.583.627.653	-9,79
II	INVESTASI JANGKA PANJANG				
	Investasi Non Permanen				
	Investasi Non Permanen Lainnya	0	2.823.759.486	3.269.740.083	
	Jumlah Investasi Non Permanen	0	2.823.759.486	3.269.740.083	
	Investasi Permanen				
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	53.345.861.953	65.345.861.953	84.204.858.034	25,64
	Investasi Permanen Lainnya	5.574.200.000	0	0	-100,00
	Jumlah Investasi Permanen	58.920.061.953	65.345.861.953	84.204.858.034	19,55
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	58.920.061.953	68.169.621.439	87.474.598.117	21,85
III	ASET TETAP				
	Tanah	481.275.795.900	570.174.632.700	505.338.334.920	2,47
	Peralatan dan Mesin	228.910.820.851	159.374.213.855	186.602.499.386	-9,71
	Bangunan Gedung	248.853.970.153	897.159.572.300	658.870.016.794	62,71
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.690.616.407.299	1.595.779.389.660	1.617.397.341.500	-2,19
	Aset Tetap Lainnya	31.807.649.576	15.700.737.317	19.097.731.938	-22,51
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	32.199.142.019	4.342.848.800	12.700.693.400	-37,20
	Jumlah Aset Tetap	2.713.663.785.798	3.242.531.394.632	3.000.006.617.938	5,14
IV	DANA CADANGAN	0	0	5.000.000.000	
V	ASET LAINNYA				
	Tagihan Pemberian Pinjaman	0	761.200.000	520.217.000	
	Tagihan Penjualan Angsuran	12.663.743.033	0	0	-100,00
	Tagihan Bagi Hasil Kemitraan	0	10.728.000.000	10.069.821.000	

Lanjutan tabel 3.11

No	Uraian	2007	2008	2009	Pertumbuhan
	Tagihan Sewa	0	1.911.462.022	301.966.011	
	Tuntutan Ganti Rugi	91.066.585	83.958.793	70.646.702	-11,92
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	36.661.755.917	36.661.755.917	36.661.755.917	0,00
	Aset Lain -lain	495.000.000	675.687.110	655.778.473	15,10
	Aset Tak Berwujud	0	0	914.696.550	
	Jumlah Aset Lainnya	49.911.565.535	50.822.063.842	49.194.881.653	-0,72
	JUMLAH ASET	2.971.888.274.914	3.522.749.240.615	3.263.259.725.362	4,79
	KEWAJIBAN				
VI	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
	Utang kepada Pihak Ketiga	0	0	682.028.090	
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	880.109.107	1.881.904.404	1.121.389.818	12,88
	Utang Bunga	577.955.382	459.221.795	379.637.470	-18,95
	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat	860.238.188	761.652.155	761.652.155	-5,90
	Utang Jangka Pendek Lainnya	34.256.450	521.676.297	20.000.000	-23,59
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	2.352.559.127	3.624.454.651	2.964.707.533	12,26
VII	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	4.470.904.480	3.250.030.580	2.108.740.955	-31,32
	Utang Jangka Panjang Lainnya	0	0	30.000.000	
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	4.470.904.480	3.250.030.580	2.138.740.955	-30,84
	JUMLAH KEWAJIBAN	6.823.463.607	6.874.485.231	5.103.448.488	-13,52
	E K U I T A S D A N A				
VIII	EKUITAS DANA LANCAR				
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	134.768.116.023	143.597.315.074	98.196.733.350	-14,64
	Pendapatan yang Ditangguhkan	0	42.218.989	44.875.255	
	Cadangan Piutang	6.128.649.622	8.008.326.965	10.954.430.559	33,69
	Cadangan Persediaan	7.615.986.876	7.696.396.270	11.266.198.671	21,63
	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	-1.472.450.020	-1.742.550.247	-1.843.317.715	11,89
	Jumlah Ekuitas Dana Lancar	147.040.302.500	157.601.707.051	118.618.920.120	-10,18
IX	EKUITAS DANA INVESTASI				
	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	58.920.061.953	68.169.621.439	87.474.598.117	21,85
	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	2.713.663.785.798	3.242.531.394.632	3.000.006.617.938	5,14

lanjutan

No	Uraian	2007	2008	2009	Pertumbuhan
	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	49.911.565.535	50.822.063.842	49.194.881.653	-0,72
	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	-4.470.904.480	-3.250.030.580	-2.138.740.955	-30,84
	Jumlah Ekuitas Dana Investasi	2.818.024.508.806	3.358.273.049.333	3.134.537.356.754	5,47
X	EKUITAS DANA CADANGAN	0	0	5.000.000.000	
	JUMLAH EKUITAS DANA	2.965.064.811.306	3.515.874.756.383	3.258.156.276.873	4,83
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2.971.888.274.914	3.522.749.241.615	3.263.259.725.362	4,79

Sumber: www.jogjakota.go.id.

3.1.2.4 Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio likuiditas yang digunakan adalah rasio lancar (current ratio) dan Quick Ratio. Rasio lancar adalah aset lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek, sedang Quick Ratio adalah aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban jangka pendek.

Tabel 3.12
Rasio Likuiditas Tahun 2007-2009

No	Rasio Likuiditas	2007	2008	2009
1	Rasio Lancar	63,50	44,48	41,01
2	Quick Ratio	60,26	42,36	37,21

Sumber: Neraca Keuangan Daerah Kota Yogyakarta, diolah

Rasio Lancar digunakan untuk melihat kemampuan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Semakin besar rasio yang diperoleh, semakin lancar hutang pembayaran jangka pendeknya. Berdasarkan perhitungan, nilai rasio lancar Neraca Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2007 sebesar 63,5, tahun 2008 sebesar 44,48, dan tahun 2009 sebesar 41,01. Nilai yang diperoleh ini mengindikasikan bahwa Pemerintah dapat dengan mudah mencairkan aset lancarnya untuk membayar seluruh hutang atau kewajiban jangka pendeknya. Walaupun begitu, perlu diperhatikan nilai rasio lancar yang semakin menurun. Nilai rasio yang semakin kecil dapat menunjukkan semakin berkurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajibannya. Jika ditelusuri

penyebabnya, hal ini dapat disebabkan oleh semakin berkurangnya jumlah aset lancar akibat semakin berkurangnya kas, namun di sisi lain utang jangka pendek juga semakin meningkat.

Quick Ratio lebih akurat dibandingkan rasio lancar (current ratio) karena Quick ratio telah mempertimbangkan persediaan dalam perhitungannya. Sebaiknya ratio ini tidak kurang dari 1. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai quick ratio neraca keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2007 sebesar 60,26, tahun 2008 sebesar 42,36 dan tahun 2009 sebesar 37,21. Nilai dari perhitungan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan aset lancar Pemerintah Kota Yogyakarta setelah dikurangi persediaan, mempunyai kemampuan yang cukup kuat untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya.

3.1.2.5 Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio solvabilitas yang digunakan adalah rasio kewajiban terhadap aset dan rasio kewajiban terhadap ekuitas. Rasio kewajiban terhadap aset adalah kewajiban dibagi dengan aset, sedangkan rasio kewajiban terhadap ekuitas adalah kewajiban dibagi dengan ekuitas.

Tabel 3.13

Rasio Solvabilitas Tahun 2007-2009

No	Rasio Solvabilitas	2007	2008	2009
1	Rasio Kewajiban Terhadap Aset	0,002296	0,001951	0,001564
2	Rasio Kewajiban Terhadap Ekuitas	0,002301	0,001955	0,001566

Sumber: Neraca Keuangan Daerah Kota Yogyakarta, diolah

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rasio kewajiban terhadap aset tahun 2007 sebesar 0,002296, tahun 2008 sebesar 0,001951 dan tahun 2009 sebesar 0,001564. Semakin kecil nilai rasio ini, maka semakin baik rasio rasio kewajiban terhadap asset. Jika dilihat dari hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta selama tahun 2007-2009 cukup kuat untuk membayar jika Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan pinjaman ke kreditor dan kemampuan membayar tersebut cenderung meningkat.

Rasio kewajiban terhadap ekuitas secara langsung membandingkan kewajiban dibagi dengan ekuitas. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rasio tahun 2007 sebesar 0,002301, tahun 2008 sebesar 0,001955 dan tahun 2009 sebesar 0,001565. Semakin kecil nilai rasio ini, maka semakin baik rasio rasio kewajiban terhadap ekuitas karena menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk membayar kewajibannya.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta selama 2007-2010 menunjukkan proporsi pengeluaran yang digunakan untuk belanja aparatur bersifat fluktuatif, cenderung meningkat. Pada tahun 2007, proporsi belanja aparatur terhadap total pengeluaran hanya mencapai 58,37%, meningkat menjadi 61,29% tahun 2008, lalu menurun menjadi 58,84% dan meningkat lagi menjadi 66,58% pada tahun 2010. (tabel 14) Kondisi ini sepintas memperlihatkan bahwa APBD Kota Yogyakarta belum memberikan pelayanan yang optimal bagi publik karena sebagian besar APBD Kota Yogyakarta digunakan untuk belanja pegawai. Perlu dipahami bahwa belanja pegawai sebagian besar untuk belanja aparatur bidang pendidikan dan kesehatan.

Tabel 3.14
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Tahun 2007-2010

Tahun	Belanja Aparatur			Total Belanja	Proporsi Belanja aparatur
	belanja tidak langsung	belanja langsung	Jumlah		
2007	263.728.387.186,00	68.476.752.847,00	332.205.140.033,00	569.120.372.561,96	58,37
2008	342.891.947.474,00	85.279.523.295,60	428.171.470.769,60	698.566.664.120,78	61,29
2009	380.394.869.904,00	80.794.926.619,00	461.189.796.523,00	783.851.692.759,66	58,84
2010	467.904.710.054,00	91.242.263.994,00	559.146.974.048,00	839.866.480.661,43	66,58

Sumber: Neraca Keuangan Daerah Kota Yogyakarta, diolah

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Selama kurun waktu 2007-2010, APBD Kota Yogyakarta mengalami dua kali defisit anggaran dan dua kali surplus anggaran. Pada dua tahun awal pelaksanaan RPJMD 2007-2011, APBD Kota Yogyakarta mengalami surplus anggaran dan defisit anggaran terjadi pada dua tahun berikutnya. Pada tahun 2007 surplus

anggaran mencapai Rp44.157.655.696,83,- kemudian menurun menjadi Rp8.703.306.938,74,-. Pada tahun 2009, APBD Kota Yogyakarta justru mengalami defisit yang mencapai angka Rp 45.556.004.844,57,- dan pada tahun berikutnya (2010) masih terjadi defisit anggaran dengan nilai yang lebih rendah yaitu Rp25.132.208.164,80,-. Penurunan surplus anggaran dan terjadinya defisit anggaran disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah jauh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan. Peningkatan belanja daerah didominasi oleh peningkatan belanja aparatur. Kontribusi belanja aparatur terhadap peningkatan belanja daerah mencapai 83,82% selama 2007-2010. (Tabel 3.15) namun hal ini tidak mengindikasikan bahwa belanja daerah lebih banyak digunakan untuk kebutuhan rutin birokrasi dibandingkan untuk memberikan pelayanan publik, karena belanja aparatur sebagian atau lebih dari 60% berupa aparatur pendidikan dan kesehatan.

Tabel 3.15 Defisit dan surplus Riil APBD Kota Yogyakarta 2007-2010

		2007	2008	2009	2010
1	Pendapatan	615.648.852.480,31	720.252.933.347,72	749.989.016.366,95	815.495.924.651,51
	Dikurangi				
2	Belanja	569.120.372.561,96	698.566.664.120,78	783.851.692.759,66	839.866.480.661,43
3	Pengeluaran pembiayaan daerah	2.370.824.221,52	12.982.962.288,20	11.693.328.451,86	761.652.154,88
4	Suplus (defisit) riil	44.157.655.696,83	8.703.306.938,74	(45.556.004.844,57)	(25.132.208.164,80)

3.3 Kerangka Pendanaan

3.3.1 Analisis pengeluaran periodik prioritas utama

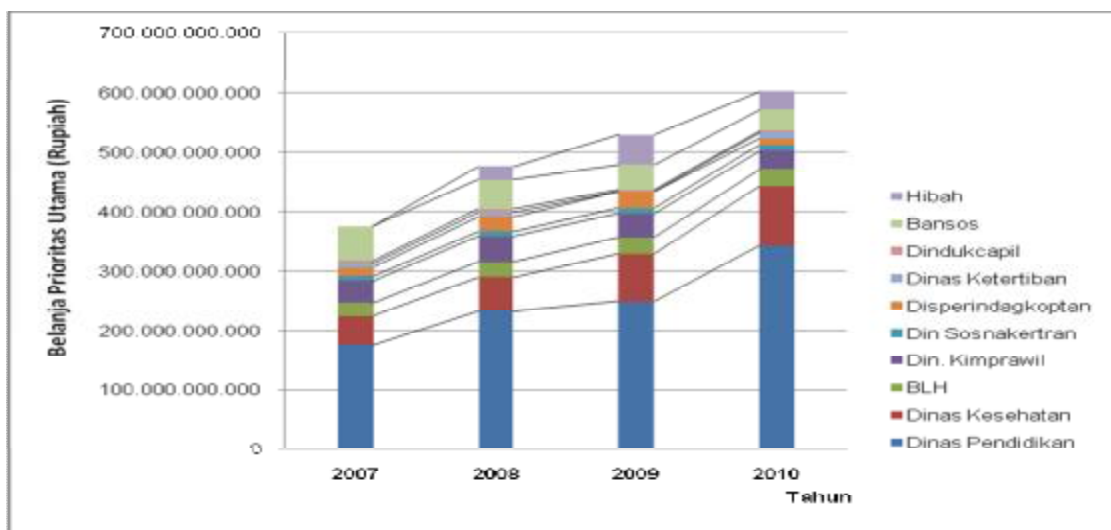
Analisis terhadap terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat ditujukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh pemerintah daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar. Di Kota Yogyakarta belanja pelayanan dasar adalah alokasi belanja untuk Dinas Kesehatan, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kimpraswil, Dinas Kimprawil, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian, Dinas Ketertiban, Dinas Penduduk dan cacatan sipil. Selain itu belanja prioritas juga dialokasikan untuk bantuan sosial dan hibah.

Pertumbuhan belanja periodik prioritas utama untuk pelayanan dasar Kota Yogyakarta mencapai 17,07% per tahun. Laju pertumbuhan ini telah meningkatkan belanja periodik prioritas utama meningkat dari Rp 375.308.672.394,- tahun 2007

menjadi Rp 602.218.391.382,-. Dalam kurun waktu yang sama, proporsi belanja periodik prioritas utama terhadap belanja daerah mengalami peningkatan dari 65,95% hingga 71,70%. Dengan memperhatikan proporsi aparatur terhadap belanja daerah (66,58% tahun 2010), nampaknya alokasi belanja daerah untuk belanja periodik prioritas lebih banyak digunakan untuk belanja aparatur. (Tabel 3.16 dan gambar 3.4)

Tabel 3.16 Belanja Prioritas Utama untuk belanja pelayanan dasar Kota Yogyakarta 2007-2010

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	Pertumbuhan 2007-2010	
						%/ tahun	Rupiah
1	Dinas pendidikan	176.274.696.447	232.599.186.594	249.316.020.088	343.191.064.972	24,87	166.916.368.525
2	Dinas Kesehatan	48.532.382.954	57.080.777.430	79.578.687.798	100.286.130.284	27,37	51.753.747.330
3	BLH	22.280.994.286	25.900.430.963	27.674.653.805	27.886.542.824	7,77	5.605.548.538
4	Din. Kimprawil	36.480.898.629	42.807.254.781	40.539.212.536	30.763.886.002	-5,52	-5.717.012.627
5	DinSosnakertran	7.872.043.046	8.616.487.962	9.212.818.399	10.130.217.453	8,77	2.258.174.407
6	Disperindagkoptan	14.538.201.217	24.328.131.497	27.567.366.196	10.855.146.007	-9,28	-3.683.055.210
7	Dinas Ketertiban	6.872.655.334	7.907.132.419	0	10.066.437.370	13,57	3.193.782.036
8	Dindukcapil	4.714.575.851	5.355.844.620	3.332.428.097	3.168.692.460	-12,41	-1.545.883.391
9	Bansos	57.742.224.630	49.587.684.559	42.312.581.054	35.339.698.475	-15,10	-22.402.526.155
10	Hibah	0	22.180.860.900	49.915.246.350	30.530.575.535	17,32	30.530.575.535
	Jumlah	375.308.672.394	476.363.791.725	529.449.014.323	602.218.391.382	17,07	226.909.718.988
	Belanja daerah	569.120.372.562	698.566.664.121	783.851.692.760	839.866.480.661	13,85	270.746.108.099
	Persentase Belanja Pelayanan dasar terhadap belanja daerah	65,95	68,19	67,54	71,70		



Gambar 3. 4 Perkembangan Belanja Prioritas utama Kota Yogyakarta 2007-2010

3.3.2 Proyeksi Data Masa Lalu

Kerangka pendanaan merupakan kapasitas kemampuan riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembungunan jangka menengah selama 5 tahun ke depan. Kapasitas kemampuan riil adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Sampai dengan tahun 2010, kapasitas riil kemampuan keuangan Kota Yogyakarta mencapai Rp310.712.614.464,60, lebih rendah dibandingkan pada awal pelaksanaan RPJMD 2007-2011. Hal ini berkaitan dengan pertumbuhan belanja prioritas dan pembiayaan pengeluaran (16,88% per tahun) jauh melebihi pertumbuhan realisasi pendapatan (9,82% per tahun) selama 2007-2010.

Untuk kurun waktu 5 tahun mendatang kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Yogyakarta diharapkan akan semakin meningkat. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa laju pertumbuhan pendapatan daerah diproyeksikan sedikit mengalami peningkatan dan terjadi peningkatan efektivitas penggunaan belanja daerah. Perkiraan kapasitas kemampuan daerah dapat disajikan secara indikatif, yaitu tidak kaku dan disesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya. Perkiraan kemampuan daerah yang dirinci menurut pendapatan, belanja dan pembiayaan Tahun Anggaran 2012 - 2016 selengkapnya secara indikatif tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.17
Perkiraan Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2012 - 2016

	2012	2013	2014	2015	2016
PENDAPATAN DAERAH	899.626.131.133	945.206.000.000	1.000.599.000.000	1.050.699.000.000	1.102.193.000.000
PENDAPATAN ASLI DAERAH	241.190.745.004	256.367.000.000	280.050.000.000	308.535.000.000	337.703.000.000
Pajak Daerah	142.003.279.000	144.350.000.000	156.883.000.000	173.513.000.000	190.142.000.000
Retribusi Daerah	32.075.528.048	33.293.000.000	35.905.000.000	38.809.000.000	40.911.000.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10.121.339.863	10.847.000.000	11.202.000.000	11.562.000.000	11.925.000.000
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	56.990.598.093	67.877.000.000	76.060.000.000	84.651.000.000	94.725.000.000
DANA PERIMBANGAN	575.131.711.129	594.877.000.000	623.638.000.000	642.157.000.000	661.232.000.000
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	32.179.747.129	32.824.000.000	33.481.000.000	34.151.000.000	34.835.000.000
Dana Alokasi Umum	536.466.614.000	555.243.000.000	583.006.000.000	600.497.000.000	618.512.000.000
Dana Alokasi Khusus	6.485.350.000	6.810.000.000	7.151.000.000	7.509.000.000	7.885.000.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	83.303.675.000	93.962.000.000	96.911.000.000	100.007.000.000	103.258.000.000
Hibah	-	-	-	-	-
Dana Darurat	-	-	-	-	-
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya	56.153.667.000	58.962.000.000	61.911.000.000	65.007.000.000	68.258.000.000
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	22.900.008.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah lainnya	4.250.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
BELANJA DAERAH	944.387.078.100	996.526.000.000	1.046.870.000.000	1.089.028.000.000	1.133.047.000.000
BELANJA TIDAK LANGSUNG	537.766.495.880	573.192.000.000	610.584.000.000	639.388.000.000	669.640.000.000
Belanja Pegawai	488.062.869.225	522.228.000.000	558.784.000.000	586.724.000.000	616.061.000.000
Belanja Bunga	118.865.521	76.000.000	33.000.000	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	11.872.589.790	12.111.000.000	12.354.000.000	12.602.000.000	12.855.000.000
Belanja Bantuan Sosial	31.153.411.500	31.777.000.000	32.413.000.000	33.062.000.000	33.724.000.000
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	-	-	-	-	-

	2012	2013	2014	2015	2016
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	-	-	-	-	-
Bantuan Keuangan kepada parpol	2.719.828.225	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
Belanja Tidak Terduga	3.838.931.619	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000
BELANJA LANGSUNG	406.620.582.220	423.334.000.000	436.286.000.000	449.640.000.000	463.407.000.000
Belanja Pegawai	-	-	-	-	-
Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
Belanja Modal	-	-	-	-	-
SURPLUS / (DEFISIT)	(44.760.946.967)	(51.320.000.000)	(46.271.000.000)	(38.329.000.000)	(30.854.000.000)
PEMBIAYAAN DAERAH					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	50.122.599.122	56.682.000.000	51.633.000.000	43.329.000.000	35.854.000.000
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	49.772.599.122	56.482.000.000	51.433.000.000	43.129.000.000	35.654.000.000
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	150.000.000	-	-	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.361.652.155	5.362.000.000	5.362.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
Pembayaran Pokok Utang	361.652.155	362.000.000	362.000.000	-	-
Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000	-	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO	44.760.946.967	51.320.000.000	46.271.000.000	38.329.000.000	30.854.000.000
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	-	-	-	-	-

BAB IV

ANALISIS ISU ISU STRATEGIS

4.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan yang dihadapi kota Yogyakarta secara garis besar meliputi :

1. Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah
2. Aparatur Pemerintah Daerah
3. Kesehatan
4. Infrastruktur dan Tata Ruang
5. Pelayanan Administrasi
6. Wajib Belajar 12 Tahun
7. Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM-K)
8. Kemiskinan
9. Kualitas Sumber Daya Manusia
10. Perekonomian Daerah
11. Daya Dukung Pengembangan Usaha

Permasalahan pembangunan merupakan bagian yang perlu diurai dengan dukungan penjelasan untuk dapat diselesaikan dan menjadi masukan dalam penyusunan sasaran pembangunan.

4.1.1 Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik akan mendorong terciptanya kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD. Dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik terdapat beberapa permasalahan diantaranya masih diperlukan peningkatan manajemen pemerintahan, perbaikan proses perencanaan khususnya menyangkut proses pelibatan masyarakat, peningkatan sistem

pengawasan dan akuntabilitas dalam mewujudkan pemerintahan berintegritas tinggi.

4.1.2 Aparatur Pemerintah Daerah

Dalam rangka meningkatkan standar dan kualitas pelayanan kepada masyarakat masih diperlukan peningkatan kualitas pengelolaan kebijakan dan regulasi, pelayanan publik, produktivitas aparatur, kesejahteraan pegawai, budaya kerja aparatur, dan partisipasi masyarakat sehingga hasil-hasil pembangunan secara nyata dirasakan seluruh masyarakat.

Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah telah banyak dilakukan, baik melalui pendidikan maupun pelatihan. Pelatihan tersebut diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah atau karena adanya kebijakan baru Pemerintah. Komponen-komponen penunjang pendidikan dan pelatihan (diklat) seperti kualitas pengajar, koordinasi dalam penyelenggaraan diklat, fasilitas diklat, dan sebagainya juga terus ditingkatkan. Namun, pengaturan ataupun pedoman dalam manajemen aparatur itu sendiri masih memerlukan penanganan yang lebih baik, termasuk perlunya dikembangkan standar kompetensi maupun pola mutasi untuk aparat pemerintah daerah. Pengaturan teknis ini diperlukan karena adanya tuntutan yang berbeda antara sebelum dan setelah diberlakukannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah.

Dari sisi ketersediaan pegawai, menurut perhitungan berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 dan Kepmenpan Nomor : KEP75/M.PAN/7/2004 (Analisis beban kerja), jumlah PNS Kota Yogyakarta adalah sebanyak 7.944 orang dan menurut analisis jabatan 2011 ada sebanyak 11.385 orang. Kondisi jumlah Pegawai yang ada sampai dengan tanggal 1 April 2012 ada sebanyak 8.333 orang, sehingga masih ada kekurangan 3.052 orang pegawai. Kondisi ini merata di seluruh SKPD termasuk yang melayani langsung masyarakat yaitu sector pendidikan dan kesehatan serta pelayanan masyarakat di kewilayahan.

4.1.3 Kesehatan

Permasalahan kesehatan di Kota Yogyakarta terkait dengan kesehatan ibu hamil, kesehatan balita, makanan pendamping ASI balita, kasus pneumonia balita (penderita penyakit paru-paru pada usia balita), rujukan yang diberikan

PUSKESMAS untuk masyarakat umum dan khusus bagi keluarga miskin serta Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan kesehatan lingkungan.

Kesadaran bagi masyarakat, khususnya dukungan dari keluarga pada ibu hamil sangat diperlukan demi tercapainya kesehatan ibu dan bayi. Pemeriksaan kehamilan begitu penting bagi ibu hamil karena dalam pemeriksaan tersebut akan dilakukan monitoring secara menyeluruh baik mengenai kondisi ibu maupun janin yang sedang dikandungnya. Dengan pemeriksaan kehamilan maka dapat diketahui perkembangan kehamilan, tingkat kesehatan kandungan, kondisi janin, dan bahkan penyakit atau kelainan pada kandungan yang diharapkan dapat dilakukan penanganan secara dini.

Temuan yang terjadi di Kota Yogyakarta adalah imunisasi drop out/tidak kembali dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan kegunaan dan manfaat dari imunisasi bagi balita. Selain itu pengetahuan ibu tentang imunisasi memang diperlukan agar meningkatkan kesadaran bagi orang tua terhadap anaknya tentang pencegahan penyakit dan kesehatan anak. Meskipun demikian keterlibatan pamong/pihak pemerintah dalam memotivasi ibu dalam upaya preventif cukup berpengaruh.

Kasus yang ditemukan di Kota Yogyakarta salah satunya adalah belum terpenuhinya makanan pendamping untuk balita untuk keluarga miskin. Masalah yang ditemui ini disebabkan oleh tidak lancarnya makanan pendamping ASI balita makanan pendamping ASI balita yang berasal dari pusat hanya diterima pemerintah Kota Yogyakarta. Pemenuhan makanan pendamping ASI balita bagi keluarga miskin terkendala/tergantung kiriman dari pusat.

Selama beberapa tahun ini penyakit ISPA selalu menempati urutan pertama dalam 10 Besar Penyakit di Puskesmas se Kota Yogyakarta. Hingga bulan Oktober 2010, berdasarkan laporan LB1 (Laporan Bulanan Data Kesakitan) jumlah penderita ISPA mencapai 48.351 orang (20,8 % dari seluruh penderita baru yang berkunjung ke puskesmas) dan jumlah penderita Pneumonia sebanyak 747 orang (0,3 %). Kegiatan Pengendalian Penyakit ISPA, pengamatan perlu dilakukan lebih intensif terutama penderita Pneumonia pada usia balita, karena penyakit ini secara nasional masih sering menimbulkan kematian. Jumlah penderita yang ditemukan cukup tinggi walaupun tidak setinggi perkiraan yang ditetapkan secara nasional. Menurut perkiraan (nasional) 10 % dari jumlah balita akan menderita pneumonia

setiap tahunnya. Bila angka itu diterapkan di Yogyakarta maka diperkirakan dalam tahun 2010 ini terdapat lebih dari 2500 penderita.

Data rujukan yang diberikan PUSKESMAS untuk keluarga miskin saat ini masih menjadi satu dengan data rujukan untuk masyarakat umum. Terjadinya missing data untuk kasus rujukan bagi keluarga miskin dikarenakan perbedaan pemahaman indikator capaian data rujukan. Bagi keluarga miskin, rujukan dari PUSKESMAS ke Rumah Sakit dibebaskan biaya. Akan tetapi kurangnya pengetahuan masyarakat terkadang justru menjadi kendala dalam pengurusan/proses rujukan.

Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah tindakan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok atau masyarakat yang sesuai dengan norma-norma kesehatan, menolong dirinya sendiri dan berperan aktif dalam pembangunan kesehatan untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Banyak penyakit dapat dihindari dengan PHBS, mulai dari Diare, DBD, flu burung, atau pun flu babi yang akhir-akhir ini marak. Salah satu faktor yang mendukung PHBS adalah kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pelaksanaan perawatan komunitas. Maka guna tercapainya keberhasilan intervensi perawatan komunitas perlu adanya pembahasan khusus mengenai PHBS kesehatan lingkungan.

PHBS dalam tatanan rumah tangga yang masih perlu diperhatikan pemerintah Kota Yogyakarta adalah indikator tidak merokok, Indikator Olahraga dan kepesertaan JPKM. Masih banyak masyarakat Kota Yogyakarta yang merokok sehingga diasumsikan semua anggota keluarga yang tinggal di rumah tersebut mempunyai kemungkinan terpapar asap rokok yang dapat menimbulkan berbagai penyakit akibat asap rokok baik aktif maupun pasif.

Sedangkan untuk kasus JPKM, masyarakat Kota Yogyakarta yang belum sadar akan pentingnya ikut menjadi anggota JPKM/Asuransi Kesehatan bagi dirinya sendiri maupun anggota keluarganya. Namun kemungkinan yang lain adalah karena adanya Jamkesos/Askeskin/KMS yang diberikan kepada masyarakat miskin sehingga mereka merasa sudah difasilitasi oleh Pemkot Yogyakarta dan tidak perlu menjadi anggota JPKM di wilayahnya. Sedangkan pada kasus olah raga, masyarakat Kota Yogyakarta masing cukup banyak yang belum sadar akan pentingnya melakukan olahraga setiap hari.

4.1.4 Infrastruktur dan tata ruang

Permasalahan infrastruktur dan tata ruang di Kota Yogyakarta terkait dengan laju perubahan penggunaan lahan, infrastruktur perkotaan, sistem transportasi, bangunan rumah layak huni, serta sistem pengelolaan prasarana lingkungan.

Daerah perkotaan diidentikkan dengan jumlah penduduk yang tinggi dan penggunaan lahan didominasi oleh lahan terbangun. Tingginya jumlah penduduk ini mengakibatkan kebutuhan penduduk akan ruang terutama ruang yang semakin tinggi terutama untuk lahan terbangun. Hal ini pada akhirnya akan menjadi pemicu terjadinya konversi lahan dari lahan non terbangun menjadi lahan terbangun.

Sistem drainase perkotaan terdiri dari saluran primer, sekunder dan tersier. Saluran utama dalam sistem drainase di Kota Yogyakarta adalah saluran air hujan, namun demikian masih terjadi tumpang tindih pemanfaatan saluran air hujan. Disamping digunakan sebagai saluran air hujan juga dipergunakan untuk pembuangan air limbah dan saluran irigasi. Terdapat juga saluran yang difungsikan untuk ketiganya yaitu kali Belik dan kali Widuri. SAH baol 2010 277,757.64 atau 87.80% dan sedang 31,983.26 atau 10.11% yang rusak 6,611.77 2.09%

Sampai saat ini masih terdapat lokasi-lokasi rawan genangan terutama pada saat curah hujan tinggi yang disebabkan faktor alam (morfologi lahan/cekungan lahan yang menyebabkan limpasan air drainase), tersumbatnya saluran drainase oleh sampah maupun endapan di saluran-saluran drainase yang ada.

Menurunnya jumlah titik genangan dari 84 pada tahun 2007 menjadi 60 pada tahun 2010 disebabkan oleh penambahan panjang dan perbaikan kondisi saluran air selama kurun waktu tersebut, dan juga karena penambahan jumlah sumur resapan, baik yang diupayakan secara swadaya oleh masyarakat maupun dengan bantuan pemerintah. Tahun 2008, panjang total saluran air, baik primer, sekunder maupun tersier, hanya sekitar 314.655,67 m. Tahun 2009, panjang saluran meningkat menjadi 316.071,00 m, dan meningkat kembali menjadi 316.352,67 tahun 2009. Perbaikan kondisi saluran air juga dilakukan selama kurun waktu tersebut, terbukti dengan meningkatnya panjang saluran air yang berada dalam kondisi baik dari tahun 2008 yang hanya sepanjang 269.594,07 m, menjadi 273.012,67 m tahun 2010. Perbaikan dan peningkatan kuantitas dan terutama

kualitas sistem drainase di Kota Yogyakarta harus terus diupayakan agar seluruh bagian sistem ini dapat berfungsi dengan baik.

Kondisi Sanitasi di Kota Yogyakarta memiliki permasalahan yang cukup kompleks, hal ini disebabkan kondisi geografis wilayah yang sempit dan terbelah oleh 3 sungai (Winongo, Code, dan Gajah Wong) dengan penduduk cukup banyak dan heterogen. Kondisi geografis Kota Yogyakarta memungkinkan terjadinya aliran pencemaran air tanah dari daerah utara menuju selatan, sehingga menanggung beban pencemaran yang mengalir dari atas, yakni wilayah Kabupaten Sleman.

Permasalahan Kota Yogyakarta yang tidak bisa diabaikan adalah berikaitan dengan kebersihan. Sampah yang tidak ditangani dengan baik, akan mendatangkan banyak permasalahan lingkungan, mulai dari mengganggu pemandangan, menimbulkan bau yang tidak sedap, bahkan menjadi sumber penyakit. Volume timbunan sampah di Kota Yogyakarta pada tahun 2010 mengalami peningkatan menjadi sebesar 344,7 m³, sebagian besar sudah dapat dikelola masyarakat sehingga sisa yang dibuang hanya 178,5 m³ atau sekitar 52% dari jumlah produksi sampah (lihat Tabel 2.12). Program penanganan sampah berupa pengelolaan sampah mandiri dengan 4R (Replace, Reuse, Reduce, Recycle) cukup berhasil dilihat dari volume sampah yang dibuang ke TPA Piyungan mengalami penurunan. Sampai dengan akhir tahun 2010 sudah ada 32 kelompok pengelola sampah mandiri di wilayah yaitu Jaringan Pengolah Sampah (Jaripolah).

Sistem transportasi merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan daerah perkotaan untuk memberikan aksesibilitas atau keterjangkauan. Aksesibilitas menjadi penting untuk mendukung kelancaran mobilitas penduduk, barang dan jasa serta mendorong peningkatan perekonomian masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan aksesibilitas adalah laju pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang tidak sebanding dengan ruas jalan, sehingga menimbulkan kepadatan dan kemacetan lalu lintas. Kondisi tersebut diperberat dengan masih rendahnya perilaku tertib pengguna jalan sehingga berpengaruh terhadap angka kejadian kecelakaan lalu lintas. Selama kurun waktu tahun 2007-2011 telah terjadi 2.914 kejadian kecelakaan lalu lintas dengan jumlah korban meninggal dunia 59 orang, luka berat 305 orang dan luka ringan 1.381 orang.

Sementara itu, dari segi prasarana jalan, hasil pelaksanaan program dan kegiatan urusan pekerjaan umum dalam tahun 2007-2011 dapat dilihat dari peningkatan panjang jalan dengan kondisi baik dari 99,15 kilometer pada tahun 2007 menjadi 112,36 kilometer pada tahun 2010. Kedepan kondisi jalan masih terus perlu segera diperbaiki untuk menunjang kota pariwisata.

Berdasarkan survei penjangkauan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan tahun 2009, diketahui bahwa fasilitas transportasi seperti jalan, halte, trotoar, tempat penyeberangan, lampu pengatur lalu lintas, lampu penerangan jalan, rambu/marka jalan, polisi tidur, kendaraan umum dan pribadi, jalur transportasi, serta sarana untuk penyandang cacat masih perlu untuk ditingkatkan.

4.1.5 Pelayanan Administrasi

Pelayanan administrasi khususnya berkaitan dengan penataan administrasi kependudukan dalam kegiatan pelayanan pembuatan KK/KTP, KIA, pembuatan kutipan akta dan buku register catatan sipil, dilaksanakan dengan kebijakan peningkatan pelayanan prima di bidang administrasi kependudukan dengan standarisasi penyelesaian dokumen berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan melalui pendataan penduduk dan pencatatan sipil yang didukung dengan sistem informasi administrasi kependudukan (SIK) yang terpadu secara nasional. Permasalahan dalam administrasi kependudukan adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan setiap peristiwa kependudukan, belum terdatanya secara riil jumlah penduduk yang ada di Kota Yogyakarta. Untuk mengatasi hal tersebut dilaksanakan dengan program tertib administrasi kependudukan dengan pembuatan e-KTP yang berbasis pada NIK nasional, pemberian NIK pada setiap penduduk, konektivitas NIK.

4.1.6 Wajib belajar 12 tahun

Pemerataan akses pendidikan untuk memenuhi program wajib belajar 12 tahun yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau diwujudkan melalui Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) , Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk sekolah negeri

dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) sebagai pendamping BOS pusat. Kebijakan tersebut merefleksikan komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta yakni tidak ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah karena alasan tidak tersedia biaya sekolah. Akan tetapi secara riil masih ditemui penduduk yang tidak dapat baca tulis yang dicirikan adanya angka melek huruf yaitu 99,95% dan terdapat angka putus sekolah dengan berbagai alasan terlihat dari rata-rata lama sekolah sebesar 11,5 tahun.

4.1.7 Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM-K)

Permasalahan dalam peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang dimotori oleh kelompok UMKM-K selama ini berupa permodalan, pemasaran dan manajemen. Berbagai upaya telah ditempuh dalam rangka menanggulangi masalah tersebut antara lain pemberian bantuan permodalan dan berbagai bentuk pelatihan, hasil dari usaha tersebut tampak pada peningkatan jumlah koperasi di Kota Yogyakarta yaitu dari 519 unit pada tahun 2007 menjadi 555 unit pada tahun 2011 dengan jumlah koperasi aktif meningkat dari 416 unit pada tahun 2007 menjadi 451 unit pada tahun 2011. Untuk jumlah UKM di Kota Yogyakarta sampai dengan tahun 2010 mencapai 22.091 unit dengan rata-rata omzet sebesar Rp646.829.370.000,00 (enam ratus empat puluh enam milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau 20,68 % dari omzet keseluruhan industri serta realisasi volume ekspor per mata dagangan di Kota Yogyakarta tahun 2010 dari 79 jenis mata dagangan dengan nilai US \$ 21.060.982,16.

Program pemberdayaan pelaku Koperasi dan UMKM yang diadakan belum mampu mencapai hasil optimal karena dalam pelaksanaannya terkendala ketersediaan dana. Berkaitan dengan permodalan sebenarnya sudah disediakan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah dan perusahaan-perusahaan melalui CSR, akan tetapi dirasa belum tepat sasaran, sehingga kedepan perlu adanya data yang komprehensif terkait jenis, bentuk dan jumlah pelaku yang membutuhkan pelatihan, serta adanya kajian dan *pilot project* terkait pengembangan UMKM berdasarkan kebutuhan dan kemampuan kelompok masyarakat di wilayah tertentu (*community based*) untuk meningkatkan efektifitas pemberdayaan UMKM masyarakat lokal.

Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Yogyakarta belum sepenuhnya dapat dilakukan dengan baik di beberapa kawasan. Di antaranya berkaitan dengan penertiban PKL masih menghadapi banyak tantangan seperti kepatuhan pelaku terhadap aturan yang telah dibuat pemerintah dan efektifitas pemberlakuan sanksi bagi yang melanggar. Selain itu juga berkaitan dengan kesadaran untuk menjaga kebersihan dan higienitas khususnya bagi PKL yang berjualan makanan.

Kualitas pangan yang beredar di masyarakat masih rendah. Di Kota Yogyakarta masih banyak ditemukan makanan tidak sehat dan berbahaya kimia berbahaya seperti zat pewarna sintetis, pengawet dan perasa yang tinggi yang beredar di masyarakat. Makanan tersebut justru banyak dikonsumsi oleh anak sekolah yang dapat mengancam kesehatan dan kecerdasan generasi mendatang. Untuk itu dibutuhkan kebijakan yang lebih efektif untuk mengurangi atau menekan peredaran makanan mengandung zat berbahaya agar tidak semakin merugikan masyarakat. Pengawasan kualitas pangan dan monitoring terhadap kualitas dan kesehatan pangan perlu ditingkatkan serta perbaikan tata niaga pangan yang masih tidak efisien sehingga membuat volatilitas harga pangan tinggi.

4.1.8 Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan kota adalah permasalahan yang terdapat di sebagian besar kota besar, demikian pula Kota Yogyakarta juga tidak terlepas dari permasalahan ini. Permasalahan kemiskinan di Kota Yogyakarta antara lain kemiskinan kota, mental keagamaan, pendataan warga miskin, penyandang cacat, pengangguran, kader pengentasan kemiskinan serta program-program kemiskinan.

Kemiskinan kota kebanyakan terpusat pada wilayah g yang dibangun pada lahan marjinal atau memanfaatkan tanah kosong secara illegal. Saat ini banyak warga miskin yang bertempat tinggal pada lahan-lahan kosong secara illegal, hal ini karena mereka tidak memiliki alternatif lain sebagai tempat tinggal. Tempat tinggal warga miskin biasanya kurang tertata baik dan kurang memiliki prasarana dasar permukiman sehingga menimbulkan adanya kawasan kurang layak huni yang tersentra di daerah bantaran sungai. Sampai dengan akhir tahun 2011 rumah tidak layak huni ada sebanyak 1.979 rumah, program perbaikan rumah tiap tahunnya rata rata sekitar 200 rumah.

Mental keagamaan masyarakat masih rendah dalam mengurangi permasalahan kemiskinan. Kesadaran masyarakat miskin untuk keluar dari kriteria miskin masih rendah, mereka sudah terbiasa mendapatkan bantuan dari pemerintah sehingga enggan jika bantuan tersebut dihentikan. Kebiasaan ini harus dirubah dan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan memasukkan aspek keagamaan, sehingga mereka dapat belajar untuk menjadi mandiri dengan mengandalkan kemampuan yang mereka miliki.

Pendataan warga miskin sangat membantu dalam penanggulangan kemiskinan agar tepat sasaran. Selama ini pendataan warga miskin sudah dilakukan, namun untuk mendapatkan data yang valid tidak mudah, hal ini karena warga miskin tersebut sering berpindah tempat, misalnya gelandangan dan anak jalanan yang terus pindah mencari tempat tinggal baru dari satu tempat ke tempat lain. Pelaksanaan pendataan kemiskinan perlu partisipasi masyarakat khususnya kader pengentsan kemiskinan dalam melakukan validasi data.

Penanganan program penentasan kemiskinan perlu keterlibatan semua SKPD dengan pembagian tugas yang jelas antar SKPD sehingga tidak ada program yang tumpang tindih, disamping itu batasan kemiskinan perlu dibuat agar pendataan keluarga dan penduduk miskin tidak berbeda-beda antar SKPD. Kedepan perlu penanganan secara komprehensif dalam mengatasi kemiskinan perkotaan baik secara non fisik maupun fisik antara lain penataan kawasan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat, demikian pula bentuk program dan pelatihan serta bantuan alat yang diberikan kepada keluarga miskin harus disesuaikan dengan kebutuhan serta perlu monitoring dalam penggunaan dan pelaksanaannya.

Pendampingan bagi penyandang cacat maupun sakit jiwa baik dari keluarga maupun dari pemerintah masih belum maksimal. Kaum marginal ini belum mendapatkan perhatian yang lebih baik. Perhatian kepada mereka dapat ditunjukkan dengan tersedianya fasilitas/sarana dan prasarana yang dapat membantu penyandang cacat untuk bergerak/berekspresi.

Persentase rumah layak huni dibandingkan dengan seluruh rumah selama empat tahun terakhir mengalami peningkatan, walaupun demikian, di Kota Yogyakarta masih saja terdapat rumah yang tidak layak huni. Pada tahun 2010,

persentase rumah tidak layak huni dibandingkan dengan seluruh rumah adalah sebesar 4,36 %.

4.1.9 Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas pendidikan baik SD, SMP maupun SMA di Kota Yogyakarta belum merata, hal ini menyebabkan tingginya permintaan untuk masuk ke sekolah yang memiliki kualitas bagus semakin tinggi, sedangkan disisi lain masih banyak sekolah yang mengalami kekurangan siswa dikarenakan kurangnya minat siswa untuk masuk ke sekolah tersebut. Pemerataan kualitas sekolah diperlukan untuk menyamakan kualitas masing-masing sekolah sehingga tidak menyebabkan kurang meratanya distribusi siswa ke masing-masing sekolah.

Pendidikan moralitas, budi pekerti dan pendidikan karakter sangat diperlukan dalam dunia pendidikan sekarang ini, hal ini terkait dengan mulai lunturnya pengetahuan siswa terkait dengan kebudayaan lokal serta moral dan perilaku siswa yang sekarang mengalami penurunan. Pendidikan seperti ini sangat diperlukan untuk membangun karakter siswa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan serta moralitas siswa, sehingga perlu memasukkan pendidikan budaya dalam muatan lokal pelajaran sekolah. Selain itu juga perlu penguatan pendidikan berbasis budaya kota Yogyakarta dengan melibatkan masyarakat dan pelaku usaha, dalam rangka meringankan biaya pendidikan.

Tenaga administrasi dan sarana perpustakaan khususnya TK dan SD belum optimal, salah satu solusinya adalah meningkatkan sarana perpustakaan dan tenaga pustakawan pada setiap tingkat pendidikan formal dan non formal antara lain penyelenggaraan sanggar belajar di setiap kampung/RW, peningkatan budaya baca dan budaya belajar, program perpustakaan di setiap RW/RT.

Pendidikan ketrampilan bagi masyarakat Kota Yogyakarta belum optimal. Untuk mendorong ketrampilan masyarakat diperlukan peningkatan pelatihan keterampilan khususnya bagi warga miskin dan pemberian motivasi supaya percaya diri, hal ini dimaksudkan agar mereka dapat mengembangkan diri dan dapat berusaha untuk memnuhi kebutuhan sehari-hari.

Terkait dengan minat baca dan tulis dalam meningkatkan pengetahuan di lingkungan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Salah satu contoh untuk meningkatkan minat baca dan tulis masyarakat adalah dengan program koran

masuk wilayah. Program yang sudah berlangsung ini harus terus dilangsungkan agar dapat menarik minat baca dan tulis masyarakat Kota Yogyakarta.

Permasalahan pengangguran terbuka terkait dengan Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka di kota Yogyakarta pada tahun 2010 yang mencapai 5,28% (20.136 orang) dari total angkatan kerja, angka ini masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan target pengangguran terbuka di RPJP Kota Yogyakarta yang tidak lebih dari 4%. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2010 di Kota Yogyakarta sebesar 20.136 orang angkatan kerja atau sekitar 5,28 persen dari seluruh penduduk usia angkatan kerja. Angkatan kerja baru, yaitu penduduk yang lulus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan memunculkan penganggur baru. Terbatasnya kesempatan kerja, kurangnya keterampilan serta rendahnya jiwa kewirausahaan merupakan beberapa penyebab munculnya pengangguran di Kota Yogyakarta.

Pencari kerja di wilayah kota sebagian besar merupakan lulusan universitas atau sekolah tinggi. Minimnya lapangan pekerjaan formal yang membutuhkan tenaga kerja dengan kualifikasi S1 menyebabkan banyak tenaga kerja tidak terserap di Kota. Mereka kemudian justru diberdayakan di wilayah lain di luar Kota Yogyakarta yang memiliki banyak lapangan kerja formal. Selain masalah ketersediaan lapangan kerja, insentif bagi para lulusan S1 masih rendah sehingga tidak dapat mencegah perpindahan tenaga kerja berpendidikan tinggi ke luar Kota. Jika hal ini dibiarkan maka Kota Yogyakarta akan kehilangan aset SDM yang berkualitas untuk membangun Kota.

Penyelenggaraan pelatihan selama ini masih bersifat temporer dan belum ada sistem yang baku sehingga belum fokus dan belum tepat sasaran, sehingga sulit untuk melakukan evaluasi maupun tidak lanjut dari kegiatan tersebut. Selain itu pihak yang disasar maupun materi yang akan diberikan pada pelatihan belum terfokus.

Minimnya lapangan pekerjaan formal yang mampu menyerap keahlian para pencari kerja menyebabkan banyak tenaga kerja tidak terserap di Kota Yogyakarta. Menciptakan lapangan kerja formal membutuhkan investasi yang cukup besar serta dibutuhkan cara yang tepat untuk menarik investor besar agar dapat berinvestasi di Kota Yogyakarta serta mengembangkan kegiatan yang sesuai dengan corak dan warna perekonomian di Kota Yogyakarta. Kegiatan ekonomi yang

berbasis pada pemikiran (*brain intensive*) dianggap cocok untuk dijalankan meskipun masih menemui kendala untuk menemukan bentuk yang tepat. Demikian juga dengan pengembangan industri kreatif juga dapat dianggap sebagai pilihan yang sesuai untuk dikembangkan di Kota Yogyakarta dan diharapkan mampu untuk menyerap tenaga kerja profesional di bidangnya.

4.1.10 Perekonomian Daerah

Sektor pariwisata dapat membuka peluang kerja, meningkatkan pendapatan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses perumusan kebijakan, aspirasi warga memegang peranan yang cukup penting sebagai salah satu dasar perumusan masalah dan isu-isu strategis yang terkait dengan pariwisata. Salah satu data yang dapat digunakan sebagai parameter/tolok ukur keberhasilan sektor pariwisata dalam pembangunan adalah data wisatawan dan pelaku usaha wisata. Data wisatawan dan pelaku usaha wisata yang akurat, sangat tergantung dari ketepatan metode yang dilaksanakan termasuk data jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan di suatu daerah. Sebagai salah satu daerah tujuan wisata terkemuka di Indonesia, pariwisata di Kota Yogyakarta merupakan potensi unggulan daerah. Sampai dengan tahun 2010 jumlah wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta mencapai 2.460.967 orang meningkat 1.200.309 orang atau 95,21 % dibanding tahun 2007 yang mencapai 1.260.658 orang.

Pada sektor pariwisata terdapat beberapa masalah utama yang perlu segera ditindaklanjuti dan ditangani secara langsung maupun bertahap. Predikat Kota Yogyakarta sebagai daerah wisata perlu memperhatikan kenyamanan wisatawan terutama dalam hal kebersihan di kawasan yang menjadi daya tarik wisatawan. Beberapa hal yang menjadi sorotan dalam permasalahan kebersihan wisata adalah kebersihan toilet, perilaku membuang sampah, coretan di area sekitar tempat wisata, kebersihan sarana transportasi, kebersihan sarana akomodasi dan lain-lain. Adanya biaya kebersihan di sarana umum seperti di toilet semakin memperpuruk citra kebersihan Kota Yogyakarta, hal ini bukan dilihat dari nilai uang yang menjadi permasalahan, tapi karakter sumber daya manusia (SDM) yang masih kurang memperhatikan profesionalisme.

Kebersihan kawasan wisata menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah, masyarakat baik pengunjung maupun pedagang yang berjualan di objek

wisata perlu selalu menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Sekecil apapun sampah, hendaklah dibuang pada tempatnya agar memudahkan para petugas kebersihan yang bekerja. Upaya pemerintah dalam penyediaan tong-tong sampah dan plang-plang himbauan agar masyarakat, wisatawan, pelaku usaha wisata untuk menjaga kebersihan dan keindahan perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi.

Salah satu keperluan yang penting bagi para wisatawan adalah kebutuhan akan sarana penginapan/hotel yang nyaman dan memadai, terkait dengan rasa nyaman wisatawan saat melepas lelah dan mempersiapkan kembali untuk beraktifitas di hari berikutnya. Jaringan dan sarana transportasi perlu menjadi perhatian dalam memberikan kemudahan bagi wisatawan menuju obyek dan daya tarik wisata.

- § Perlu diperhatikan sarana prasarana dan kesehatan lingkungan, peningkatan kualitas SDM, kenyamanan dan keamanan
- § Dukungan *public transportation*, kemudahan menjangkau obyek wisata.
- § Sarana tempat parkir yang memadai, tertib dan nyaman.

Keberadaan Kota Yogyakarta sebagai Kota Budaya memang membutuhkan dukungan dari semua pihak baik dari masyarakat maupun pemerintah. Kekhasan budaya yang ada akan menjadi sebuah ikon Kota Yogyakarta yang akan membedakannya dengan kota-kota lainnya. Kebudayaan Yogyakarta yang berpangkal pada kebudayaan yang dikembangkan oleh Kraton Yogyakarta pada dasarnya merupakan budaya adiluhung yang sampai saat ini masih terlestarikan dengan baik. Kesadaran masyarakat dalam menghidupkan nilai-nilai budaya Yogyakarta belum optimal karena masih berorientasi pada event/pementasan, belum menjadi aktifitas kegiatan pembinaan yang rutin dilaksanakan. Tidak hanya masyarakat yang memerlukan sadar wisata dan sadar budaya, akan tetapi peran pelaku usaha pariwisata dalam menggiatkan sadar wisata dan sadar budaya dapat menambah kekuatan bagi daya tarik wisata berbasis budaya di Kota Yogyakarta.

Sebagai kota pariwisata kesadaran adanya sapta pesona yang terdiri dari keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahan dan kenangan belum sepenuhnya dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh masyarakat. Tujuh konsep tersebut bertujuan untuk menciptakan keadaan pariwisata yang baik dan pendapatan asli daerah Kemudahan akses, transportasi, akomodasi yang

memadai, kegiatan yang menarik untuk dilakukan, dan fasilitas penunjang lainnya dapat berpengaruh pada citra Yogyakarta sebagai kota pariwisata.

Kebudayaan Jawa yang menjadi ruh nilai-nilai budaya di Kota Yogyakarta saat ini sudah cukup memperoleh apresiasi yang baik dari masyarakat, hal ini terlihat dari tingkat partisipasi masyarakat Yogyakarta utamanya generasi muda dalam melestarikan dan mengembangkan budaya Jawa. Meskipun dari sisi kuantitas masih perlu ditingkatkan karena sangat dipengaruhi oleh dampak masuknya arus budaya global, namun bukan berarti tidak ada regenerasi dalam transformasi seni dan tradisi Jawa.

Potensi kesenian dan juga adat istiadat serta sistem nilai yang ada di masyarakat merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Oleh karena itu pelestarian mutlak harus dilakukan untuk menjamin kesinambungan, namun bukan berarti seni dan tradisi menjadi sesuatu yang tidak dapat dijadikan sebuah potensi khusus bagi Kota Yogyakarta. Kekayaan inilah yang menjadikan Kota Yogyakarta kaya akan potensi budaya sehingga ditetapkan Pariwisata berbasis Budaya yang akan dikembangkan di Kota ini.

Diversifikasi atraksi pariwisata perlu ditingkatkan untuk menarik lebih banyak wisatawan berkunjung ke Kota Yogyakarta sehingga atraksi wisata yang ditawarkan tidak monoton dan menjadi kejenuhan bagi wisatawan. Atraksi wisata yang ditawarkan harus memiliki karakter yang mantap dan unik sehingga memberikan kesan tersendiri bagi wisatawan dan dapat menimbulkan efek untuk mengunjungi atraksi wisata tersebut.

Permasalahan muncul ketika pembangunan sektor pariwisata sedikit demi sedikit mengancam eksistensi dan kelestarian budaya lokal. Secara perlahan-lahan tetapi pasti masyarakat akan mengadopsi budaya yang lebih modern yang berasal dari luar budayanya sendiri. Pengembangan pariwisata Yogyakarta perlu diarahkan pada pengembangan pariwisata yang berorientasi pada pelestarian budaya. Untuk menciptakan pengembangan pariwisata yang berorientasi pada kelestarian budaya, ada sejumlah hal yang dapat ditempuh, antara lain menghidupkan kembali festival-festival kebudayaan lokal, perlu adanya pemetaan tata ruang pariwisata, memberikan muatan lokal kebudayaan dalam kurikulum pendidikan di Yogyakarta dan revitalisasi keraton sebagai pusat kebudayaan serta pembentukan tim pemantau pengembangan pariwisata.

Jika berhasil diciptakan pengembangan pariwisata yang memperhatikan kelestarian budaya, dapat diyakini bahwa dari waktu ke waktu Yogyakarta akan tetap mampu mempertahankan eksistensinya sebagai kota pariwisata.

§ Terkait dengan kampung wisata, sebutan Prawirotaman dan Sosrowijayan sebagai 'kampung Internasional' membuktikan kedekatan atmosfer Kota Yogyakarta dengan 'selera eksotisme' wisatawan mancanegara.

§ Sebagian besar kecamatan (38 obyek wisata) di Kota Yogyakarta memiliki obyek wisata museum, oleh karena itu upaya pengembangan dan promosi untuk menggugah daya tarik wisatawan perlu ditingkatkan.

Lama tinggal wisatawan mancanegara di Kota Yogyakarta relatif masih rendah. Rata-rata lama tinggal wisatawan sampai dengan tahun 2010 adalah 2,47 hari. Atraksi budaya dan kesenian-kesenian budaya Jawa sangat potensial dikembangkan di Kota Yogyakarta hal ini berpotensi untuk dapat meningkatkan lama tinggal.

Dalam pengembangan paket wisata/*tour* pariwisata diharapkan dapat lebih melibatkan pasar. Hal penting dalam mengembangkan paket wisata nusantara perlu memenuhi tiga hal, yaitu sesuai dengan preferensi target pasar, penyebaran ke destinasi pariwisata yang lebih luas, serta mampu bersaing dengan paket-paket wisata luar negeri. Sasaran pasar potensial paket wisata nusantara adalah ; (1) segmen keluarga, (2) segmen rombongan pelajar/mahasiswa, (3) segmen perusahaan swasta/instansi, (4) segmen dewasa (27-46 tahun), dan (5) segmen kelompok ekonomi menengah keatas.

Hasil industri Kecil maupun Menengah di Kota Yogyakarta selama ini merupakan produk unggulan bagi wilayah ini. Selama Tahun 2007 sampai dengan semester I tahun 2011 berdasarkan data Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta, usaha yang bergerak di berbagai sektor perekonomian mengalami kenaikan yang cukup signifikan dengan perincian, industri berjumlah 4.569 unit usaha, perdagangan dan jasa 16.853 unit usaha dan koperasi berjumlah 550 kelompok serta pertanian berjumlah 147 kelompok. Lima jenis komoditas produk unggulan daerah yang dihasilkan industri kecil dan menengah meliputi mebel kayu, kulit lembaran disamak, sarung tangan golf, kerajinan perak dan kerajinan kayu. Sedangkan perusahaan industri besar dan sedang di Kota Yogyakarta sampai dengan semester I tahun 2011 sebanyak 33

perusahaan. Dari data tersebut maka industri kreatif dapat masuk pada kelompok industri dan perdagangan khususnya jasa.

Industri kreatif merupakan jenis industri yang berfokus pada penciptaan barang dan jasa dengan mengandalkan keahlian, bakat dan kreatifitas sebagai kekayaan intelektual. Menurut tipenya industri kreatif dibedakan menjadi tiga tipe yaitu *generative creativity* yang merupakan bentuk asli dari kreatifitas yang diasosiasikan kepada ciptaan yang baru, unik atau berbeda dengan ciptaan sebelumnya. Kedua, *adoptive creativity* merupakan penemuan kreatif atas cara-cara baru hasil pengadopsian ide baru yang tercipta sebelumnya, untuk pengembangan proses yang baru dan untuk mendorong proses pengembangan itu sendiri. Ketiga, *retentive creativity* adalah penerapan ide baru pada gaya hidup konsumen dan penerapan ide baru pada operasi rutin suatu perusahaan. Atau dapat dikatakan jenis kreatifitas ini merupakan upaya untuk menerapkan secara berulang suatu temuan pada produk.

Di tingkat nasional pengembangan industri kreatif menemui beberapa masalah, antara lain: (a) kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pelaku industri kreatif yang masih kurang memadai. (b) menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan industri kreatif. (c) penghargaan/apresiasi terhadap insan kreatif dan karya kreatif yang dihasilkan masih rendah. (d) pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi yang masih perlu ditingkatkan guna mendukung industri kreatif. (e) kebutuhan akan lembaga pembiayaan yang mendukung pelaku industri kreatif yang belum terpenuhi secara optimal.

Jika dibandingkan dengan kondisi industri kreatif di Kota Yogyakarta maka ada beberapa masalah sama yang dihadapi yaitu pada poin a dan e. Beberapa alasan yang mendasarinya adalah belum dipahaminya industri kreatif oleh *stakeholder*, belum adanya studi yang intensif yang diarahkan untuk memahami pola pengelolaan pengembangan industri kreatif serta dampaknya terhadap perekonomian Kota Yogyakarta, dan terbatasnya sumber pendanaan bagi pengembangan industri kreatif.

Untuk itu dibutuhkan perhatian pemerintah untuk meningkatkan kegiatan industri kreatif. Agar pengembangan industri kreatif berjalan optimal maka pemerintah perlu menentukan tipe industri kreatif apa yang memungkinkan untuk

dikembangkan terkait karakteristiknya. Sehingga diharapkan pengembangan dapat memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan tepat.

Pelatihan untuk industri kreatif masih terkendala dana. Pengembangan industri kreatif yang dilakukan oleh pemerintah selama ini belum optimal karena terkendala dana. Pemerintah juga belum mampu mengandalkan kerjasama dengan pihak lain untuk mengembangkan industri kreatif. Pembinaan terhadap jenis industri kreatif masih sangat sedikit. Pada tahun 2011, pembinaan terhadap industri kreatif hanya meliputi dua jenis usaha yaitu animasi dan distro, dan pada 2012 direncanakan ada penambahan yaitu jenis usaha toko *online*. Minimnya jumlah usaha industri kreatif yang dibina karena terkendala ketersediaan dana.

Daya saing produk lokal Kota Yogyakarta belum optimal di pasar internasional, Kota Yogyakarta bukan merupakan daerah pengeksport langsung, tetapi merupakan penyuplai daerah eksportir lainnya seperti Bali (untuk kerajinan peraknya), sehingga memberatkan bagi perkembangan ekspor jogja.

Penataan pasar/ritel modern perlu dilakukan untuk menciptakan persaingan sehat antar pemain maupun dengan pasar tradisional masih kurang optimal. Terkait dengan penataan pasar modern, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 89 Tahun 2009 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket di Kota Yogyakarta, tetapi terkait hubungan antara pasar modern dan pasar tradisional dalam hal kerjasama belum diatur. Selama ini pemerintah tidak dapat mengevaluasi apakah pasar tradisional yang telah memiliki perjanjian dengan pemerintah untuk mengakomodasi produk lokal dari pengusaha lokal telah ditepati atau tidak. Kegiatan evaluasi tersebut tidak dapat dilakukan karena tidak ada dasar hukum yang melatarbelakanginya.

Kegiatan promosi perdagangan yang ada selama ini belum memiliki target pasar yang jelas sehingga evaluasi juga sulit untuk dilakukan. Pemerintah lemah dalam kebijakan pengendalian pasar modern. Selain itu belum ada payung hukum untuk mengatur persaingan pasar modern dan tradisional atau persaingan antar mereka sendiri. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antar lembaga untuk mempromosikan wisata perdagangan.

Mengingat keterbatasan lahan pertanian di Kota Yogyakarta, maka kebijakan pembangunan pertanian dilaksanakan dengan mengembangkan pola pertanian komersial perkotaan yang mempunyai nilai tambah (*added value*) tinggi.

Untuk melaksanakan hal tersebut, pada tahun 2007 dilaksanakan launching Bursa Agro Jogja (BAJ) sebagai sarana promosi, informasi dan pemasaran komoditas pertanian dan ikan hias yang bernuansa hobbies, rekreatif dan edukatif. Sejak tahun 2009 pengelolaan BAJ disinergikan dengan relokasi pedagang satwa Pasar Ngasem menjadi Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY), tetapi untuk pemasaran tanaman hias yang masih terbatas.

4.1.11 Daya Dukung Pengembangan Usaha

Daya dukung pengembangan usaha sangat penting dalam mengembangkan kota dengan lokomotif pendidikan dan pariwisata. Permasalahan dalam sistem administrasi dan manajemen investasi adalah belum adanya pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan monitoring terkait kegiatan investasi. Dalam rangka mempermudah kegiatan investasi Pemerintah Kota Yogyakarta telah menyediakan fasilitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bagi kegiatan penanaman modal tetapi belum ada pihak yang berwenang melakukan monitoring dan evaluasi terhadap jalannya investasi yang sudah masuk dan disetujui, hal ini juga terkait dengan belum adanya pihak/badan yang khusus menangani kegiatan investasi.

Kebijakan investasi selama ini belum mampu menyaring atau mencegah masuknya investasi yang dapat mengancam usaha masyarakat lokal. Belum ada peraturan ataupun regulasi yang mungkin dapat diterapkan, sehingga penanaman modal yang masuk ke Kota Yogyakarta adalah yang sesuai dengan kebutuhan bagi perkembangan perekonomian Kota Yogyakarta. Kedepan perlu adanya kebijakan investasi yang berpihak kepada usaha warga lokal.

Peta Investasi dibutuhkan dalam pemetaan tentang kebutuhan investasi untuk berbagai sektor (sektor apa saja yang membutuhkan investasi besar dan sektor mana yang sudah jenuh), sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan memicu kegiatan ekonomi masyarakat.

Kawasan perkotaan akan semakin menghadapi kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun. Dengan perubahan iklim yang semakin cepat, kota-kota di Indonesia akan menjadi lebih rentan. Menurut penelitian UNDP tahun 2007, risiko dari perubahan iklim tersebut akan berakibat pada terjadinya krisis air baku, sanitasi, energi, pangan, bahkan peningkatan risiko banjir. Selain itu, antisipasi

terhadap bencana juga tidak kalah pentingnya, mengingat kondisi geografis kota di Indonesia sangat rentan terhadap bencana alam. Selain menghadapi bencana alam, kawasan perkotaan juga harus menghadapi pencemaran lingkungan baik pencemaran udara, air maupun tanah

Pencemaran sumur oleh *e-coli* terjadi akibat sistem pembuangan air limbah yang tidak memenuhi syarat kesehatan. Padatnya permukiman penduduk menyebabkan jarak antara sumur dengan *septic tank* sering kurang dari 11 meter. Padahal menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-2916-1992 tentang Spesifikasi Sumur Gali untuk Sumber Air Bersih, bahwa jarak horizontal sumur ke arah hulu dari aliran air tanah atau sumber pengotoran (bidang resapan/tangki *septic tank*) harus lebih dari 11 meter. Standar minimum jarak antara sumur dengan *septic tank* ditetapkan >10 m, dengan alasan jarak tersebut merupakan jarak aman yang tidak mungkin dapat ditempuh oleh bakteri *E. coli*, jika bakteri tersebut bermigrasi dari *septic tank* ke sumur. Bakteri *E. coli* merupakan bakteri patogen (bersifat anaerob) yang biasanya mempunyai usia harapan hidup selama tiga hari. Sedangkan kecepatan aliran air dalam tanah berkisar 3 meter per hari (rata-rata kecepatan aliran air dalam tanah di pulau Jawa 3 meter/hari), sehingga jarak ideal antara tangki septic dengan sumur sejauh 3 meter per hari x 3 hari = 9 meter (Soeparman, 2002). Adapun angka 1 meter atau lebih sisanya dianggap sebagai jarak pengaman. Sayangnya, jarak minimum ini sering kali diabaikan.

Penyebab lain tingginya pencemaran air tanah oleh bakteri *E.coli* karena kondisi geografis Kota Yogyakarta yang berada di daerah dataran lereng aliran gunung Merapi dengan kemiringan lahan yang relatif datar (antara 0-2%), memungkinkan terjadinya aliran pencemaran air tanah dari daerah utara yang lebih tinggi menuju selatan, sehingga wilayah Kota Yogyakarta menanggung beban pencemaran yang mengalir dari wilayah yang berada di atasnya, yaitu Kabupaten Sleman.

Tingginya pencemaran air sumur oleh bakteri *E. coli* dapat dilihat dari angka kesakitan akibat penyakit diare dan juga jumlah penderita penyakit diare di Kota Yogyakarta. Besar angka kesakitan diare tahun 2008 sebesar 18,06 dengan persentase tertangani sebesar 30,29%. Pada 2009, angka kesakitan diare menurun menjadi 16,80, dengan persentase tertangani sebesar 100%. Jika dilihat dari jumlah penderita penyakit diare, mulai tahun 2006 s.d. 2009 jumlahnya fluktuatif. Tahun

2006, penderita berjumlah 5876 orang, meningkat pada 2007 menjadi 6816 orang, kemudian turun secara drastis menjadi 2714 orang, namun pada 2009 naik kembali secara signifikan menjadi 7658 orang.

Untuk meningkatkan kualitas air tanah pada daerah berpenduduk padat dan di pinggiran sungai disiasati dengan pembuatan pengelolaan limbah komunal yang paling tidak harus berjarak lebih dari 50meter dari perumahan/permukiman. Di Kota Yogyakarta telah dibangun 43 sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal domestik, 37 di antaranya tersebar di sepanjang bantaran tiga sungai yakni Code, Winongo, dan Gajahwong, yang sebagian besar belum berfungsi secara optimal. Selain itu, juga sudah dilakukan pembuangan dengan sistem air limbah terpusat, yaitu pembuangan air limbah melalui pipa yang dialirkan ke pengolahan limbah di Sewon, Bantul. Sistem pembuangan air limbah terpusat di Sewon tersebut telah tersambung dengan saluran pembuangan 10.119 rumah tangga.

Penyediaan sarana dan prasarana air bersih non perpipaan, dilakukan dengan kegiatan penyediaan sarana prasarana air minum dan penyehatan lingkungan terutama berkaitan dengan sanitasi, berupa pemasangan *water treatment* dan rehab MCK umum. Sampai dengan tahun 2010, dari 716 unit MCK umum telah terpasang *water treatment* sebanyak 216 unit. Jumlah ini tentunya sangatlah sedikit karena perbandingan antara jumlah MCK umum yang telah terpasang *water treatment* hanya 30,17%.

Sebagaimana pada umumnya perkotaan, pencemaran udara merupakan permasalahan yang dihadapi oleh Kota Yogyakarta. Pencemaran udara meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk Kota Yogyakarta. Jumlah penduduk Kota Yogyakarta tahun 1971 berjumlah 340.908 jiwa, jumlah tersebut meningkat tahun 1980 menjadi 398.192 jiwa, meningkat kembali tahun 1990 menjadi 412.059 jiwa, dan terakhir meningkat hingga 455.946 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk akan diikuti peningkatan aktifitas, termasuk aktifitas yang menghasilkan emisi. Adapun aktifitas yang menghasilkan emisi antara lain terkait konsumsi bahan bakar fosil, listrik, dan air.

Peningkatan konsumsi bahan bakar fosil untuk transportasi dapat dilihat dari angka jumlah kendaraan bermotor penduduk Kota Yogyakarta yang meningkat dari tahun ke tahun. Selang waktu 5 tahun, jumlah berbagai jenis kendaraan

bermotor meningkat secara drastis, terutama untuk jenis kendaraan bus yang meningkat lebih dari tiga kali lipat dan sepeda motor yang meningkat hampir dua kali lipat. Peningkatan juga terjadi pada jenis kendaraan bermotor yang lain, seperti sedan yang meningkat dari 32332 buah menjadi 36533 buah dan truk dari 12730 buah menjadi 12992 buah. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor, berimbas pada peningkatan konsumsi bahan bakar fosil, baik berupa bensin premium, maupun solar. Padahal, menurut IPCC (1996) setiap liter bensin premium mengemisi 2,33 kgCO₂ dan solar 2,67 kgCO₂.

Aktifitas penduduk Kota Yogyakarta terkait konsumsi listrik, secara tidak langsung juga turut menyumbang emisi (*in direct/off-site emission*). Tabel di atas menunjukkan bahwa peningkatan jumlah pelanggan, akan diikuti oleh peningkatan daya tersambung dan jumlah energi terjual, dengan jumlah energi terjual tertinggi ada pada tahun 2005. Berdasarkan data energi yang terjual, diketahui bahwa tahun 2005 jumlah energi yang terjual mencapai 576.601.596 kwh. Jika setiap kwh energi listrik mengemisi 0,718 kgCO₂, maka pada 2005 penduduk Kota Yogya menyumbang *indirect emission* berasal dari konsumsi listrik sebesar $4,14 \times 10^8$ kgCO₂.

Aktifitas penduduk Kota Yogyakarta terkait konsumsi air PDAM, juga menyumbang *off-site emission*. Produksi setiap m³ air PDAM, membutuhkan energi listrik sekitar 0,71 kwh/m³, padahal setiap kwh listrik mengemisi 0,781 kgCO₂. Maka, berdasarkan data PDAM Kota Yogyakarta diketahui total produksi air tahun 2005 sebesar 18.635.137 m³. Ini berarti bahwa pada 2005, jumlah *of-site emission* yang dihasilkan dari produksi air PDAM Kota Yogyakarta sebesar $9,5 \times 10^6$ kgCO₂.

Hasil pengukuran kualitas udara di beberapa titik di Kota Yogyakarta, menunjukkan bahwa kualitas udara ambien tahun 2008, baik untuk SO₂, CO, NO₂, partikel debu, dan Pb, masih berada di bawah ambang batas. Namun, hasil pengukuran tahun 2010, menunjukkan kondisi sangat berbeda. Di beberapa titik, konsentrasi gas dan partikel pencemar udara tercatat telah melebihi ambang batas. Misalnya, hasil pengukuran di Jl. Laksda Adisucipto (depan saphir), menunjukkan kandungan gas SO₂ dan O₃ ambien 1,5 kali lebih besar untuk SO₂ dan hampir 2 kali lipat untuk O₃, dari standart baku mutu udara ambien yang ditentukan.

Selain itu, hasil pengukuran partikel debu (PM 2,5) di dua titik juga menunjukkan nilai yang melebihi ambang batas, yaitu di Terminal Giwangan dan

Simpang Empat Gedongtengen. Jumlah PM 2,5 di Terminal Giwangan mencapai 86,5 $\eta\text{g}/\text{m}^3$ dan di Simpang Empat Gedongtengen mencapai 80,6 $\eta\text{g}/\text{m}^3$, padahal nilai baku mutu untuk PM 2,5 adalah 65 $\eta\text{g}/\text{m}^3$. Kondisi terparah dijumpai untuk hasil pengukuran gas CO, karena di semua titik pengukuran menunjukkan bahwa kandungan gas CO ambien telah jauh melampaui baku mutu lingkungan. Kandungan gas CO ambien tertinggi dijumpai di lokasi Pertigaan Jl. Malioboro, jumlah gas CO ambien telah mencapai 157.556 $\eta\text{g}/\text{m}^3$, atau 4500 kali lebih besar dari standart baku mutu lingkungan yang ditentukan. Ini menunjukkan, bahwa kondisi pencemaran udara Kota Yogyakarta sudah cukup parah, dan butuh penanganan serius. Upaya penanganan pencemaran udara ditindaklanjuti dengan berbagai cara antara lain uji emisi bagi kendaraan bergerak secara berkala serta pembangunan RTH publik dan pembuatan taman di tepi sungai.

Penciptaan ketentraman dan keteriban kota menjadi permasalahan yang terus ditingkatkan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi warga kota dan masyarakat pendatang khususnya para wisatawan. Rasa nyaman dan aman untuk berwisata di Kota Yogyakarta dapat dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan tiap tahun baik domestik maupun internasional serta lama tinggal wisatawan di Kota Yogyakarta. Meskipun prestasi yang ditunjukkan pada sektor wisata terus membaik, perlu dijaga dan dicari inovasi baru yang menjadi daya tarik bagi kenyamanan wisatawan.

Kenyamanan di jalan, ruang publik di lokasi wisata dan sekitarnya perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Kota Yogyakarta. Adanya pengamen dan peminta-minta di persimpangan jalan, di ruang publik maupun di kawasan wisata membuat wisatawan terganggu dan gerah akan keberadaannya. Meskipun tidak berdampak langsung bagi sektor pariwisata akan tetapi kondisi seperti ini lambat laun jelas menjadi bumerang bagi pariwisata.

4.2 Isu Strategis Pembangunan Kota Yogyakarta

Melihat kondisi hasil pembangunan yang telah dilaksanakan dan permasalahan yang dihadapi, serta melihat pada isu strategis nasional dan regional maka dalam pembangunan lima tahun ke depan ada beberapa isu strategis yaitu :

1. Reformasi Birokrasi
2. Kinerja Aparatur

3. Pelayanan kesehatan
4. Perbaikan sarana prasarana perkotaan
5. Pelayanan Adminitrasi Publik
6. Pendidikan Inklusif
7. Ekonomi kerakyatan
8. Percepatan pengurangan kemiskinan
9. Peningkatan pembangunan SDM
10. Peningkatan ekonomi daerah
11. Kota yang nyaman dan aman

Berbagai isu strategis dimaksud merupakan tantangan yang perlu diantisipasi dan juga potensi sumberdaya yang perlu dikembangkan untuk keberhasilan pencapaian cita-cita pembangunan.

4.2.1 Reformasi Birokrasi

Didukung oleh institusi penunjang yang mengakomodasi reformasi birokrasi yaitu pembaharuan penyelenggaraan sistem pemerintahan. Penyempurnaan kebijakan di bidang aparatur akan mendorong terciptanya kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD, manajemen pemerintahan dan manajemen SDM aparatur yang efektif, serta sistem pengawasan dan akuntabilitas yang mampu mewujudkan pemerintahan yang berintegritas tinggi. Implementasi hal-hal tersebut pada masing-masing SKPD akan mendorong perubahan *mind set* dan *culture set* pada setiap birokrat ke arah budaya yang lebih profesional, produktif, dan akuntabel.

Setiap perubahan diharapkan dapat memberikan dampak pada penurunan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, pelaksanaan anggaran yang lebih baik, manfaat program-program pembangunan bagi masyarakat meningkat, kualitas pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik meningkat, produktivitas aparatur meningkat, kesejahteraan pegawai meningkat, dan hasil-hasil pembangunan secara nyata dirasakan seluruh masyarakat. Secara bertahap, upaya tersebut diharapkan akan terus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kondisi ini akan menjadi profil birokrasi yang diharapkan.

Kondisi tersebut di atas akan dicapai melalui berbagai upaya, antara lain dengan penerapan program *quick wins*, yaitu suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali suatu program besar dan sulit. *Quick wins* bermanfaat untuk mendapatkan momentum awal yang positif dan meningkatkan kepercayaan instansi untuk melakukan sesuatu perubahan yang berat. Penyelesaian sesuatu yang berat merupakan inti dari suatu program besar. *Quick wins* dilakukan di awal dan dapat berupa *quick wins* untuk penataan organisasi, tata laksana, peraturan perundangundangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan penataan budaya kerja aparatur.

4.2.2. Kinerja Aparatur

Isu penting dalam bidang aparatur adalah berkaitan dengan kinerja aparatur yang kemudian dikaitkan dengan remunerasi. Remunerasi baru dilaksanakan oleh sebagian di Pemerintah Pusat belum sampai pada Pemerintah Daerah. Selain itu juga isu tentang besarnya belanja aparatur yang melebihi separo dari belanja daerah, yang sebenarnya isu ini menjadi kabur karena jumlah sebagian pegawai adalah tenaga kesehatan dan pendidikan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Dalam pembinaan kepegawaian maka tuntutan profesionalisme dan kompetensi adalah penting dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur pemerintah, karena akan mengelola birokrasi. Dalam proses reformasi birokrasi aparatur merupakan faktor terpenting, dan faktor ini menjadi faktor kunci. Isu maraknya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) harus dijawab dengan perbaikan budaya kerja dan perilaku yang bersih untuk menghasilkan kinerja yang baik dalam memberikan pelayanan masyarakat.

Keterbatasan anggaran dalam penyelenggaraan pengembangan sumber daya pegawai termasuk melalui pendidikan dan pelatihan, perlu dipecahkan dengan metode pembinaan dan pengawasan yang efektif dan efisien. Selain itu juga perencanaan dan rekrutmen yang harus lebih baik di dalamnya sehingga menghasilkan aparatur yang profesional dan mempunyai kompetensi. Untuk lebih optimalnya kinerja aparatur juga perlu dibarengi dengan kelengkapan sarana dan prasarana khususnya yang berkaitan dengan teknologi informasi.

4.2.3. Pelayanan kesehatan

The five level prevetion by leavel and clark terdiri dari 1) Promosi Kesehatan 2) Pencegahan dan Perlindungan Kesehatan, 3) Pengobatan 4) Pembatasan kecacatan dan 5) Pemulihan kesehatan.

Sedangkan promosi kesehatan meliputi : penyuluhan kesehatan, tukar kawruh babagan kesehatan, klompencapir gaya almarhum Presiden Soeharto, Usaha Kesehatan Sekolah yang pada prinsipnya melakukan sosialisasi kesehatan atau menyebar-luaskan pengetahuan sehat, dan sebagainya. Pencegahan kesehatan meliputi : mandi bersabun, sikat gigi, identifikasi kandungan makanan jajanan, pemberantasan jentik-jentik nyamuk, identifikasi anjing yang mengandung Rabies, dan sebagainya. Perlindungan kesehatan meliputi : mengenakan jaket, helm, masker, sarung tangan, kelambu, payung, sun cream agar tidak tersengat panas matahari, dan sebagainya. Pengobatan meliputi : penyuntikan, pemberian obat, operasi, dan sejenisnya. Pembatasan kecacatan meliputi : melakukan *follow up* terhadap pasien pasca pengobatan, pencegahan metastase atau perluasan kanker pasca treatment, kunjungan ke rumah pasien dan sebagainya. Pemulihan kesehatan itu meliputi : pembinaan lansia, pembinaan wanita tuna susila, pengembalian mantan penderita ke tempat kerja semula atau ke sekolah lagi atau ke rumahnya lagi, dan sejenisnya.

Kuratif atau pengobatan adalah cara-cara pasive yaitu menunggu penderita yang sakit untuk diobati. Yang dalam konsep DEPKES disebut sebagai paradigma sakit ini mahal sekali. Sebaliknya 4 lainnya adalah paradigma sehat adalah lebih aktif dan murah biayanya. Paradigma sehat banyak dikerjakan di negara maju, sebaliknya paradigma miskin banyak digunakan pada negara miskin.

Standar Pelayanan Minimal kesehatan merupakan standar pelayanan publik untuk menjamin minimum pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh masyarakat dari Pemerintah. PUSKESMAS (Pusat Kesehatan Masyarakat) sebagai salah satu institusi fasilitas pemerintah daerah dan sebagai lini terdepan dalam pemberian pelayanan kesehatan non-profit kepada masyarakat dan merupakan ujung tombak dalam sistem kesehatan Nasional, juga dituntut untuk dapat memberikan pelayanan dengan baik berdasarkan wewenang tugas pokok dan fungsinya yang disesuaikan dengan situasi, kondisi, masalah dan kemampuan Puskesmas tersebut. Masalah globalisasi kesehatan membawa konsekuensi, yaitu

kompetensi pelayanan kesehatan pemerintah akan terdesak oleh investasi asing dan minimal membentuk persepsi masyarakat tentang pelayanan yang layak diterima. Akibat dari tuntutan masyarakat tersebut, profesionalisme pelayanan semakin dipacu tetapi berdasarkan koridor kebijakan standar pelayanan yang telah disusun.

Dalam rangka swadana puskesmas era otonomi, maka pada tahun 2005 akan diberlakukan tarif berobat sebesar Rp. 4000.- untuk setiap pasien, artinya akan terjadi kenaikan lebih besar 6 (enam) kali lipat lebih dari penetapan tarif sebelumnya. Hal ini dipertimbangkan untuk mengejar kebutuhan peningkatan fasilitas dan mutu pelayanan mandiri di kota Yogyakarta seiring peningkatan kompetisi dengan sarana-sarana kesehatan swasta yang berada dalam wilayah Rejowinangun seperti: RS Bersalin Permata Bunda, Pengobatan Puri Adisti, Klinik IBI, Pengobatan lengkap Hidayatullah, Pengobatan Spesialis Medika dan puluhan praktek Bidan/dokter lainnya yang mengadakan tindakan profesional dan telah memberlakukan tarif jauh lebih besar dibandingkan dengan rencana tarif baru tersebut. Walaupun pada dasarnya puskesmas sebagai institusi yang non-profit milik pemerintah bertarif murah namun diharapkan dapat bersaing, akibat subsidi bantuan yang sangat terbatas dari pemerintah maka pemenuhan tuntutan peningkatan akan dibebankan pada tarif pelayanan.

Peran serta masyarakat merupakan keikutsertaan individu, keluarga dan kelompok masyarakat dalam setiap menggerakkan upaya kesehatan yang juga merupakan tanggung jawab sendiri, keluarga dan masyarakatnya. Peran serta masyarakat adalah proses ketika individu dan keluarga dan serta lembaga swadaya masyarakat, termasuk swasta bertanggung jawab atas kesejahteraan kesehatan diri sendiri, keluarga dan masyarakat.

Dalam sistem kesehatan nasional, pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan masyarakat. Upaya menjaga kesehatan masyarakat juga dapat dilakukan dengan pelibatan komunitas masyarakat. Pelayanan kesehatan berbasis komunitas perlu dikembangkan di Kota Yogyakarta dengan memberdayakan dan melibatkan masyarakat demi mempertahankan manusia sehat secara fisik dan mental.

Peran masyarakat dalam melakukan pencegahan/preventif terhadap penyakit, baik dalam tatanan rumah tangga atas kesadaran sendiri dan secara sukarela sudah merupakan kebutuhan yang urgen. Rumah tangga sehat berarti

mampu menjaga, meningkatkan dan melindungi kesehatan setiap anggota rumah tangga dari gangguan ancaman penyakit dan lingkungan yang kurang kondusif. Dengan adanya peran masyarakat dalam kesehatan, maka diharapkan setiap anggota keluarga meningkat kesehatannya dan tidak mudah sakit sehingga produktivitas kerja anggota keluarga juga meningkat. Anak-anak akan tumbuh sehat dan cerdas. Karenanya pengeluaran biaya rumah tangga dapat difokuskan untuk pemenuhan gizi keluarga, pendidikan dan modal usaha untuk peningkatan pendapatan keluarga. Peran serta masyarakat dalam menjaga kesehatan dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

a. Peran serta masyarakat karena Imbalan

Adanya peran serta karena adanya imbalan tertentu yang diberikan baik dalam bentuk imbalan materi atau imbalan kedudukan.

b. Peran serta masyarakat karena Paksaan/Perintah

Masyarakat berperan serta karena adanya ancaman atau sanksi.

c. Peran serta masyarakat karena Identifikasi

d. Peran serta masyarakat karena Tuntutan Hak Asasi & Tanggung Jawab

e. Peran serta masyarakat yang disertai kreasi dan daya cipta

f. Peran serta masyarakat karena kesadaran

Peran serta atas dasar kesadaran tanpa adanya paksaan atau harapan dapat imbalan.

Pemeliharaan kesehatan ibu berkorelasi dengan angka kematian ibu. Kesehatan ibu biasanya banyak diperhatikan pada saat masa kehamilan, saat proses persalinan dan pasca melahirkan. Ada empat faktor yang menyebabkan terjadinya kematian ibu, yakni terlalu tua saat hamil, terlalu muda untuk hamil, terlalu sering hamil, dan terlalu dekat jarak kehamilan. Jika keempat itu bisa diperbaiki maka angka kematian ibu bisa diturunkan. Upaya untuk menjaga kesehatan ibu dan menurunkan kematian ibu perlu dilaksanakan secara bersama-sama, tidak hanya pihak pemerintah akan tetapi juga lingkungan keluarga memiliki peran yang mampu memberikan dukungan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan pendidikan kesehatan reproduksi di kalangan siswa sekolah mulai dari SD hingga SMA. Selain itu, juga menanamkan norma dan budaya bahwa menikah itu idealnya hingga usia 24-25 tahun.

Status gizi balita harus diperhatikan. Mereka harus memperoleh gizi yang cukup. Gizi bagi balita dapat mempengaruhi perkembangan balita kedepannya. Jika gizi balita cukup maka balita tersebut bisa menjadi anak yang sehat dikemudian hari. Tetapi jika gizi balita kurang maka dapat mempengaruhi perkembangannya.

Endemisitas penyakit menular pada lingkungan permukiman harus dicegah. Oleh karena itu hal-hal yang dapat dilakukan :

- § Terwujudnya peningkatan kesehatan lingkungan dengan pengendalian penyakit menular di masyarakat.
- § Pengendalian penyakit menular

Upaya promotif dan preventif terhadap berbagai jenis penyakit dapat dilakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat agar penyebaran penyakit menular bisa dicegah sedini mungkin dan Memperkuat program promosi kesehatan untuk pencegahan dan mengatasi masalah-masalah kesehatan.

Pelayanan kesehatan telah dilakukan dengan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, namun saat ini yang lebih banyak dilakukan adalah upaya kuratif. Upaya pelayanan kesehatan yang berbasis masyarakat dikembangkan dengan adanya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

Hospital building belum memenuhi syarat/standar prasarana kesehatan. Hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sehingga mereka merasa nyaman untuk berobat.

4.2.4. Perbaikan sarana prasana Perkotaan

Pembangunan kewilayahan dilaksanakan dengan mengakomodasi permasalahan dan kebutuhan pembangunan di tiap-tiap wilayah (kampung) dan didukung partisipasi seluruh warga kampung dengan menerapkan konsep pembangunan SEGORO AMARTO (Semangat Gotong Royong Agawe Majune Ngayogyakarta).

Pembangunan dengan menggunakan wilayah sebagai satuan wilayah pengembangan memiliki keuntungan tersendiri bagi Kota Yogyakarta. Hal ini disebabkan masyarakat dalam suatu wilayah yang merupakan obyek sekaligus subyek pembangunan memiliki ikatan batin yang lebih tinggi sehingga prinsip gotong royong pun dapat digunakan dalam pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan berbasis kewilayahan harus didasari oleh prinsip gotong royong., hal ini selaras dengan dikembangkannya konsep pembangunan SEGORO AMARTO. SEGORO AMARTO pada dasarnya merupakan gerakan bersama seluruh masyarakat untuk pembangunan, khususnya penanggulangan kemiskinan dengan menekankan pada penguatan nilai-nilai budaya masyarakat yang tercermin pada sikap, perilaku, gaya hidup, dan wujud kebersamaan dalam kehidupan yang mencakup aspek fisik maupun non fisik.

Jumlah kendaraan yang terus meningkat di kota Yogyakarta tidak diikuti dengan peningkatan jalan yang signifikan. Kondisi ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan lalu lintas seperti kemacetan dan keserawutan lalu lintas yang lainnya. Oleh karena itu harus ada upaya untuk pengurangan kendaraan bermotor, memaksimalkan penggunaan angkutan umum serta penggunaan sepeda.

Kebijakan pengurangan kendaraan bermotor misalnya kebijakan parkir mengenai biaya parkir yang mahal, menekan penyediaan lahan parkir kecuali untuk kegiatan pariwisata dan pembatasan tahun kendaraan. Kebijakan untuk memaksimalkan angkutan umum antara lain perbaikan layanan angkutan umum, meningkatkan kualitas dan kuantitas angkutan umum, menurunkan tarif angkutan umum dan menyediakan angkutan wisata disekitar Kraton. Kebijakan untuk penggunaan sepeda seperti Program segosegawe. Program ini harus didukung dengan sarana dan prasarananya seperti jalur sepeda yang terpisah dengan jalan raya.

Terjadinya bencana Merapi pada akhir tahun 2010 menyebabkan Kota Yogyakarta tidak terlepas dari bencana. Bencana yang mengancam pasca erupsi Gunung Merapi adalah ancaman lahar dingin. Kota Yogyakarta dilalui 3 sungai. Salah satunya adalah Sungai Code. Sungai ini merupakan terusan dari Sungai Boyong yang berhulu pada Gunung Merapi, sehingga ancaman terjadinya banjir lahar dingin mengancam masyarakat yang bertempat tinggal dan beraktivitas disepanjang Sungai Code. Terdapat 16 kelurahan yang berada pada sepanjang Sungai Code. Oleh karena itu diperlukan jalur-jalur evakuasi di Kota Yogyakarta jika terjadi bencana lahar dingin. Selain jalur evakuasi juga dibutuhkan titik kumpul warga pasca evakuasi.

Bencana kebakaran meningkat dari tahun-ketahun di Kota Yogyakarta baik dipermukiman padat warga maupu pada perkantoran/hotel. Untuk di permukiman

warga sebaiknya tersedia hidrant kering yang dapat digunakan sewaktu-waktu. Sedangkan pada perkantoran/hotel-hotel diwajibkan untuk memiliki alat pencegah kebakaran dan sebaiknya secara rutin terdapat pengecekan alat-alat kebakaran sehingga tidak kadaluarsa. Selain itu sebaiknya juga ada simulasi bencana sehingga jika terjadi kebakaran warga sudah siap dan tidak menimbulkan banyak korban.

Persentase permukiman kumuh di Kota Yogyakarta menurun dari tahun 2007 hingga 2010. Pada tahun 2007 persentase rumah tidak layak huni sebesar 5%. Sedangkan pada tahun 2010 menurun menjadi 4,4% (Kimpraswil Kota Yogyakarta, 2010). Hal yang perlu diperhatikan adalah kondisi sanitasi, drainase, jalan kampung, pengolahan limbah, pertamanan untuk mewujudkan rumah layak huni dan lingkungannya.

Pengadaan air bersih di Kota Yogyakarta dibedakan menjadi air bersih sistem perpipaan dan non perpipaan. Masyarakat Kota Yogyakarta lebih banyak berakses air bersih non perpipaan, pada tahun 2010 mencapai 99,7% sedangkan untuk yang berakses non perpipaan sebesar 51,4%.

Limbah padat yang dimaksud disini adalah limbah domestik dan tidak berbahaya. Keberadaan limbah tersebut disebabkan karena pola produksi dan konsumsi yang tidak *sustainable*. Meskipun tidak berbahaya, akumulasi limbah padat (sampah) jika tanpa pengelolaan dengan baik mendatangkan banyak permasalahan lingkungan. Adapun isu strategis terkait limbah padat atau sampah di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- a. Penyediaan lahan untuk TPA
 - b. Pengolahan sampah sebelum masuk TPA (pemilahan, *reuse, recycle, reduce*)
 - c. Pengurangan penggunaan tas plastik warna (peran serta usaha retail dan swasta)
 - d. Inovasi pengelolaan sampah komunal
4. Kesiapsiagaan bencana

Kota Yogyakarta tidak lepas dari ancaman bencana baik yang bencana alam maupun non alam. Ancaman bencana yang sering dihadapi oleh penduduk Kota Yogyakarta adalah bencana kebakaran, angin puting beliung, dan lahar di sepanjang bantaran Kali Code. Ancaman bencana tersebut harus selalu disadari oleh masyarakat dan pemerintah Kota Yogyakarta sehingga upaya pengurangan resiko bencana selalu menjadi pertimbangan dalam setiap program pembangunan.

Isu strategis dalam kesiapsiagaan bencana di Kota Yogyakarta adalah budaya atau perilaku kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, prasarana perumahan yang dapat diakses oleh mobil pemadam kebakaran, serta restorasi alur Sungai Code untuk meningkatkan daya angkut sungai pada saat banjir lahar.

4.2.5. Pelayanan Adminitrasi Publik

Menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa bidang kependudukan dan catatan sipi merupakan urusan wajib kewenangan Pemerintah Kota. Salah satu pelayanan administrasi publik yang perlu mendapatkan perhatian adalah berkaitan dengan administrasi kependudukan. Keberadaan seseorang yang berkaitan dengan adminitrasi kependudukan sangat penting mulai dari akta kelahiran, perkawinan, kematian, kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Isu terakhir adalah diberlakukannya e-KTP di seluruh wilayah Indonesia, hal ini perlu kesadaran masyarakat dan ketegasan serta kejelasan sehingga dapat dihindarkan adanya KTP ganda.

Tertib administrasi kependudukan juga penting untuk keperluan adminitrasi lainnya. Dalam berbagai urusan seperti pendidikan, kesehatan, usaha, pengurusan jaminan semua didasarkan pada keadaan/domisli seseorang. Untuk menghindari penyalahgunaan tentu tertib administrasi menjadi kunci awal untuk melaksanakan pelayanan adminitrasi yang lain. Penyelesaian e-KTP secara menyeluruh dan dengan adanya pemanfaatan teknologi invormasi akan dapat menunjang pelayanan masyarakat terutama dengan penyederhanaan berbagai keperluan yang berkaitan dengan administrasi publik

4.2.6. Pendidikan inklusif

Isu pendidikan inklusif menguat akhir-akhir ini dalam rangka untuk memberikan kesempatan belajar bagi warga masyarakat termasuk yang berkebutuhan khusus. Yogyakarta sebagai kota pendidikan telah melewati wajib belajar 9 tahun, hal ini ditunjukkan dengan angka putus sekolah pada angka 11,5 atau putus sekolah pada tingkat kelas 11 lebih. Secara keprograman Pemerintah Kota yogyakarta bahkan sudah menerapkan program wajib belajar 12 tahun sejak awal

melalui kebijakan di RPJM tahap pertama, sementara untuk tingkat nasional dan regional baru akan dimulai tahun 2013. Kesempatan belajar tidak hanya menjadi hak bagi usia sekolah tetapi terbuka bagi seluruh warga yang ingin meningkatkan pendidikan dan pengetahuannya. Dalam hal ini berkaitan dengan akses pendidikan untuk dapat dilakukan melalui sekolah formal, non formal maupun informal. Untuk ini keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pendidikan menjadi kendala khususnya pada pendidikan non formal dan informal untuk memberikan akses pendidikan bagi semua. Selain itu untuk pendidikan non formal dan informal perlu peningkatan kompetensi bagi para pamong belajar yang ada di masyarakat, yaitu yang tergabung dalam PKBM-PKBM.

4.2.7. Ekonomi kerakyatan

Pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki potensi yang besar dan strategis dalam meningkatkan aktivitas ekonomi, termasuk menyediakan keperluan barang dan jasa suatu daerah. beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan koperasi dan UMKM di kota Yogyakarta meliputi:

- a. Pemberdayaan pelaku UMKM–K melalui cara yang lebih kreatif.
- b. Menciptakan peluang usaha bagi masyarakat lokal berbasis komunitas kewilayahan (*community based*), dan
- c. Meningkatkan kerjasama antara UMKM dan perusahaan korporasi swasta maupun milik pemerintah.

Selanjutnya, solusi yang kreatif dapat berhasil jika pelatihan yang diberikan pada para pelaku tepat sasaran. tepat sasaran yang dimaksud dapat didasarkan pada bakat dan kebutuhan jenis ketrampilan yang dibutuhkan. Peluang juga muncul dalam penciptaan peluang usaha bagi masyarakat lokal berbasis komunitas kewilayahan (*community based*). Misalnya, penggalakan pengembangan pengrajin perak oleh tim dari Universitas Gadjah Mada dan *Jogja Heritage Society* (JHS). Selain itu, peningkatan kerjasama antara UMKM dan perusahaan korporasi swasta maupun milik pemerintah perlu dilanjutkan. Pembentukan modal ventura seperti yang tertuang dalam Deklarasi Jimbaran merupakan teladan yang dapat diadopsi. Semua hal tersebut tersebut akan berguna untuk meningkatkan produktivitas pelaku koperasi dan UMKM.

Ketahanan pangan merupakan salah satu dasar keberhasilan pembangunan di kota Yogyakarta. ketahanan pangan tidak hanya didasarkan pada segi kuantitas, dimana semua warga mendapatkan makanan yang cukup dan memadai jumlahnya, namun pemerintah juga harus memperhatikan kualitas dari makanan yang didistribusikan. pengawasan dan pengelolaan pangan diperlukan untuk mewujudkan ketahanan pangan yang ideal.

Munculnya ragam bakteri dan virus yang dapat menyebar dengan cepat melalui air dan udara membahayakan tingkat higienitas makanan yang dikonsumsi. selain itu, peredaran makanan yang mengandung bahan tambahan pangan dan cemaran (bahan kimia, mikro organisme dan fisik) yang membahayakan bagi kesehatan masyarakat. oleh sebab itu, pengawasan terhadap pangan dibutuhkan demi menjaga kesehatan masyarakat.

Dari segi pengelolaan, pemerintah kota Yogyakarta perlu menciptakan tata niaga yang berkeadilan dan efisien untuk menjaga stabilitas harga pangan. perilaku para spekulasi seringkali mengakibatkan inflasi pada saat-saat tertentu.

4.2.8. Percepatan pengurangan kemiskinan

Isu strategis kemiskinan meliputi isu Penurunan Angka Kemiskinan secara signifikan, Standart Penduduk Miskin Masih Rendah, penambahan penduduk miskin dari daftar penduduk rentan miskin, pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin, asuransi kesehatan untuk keluarga miskin (KMS), mental keagamaan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, peran serta penduduk yang mampu untuk mengatasi kemiskinan dan perlunya kader-kader kemiskinan

Jumlah penduduk miskin Kota Yogyakarta pada tahun 2007 sebesar 89.818 jiwa sedangkan pada tahun 2010 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 65.371 jiwa. Penurunan yang signifikan ini menunjukkan keberhasilan pemerintah Kota untuk memerangi kemiskinan. Hal ini harus terus ditingkatkan dari tahun ke tahun sehingga akan kemiskinan dapat ditekan sekecil mungkin. Penurunan angka kemiskinan ini tentu saja harus diikuti dengan kondisi yang sebenarnya dilapangan dan dapat ditunjukkan dengan semakin meningkatnya kesejahteraan penduduk Kota Yogyakarta.

Adanya perubahan standar kemiskinan dan kenaikan harga bahan baku dapat menyebabkan kerentanan bagi masyarakat yang rentan miskin untuk menjadi

penduduk miskin. Mereka terancam untuk masuk kedalam kategori miskin jika mereka tidak mampu meningkatkan kesejahteraan mereka

Prosedur pelayanan kesehatan dan pengurusan administrasi bagi keluarga miskin masih dirasakan sulit bagi keluarga miskin. Pembinaan dan sosialisasi penyuluhan kesehatan perlu dilakukan khususnya bagi keluarga kurang mampu agar pengetahuan tentang pentingnya menjaga kesehatan dapat mereka terapkan dalam kehidupan sehari hari.

Asuransi ini sangat dibutuhkan oleh penduduk miskin agar mereka memperoleh akses untuk pelayanan kesehatan meskipun mereka kurang mampu. Hal ini karena biaya kesehatan sekarang ini yang semakin mahal. Sehingga dengan adanya KMS ini dapat membantu mempermudah penduduk miskin untuk memperoleh akses kesehatan. KMS ini harus diterima oleh penduduk yang benar-benar miskin dan tidak boleh salah sasaran.

Dalam pengentasan kemiskinan diharapkan menggunakan aspek keagamaan sehingga masyarakat yang miskin bersedia berusaha lebih keras untuk memperoleh penghidupan yang lebih baik. Aspek keagamaan ini harus dimasukkan dalam setiap sosialisasi kemiskinan.

Penduduk mampu memiliki peran besar untuk turut serta mengatasi permasalahan kemiskinan. Mereka yang mampu harus bisa memberdayakan penduduk yang kurang mampu sehingga dapat membantu meningkatkan taraf hidup mereka. Pembukaan lapangan kerja oleh mereka yang mampu dapat membantu penduduk miskin memperoleh pekerjaan. dengan demikian dapat membantu mengurangi pengangguran.

Kader-kader kemiskinan diperlukan untuk memantau penduduk miskin pada tingkat yang paling bawah yaitu RT/RW. Mereka harus terus mendaa penduduk miskin dan memberikan sosialisasi terkait kemiskinan.

4.2.9. Peningkatan pembangunan SDM

Dalam rangka memenuhi amanat sebagaimana digambarkan dalam RPJPD, maka peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan menjadi sangat penting. Peningkatan mutu ini dipengaruhi berbagai faktor seperti kurikulum, sumber daya manusia, sarana prasarana dan iklim yang kondusif, dan penguasaan teknologi dan informasi dalam rangka mewujudkan hasil pendidikan berdaya saing tinggi.

Akhir-akhir ini mulai disorot tentang menurunnya rasa nasionalisme, rasa berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Penumbuhan rasa nasionalisme tidak hanya sekedar simbol-simbol tetapi menerapkan pendidikan karakter yang sebenarnya, tidak hanya sekedar pengajaran.

Ketenagakerjaan di kota Yogyakarta memiliki dinamika yang menarik untuk diketahui. Secara umum, ada empat hal penting yang menjadi perhatian:

- a. Peningkatan perlindungan terhadap tenaga kerja. Peningkatan perlindungan terhadap tenaga kerja meliputi beberapa aspek. Pertama, sejumlah kelompok buruh di kota Yogyakarta menuntut upah minimum buruh dinaikkan menjadi di atas 1 juta rupiah. Kedua, mereka juga mengharapkan dihapuskannya sistem kontrak kerja dan *outsourcing*. Dalam hal ini, sosialisasi UU tenaga kerja ke perusahaan perlu dilakukan untuk meminimalisir konflik antara *employee* dan *employer*. Ketiga, para tenaga kerja juga menuntut jaminan atas kesehatan dan kesejahteraan lainnya. Keempat, perlindungan terhadap tenaga kerja khususnya wanita dan anak-anak juga masih terus dibicarakan.
- b. Penanggulangan kemiskinan dengan implementasi nilai-nilai *segoro amarto*. Penanggulangan kemiskinan dengan implementasi nilai-nilai *segoro amarto* (semangat gotong royong) juga masih hangat untuk didiskusikan. Beberapa program penanggulangan kemiskinan terus dilakukan, diantaranya: PNPM Mandiri Perkotaan dan TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) sebagai upaya percepatan pengentasan kemiskinan di tingkat kelurahan. hal tersebut ditujukan agar angka kemiskinan mengalami penurunan dengan basis standar ambang kemiskinan yang lebih tinggi. Selain itu, ada pemikiran yang juga menarik untuk dikaji, yaitu upaya pengentasan kemiskinan melalui jalur keagamaan dan perlombaan.
- c. Peningkatan daya saing tenaga kerja berpendidikan tinggi. Kota Yogyakarta, sebagai pusat pendidikan, mencetak ratusan lulusan berpendidikan tinggi setiap tahunnya. Namun, nampaknya lulusan tersebut masih berorientasi untuk bekerja di luar kota. Dalam hal ini, daya saing tenaga kerja berpendidikan tinggi perlu ditingkatkan. Pemberian insentif kepada para lulusan berpendidikan tinggi merupakan alternatif yang dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat bermigrasi keluar jogja.

- d. Peningkatan kesadaran wirausaha bagi para sarjana oleh lembaga akademik. Selain itu, peningkatan kesadaran wirausaha bagi para sarjana perlu dilakukan oleh lembaga akademik. Karena kewirausahaan tidak hanya cukup diperoleh dari sejumlah teori, para mahasiswa dan pelajar perlu diberikan pelatihan ketrampilan khusus agar siap terjun ke dunia bisnis yang sebenarnya.

4.2.10. Peningkatan ekonomi daerah

Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata berbasis budaya dengan dukungan pelestarian dan pengembangan seni serta pelestarian cagar budaya.

Dengan adanya potensi wisata di Kota Pariwisata, melibatkan partisipasi masyarakat dalam pariwisata di Kota masih minim. Dalam pengembangan pariwisata selama ini budaya masyarakat setempat lebih dilihat sebagai objek, sehingga mengakibatkan “menjual budaya” dengan adanya pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dapat ditekankan kesetaraan antara masyarakat dengan wisatawan dan berkembangnya budaya sebagai jati diri bangsa. Masyarakat sendiri memberikan penjelasan tentang budaya dan kebiasaan setempat. Dengan demikian, wisatawan lebih mengerti tentang kebudayaan, kebiasaan dan kecenderungan mengikuti atau patuh pada aturan yang berlaku di tempat yang dikunjungi. Pengalaman dapat membantu saling pengertian dan menghargai nilai-nilai yang berbeda, yang pada gilirannya mendukung masyarakat untuk lebih terbuka dan memberi penjelasan tentang pengetahuan lokal kepada wisatawan.

Pengembangan pariwisata melalui *Community-Based Tourism* (CBT), adapun definisi CBT adalah pariwisata yang menyadari kelangsungan budaya, sosial, dan lingkungan. Bentuk pariwisata ini dikelola dan dimiliki oleh masyarakat untuk masyarakat, guna membantu para wisatawan untuk meningkatkan kesadaran mereka dan belajar tentang masyarakat dan tata cara hidup masyarakat lokal (*local way of life*). Dengan demikian, CBT sangat berbeda dengan pariwisata massa (*mass tourism*). CBT merupakan model pengembangan pariwisata yang berasumsi bahwa pariwisata harus berangkat dari kesadaran nilai-nilai kebutuhan masyarakat sebagai upaya membangun pariwisata yang lebih bermanfaat bagi kebutuhan, inisiatif dan peluang masyarakat lokal. CBT bukanlah bisnis wisata yang bertujuan untuk memaksimalkan profil bagi para investor. CBT lebih terkait dengan dampak pariwisata bagi masyarakat dan sumber daya lingkungan (*environmental resources*).

CBT lahir dari strategi pengembangan masyarakat dengan menggunakan pariwisata sebagai alat untuk memperkuat kemampuan organisasi masyarakat rural/lokal.

Pariwisata budaya :

- a. Perlunya mengembangkan kecintaan masyarakat terhadap budaya Jawa sekaligus sebagai daya tarik wisatawan menuju Kota Yogyakarta.
- b. Perlunya kerjasama antara dinas terkait untuk mengupayakan menjaga dan melestarikan seni dan budaya di masyarakat dengan membentuk paguyuban-paguyuban sebagai wadah (merupakan salah satu bentuk SEGORO AMARTO).
- c. Jogja tidak hanya berkembang karena Budaya Jawa, potensi kekayaan kultural (baik budaya Kolonial, Melayu, Arab maupun China) dapat dijadikan warna tersendiri bagi kekhasan wisata budaya di Kota Yogyakarta dengan tetap menjunjung tinggi dan melestarikan budaya asli Jawa.
- d. Upaya mengembalikan toponimi (misal: nama jalan) sebagai gebrakan dalam menciptakan pencitraan Kota Yogyakarta sebagai kota budaya dan kota pariwisata.
- e. Revitalisasi citra Kota Yogyakarta perlu adanya kerjasama dengan daerah sekitar sebagai *brand image* 'Jogja'. Di mata wisatawan, 'Jogja' tidak hanya Kota Yogyakarta melainkan wilayah-wilayah di sekitar Yogyakarta sehingga pencitraan harus dilakukan bersama-sama dengan daerah sekitar, baik pemerintah daerah maupun pelaku wisata untuk dapat bersaing dengan daerah tujuan wisata lainnya di Indonesia. Selain itu juga perlu adanya karakteristik 'Jogja' dalam berbagai aspek yang perlu diciptakan tanpa meninggalkan budaya Jawa yang berpusat pada budaya kraton di Yogyakarta.

Pengembangan Malioboro :

- a. Kawasan yang nyaman untuk dikunjungi, terkait dengan lalu lintas dan ketersediaan area parkir.

Kota Yogyakarta yang terkenal sebagai kota pendidikan, budaya dan pariwisata memiliki berbagai macam lokasi untuk dikunjungi sebagai obyek wisata. Salah satu kebanggaan yang dimiliki Kota Yogyakarta adalah Malioboro. Malioboro selain disebut sebagai jantung Kota Yogyakarta juga

sebagai pusat keramaian yang meliputi berbagai kegiatan, baik pemerintahan, perdagangan, jasa, pariwisata, dan lain sebagainya.

Malioboro menjadi primadona wisatawan dan pemudik selama liburan yang memilih Kota Yogyakarta sebagai tujuan wisata. Sejumlah permasalahan pun muncul di sentral perekonomian Kota Yogyakarta tersebut. Kemacetan, parkir dan sampah menjadi keluhan sejumlah wisatawan yang berkunjung ke Malioboro. Beberapa titik di kawasan Malioboro juga menjadi tempat-tempat parkir yang menggunakan badan jalan. Hal ini lah yang menjadi salah satu penyebab kawasan Malioboro macet dan mengganggu pengguna jalan lain. Sebagai alternatif solusi dari permasalahan kemacetan dan kenyamanan pengguna jalan, maka di tempat-tempat tertentu perlu diperbanyak map/peta yang dilengkapi dengan informasi-informasi tentang tempat-tempat wisata di Kota Yogyakarta dan jalan-jalan alternatif, agar wisatawan yang berasal dari luar daerah bisa lebih nyaman berlibur tanpa harus bingung mencari jalan.

Lahan parkir di Malioboro sangat terbatas, menjadikan ketidakseimbangan antara jumlah kendaraan pengunjung dengan lahan parkir yang tersedia. Hal ini menyebabkan trotoar yang semestinya digunakan untuk pejalan kaki digunakan sebagai tempat parkir. Masalah lahan parkir ini diperparah dengan masalah retribusi parkir yang dilegalkan oleh pemerintah kota. Hal ini telah berjalan lama dan harapannya akan ada perubahan/perbaikan terutama dalam hal ketersediaan lahan parkir di Malioboro.

Penataan kawasan Malioboro hendaknya mengerucut pada satu pemahaman dan kesepemahaman yang sama, bahwa Kawasan Malioboro, tidak hanya sebagai Kawasan Ekonomi, tetapi juga sebagai Kawasan Budaya. Bangunan yang ada di sepanjang Malioboro adalah bangunan lama dan mewakili sejarah penting di masanya. Malioboro beriklim ekonomi karena selama ini memang seperti itu yang dibentuk. Perlunya dibentuk kelompok masyarakat di sekitar Kawasan Malioboro untuk terlibat bersama dalam upaya penataan Kawasan Malioboro sebagai kawasan budaya bersama dan kawasan ekonomi diharapkan mampu meminimalisir terjadinya konflik dalam perencanaan.

Pengembangan Kampung-Kampung Wisata di Yogyakarta yaitu :

- a. Melalui simbolisasi fisik (misal: toponimi, penandaan kampung, peta wisata, dan lain-lain) agar lebih dikenal. Salah satunya dengan mengembalikan toponimi maupun simbolisasi kampung-kampung keprajuritan.
- b. Peningkatan promosi wisata baik melalui pelaku usaha wisata maupun media yang lain.

Pengembangan pariwisata membawa pengaruh positif bagi masyarakat, yaitu meningkatnya taraf perekonomian masyarakat. Namun, pengembangan sektor pariwisata juga membawa pengaruh lain, yaitu terancamnya lingkungan kebudayaan masyarakat. Padahal, kemajuan sektor pariwisata sedikit banyak ditentukan oleh kualitas kebudayaan masyarakat. Lingkungan budaya ini yang menjadi daya tarik terbesar dunia pariwisata.

Salah satu kearifan lokal dalam pariwisata adalah mengembangkan pariwisata yang berwawasan lingkungan budaya. Untuk menciptakan pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan ada lima hal yang dapat ditempuh. Pertama, pembangunan fisik memperhatikan kekhasan Yogyakarta. Kedua, menghidupkan wisata budaya tradisional. Ketiga, memberikan pendidikan budaya pada generasi muda. Keempat, penghargaan terhadap warisan nenek moyang. Dan kelima, pengalokasian dana untuk pengembangan kebudayaan.

Pembangunan sektor pariwisata sedikit demi sedikit mengancam eksistensi dan kelestarian budaya lokal. Secara perlahan-lahan tetapi pasti masyarakat akan mengadopsi budaya yang lebih modern yang berasal dari luar budayanya sendiri. Hal itu menimbulkan masalah tersendiri. Kebanyakan wisatawan datang ke Yogyakarta bukan pertama-tama untuk menikmati suasana modern, melainkan justru untuk mengenal dan menikmati suasana dan kebudayaan lokal. Jika yang dicari adalah suasana modern, kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Batam menyediakannya. Maka, jika secara perlahan-lahan kebudayaan lokal tergeser, dapat dipastikan bahwa lama kelamaan Yogyakarta akan kehilangan aset untuk ditawarkan pada para wisatawan. Tak ada lagi kekhasan Yogyakarta yang dapat dikedepankan untuk menarik wisatawan. Persoalan tersebut perlu dicari solusinya. Pengembangan

pariwisata Yogyakarta perlu diarahkan pada pengembangan pariwisata yang berorientasi pada pelestarian budaya.

Kota pariwisata adalah salah satu *icon* yang melekat kuat pada kota Yogyakarta. Namun, ada beberapa hal yang perlu ditinjau lebih lanjut seputar dunia kepariwisataan kota Yogyakarta.

- a. Budaya lokal. Wisata kota Yogyakarta yang berbasis budaya lokal merupakan daya tarik utama yang masih dapat dioptimalkan. Urgensi keberadaan pranata hukum pemeliharaan identitas kota menjadi prioritas agar *icon-icon* budaya lokal tetap terjaga. Beberapa aset PT KA di Yogya yang akan dibenahi untuk kemudian dikembangkan adalah kawasan Stasiun Tugu hingga Malioboro, stasiun-stasiun tua dari zaman Nederlands-Indische Spoorweg Maatschappij (NIS) di abad 19 dan 20.
- b. Kawasan Stasiun Tugu hingga Malioboro menyisakan bangunan-bangunan lama, juga semacam gudang dalam kondisi memprihatinkan. Pengembangan sub kawasan Stasiun Tugu merupakan rencana terpadu dengan pihak Pemprov DIY, Pemkot, dan Kraton Yogyakarta.
- c. Kegiatan budaya. Permintaan akan adanya kegiatan/event budaya yang bersifat regular dan berkesinambungan semakin meningkat. Beberapa contoh kegiatan budaya, seperti: Jogja Java Carnival dan Sekaten, mampu menarik perhatian wisatawan dalam dan luar kota, bahkan mancanegara.
- d. Akses wisata. Akses ke lokasi wisata dan sarana pendukung lainnya perlu ditingkatkan. Penambahan shelter dan route Transjogja, penyediaan rambu-rambu lalu lintas yang jelas, dan penunjuk arah lokasi obyek wisata yang informatif, serta perluasan kawasan parkir merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menunjang kepariwisataan kota Yogyakarta.
- e. Promosi wisata. Kegiatan pariwisata melalui promosi dan kekuatan jejaring perlu ditingkatkan.
- f. Wisata malam. Kegiatan wisata malam yang masih potensial untuk dikembangkan mengingat semakin meningkatnya minat masyarakat baik dari dalam maupun dari luar wilayah Kota Yogyakarta terhadap wisata ini. Namun demikian pengembangannya harus tetap dalam koridor budaya dan nilai-nilai luhur Kota Yogyakarta

Beberapa isu strategis bidang perdagangan meliputi:

- a. Pengespor langsung. Mengembangkan potensi Kota Yogyakarta sebagai daerah pengekspor langsung. Selama ini Kota Yogyakarta masih menjadi daerah pengekspor sekunder, artinya prouk-produk dari wilayah ini lebih banyak di jual ke Kota yang menjadi pengekspor utama seperti Bali, sebelum di ekspor keluar negeri. Hal ini menyebabkan jalur distribusi yang lebih panjang bagi produk lokal seperti hasil kerajinan untuk dapat mengambil pasar internasional. Untuk menyikapi hal tersebut maka perlu dikembangkan potensi Kota Yogyakarta agar dapat menjadi daerah pengekspor utama produk kerajinan dan lainnya.
- b. Persaingan ketat antara pasar modern dan pasar tradisional. Perkembangan pasar modern yang menawarkan berbagai kelebihan tidak terbendung. Keberadaan pasar ini membawa dua dampak baik positif maupun negatif. Perkembangan yang tidak dikendalikan dan diarahkan akan mengancam pasar tradisional sebagai pemain lama dengan segala *image* yang melekat kepadanya. Namun di sisi lain pasar modern juga berperan sebagai pesaing yang menstimulus pasar tradisional untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan daya saingnya. Kondisi ini merupakan tantangan bagi pemerintah untuk dapat mengatur dan memberi ruang gerak yang adil dan seimbang bagi perkembangan dua pasar tersebut untuk menciptakan kepuasan bagi semua pihak termasuk masyarakat sebagai konsumen.
- c. Kebutuhan akan adanya payung hukum untuk mengatur persaingan pasar modern dan tradisional atau persaingan antar mereka sendiri. Persaingan antara pasar modern dan tradisional yang semakin ketat membutuhkan pengaturan oleh pemerintah agar persaingan berjalan adil dan tidak saling meniadakan. Kewenangan pemerintah di era otonomi daerah ini menjadi lebih leluasa untuk menciptakan produk hukum yang lebih berkeadilan dan tepat sasaran.
- d. Kebutuhan peningkatan pengendalian pasar modern.
- e. Menggiatkan promosi pasar tradisional dengan *image* harga murah. Promosi pasar tradisional harus memiliki target yang jelas, apakah akan menyasar konsumen akhir atau konsumen perantara. Hal ini penting agar promosi dapat

memberikan efek yang nyata terhadap perkembangan pasar tradisional dan mampu memberdayakan potensi yang dimilikinya.

Untuk menunjang kegiatan promosi pasar tradisional dalam rangka meningkatkan daya saing, maka telah dilakukan beberapa usaha antara lain: (i) *Brand Development* Pasar Tradisional, (ii) telah dibangun *semibasement* untuk sebagian Pasar Tradisional, (iii) dilakukan pekan belanja berhadiah, (iv) penciptaan kebersihan, keamanan, kenyamanan dan ketertiban pasar.

Pengembangan industri jasa berkaitan dengan industri hiburan dan rekreasi serta industri perseorangan dan rumah tangga. Dalam pengembangan ekonomi kerakyatan pengembangan industri jasa perseorangan dan rumah tangga perlu dikembangkan untuk dapat seluas-luasnya memberikan akses berusaha. Selama ini industri jasa perseorangan dan rumah tangga yang berkembang adalah jasa kebutuhan yang berkaitan dengan pendidikan khususnya perguruan tinggi.

Pengembangan sektor industri potensial berkembang ke arah industri kreatif, yaitu industri yang berkaitan dengan gaya hidup. Pengembangan industri kreatif dapat berupa kegiatan industri dengan skala rumah tangga, dan akan berjalan baik apabila dilakukan dengan adanya kerjasama yang saling menguntungkan antara usaha skala kecil dan besar.

Pemberdayaan pelaku industri kreatif melalui pelatihan yang terfokus dan terukur. Melakukan atau menyelenggarakan pelatihan dengan tema yang spesifik sehingga dapat memenuhi kebutuhan di pasar tenaga kerja. Hal ini mengingat industri kreatif memerlukan tingkat pemahaman dan ketrampilan yang cukup tinggi terkait dengan proses produksinya. Profesionalisme dan kehandalan tenaga kerja sangat dibutuhkan untuk menciptakan produk yang memiliki unsur kreatifitas sekaligus nilai ekonomi yang tinggi.

Penetapan cagar budaya sebagai citra kota. Dengan demikian diharapkan terdapat penataan dan pengelolaan cagar budaya sehingga dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya pada cagar budaya. Dengan adanya penataan dan pengelolaan cagar budaya diharapkan kegiatan pariwisata dapat berkembang dan dapat menarik banyak wisatawan baik lokal maupun internasional.

4.2.11. Kota yang nyaman dan aman

Luasan Ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta pada tahun 2011 telah mencapai 32,46% dengan luas taman sebesar 63.305m², dimana 17,96% merupakan RTH publik dan 14,59% RTH privat (BLH Kota Yogyakarta, 2011). Meskipun sudah melebihi 30% seperti yang diamanatkan dalam undang-undang tetapi untuk RTH publik belum mencapai target. Dalam undang-undang disebutkan bahwa untuk RTH publik harus mencapai 20%. Sedangkan untuk RTH privat melebihi target.

Merujuk pada isu-isu global, baik yang tercantum pada *Millenium Development Goals* (MDGs) maupun Agenda 21, terdapat beberapa isu lingkungan penting di Kota Yogyakarta yang selaras dengan isu-isu global, dan harus mendapat perhatian lebih. *Goal* ke-7 MDGs menyebutkan tentang *Ensure Environmental Sustainability*, atau jaminan keberlanjutan lingkungan. *Goal* atau tujuan ke-7 MDGs tersebut memiliki target untuk mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam program dan kebijakan negara, dan mengembalikan sumber daya yang hilang.

Isu strategis lingkungan yang ada di Kota Yogyakarta, jika dikaitkan dengan isu global dapat dikelompokkan menjadi 4 fokus:

Isu terkait perlindungan terhadap atmosfer didasari atas kesepakatan internasional Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer tahun 1985, Montreal Protocol on Substances yang merupakan amandemen dari Deplete the Ozone Layer tahun 1987, United Nations Framework Convention on Climate Change tahun 1992 dan instrumen internasional dan regional lainnya.

Isu perlindungan atmosfer ditujukan untuk menekan pemicu perubahan iklim dan kebocoran lapisan ozon, melalui mengurangi, mengevaluasi, dan mengatur ulang aktifitas penyebab emisi. Agenda 21 memfokuskan program perlindungan atmosfer pada 4 sektor berikut:

a. Pengembangan energi terbarukan, efisiensi dan konsumsi energi.

Energi sangat penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial, serta meningkatkan kualitas hidup. Banyak sumber energi tersedia di bumi ini, tapi manusia sering memanfaatkan sumber energi tersebut secara tidak berkelanjutan. Kebutuhan untuk mengontrol emisi mendasari efisiensi produksi dan konsumsi energi. Pada skala lokal pengembangan energi dari limbah merupakan isu penting bagi pemerintah Kota Yogyakarta. Masyarakat

Kota Yogyakarta dengan pengalamannya mengelola sampah komunal merupakan peluang bagi pengembangan energi terbarukan dari kegiatan pengolahan limbah.

b. Pengurangan Emisi dari Sektor Transportasi.

Transportasi juga memegang peran penting dalam menjalankan roda pembangunan ekonomi dan sosial. Namun, kebutuhan akan transportasi memiliki kecenderungan untuk terus meningkat, padahal sektor transportasi juga turut menyumbang emisi. Sehingga perlu pengkajian ulang tentang sistem transportasi yang ada, dan membutuhkan design yang lebih efektif untuk sistem transportasi dimasa mendatang. Trans-Jogja merupakan salah satu upaya pemerintah Kota Yogyakarta untuk menata transportasi yang lebih baik. Inovasi sumber energi yang terbarukan bagi Trans-Jogja perlu mendapat perhatian pada lima tahun mendatang. Program SEGOSEGAWA juga merupakan program yang dalam lima tahun mendatang memerlukan pengembangan, khususnya dalam menyediakan jalur sepeda yang lebih aman dan nyaman. Kemungkinan Trans-Jogja diberi fasilitas untuk mengangkut sepeda (di dalam atau di luar bus) juga menjadi isu pengurangan emisi yang penting.

c. Peningkatan upaya sekuestrasi gas rumah kaca

Upaya sekuestrasi dapat dilakukan dengan mengembangkan tutupan vegetasi. Di daerah perkotaan upaya ini dilakukan dengan mengoptimalkan lahan yang masih terbuka untuk ruang terbuka hijau baik yang privat maupun yang ruang publik. Walaupun RTH tidak mungkin mampu menyerap emisi yang dihasilkan oleh penduduk Kota Yogyakarta, keberadaan RTH dapat memperbaiki iklim mikro kota dan estetika kota. Dengan demikian perluasan RTH di area publik dan privat merupakan isu masih penting untuk diangkat pada lima tahun mendatang.

Selain perluasan RTH, RTH harus dikembangkan sebagai fungsi habitat satwa dan pengembangan ekonomi lokal untuk mewujudkan terwujudnya kampung hijau dan kota hijau.

Jika dirinci, isu strategis Lingkungan Kota Yogyakarta dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap atmosfer adalah:

- a) Peningkatan jumlah penduduk dan aktifitasnya, terkait konsumsi bahan bakar fosil (listrik, transportasi, memasak)

- b) Alternatif energi terbarukan dan ramah lingkungan disektor transportasi
- c) Pengembangan sistem transportasi masal yang dapat mengurangi emisi gas rumah kaca.
- d) *Zero waste* dalam industri dan rumah tangga
- e) Peningkatan penyerapan karbon Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Sumber air tawar merupakan komponen penting dari hidrosfer bumi dan merupakan bagian yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan keseluruhan ekosistem.

Air dibutuhkan oleh semua aspek kehidupan. Sehingga keberadaan air harus dipastikan ketersediaannya dengan kualitas yang baik, karena dengan demikian akan memelihara keseluruhan populasi di planet ini, selain itu juga memelihara fungsi hidrologi, biologi dan kimia ekosistem, menyesuaikan aktifitas manusia dalam pemanfaatan air sesuai batas-batas kemampuan alam, dan melawan vektor penyakit yang hidup di air.

Isu terkait perlindungan ketersediaan air tawar di Kota Yogyakarta secara kualitas dan kuantitas, terbagi menjadi beberapa sektor:

a. Terpeliharanya imbuhan air tanah

Pemanfaatan Kota Yogyakarta sebagai areal terbangun telah menyebabkan infiltrasi air air hujan yang berfungsi sebagai imbuhan air tanah menjadi terganggu. Kondisi ini jika dibiarkan tanpa terkendali akan menyebabkan imbuhan air tanah berkurang dan selanjutnya akan mengancam ketersediaan air tanah. Sebagian besar penduduk Kota Yogyakarta masih tergantung pada air tanah, sehingga ancaman terhadap keberadaan air tanah menjadi ancaman serius bagi penduduk Kota Yogyakarta. Upaya-upaya untuk tetap menjaga imbuhan air tanah melalui pembangunan biopori sumur resapan menjadi isu strategis yang mutlak harus dijadikan perhatian. Manajemen aliran permukaan harus diupayakan dengan semaksimal mungkin sehingga volume infiltrasi air ke dalam tanah dapat semakin meningkat.

b. Pengendalian pencemaran air tanah

Isu penting kedua terkait dengan perlindungan terhadap ketersediaan sumber air adalah upaya penjaminan kualitas air tanah di wilayah Kota Yogyakarta. Upaya ini hanya dapat dilakukan dengan cara pengendalian pencemaran air tanah. Pencemaran air tanah sebagian besar berasal dari

bakteri *e-coli* dari tanki septik penduduk dan limbah cair domestik maupun industri. Upaya untuk mengurangi limbah yang terinfiltrasi langsung ke dalam air tanah merupakan isu strategis yang harus tetap diangkat sebagai program pembangunan Kota Yogyakarta, yaitu melalui peningkatan kapasitas IPAL komunal dan IPAL terpadu serta fasilitas *water purifier*.

Jika dirinci, isu strategis lingkungan Kota Yogyakarta dalam kaitannya dengan perlindungan ketersediaan air tawar secara kualitas maupun kuantitas adalah:

- a. Peningkatan kebutuhan air bersih
- b. Ketersediaan air tanah yang terus menurun
- c. Pencemaran air permukaan dan air tanah oleh limbah cair rumah tangga, industri, maupun pertanian
- d. Sumur resapan dan biopori
- e. Kerusakan ekosistem akuatik sungai
- f. Penanganan air limbah dan penyediaan sanitasi lingkungan
- g. Gerakan program kali bersih
- h. Sarana saluran drainase yang belum tertata akibat peralihan lahan pertanian menjadi lahan permukiman
- i. Pengelolaan air limbah pedagang kaki lima
- j. Pengembangan MCK Komunal
- k. Sarana saluran limbah rumah tangga/*asseiner*ing sebagai pendukung kebersihan lingkungan
- l. Kesadaran masyarakat tentang fungsi sumur resapan air hujan

Perilaku masyarakat terhadap lingkungan merupakan isu strategis yang harus menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan Kota Yogyakarta. Membangun perilaku ramah lingkungan merupakan proses yang panjang dan harus dimulai sejak dini, bertahap dan berkesinambungan. Upaya-upaya strategis dalam membangun perilaku ramah lingkungan di Kota Yogyakarta dapat dilakukan dengan:

- a. Kampanye lingkungan mengenai kota/kampung hijau, kali bersih, langit biru dan SEGOSEGAWA
- b. Peningkatan kapasitas kader lingkungan (satpol PP pelanggaran ringan, motivator, fasilitator, kader, jumlah, jumenta dan lain lain)

- c. Peningkatan peran dunia usaha/retail dalam pengurangan penggunaan plastik berwarna dan bahan tidak dapat didaur ulang.

Modal merupakan faktor produksi yang krusial dalam kegiatan ekonomi di suatu daerah. Semakin besar akumulasi modal yang ada, kegiatan ekonomi akan dapat memproduksi output pada tingkat yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, beberapa hal perlu diperhatikan terkait dengan penanaman modal di kota Yogyakarta.

- a. Pelayanan jasa dengan dukungan sistem informasi pelayanan publik dan penciptaan iklim investasi. Keberadaan pelayanan yang baik serta iklim investasi yang kondusif akan menarik perhatian investor untuk melakukan penetrasi ke pasar bisnis Kota Yogyakarta.
- b. Pelayanan investasi yang terpadu dan terintegrasi perlu disediakan agar birokrasi penanaman modal tidak menghambat kelancaran baik dari segi perizinan hingga selesai.
- c. Pemetaan kebutuhan investasi sektoral. Pemetaan ini berfungsi untuk mengoptimalkan *multiplier effect* dari investasi. Pemetaan sektor potensial, khususnya sektor jasa di kota Yogyakarta, akan membantu pemerintah dalam manajemen investasi. Kemudian, keberhasilan investasi ada satu sektor tertentu, jasa, akan membawa dampak positif bagi sektor yang lain.
- d. Wilayah potensial investasi. Selain pemetaan sektor, pemetaan wilayah potensial juga perlu dilakukan agar sasaran investasi dapat tercapai.
- e. Pendukung investasi. Aspek pendukung seperti kepastian hukum, kemudahan perijinan, stabilitas politik, kemudahan memperoleh tenaga kerja, insentif pada bidang pariwisata, dan pengelolaan investasi akan menentukan seberapa besar penanaman modal yang dapat diusahakan di kota Yogyakarta.

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Visi Pembangunan

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka pemerintahan daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam kerangka besar itulah, visi, misi dan program kerja walikota terpilih untuk lima tahun ke depan merupakan tahap kedua Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 – 2025, diarahkan untuk membawa masyarakat Kota Yogyakarta menuju suatu kehidupan masyarakat yang sejahtera, berakhlak, bermartabat, berkarakter dan bermakna. Maka visi pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2012 – 2016 adalah :

*“Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas,
berkarakter dan Inklusif, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa,
yang Berwawasan Lingkungan
dan Ekonomi Kerakyatan”*

Visi Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016 ini menjadi arah cita cita bagi pembangunan yang secara sistematis bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan Kota Yogyakarta . Penjelasan dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

- Pendidikan berkualitas
 - Penyelenggaraan pendidikan di Kota Yogyakarta harus memiliki kualitas yang berstandar internasional
 - Memiliki keunggulan kompetitif dalam penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan ilmu dan teknologi

- Mampu menciptakan manusia Indonesia seutuhnya yaitu keseimbangan antara kecerdasan inteligensia (Intelligensia Quotient), emosional (Emotional Quotient), spiritual (Spiritual Quotient) dan kebugaran dan kesehatan fisik (kinestetik);
- Dikembangkan dengan dukungan sistem kebijakan pendidikan yang unggul
- Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai
- Pendidikan berkarakter
 - Mengembangkan potensi kalbu/ nurani/ afektif peserta didik sebagai manusia dan warganegara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa dalam sistem yang berakar pada budaya lokal dan menghormati kemajemukan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Bhineka Tunggal Ika);
 - Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius
 - Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa
 - Mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan
 - Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreatifitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuata
- Pendidikan inklusif
 - Sistem pendidikan yang mengembangkan kreatifitas dengan memberikan akses kepada semua orang dalam satu sistem yang mencakup sekolah, program nonformal/informal, pendidikan keluarga dan masyarakat serta melibatkan seluruh masyarakat secara penuh
 - Merupakan sebuah proses dan tujuan yang menggambarkan kualitas atau karakteristik pendidikan untuk semua
 - Mengembangkan sistem pendidikan formal, non formal dan in formal, dengan merespon keberagaman, mengidentifikasi hambatan belajar yang dihadapi individu maupun kelompok anak.
 - Pendidikan inklusif bukan hanya menyangkut metode dan sistem, tetapi menyangkut nilai-nilai dan keyakinan mendasar tentang pentingnya

menghargai dan menghormati perbedaan, tidak mendiskriminasi, dan berkolaborasi dengan orang lain untuk menciptakan dunia yang lebih adil

- **Pariwisata berbasis budaya**
 - Kegiatan pariwisata di Kota Yogyakarta dikembangkan dengan dasar dan berpusat pada budaya Jawa yang selaras dengan sejarah dan budaya Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat maupun Kadipaten Pakualaman, kearifan lokal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa
 - Menyempurnakan dan meningkatkan jaringan kerjasama wisata dengan pihak lain
 - Menjadikan daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara
 - Peningkatan kegiatan pariwisata dilaksanakan dengan menciptakan inovasi-inovasi yang tetap berlandaskan pada wisata budaya, wisata bangunan bersejarah, wisata pendidikan, wisata konvensi dan wisata belanja
- **Pusat pelayanan jasa**
 - Kota Yogyakarta sebagai pusat pelayanan jasa yang meliputi jasa penunjang pendidikan dan pariwisata, perdagangan, pemerintahan, keuangan, kesehatan, transportasi dan komunikasi harus dibangun lebih maju dan mampu mandiri
 - Memberikan kontribusi dan dominasi yang lebih besar dari daerah lain di Indonesia
 - Peningkatan kegiatan pelayanan jasa dilakukan dengan memperkuat perekonomian kota pada sektor andalan menuju keunggulan kompetitif
 - Membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan, dengan tetap mempertahankan dan mengembangkan industri kecil dan menengah
- **Berwawasan lingkungan**
 - Upaya sadar, terencana dan berkelanjutan
 - Memadukan lingkungan alam dengan lingkungan nilai-nilai religius, sosial, budaya dan kearifan lokal ke dalam proses pembangunan
 - Menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan
- **Ekonomi kerakyatan**
 - Mendorong dan memfasilitasi berjalannya ekonomi kerakyatan yang berkualitas, berkelanjutan, berbasis wilayah, dan berpihak kepada masyarakat Kota Yogyakarta

- Ekonomi kerakyatan yang dimaksud adalah perekonomian yang senantiasa menyelaraskan antara kondisi dan potensi daerah dengan kinerja ekonomi
- Ekonomi daerah akan tumbuh dan berkembang, berbasis pada ekonomi rakyat dan mampu memberikan dampak nyata kepada rakyat

5.2 Misi Pembangunan

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2012 – 2016 tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan beserta pokok pokok penjelasannya sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
 - Memperkuat tata kelola pemerintahan Kota Yogyakarta yang baik, bersih, berkeadilan, demokratis, dan berlandaskan hukum
2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas
 - Mewujudkan pendidikan untuk semua (inklusif)
 - Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat
 - Memperkuat pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan aksesibel bagi seluruh warga Yogyakarta termasuk warga yang mempunyai perbedaan kemampuan (difabel)
3. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dengan gerakan Segoro Amarto
 - Mengembangkan ekonomi kerakyatan
 - Memperkuat masyarakat Kota Yogyakarta yang toleran, inklusif, bermoral, beretika, beradab dan berbudaya
 - Memasyarakatkan dan membudayakan gerakan Segoro Amarto
4. Mewujudkan daya saing daerah yang kuat
 - Memperkuat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan yang berkualitas, berkarakter, dan inklusif
 - Memperkuat dan mengembangkan keterpaduan Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan
 - Memperkuat daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa
 - Memperkuat Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan
 - Memperkuat Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai

5.3 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan pada visi dan misi pembangunan daerah Kota Yogyakarta tahun 2012 – 2016 maka disusun tujuan pembangunan selama lima tahun kedepan sebagai berikut sebagaimana sebagai berikut :

- 5.3.1 Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dengan sasaran :**
- Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
 - Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah
- 5.3.2 Meningkatkan kualitas pelayanan publik**
- Terwujudnya pendidikan inklusif untuk semua
 - Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau
 - Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai
 - Terwujudnya pelayanan administrasi publik yang baik
- 5.3.3 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan gerakan Segoro Amarto dalam rangka penanggulangan kemiskinan**
- Terwujudnya peningkatan kualitas ekonomi masyarakat
 - Terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat
- 5.3.4 Memperkuat daya saing daerah untuk memajukan kota Yogyakarta**
- Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul
 - Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat
 - Terwujudnya daya dukung pengembangan usah

Tabel 5.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, berkarakter dan Inklusif, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan

Misi	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
		Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah
Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Terwujudnya pendidikan inklusif untuk semua
		Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau
		Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai
		Terwujudnya pelayanan administrasi publik yang baik
Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dengan gerakan Segoro Amarto	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan gerakan Segoro Amarto dalam rangka penanggulangan kemiskinan	Terwujudnya peningkatan kualitas ekonomi masyarakat
		Terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat
Mewujudkan daya saing daerah yang kuat	Menguatkan daya saing daerah untuk memajukan kota Yogyakarta	Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul
		Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat
		Terwujudnya daya dukung pengembangan usaha

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6.1 Strategi Umum

Strategi umum yang diambil dalam rangka mencapai visi, dan mewujudkan misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2012-2016 yaitu meliputi :

1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas kinerja Pemerintah Daerah agar mampu menjalankan kewajiban konstitusionalnya, yaitu memberikan perlindungan dan pelayanan, serta memberdayakan segenap warga masyarakat kota Yogyakarta. Suatu Pemerintah Daerah yang baik adalah Pemerintah Daerah yang terbuka, dapat dipercaya, partisipatif dan senantiasa berjalan di atas prinsip-prinsip demokrasi. Suatu pemerintah yang mendapatkan kepercayaan dari rakyat dan bersedia untuk membangun kemitraan yang luas. Hal ini akan menjadi modal dasar bagi terciptanya pembangunan yang mensejahterakan masyarakat, dan memastikan masyarakat mendapatkan hak-hak dasarnya.
2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia di Kota Yogyakarta. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia menjadi dasar bagi pembangunan dan bersifat sangat strategis bagi pembangunan Kota Yogyakarta di masa mendatang, mengingat sumberdaya alam Kota Yogyakarta yang terbatas, dan tidak menjanjikan secara ekonomis. Barangkali, kita harus banyak belajar dari negeri tetangga, yang mampu mengembangkan sumberdaya manusia, dan akhirnya mampu menjadi bangsa yang besar dan berkarakter. Pemerintah Kota Yogyakarta bersama segenap warganya harus menyatukan tekad untuk membangun manusia Indonesia dimulai dari Kota Yogyakarta.
3. Mendorong dan memfasilitasi berjalannya ekonomi kerakyatan yang berkualitas, berkelanjutan, berbasis wilayah, dan berpihak kepada masyarakat Kota Yogyakarta. Ekonomi kerakyatan yang dimaksud adalah perekonomian yang senantiasa menyelaraskan antara kondisi dan potensi daerah dengan kinerja ekonomi. Fokusnya adalah menggerakkan perekonomian yang mampu

mengurangi angka kemiskinan dan memperluas lapangan kerja, serta mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Dengan ini diharapkan ekonomi daerah akan tumbuh dan berkembang, berbasis pada ekonomi rakyat dan mampu memberikan dampak nyata kepada rakyat.

6.2 Strategi dan arah kebijakan

Demi tercapainya visi pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2012-2016 maka perlu ditetapkan strategi dan arah kebijakan untuk merumuskan tentang arah kebijakan pembangunan tahunan atau tahapan pembangunan pertahunnya yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Hal ini nantinya akan memudahkan dan membantu dalam pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 6.

Tabel 6.1

Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Misi 1

Visi : Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, berkarakter dan Inklusif, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan

Misi : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan internal SKPD/unit kerja	Meningkatkan kualitas pengelolaan kegiatan internal SKPD/unit kerja yang menyangkut administrasi, kinerja, SDM, sarana prasarana dan keuangan
		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	Mengoptimalkan pelaksanaan analisis jabatan dan memantapkan kelembagaan
			Menyediakan pedoman etika penyelenggaraan pemerintahan dan budaya kerja
			Mengembangkan pelayanan publik menuju pencitraan pelayanan prima
		Memperkuat pelaksanaan tata pemerintahan dan pelayanan berbasis kewilayahan	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Pewujudan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Mengoptimalkan penyelesaian persoalan hukum
		Menyebarluaskan dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk hukum daerah	
		Mengoptimalkan pengkajian produk hukum daerah dan data hukum	
		Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif	Mengintensifkan pembinaan dalam rangka pengendalian internal
		Mengembangkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di seluruh SKPD	
		Peningkatan pendapatan daerah	Meningkatkan kualitas kebijakan pengembangan pendapatan daerah
		Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah	
		Melaksanakan intensifikasi pendapatan asli daerah	
		Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah	
		Peningkatan efektifitas dan efisiensi belanja daerah	Melaksanakan perencanaan penganggaran belanja berbasis kinerja

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Melaksanakan pengendalian belanja sesuai dengan dokumen anggaran
		Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan	Meningkatkan konsistensi perencanaan pembangunan yang partisipatif
		Menguatkan jejaring penelitian dan pengembangan pembangunan	
		Mengembangkan data dan statistik pembangunan	
		Mengefektikan pengendalian dan evaluasi pembangunan	
		Peningkatan pelayanan umum, komunikasi dan informasi	Memperluas jangkauan promosi dan publikasi program pembangunan
		Mengembangkan teknologi informasi dan aplikasi telematika dalam rangka e-government	
		Meningkatkan pelayanan administrasi umum, kerumahtanggan, dan keprotokolan pemerintah daerah	
		Mengoptimalkan penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	
		Mengembangkan dan meningkatkan kualitas kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Mengoptimalkan fungsi kesekretariatan DPRD
	Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah	Pengelolaan manajemen kepegawaian yang mengacu pada kebutuhan pelayanan prima	Menyediakan regulasi bagi pengembangan manajemen kepegawaian dan pengembangan pola karir
			Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian yang transparan, cepat, tepat dan akuntabel
			Menata SDM aparatur untuk meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat khususnya di wilayah
		Peningkatan kapasitas SDM aparatur	Mengefektifkan penyelenggaraan diklat dan pengiriman tugas belajar
	Meningkatkan kesejahteraan pegawai		

Tabel 6.2
Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Misi 2

Visi : Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, berkarakter dan Inklusif, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan

Misi : Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Terwujudnya pendidikan inklusif untuk semua	Peningkatan akses pendidikan melalui pendidikan formal, non formal maupun informal	Menuntaskan wajib belajar 12 tahun dengan basis inklusif Menyediakan jaminan pendidikan
	Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau	Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
			Mengembangkan pelayanan puskesmas 24 jam dan rumah sakit tanpa kelas
			Meningkatkan kualitas ketersediaan sarana prasarana kesehatan dan kefarmasian
			Meningkatkan kesehatan keluarga dan reproduksi
			Meningkatkan perbaikan gizi masyarakat dan pembelian makanan tambahan bagi kelompok rentan dan anak sekolah
Mengurangi jumlah balita gizi buruk dengan penyelenggaraan rumah pemulihan gizi			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
		Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	Mengendalikan penyebaran penyakit menular dan tidak menular serta meningkatkan kewaspadaan dini terhadap kejadian luar biasa	
		Melakukan pengawasan dan pembinaan kesehatan lingkungan		
		Penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat	Menyediakan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin	
		Meningkatkan partisipasi jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat menuju universal coverage		
		Penyediaan regulasi dan sumber daya kesehatan	Melakukan pembinaan dan pelaksanaan regulasi pelayanan kesehatan	
		Meningkatkan sumber daya manusia kesehatan		
		Peningkatan upaya preventif dan promotif kesehatan	Meningkatkan peran serta masyarakat di bidang kesehatan menuju keluarga siaga dan terciptanya PHBS	
		Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai	Peningkatan penataan ruang yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	Meningkatkan cakupan rencana rinci tata ruang dan kawasan strategis kota
			Mengembangkan kawasan citrakota	
			Mengoptimalkan penataan kawasan sungai	
Peningkatan sarana dan prasarana perkotaan yang berkualitas dan inklusif	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan			
Meningkatkan kualitas talud/bronjong dan saluran pengairan				

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Meningkatkan kualitas sistem jaringan drainase
			Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana air limbah
			Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana persampahan
			Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar pemukiman berbasis kewilayahan
			Meningkatkan pemenuhan kebutuhan bangunan gedung pemerintah sesuai standar kebutuhan khususnya yang ada di wilayah dan berwawasan inklusif
		Peningkatan pelayanan pengendalian bahaya kebakaran serta penanggulangan bencana	Meningkatkan cakupan pelayanan kesiapsiagaan pengendalian bahaya kebakaran serta penanggulangan bencana
		Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kesiapsiagaan pengendalian bahaya kebakaran serta penanggulangan bencana	
		Peningkatan sistem transportasi perkotaan	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perhubungan
		Meningkatkan kualitas manajemen lalu lintas dan angkutan jalan	
		Meningkatkan penataan parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Terwujudnya pelayanan administrasi publik yang baik	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi publik	Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang sesuai dengan prinsip pelayanan prima

Tabel 6.3

Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Misi 3

Visi : Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, berkarakter dan Inklusif, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan

Misi : Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dengan gerakan Segoro Amarto

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan Segoro Amarto dalam rangka penanggulangan kemiskinan	Terwujudnya peningkatan kualitas ekonomi masyarakat	Peningkatan ekonomi masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan	Meningkatkan pembinaan koperasi dan lembaga keuangan mikro
			Meningkatkan kualitas sumber daya pelaku UMKM melalui fasilitasi permodalan, promosi, kerjasama usaha dan informasi usaha
			Menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan di masyarakat
	Terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat	Peningkatan pemberdayaan masyarakat yang berafirmatif gender	Meningkatkan ketahanan pangan dan pengawasan kualitas bahan makanan
			Meningkatkan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan
			Meningkatkan pemberdayaan, kualitas hidup serta perlindungan perempuan dan anak
		Meningkatkan potensi sumber kesejahteraan sosial	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Meningkatkan rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial
		Meningkatkan Gerakan Segoro Amarto dalam rangka penanggulangan kemiskinan	
		Peningkatan wawasan kebangsaan	Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan menuju bangsa yang berkarakter dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia
		Peningkatan kapasitas pemuda, prestasi dan sarana olahraga	Meningkatkan aktifitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pembinaan pengembangan olahraga

Tabel 6.4

Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Misi 4

Visi : Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, berkarakter dan Inklusif, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan

Misi : Mewujudkan daya saing daerah yang kuat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menguatkan daya saing daerah untuk memajukan kota Yogyakarta	Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul	Peningkatan kualitas pendidikan	Meningkatkan manajemen penyelenggaraan pendidikan berkualitas
			Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dalam menumbuhkan pendidikan karakter
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan
			Meningkatkan daya tarik perpustakaan dan budaya baca masyarakat
			Meningkatkan kualitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar sekaligus memberikan perlindungan ketenaga kerjaan
	Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat	Pengembangan pariwisata berbasis budaya	Meningkatkan promosi dan kerjasama pariwisata
			Mengembangkan ODTW dan wisata MICE

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
			Mengembangkan gerakan sadar wisata berbasis komunitas	
		Melestarikan nilai-nilai budaya kraton Yogyakarta sebagai modal sosial masyarakat		
		Pengembangan potensi ekonomi daerah	Mengembangkan industri kreatif	
		Meningkatkan revitalisasi pasar tradisional		
		Meningkatkan pertanian perkotaan berbasis kreatif hobbies		
		Meningkatkan fasilitasi pengembangan usaha bagi pedagang /usaha informal		
		Terwujudnya daya dukung pengembangan usaha	Pengembangan lingkungan yang kondusif bagi dunia usaha	Meningkatkan pelayanan perizinan sesuai dengan prinsip pelayanan terpadu yang pro investasi
		Menciptakan ketenteraman dan ketertiban yang kondusif		
		Peningkatan kualitas lingkungan hidup perkotaan sesuai dengan baku mutu	Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau publik dengan dominasi tanaman perindang	
		Meningkatkan pengendalian pencemaran lingkungan untuk pemangunan berkelanjutan dengan memperhatikan baku mutu udara, air dan tanah		

6.3 Strategi dan Arah Kebijakan Tata Ruang Wilayah

6.3.1. Umum

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Yogyakarta Tahun 2009-2029 yang disusun untuk kurun waktu 20 tahun mendatang, pengembangan ruang Kota Yogyakarta mengacu pada hierarki fungsional sesuai dengan RTRWN dan selaras dengan RTRW Provinsi. Sehingga dalam penataan ruang Kota Yogyakarta tidak terlepas dari penataan ruang di wilayah sekitarnya, yaitu

- § Dalam konteks nasional Kota Yogyakarta adalah Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang membutuhkan keterkaitan aksesibilitas antarwilayah secara optimal.
- § Dalam konteks Provinsi D.I Yogyakarta merupakan Ibukota Provinsi, sehingga dituntut terjadinya aksesibilitas yang tinggi ke sistem kota-kota dibawahnya (Sleman, Bantul, Kulonprogo dan Gunungkidul) maupun pusat-pusat pengembangan lainnya;
- § Fungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional dan Ibukota Provinsi dituntut adanya keterkaitan Kota Yogyakarta dengan kota-kota *hinterland* di sekitarnya yang berhimpitan untuk membagi beban dan fungsi-fungsi kegiatan perkotaan secara hierarkis dan terintegrasi.

Tujuan penataan ruang Kota Yogyakarta adalah mewujudkan :

- a. ruang wilayah Daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- b. keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah
- c. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang Daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
- d. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- e. terciptanya ruang-ruang kota yang mendukung nilai-nilai sejarah, budaya, maupun tradisi kehidupan masyarakat Yogyakarta;
- f. terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang kota untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;
- g. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

6.3.2. Rencana Struktur Ruang

Tujuan utama penataan struktur tata ruang Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- § Memantapkan fungsi Kota Yogyakarta dan kota-kota di sekitarnya untuk mendukung fungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional yaitu sebagai pusat koleksi distribusi barang dan jasa dalam melayani wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta yang terintegrasi dengan Pusat-pusat Kegiatan Wilayah di sekitarnya dan Pusat-Pusat Kegiatan Nasional lainnya di Indonesia serta Internasional,
- § Meningkatkan aksesibilitas Kawasan Aglomerasi Yogyakarta dengan pusat kegiatan wilayah dan lokal di Provinsi D.I. Yogyakarta serta kota-kota nasional dan internasional melalui keterkaitan sistem jaringan transportasi primer baik jaringan jalan darat (arteri/kolektor primer),
- § Mempertahankan keberadaan kawasan lindung serta mengoptimalkan potensi sumber daya alam dengan tetap memperhatikan azas kelestarian, dan budaya setempat,
- § Mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi dan seimbang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung pertumbuhan dan perkembangan Kawasan Aglomerasi Yogyakarta,
- § Mengembangkan sistem pusat-pusat pelayanan kawasan yang terintegrasi dan berhierarki dengan pusat pelayanan lainnya dan sejalan dengan kebijaksanaan Pembangunan Nasional, Provinsi D.I. Yogyakarta serta Kabupaten/Kota terkait,
- § Mengembangkan beberapa ruas jalan baru untuk selanjutnya diintegrasikan dengan jalan arteri primer dan kolektor primer dan jalan fungsi sekunder yang telah ada di Kota Yogyakarta untuk meningkatkan aksesibilitas yang merata ke seluruh pusat-pusat kegiatan dan ke luar kota sekaligus mengurangi beban transportasi di Kota Yogyakarta yang didukung sistem terminal penumpang yang berhierarki,
- § Sistem pusat-pusat pelayanan mengacu pada analisis hierarki pusat-pusat kegiatan yaitu Yogyakarta sebagai Pusat Kota sekaligus PKN yang ditunjang oleh empat Kota sebagai PKL (Sleman, Bantul, Kulonprogo dan Gunungkidul), dan kota-kota ibukota kecamatan serta kota baru atau pusat kawasan pariwisata sebagai Pusat Kegiatan Lokal lainnya.
- § Pola pemanfaatan ruang untuk Kawasan Lindung dan Kawasan Ruang Terbuka Hijau atau Jalur Hijau yang telah ditetapkan dalam UU No 26 tahun 2007, serta lahan pertanian sawah beririgasi merupakan limitasi pengembangan dan harus dijaga kelestariannya dan target kawasan terbuka secara total adalah 60% dan khusus untuk Kota Inti adalah 35% .
- § Pengembangan kawasan pariwisata tetap mempertahankan yang telah ada dan membatasi dan mengendalikan dengan ketat pengembangan baru di wilayah provinsi dan Kota Yogyakarta, dan pengarahan pada kawasan efektif pariwisata di Kecamatan Kraton dan Kota Gede sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang berkaitan

- § Mengintegrasikan sistem pelayanan beberapa infrastruktur yang dapat dilakukan seperti integrasi pelayanan air bersih, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah dan lainnya berdasarkan kesepakatan antar kabupaten/kota terkait
- § Mengembangkan Kawasan Prioritas untuk mengantisipasi kawasan yang cenderung tumbuh cepat, mempunyai kepentingan ekonomi, lingkungan dan sosial budaya
- § Mengembangkan konsep kelembagaan kerjasama antarwilayah Kabupaten/Kota dalam penataan ruang Kawasan Aglomerasi Kota Yogyakarta.
- § Menciptakan keserasian pembangunan dengan Kota-Kota di dalam wilayah pengembangan Provinsi D.I. Yogyakarta.
- § Mengembangkan konsep kelembagaan kerjasama penataan ruang dan pembangunan antarKabupaten/kota dalam Kawasan Aglomerasi Yogyakarta atau wilayah Kabupaten/Kota lainnya.

A. Sistem Pusat-Pusat Pelayanan Kota Yogyakarta

Sistem pusat-pusat pelayanan untuk Kota Yogyakarta direncanakan membentuk pusat kota, subpusat kota, dan pusat pelayanan lingkungan. Pusat Kota berlokasi di kawasan Kecamatan Danurejan, Kecamatan Gedongtengen, dan Kecamatan Gondomanan, subpusat kota tersebar di seluruh kecamatan dimana masing-masing kecamatan memiliki satu subpusat, sedangkan pusat pelayanan lingkungan tersebar di seluruh kelurahan dan sekitar kawasan permukiman. Untuk menciptakan integrasi antara pusat kota, subpusat kota dan pusat pelayanan lingkungan maka dibutuhkan prasarana penghubung seperti jalan dan jembatan.

B. Fungsi Pusat Permukiman Kota Yogyakarta

Secara umum, pusat permukiman di Kota Yogyakarta mempunyai fungsi antara lain: pusat administrasi dan pemerintahan provinsi dan kota, pusat perdagangan jasa dan pemasaran, pusat perhubungan dan komunikasi, pusat budaya dan pariwisata, pusat produksi pengolahan, pusat pelayanan sosial (kesehatan, pendidikan, agama, dll), pusat pendidikan, dan pusat kegiatan pariwisata. Kelengkapan prasarana dan sarana yang terdapat pada masing-masing pusat akan menjadikan Kota Yogyakarta sebagai pusat dari wilayah *hinterland*-nya. Di pihak lain terdapat pengelompokan pusat-pusat yang membentuk fungsi kota berdasarkan lingkup pelayanan administrasi pemerintahan (ibukota provinsi, ibukota kabupaten/kota, ibukota kecamatan, dan lainnya).

C. Rencana Jaringan Transportasi

Kota Yogyakarta sebagai kota yang besar, dituntut untuk memiliki jaringan transportasi yang dapat menjamin pergerakan orang dan barang secara terus menerus. Rencana jaringan transportasi Kota Yogyakarta meliputi rencana sistem transportasi darat, rencana sistem transportasi udara dan prasarana transportasi.

Dalam rencana sistem transportasi darat, masing-masing jalan di Kota Yogyakarta memiliki fungsi jalan yaitu jalan arteri primer, jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder, jalan lokal dan jalan lingkungan. Jalan Arteri Primer di Kota Yogyakarta menghubungkan antar PKN dengan PKW, sehingga jalan yang masuk dalam arteri primer adalah jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan Provinsi DIY (dalam hal ini wilayah Kota Yogyakarta) dengan Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebagian dari ruas Jalan Lingkar Selatan (*ringroad*) di Giwangan. Untuk kawasan perkotaan Yogyakarta, kawasan-kawasan yang dilayani oleh jaringan jalan arteri sekunder adalah Jl. Laksamana Adisucipto, Jl. Urip Sumoharjo, Jl. Jend. Sudirman, Jl. Pangeran Diponegoro, Jl. Magelang, Jl. Kyai Mojo, Jl. Hos Cokroaminoto, Jl. RE Martadinata, Jl. Tandean, Jl. Bugisan Jl. MT Haryono, Jl. Kolonel Sugiono, Jl. Mayjen Sutoyo, Jl. Perintis Kemerdekaan, dan Jl. Gedongkuning.

Adapun jaringan jalan kolektor sekunder yang menghubungkan antar kawasan di Kota Yogyakarta, diantaranya yaitu ruas Jl. Malioboro, Jl. P. Mangkubumi, Jl. A. Yani, Jalan C. Simanjuntak, Jl. Gejayan, Jl. Kusumanegara, Jl. Sultan Agung, Jl. Senopati, Jl. KH. A. Dahlan, Jl. Mataram, Jl. Brigjend Katamso, Jl. Parangtritis, Jl. Bantul, Jl. Prof. Herman Yohannes, Jl. Taman Siswa, Jl. Dr. Wahidin, Jl. Dr. Sutomo. Jaringan jalan lokal pada kawasan di kota dengan perumahan pada tingkatan sekunder. Sedangkan jalan lingkungan merupakan jalan penghubung antara lingkungan perumahan penduduk dengan jalan lokal. Kondisi struktur jalan sudah menggunakan jalan semen dengan kondisi jalan sudah cukup baik.

Pengembangan sistem transportasi udara tetap mengutamakan pada peranan Bandar Udara Adi Sucipto sebagai pintu gerbang utama Kota Yogyakarta, dengan memperhatikan pada penataan dan pengaturan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan. Prasarana transportasi Kota Yogyakarta meliputi terminal bus, stasiun kereta api, halte bus trans jogja, parkir, penyeberangan jalan dan pedestrian.

D. Rencana Sistem Jaringan Energi

Pemenuhan kebutuhan akan energi listrik di Kota Yogyakarta akan tergantung pada sistem kelistrikan dan ketersediaan sumberdaya energi di Provinsi D.I. Yogyakarta. Rencana dan langkah-langkah strategis untuk memenuhi pasokan dan pelayanan listrik sampai tahun 2028 yaitu :

1. Meningkatkan daya terpasang dari sumber pembangkit tenaga listrik,

2. Menambah jaringan dan gardu listrik untuk melayani kawasan terbangun baru,
3. Penambahan gardu listrik yang berfungsi menurunkan tegangan dari sistem jaringan primer ke sistem jaringan sekunder,
4. Memaksimalkan potensi sumber daya alam di Wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta khususnya Kota Yogyakarta.

E. Rencana Sistem Jaringan Air Minum

Rencana pengembangan sarana air minum diusulkan sesuai satuan wilayah sungai mengingat saat ini di Kota Yogyakarta lebih banyak memanfaatkan sungai untuk sumber air minum, serta pertimbangan ekologis untuk menyesuaikan dengan konsep *one river one plan* sehingga meskipun sumber air dieksploitasi tetap harus disesuaikan dengan daya dukungnya.

Strategi pengembangan penyediaan air minum di Kota Yogyakarta dalam perencanaan 20 tahun ke depan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penggunaan potensi sumber dari mata air dan sumur artesis perlu dikendalikan lebih ketat mengingat saat ini penggunaan mata air tidak terkontrol, dan cenderung melakukan eksploitasi berlebihan, dikhawatirkan terjadi kerusakan lingkungan dan terjadi bencana kerawanan air,
2. Pengelolaan sungai-sungai dan DAS sebagai bagian dari rencana penyediaan air minum untuk jangka panjang dan terpusat. Saat ini potensi sungai belum dimanfaatkan secara optimal, secara kapasitas debit air sangat besar dan mampu menyediakan air untuk 20 tahun perencanaan,
3. Pengelolaan kawasan tangkapan air dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, saat ini setidaknya terdapat beberapa kawasan yang merupakan daerah tangkapan air seperti Kawasan Lindung Gunung Merapi. Perlu adanya strategi penataan ruang yang melindungi daerah tangkapan air tersebut.

F. Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Dengan meningkatnya jumlah penduduk maka kebutuhan akan pelayanan telekomunikasi juga akan semakin meningkat. Pelayanan telekomunikasi selain dibutuhkan oleh masyarakat juga sebagai penunjang kegiatan perekonomian kota. Arah pengembangan sistem prasarana telekomunikasi Kota Yogyakarta antara lain:

1. Layanan telepon tetap oleh PT. Telkom.
2. Telepon bergerak dilayani oleh operator ponsel.
3. Untuk sebagian masyarakat golongan menengah bawah perlu disiapkan strategi pelayanan di masa mendatang yaitu pembangunan fasilitas telepon berbasis VOIP pada pusat-pusat permukiman sebagai telepon umum, dan pembangunan fasilitas telepon

berbasis listrik, untuk mempermudah pengembangan jaringan terutama ke wilayah permukiman yang masih tertinggal.

G. Rencana Sistem Jaringan Drainase

Rencana pengembangan sistem drainase umumnya terbagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Arahana Pengembangan penataan Sistem Drainase Utama (major drainase) pada sungai-sungai yang tersebar di Kota Yogyakarta, misalnya Sungai Code, Winongo dan Gajahwong.
2. Rencana Pengembangan Saluran Drainase Pengumpul (minor drainase) yaitu saluran drainase yang merupakan saluran pengumpul dan berasal dari perumahan dan permukiman, perdagangan, perkantoran, industri dan lain-lain. Saluran lingkungan terkecil ke saluran drainase utama.

H. Rencana Sistem Persampahan

Dalam rencana struktur ruang Kota Yogyakarta diperhatikan beberapa arahan pengembangan prasarana sampah sebagai berikut :

1. Membudayakan sistem pengelolaan sampah dengan prinsip 4R yaitu *Replace, Reduce, Reuse, Recycle*.
2. Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Sampah.

I. Rencana Sistem Pengelolaan Air Limbah

Beberapa rencana sistem pengelolaan air limbah di Kota Yogyakarta adalah:

1. Sistem terpusat yaitu jaringan pemipaan kota
2. Sistem IPAL komunal
3. Sistem tanki septik komunal

Berikut ini merupakan tabel rangkuman Rencana Struktur ruang Kota Yogyakarta tahun 2009-2029.

Tabel 2.29 Rencana Struktur Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2009-2029

No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima tahun ke-I (2010-2014)	Lima tahun ke-II (2015-2019)	Lima tahun ke-III (2020-2024)	Lima tahun ke-IV (2025-2028)
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
I. Perwujudan Sistem Perkotaan							
I.1	Percepatan Pengembangan Pusat Kota	Peningkatan fungsi pusat kota					
		Pengembangan kawasan perkotaan baru	Keraton dan Gondomanan				
I.2	Percepatan Pengembangan Subpusat Kota	Pengembangan/peningkatan sungsi subpusat kota	Seluruh kecamatan kecuali Kraton				
I.3	Percepatan Pengembangan Subpusat Kota-kota Kecamatan	Pengembangan/peningkatan fungsi subpusat kota-kecamatan	Seluruh kecamatan				
		Pengembangan baru subpusat kota-kota kecamatan	Umbulharjo dan Kotagede				
II.1 Perwujudan Sistem Jaringan Jalan							
II.1	Jaringan Jalan Arteri Primer	Pemantapan jaringan jalan Arteri Primer internal kota	Jalan Kyai Mojo, Jalan Jendral sudirman, Jalan Urip Sumoharjo, dan Jalan Ud. Adisucipto				
		Pembangunan jaringan jalan Arteri Primer Internal kota	Jaringan lintas lingkaran luar Kota Yogyakarta yaitu Jalan Ring Road Lintas Timur				
		Pengembangan jaringan jalan Arteri Primer yang menghubungkan Kota Yogyakarta dengan wilayah diluar kota	Jaringan Lintas Yogyakarta-Sleman yaitu Jalan AM Sangaji, Jalan Magelang, Kaliurang dan Jalan Gejayan				
			Jaringan lintas Yogyakarta-Bantul yaitu Jalan S.O 1 Maret, Jalan Sisingamagraja, Jalan Parangtritis dan Jalan Imogiri				

No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima tahun ke-I (2010-2014)	Lima tahun ke-II (2015-2019)	Lima tahun ke-III (2020-2024)	Lima tahun ke-IV (2025-2028)
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	Jaringan Jalan Arteri Sekunder	Pemantapan jaringan jalan Arteri Sekunder	Jaringan Lintas Selatan yaitu Jalan Sugeng Jeroni, Mayjend Sutoyo, Kol Sugiono, Menteri Supeno, Perintis Kemerdekaan , Ngeksigondo				
			Jaringan Lintas Tengah yaitu Sepanjang Koridor jalan RE Martadinata hingga Jalan Wonocatur				
		Pengembangan jaringan jalan Arteri Sekunder internal kota	Jaringan lingkaran timur yaitu Jalan Aipda Tut Harsono				
			Jaringan lingkaran barat yaitu Jalan Cokroaminoto				
		Pengembangan jaringan jalan Arteri Sekunder yang menghubungkan Kota Yogyakarta dengan wilayah lain diluar kota	Jaringan lintas Yogyakarta ke arah Kabupaten Bantul yaitu Jalan Patangpuluh				
	Jaringan Jalan Kolektor Primer	Pemantapan dan pengembangan jaringan jalan kolektor kota	Jar. jalan kawasan perdagangan yaitu Jalan Malioboro				
			Jar. jalan kawasan budaya yaitu Jalan Brigjen Katamso, Wahid Hasyim, Ahmad Dahlan dan Jalan MT Haryono				
			Jar. jalan kawasan pendidikan : Jalan Diponegoro, Sudirman dan Urip Sumoharjo				
	Jembatan	Pembangunan jembatan fly over KA	Jalan HOS Cokroaminoto, Aipda Tut Harsono				
II.2	Perwujudan Bandar Udara Internasional	Pemantapan Bandar Udara AdiSucipto	Adi Sucipto				

No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima tahun ke-I (2010-2014)	Lima tahun ke-II (2015-2019)	Lima tahun ke-III (2020-2024)	Lima tahun ke-IV (2025-2028)
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
III.	Rencana Jaringan Energi						
III.1	Perwujudan Sistem Jaringan Energi	Perwujudan Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi	Seluruh Kota Yogyakarta				
III.2		Optimalisasi dan Pengembangan Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi	Seluruh Kota Yogyakarta				
III.3		Pengembangan Infrastruktur untuk Peningkatan Pasokan Gas Bumi	Seluruh Kota Yogyakarta				
III.4		Rehabilitasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik	Seluruh Kota Yogyakarta				
III.5		Pengembangan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik	Seluruh Kota Yogyakarta				
IV.	Rencana jaringan telekomunikasi						
IV.1	Sistem Jaringan Telekomunikasi	Rehabilitasi Jaringan Terestrial	Seluruh Kota Yogyakarta				
IV.2		Pengembangan Jaringan Terestrial	Seluruh Kota Yogyakarta				
IV.3		Jaringan Pelayanan Feeder	Seluruh Kota Yogyakarta				
V.	Rencana sistem jaringan sumber daya air						
V.1	Perwujudan Sistem Jaringan Sumberdaya Air (SDA)	Konservasi SDA, Pendayagunaan SDA, dan Pengendalian Daya Rusak Air	Seluruh Kota Yogyakarta				
VI.	Persampahan						
		Penambahan Lahan TPA Piyungan	Kecamatan Pleret, dusun Sentulrejo, Kabupaten Bantul				
		Pengadaan sarana Truk sampah	Seluruh Kota Yogyakarta				
VII.	Air Limbah						
		Pembersihan/perbaikan saluran air limbah	Seluruh Kota Yogyakarta				
		Penambahan IPAL Sewon	di Dsn Cepit, Ds Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Bantul dan sistem penggelontor				
		Pengadaan sarana Truk tinja	Seluruh Kota Yogyakarta				

No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima tahun ke-I (2010-2014)	Lima tahun ke-II (2015-2019)	Lima tahun ke-III (2020-2024)	Lima tahun ke-IV (2025-2028)
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	Air Minum	Pengembangan Instalasi Air Minum	Seluruh Kota Yogyakarta				
		Pengembangan jaringan Distribusi	Seluruh Kota Yogyakarta				
		Pembelian Truk tangki air minum					

Sumber : RTRW Kota Yogyakarta Tahun 2009-2029

6.3.3. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta secara umum terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung yang terdapat di Kota Yogyakarta meliputi :

a. kawasan perlindungan setempat;

Kawasan perlindungan setempat meliputi kawasan sepadan sungai dan ruang terbuka hijau Kota Yogyakarta. Terdapat 3 sungai utama yaitu Sungai Code, Winongo dan Gajah Wong serta kecil seperti Sungai Manunggal dan Sungai Buntung.

b. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi kawasan-kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung setempat arkeologis/budaya/sejarah sebagai kawasan yang memiliki arti penting dalam upaya pelestarian cagar budaya dan ilmu pengetahuan. Kawasan ini banyak yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya dengan SK Menteri, SK Gubernur DIY maupun SK Walikota Yogyakarta sesuai dengan klasifikasi sesuai A,B,C dan D sebagaimana tertuang dalam Undang-undang.

c. kawasan rawan bencana

Kawasan rawan bencana meliputi kawasan rawan gempa, tanah longsor dan erupsi vulkanis Gunung Merapi. Kawasan yang paling terdampak erupsi vulkanis Gunung Merapi adalah Sungai Code.

Sedangkan kawasan budidaya meliputi :

a. rencana kawasan peruntukan industri mikro, kecil dan menengah;

Rencana penanganan kawasan peruntukan industri mikro, kecil dan menengah diarahkan untuk Industri yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Sedangkan Industri

mikro, kecil dan menengah dapat berada di luar kawasan peruntukan industri sepanjang tidak bertentangan sifat dominasi kawasan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

b. rencana kawasan peruntukan pariwisata;

rencana penanganan terhadap kawasan peruntukan pariwisata meliputi

- 1) mempertahankan dan mengembangkan kualitas ruang dan fasilitas pada kawasan pariwisata terutama pada wilayah pusat kota yang meliputi kawasan Malioboro dan kawasan Kraton,
- 2) mengembangkan cluster-cluster kawasan pariwisata seperti kompleks Taman Sari, Prawirotaman, Kotagede, Taman Pintar, museum dan lainnya;
- 3) memanfaatkan secara bijaksana obyek dan benda cagar budaya untuk kegiatan pariwisata melalui pengendalian pemanfaatan ruang

c. rencana kawasan peruntukan permukiman;

Rencana penanganan kawasan peruntukan permukiman meliputi :

- 1) pada kawasan terbangun yang sudah ada dengan cara mengoptimalkan fungsi bangunan sekaligus melakukan penataan/peningkatan kualitas ruang;
- 2) perumahan perumahan di kawasan-kawasan yang padat dan tidak memungkinkan lagi dilakukan pengembangan secara horisontal, antara lain dengan pola pengembangan perumahan secara vertikal (apartemen dan rumah susun);
- 3) pengembangan permukiman skala besar dapat dilakukan dengan konsep konsolidasi lahan;
- 4) penanganan kawasan kumuh di tengah kota dengan konsep penataan;
- 5) kawasan kumuh yang tak bisa dikembangkan dan dikelola dengan cara seperti tersebut pada angka 4), dilakukan pemindahan (relokasi)

d. rencana kawasan peruntukan perdagangan dan jasa

Rencana penanganan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa meliputi :

- 1) pertumbuhan perdagangan secara linier diarahkan sepanjang jalan arteri sekunder dan kolektor sekunder;
- 2) pengembangan Perdagangan dan Jasa wajib menyediakan parkir dalam halaman atau gedung;
- 3) perencanaan pintu masuk keluar gedung agar tidak mengganggu sirkulasi dan keamanan berlalulintas;
- 4) pengaturan jadwal waktu penyaluran (loading) barang-barang perdagangan pada kawasan yang padat bangunan dan aktivitas

e. rencana kawasan peruntukan fasilitas pelayanan umum lainnya.

6.3.4. Rencana Kawasan Strategis

Penetapan Kawasan Strategis diarahkan untuk menetapkan kawasan yang di dalamnya terbentuk Citra Kota sebagai unsur pendukung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang sekitarnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dimaksudkan untuk mewadahi sejarah dan masa depan. Komponen fisik pembentuk citra kota terdiri dari jalur (path), simpul (node), pembatas (edge), blok lingkungan (district) dan tetenger (land mark). Pembentukan citra kota yang berkaitan dengan komponen fisik diarahkan pada usaha pelestarian dan pengembangan arsitektur kota yang mencakup tata ruang, tata bangunan dan tata hijau. Secara umum pengaturan terhadap Kawasan Strategis meliputi penetapan inti pelestarian, inti pengembangan serta kawasan penyangganya.

Inti pelestarian Citra Kota terdapat pada 13 lokasi baik bangunan, rumah, taman, jalan maupun ornamen yang memiliki kekhususan kawasan kota dengan spesifik sebagai berikut:

- a. Sumbu Krapyak Kraton Tugu (Jalan DI. Panjaitan, Trikora, Ahmad Yani, Malioboro, Mangkubumi) sebagai jalur kota yang menyiratkan citra filosofis dan peninggalan budaya;
- b. Masjid Besar Kauman, Masjid Mataram Kotagede, Gereja Antonius Kotabaru, Gereja Santo Yusuf Bintaran dan Kelenteng Gondomanan sebagai titik kota yang menyiratkan citra religio-kultural;
- c. Kraton Yogyakarta, Puro Paku Alaman dan Tugu sebagai bangunan tetenger kota yang menyiratkan citra peninggalan sejarah budaya;
- d. Alun-alun Utara dan Alun-alun Selatan sebagai titik kota yang menyiratkan citra budaya;
- e. Kota Gede sebagai kawasan kota yang menyiratkan citra budaya;
- f. Monumen Sasana Wiratama Tegalrejo, Musium Jendral Sudirman, Musium Perjuangan, Musium Dewantara Kertigriya, Monumen Ahmad Dahlan, Benteng Vredeburg, Gedung Agung, Masjid Syuhada dan bangunan lain yang mempunyai kaitan dengan sejarah perjuangan sebagai bangunan tetenger kota yang menyiratkan citra peninggalan sejarah perjuangan;
- g. Jalan Suroto, Cik Ditiro sebagai jalur kota yang menyiratkan citra budaya;
- h. Kotabaru sebagai kawasan kota yang menyiratkan citra perjuangan;
- i. Jalur Route Gerilya Jenderal Sudirman sebagai jalur kota yang menyiratkan citra sejarah perjuangan;
- j. Taman Makam Pahlawan Kusumanegara sebagai titik kota yang menyiratkan citra peninggalan sejarah perjuangan;
- k. Taman Siswa sebagai titik kota yang menyiratkan citra pendidikan;
- l. Pasar Bringharjo sebagai titik kota yang menyiratkan citra budaya kegiatan ekonomi;
- m. Alur Sungai Winongo, Code dan Sungai Gajahwong sebagai jalur kota yang menyiratkan citra alami;

- n. Gembiraloka sebagai titik kota yang menyiratkan citra alami.

Inti pengembangan citra kota terdapat dilokasi-lokasi sebagai berikut :

- a. Museum Tegalrejo, Museum Perjuangan, Kawasan Beteng Vredeburg, Museum Dewantara, Museum Biologi, Museum Sonobudoyo dan Kebun plasma nutfah pisang sebagai tetenger kota yang menyiratkan citra kegiatan budaya dan pendidikan aktif dan pasif;
- b. bangunan-bangunan di dalam kawasan kota baru dengan batas jalan Jenderal Sudirman, jalan DR. Wahidin, rel KA Lempuyangan, Sungai Code yang masuk dalam daftar dilindungi menurut Undang-undang Benda Cagar Budaya, sebagai tetenger yang menyiratkan citra kejuangan serta kegiatan pendidikan aktif dan pasif;
- c. Jalan Tegalendu dan jalan Mondorakan, sebagai jalur kota yang menyiratkan citra budaya, pariwisata aktif dan pasif;
- d. Mandala Krida sebagai titik kota yang menyiratkan citra pendidikan aktif dan pasif;
- e. Kraton Yogyakarta, Puro Pakualaman dan Kotagede sebagai tetenger kota yang menyiratkan citra kegiatan pariwisata pasif;
- f. Jalan Mangkubumi, Malioboro, Ahmad Yani, Trikora, jend. Sudirman, pangeran Diponegoro, Ahmad Dahlan dan Panembahan Senopati sebagai jalur kota yang menyiratkan citra kegiatan pariwisata pasif;
- g. Gembira Loka sebagai kawasan da titik kota yang menyiratkan citra kegiatan pendidikan dan pariwisata/rekreasi aktif dan pasif;
- h. Alun-alun Utara dan Alun-alun Selatan sebagai titik kota yang menyiratkan citra kegiatan pariwisata aktif dan pasif;
- i. Kridosono sebagai tetenger dan titik kota yang menyiratkan citra kegiatan pendidikan dan pariwisata/rekreasi aktif dan pasif.

Kawasan strategis penyangga citra kota merupakan pembatasan atau penyangga kawasan yang dapat berupa pembatas fisik maupun non-fisik dari kawasan budaya, pendidikan, perjuangan dan pariwisata, yang berlokasi sebagai berikut :

- a. Jeron Beteng Kraton dan jalan pembatas kawasan Kraton sebagai kawasan, pembatas dan jalur bercitra budaya dan atau pariwisata;
- b. sekitar Puro Pakualaman sebagai pembatas bercitra budaya;
- c. Kotagede sebagai kawasan, pembatas dan jalur bercitra budaya dan atau pariwisata;
- d. sekitar museum Tegalrejo sebagai pembatas bercitra budaya;
- e. Kawasan Malioboro dengan batas jalan Kyai Mojo, jalan Pangeran Diponegoro, jalan Jenderal Sudirman, Sungai Code, jalan Panembahan Senopati, jalan Ahmad Dahlan, Sungai

- Winongo sebagai kawasan, pembatas dan jalur bercitra budaya, pariwisata dan atau perjuangan;
- f. sekitar Alun-alun Utara dan Alun-alun Selatan sebagai pembatas bercitra budaya dan atau pariwisata;
 - g. Kawasan Kotabaru dengan batas jalan Jenderal Sudirman, jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, rel kereta api, Sungai Code, sebagai kawasan, tetenger, pembatas dan jalur bercitra perjuangan dan atau pendidikan;
 - h. sekitar Taman makam pahlawan Kusumanegara sebagai pembatas bercitra perjuangan;
 - i. koridor Jalan Suroto dan Jalan Cik Di Tiro sebagai kawasan bercitra pendidikan;
 - j. sekitar stadion Mandala Krida sebagai pembatas bercitra alami;
 - k. jalan K.H. Wahid Hasyim, Letjen. S. Parman, Mayjen. MT. Haryono, Mayjen. Sutoyo, Brigjen Katamso, Menteri Supeno, Perintis Kemerdekaan, Kemas, Sultan Agung, Kusumanegara, Ipda Tut Harsono, Laksda Adi Sucipto, AM. Sangaji, Magelang, Kyai Mojo, HOS. Cokroaminoto, Kapten Piere Tendean, Sugeng Jeroni, Parang Tritis, Menukan dan jalan imogiri sebagai jalur bercitra pariwisata;
 - l. jalan Laksda Adisucipto, jalan Letjen. Urip Somoharjo, Jend. Sudirman, Pangeran Diponegoro, Kyai Mojo, HOS Cokroaminoto sebagai jalur dan pembatas bercitra pariwisata;
 - m. sekitar Gembira Loka sebagai pembatas yang bercitra alami.

6.3.5. Arahan Penataan Ruang Tiap Kecamatan

A. Kecamatan Danurejan

Kecamatan Danurejan dalam struktur ruang Kota Yogyakarta termasuk ke dalam pusat Kota Yogyakarta bersama Kecamatan Gedongtengen dan Kecamatan Gondomanan. Ketiga kawasan ini dibatasi dan dibelah oleh Jalan Malioboro dan Ahmad Yani yang menjadi sumbu utama Kota Yogyakarta. Dalam wilayah ini terdapat pusat pemerintahan Provinsi DIY yaitu Kompleks Kepatihan sebagai kompleks perkantoran Provinsi DIY dan Kantor DPRD Provinsi DIY. Rencana pola ruang adalah sebagian kawasan lindung setempat arkeologi budaya sebagai bagian dari citra kota serta sebagian besar sebagai kawasan budidaya dengan model pengembangan lebih fleksibel karena berfungsi sebagai kawasan penyangga dimana pengembangan harus mendukung keberadaan kawasan inti. Pola pemanfaatan ruang didominasi peruntukan lahan sebagai perdagangan dan permukiman, dengan intensitas pemanfaatan agak tinggi (dapat dikembangkan secara maksimal dengan tetap memperhatikan kawasan inti lindung). Di kawasan ini terdapat stasiun KA penumpang Lempuyangan dan sebagian wilayah dilewati oleh Sungai Code.

B. Kecamatan Gedongtengen

Kecamatan Gedongtengen dalam struktur ruang Kota Yogyakarta sebagian sebagai pusat pelayanan kota dan sebagian sub pusat kota yang mendukung pariwisata. Rencana pola ruang adalah sebagai kawasan budidaya dengan pengembangan lebih fleksibel dan penyangga alam dan budaya. Kecamatan Gedongtengen dilewati oleh Sungai Winongo dan terdapat stasiun KA penumpang Tugu. Pola pemanfaatan ruang didominasi sebagai perdagangan dan permukiman dengan pola pengembangan sebagai penyangga budaya dan intensitas agak tinggi namun tetap mendukung keberadaan kawasan inti lindung.

C. Kecamatan Gondomanan

Struktur ruang kota pada Kecamatan Gondomanan adalah sebagai pusat pelayanan kota yang diharapkan sebagai kawasan pendukung pariwisata. Rencana pola ruang sebagian kecil sebagai kawasan lindung setempat arkeologi/budaya/sejarah dan sebagian besar sebagai penyangga alam dan budaya (pendukung kawasan inti). Di Kecamatan Gondomanan ini terletak kawasan nol kilometer dari Kota Yogyakarta sehingga tepat berada di tengah-tengah kota. Kawasan ini merupakan kawasan strategis yang memiliki berbagai Citra Kota berupa-gedung bersejarah yaitu antara lain Gedung Agung, Benteng Vrederburg, Gedung BI, Kantor Pos dan BNI serta Pasar Beringharjo yang ditetapkan sebagai inti pelestarian yang merupakan kawasan menyiratkan citra perjuangan dan religio kultural. Pola pemanfaatan ruang didominasi perdagangan dan jasa skala regional dan pariwisata. Intensitas pengembangan kawasan agak tinggi, yaitu pengembangan secara optimal dengan memperhatikan karakter lingkungan.

D. Kecamatan Kraton

Kawasan Kraton dalam struktur ruang kota adalah sebagai sub pusat pelayanan yang mendukung pusat pelayanan kota yang diarahkan untuk kawasan wisata budaya. Pola ruang adalah Kawasan Inti Lindung Setempat Arkeologis Budaya dimana kawasan ini memiliki nilai budaya sejarah dan pemanfaatannya harus sejiwa dengan kehidupan kawasan. Kecamatan Kraton secara umum meliputi kompleks kraton Yogyakarta sehingga menyimpan berbagai artefak arkeologis disamping juga masih melestarikan berbagai warisan budaya non ragawi dalam kehidupan masyarakatnya. Pemanfaatan pola ruang dominansi pariwisata yang mendukung budaya. Pengembangan kawasan diarahkan dengan intensitas rendah dan memperhatikan karakter lingkungan. Kecamatan ini adalah satu-satunya kecamatan di Kota Yogyakarta yang tidak dilewati oleh sungai sehingga tidak terdapat kawasan inti lindung alami.

E. Kecamatan Pakualaman

Struktur ruang Kecamatan Pakualaman adalah sub pusat pelayanan, sebagai pendukung pusat pelayanan kota yang diarahkan sebagai kawasan wisata budaya. Pola ruang

kawasan inti lindung setempat arkeologi budaya dimana kawasan ini memiliki nilai budaya sejarah dan pemanfaatannya harus sejiwa dengan kehidupan kawasan. Hal ini disebabkan karena terdapat kompleks Pakualaman. Pemanfaatan pola ruang dominansi perdagangan dan jasa dengan intensitas pengembangan rendah yang memperhatikan karakter lingkungan. Selain itu pada Kecamatan ini dialiri Sungai Code dan memiliki faktor kerentanan bencana dengan padatnya permukiman di tepiannya.

F. Kecamatan Kotagede

Kecamatan Kotagede dalam struktur ruang Kota Yogyakarta adalah sebagai sub pusat pelayanan yaitu mendukung pusat pelayanan yang diarahkan sebagai kawasan wisata budaya. Pola ruang adalah sebagian sebagai kawasan inti lindung setempat arkeologi budaya yaitu kawasan yang mempunyai budaya sejarah dan pemanfaatannya harus sejiwa dengan kehidupan kawasan dan sebagian kawasan penyangga alam dan budaya. Di Kecamatan Kotagede terdapat beberapa situs arkeologis dan sebagian Kebun Binatang Gembira Loka yang merupakan kawasan inti lindung hutan kota / lindung alami. Pemanfaatan pola ruang didominasi perumahan dan industri skala kecil dan menengah dengan intensitas pengembangan sedang yang memperhatikan karakter lingkungan.

G. Kecamatan Umbulharjo

Kawasan Umbulharjo dalam struktur ruang Kota Yogyakarta adalah sub pusat pelayanan yaitu mendukung pusat pelayanan kota yang diarahkan kawasan yang diprioritaskan untuk dikembangkan sebagai kawasan tumbuh cepat ekonomi. Pola ruang adalah sebagai kawasan budidaya dengan pola pengembangan lebih fleksibel dan intensitas yang tinggi maupun agak tinggi (dapat dikembangkan secara maksimal). Pemanfaatan pola ruang didominasi permukiman dan perdagangan yang dapat dikembangkan pada skala regional. Kecamatan ini terlewati dua sungai dari tiga sungai utama yaitu Code dan Gajah Wong, terdapat sebagian Kebun Binatang Gembira Loka, terletak Stadion Mandala Krida, beberapa lapangan kecil serta beberapa persawahan sehingga merupakan kecamatan dengan dukungan kawasan lindung alami dan RTH yang cukup berarti.

H. Kecamatan Gondokusuman

Struktur ruang pada Kecamatan Gondokusuman yaitu sub pusat pelayanan sebagai pendukung pusat pelayanan kota yang memiliki perpaduan beberapa karakter unik. Karakter tersebut yaitu perdagangan dan jasa (pada koridor Jalan Jenderal Sudirman, C. Simanjuntak, Cik Di Tiro, Urip Sumoharjo, Prof Herman Yohanes) serta pendidikan dan pariwisata (Kotabaru dan Terban) dimana terdapat konsentrasi fasilitas pendidikan yang cukup masif dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Terdapat pula

beberapa rumah sakit besar yang meliputi RS. Panti Rapih, RS. Bethesda, RS. DKT dan RS Mata Dr. Yap. Kawasan ini dilewati pula oleh Sungai Code yang memiliki kelandaian cukup rata sehingga rawan bencana banjir maupun luapan erupsi Merapi. Pola ruang sebagian kecil adalah kawasan inti lindung alami dan sungai serta inti lindung budaya. Sedangkan sebagian besar adalah sebagai kawasan budidaya dengan didominasi kawasan perdagangan. Pola pengembangan dapat dikembangkan secara maksimal dengan intensitas agak tinggi.

I. Kecamatan Jetis

Kecamatan Jetis dalam struktur ruang Kota Yogyakarta adalah sebagai sub pusat pelayanan yang pendukung pusat pelayanan kota. Rencana pola ruang untuk kawasan ini adalah Kawasan budidaya dengan pengembangan lebih fleksibel, intensitas agak tinggi pengembangan skala regional. Meskipun demikian, terdapat kawasan inti lindung budaya yang menyiratkan filosofi (Tugu Kota Yogyakarta) dan peninggalan budaya pada wilayah Kelurahan Cokrodingratan. Pola pemanfaatan ruang dengan dominansi perdagangan dan jasa yang dapat dikembangkan pada skala regional dengan intensitas agak tinggi.

J. Kecamatan Tegalrejo

Struktur ruang pada Kecamatan Tegal Rejo adalah sebagai sub pusat pelayanan sebagai pendukung pusat pelayanan kota berperan sebagai hub penghubung Kota Yogyakarta dengan Kabupaten maupun provinsi lain dan gerbang masuk strategis dari utara dan barat. Rencana pola ruang adalah kawasan budidaya yang pengembangannya lebih fleksibel namun pada titik tertentu mencitrakan perjuangan. Pola pemanfaatan ruang dengan dominansi permukiman, perdagangan dan industri kecil. Intensitas pengembangan adalah sedang dan skala lokal. Kecamatan Tegalrejo termasuk kawasan pilot proyek untuk penanganan kemiskinan dan permukiman kumuh terutama penanganan di kawasan tepian Sungai Winongo.

K. Kecamatan Wirobrajan

Kecamatan Wirobrajan dalam struktur ruang adalah sub pusat pelayanan kota sebagai pendukung pusat pelayanan kota dengan karakter sebagai pembatas citra pariwisata. Rencana pola ruang adalah Kawasan budidaya dengan pengembangan lebih fleksibel. Pola pemanfaatan ruang yaitu dominansi permukiman dan industri kecil dengan intensitas pengembangan sedang pada skala lokal.

L. Kecamatan Mantriweron

Kecamatan Mantriweron dalam struktur ruang adalah sub pusat pelayanan kota yang diarahkan sebagai pendukung kawasan pariwisata. Pola ruang adalah kawasan budidaya dan sebagian kawasan inti lindung setempat arkeologi budaya berupa sumbu imajiner

kota. Pola pemanfaatan ruang dominansi permukiman dan industri kecil yang merupakan pengembangan kawasan batik. Terdapat PASTHY (Pasar Aneka Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta) sebagai gerbang kota dari sisi selatan dan banyak fasilitas perhotelan pada kawasan Prawirotaman. Intensitas pengembangan adalah sedang dengan memperhatikan karakter lingkungan.

M. Kecamatan Mergangsan

Kecamatan Mergangsan dalam struktur ruang kota adalah sub pusat pelayanan kota diarahkan sebagai pendukung kawasan wisata budaya yang pengembangannya lebih fleksibel. Rencana pola ruang adalah inti pelestarian sebagai bangunan tetenger kota yang menyiratkan citra peninggalan sejarah perjuangan dan citra pendidikan. Pola pemanfaatan ruang yaitu dominansi permukiman dengan intensitas pengembangan sedang dan memperhatikan karakter lingkungan. Kecamatan ini dilewati oleh Sungai Code sehingga memiliki potensi kerawanan bencana di beberapa titik.

N. Kecamatan Ngampilan

Kecamatan Ngampilan dalam struktur kota merupakan sub pusat pelayanan kota yang diarahkan untuk mendukung pariwisata. Pola ruang adalah Kawasan budidaya dengan pengembangan lebih fleksibel dan penyangga alam budaya. Dominansi permukiman dan industri kecil merupakan penyangga budaya dengan intensitas pengembangan agak tinggi dan dapat dikembangkan secara maksimal. Kawasan ini termasuk daerah dengan kepadatan tinggi dan memiliki permasalahan permukiman di tepian Sungai Winongo.

6.3.6. Strategi dan Arah Kebijakan RTRW Provinsi DIY

Perkembangan dan pertumbuhan kota dengan batasan wilayah administrasi kecil akan meluas pada wilayah perkotaan sekitar berbatasan dengan wilayah kabupaten tetangga. Fungsi dan aktifitas perkotaan yang melebar membentuk ruang aglomerasi dengan integrasi aksesibilitas dan mobilitas lintas wilayah. Menyatunya fungsi dan aktifitas demikian menggunakan ruang dan infrastruktur dengan daya dukung dan daya tampung yang selengkapnya mencukupi untuk melayani skala wilayah aglomerasi perkotaan.

Kota Yogyakarta telah menetapkan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) demikian pula halnya dengan Kabupaten Sleman dan Bantul sesuai amanat UU No.26 Th 2007 tentang Penataan Ruang. Secara normatif peraturan daerah masing-masing adalah kewenangan dalam pengaturan tata ruang masing-masing wilayah. Sehubungan dengan menyatunya fungsi dan aktifitas dan pengelolaan tata ruang yang mempunyai keterkaitan dengan wilayah lain, Pemerintah Pusat telah memberikan wadah mediasi melalui pembahasan tata ruang pada Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) sebelum suatu produk hukum tata ruang daerah menjadi Perda pada masing-masing daerah. Pada pembahasan

tersebut telah dikaji materi tata ruang daerah dengan wilayah kabupaten tetangga dan instansi sektoral pusat. Begitupun sebaliknya pada pembahasan tata ruang kabupaten tetangga menyertakan kota dan kabupaten tetangga lain yang berbatasan. Persetujuan substansi dari pemerintah pusat merupakan suatu keluaran dari pembahasan tersebut yang mengandung arti penyelarasan tata ruang telah dibahas dan disesuaikan dengan tata ruang antar wilayah kabupaten tetangga. Keselarasan dimaksud bahwa khususnya pemanfaatan lahan dan peruntukan lahan yang terbentuk dari pola dan struktur ruang telah disepahami dan disepakati sebagai suatu kebijakan penataan ruang secara bersama.

Pada tingkat provinsi peraturan daerah tata ruang wilayah dilakukan dengan sinkronisasi tata ruang wilayah provinsi yang sekaligus berarti tata ruang kabupaten tetangga dan tata ruang wilayah aglomerasi perkotaan. Persetujuan ketentuan dalam tata ruang wilayah daerah oleh provinsi merupakan kajian penyelarasan tata ruang antar wilayah sebelum dilakukan pembahasan di tingkat pusat. Menurut ketentuan dalam tata ruang wilayah provinsi Kota Yogyakarta telah ditetapkan sebagai kota besar dalam arahan pengembangan sistem perkotaan. Demikian juga dengan Kawasan Perkotaan Yogyakarta beserta kawasan perbatasan ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Selanjutnya dalam arahan pola ruang ditetapkan sebagai kawasan andalan berupa kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional.

Penjabaran arahan tata ruang wilayah provinsi yang mencakup wilayah aglomerasi perkotaan diantaranya adalah kegiatan penyusunan peraturan zonasi (zoning regulation) di wilayah aglomerasi khususnya perbatasan. Arahan ketentuan tata ruang wilayah ini menjadi landasan bersama implementasi ketentuan tata ruang wilayah perbatasan antara kota dan kabupaten tetangga.

Pembahasan penyelarasan tata ruang wilayah dan permasalahan infrastruktur pada wilayah aglomerasi perkotaan secara reguler dan insidental dilakukan dengan mediasi instansi teknis tingkat provinsi serta melalui forum Sekretariat Bersama Yogyakarta, Sleman, dan Bantul (Sekber Kartamantul). Beberapa aspek pokok bahasan adalah tata ruang, jaringan jalan, air bersih, limbah, drainase, sungai, persampahan dan transportasi. Pada forum mediasi ini telah menghasilkan beberapa keberhasilan penyelesaian permasalahan khususnya program dan kegiatan di wilayah perbatasan. Problem tentang permasalahan teknis pada spot perbatasan dilakukan penyelarasan dengan kegiatan yang akan dilakukan oleh instansi teknis baik oleh provinsi maupun masing-masing kota dan kabupaten. Kebutuhan pengelolaan infrastruktur Kota Yogyakarta yang selama ini bertumpu pada wilayah kabupaten tetangga seperti sumber produksi air bersih dan pengelolaan sampah serta air limbah dilakukan pembahasan perencanaan dan pelaksanaan bersama. Program dan kegiatan yang akan

dilakukan sesuai alokasi anggaran dilakukan pembahasan awal untuk meminimalisir problem teknis yang terjadi di lapangan khususnya wilayah perbatasan.

Salah satu capaian dalam penanganan wilayah perbatasan adalah telah dilakukan penandatanganan kesepahaman bersama antara Provinsi DIY, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul dalam Kerjasama Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Kotagede. Wilayah Kotagede yang berupa daerah perbatasan dipandang sebagai satu kesatuan ruang dengan demikian penanganan permasalahan mempertimbangkan bahwa penanganan tidak dapat dilakukan secara parsial tetapi komprehensif dan integratif. Kesepahaman yang telah ditandatangani antara Gubernur DIY, Walikota Yogyakarta, dan Bupati Bantul pada tanggal 11 April 2011 tersebut berangkat dari paradigma pengelolaan ruang yang menyatu didukung dengan inisiasi kelompok masyarakat yang menghendaki keberlanjutan proses pembangunan wilayah secara bijak dan memperhatikan nilai-nilai lokalistik.

6.3.7. Sinergitas Strategi dan Arahan Kebijakan dengan RTRW Kabupaten Bantul

RTRW Kabupaten Bantul sebagai kebijakan tata ruang Kabupaten Bantul perlu dikaji terutama yang terkait dengan wilayah Kota Yogyakarta yaitu dari aspek:

- struktur ruang, pola ruang dan penetapan kawasan strategis pada kawasan yang berbatasan;
- struktur ruang dan pola ruang yang terkait dengan sistem perkotaan maupun sistem regional seperti Daerah Aliran Sungai (DAS), infrastruktur regional berupa IPAL Sewon dan TPA Piyungan serta sistem transportasi;
- kebijakan-kebijakan tata ruang lain yang relevan baik sinergis maupun berbeda.

Kabupaten Bantul memiliki wilayah yang secara fungsional merupakan pemekaran Kota Yogyakarta dan disebut dengan Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY). KPY sebagaimana ditetapkan dalam PP Nomor 26 Tahun 2008 ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan secara rinci dalam Perda Nomor 4 tahun 2011 meliputi Kecamatan Kasihan, sebagian Kecamatan Sewon dan sebagian Kecamatan Banguntapan.

Sistem jaringan transportasi di Kabupaten Bantul yang terkait dengan Kota Yogyakarta yaitu jaringan jalan dan sistem transportasi darat. Jaringan jalan di Kabupaten Bantul terhubung dengan baik dan memiliki arteri primer yang tersambung dengan arteri primer Kota Yogyakarta yaitu jalan lingkar (ring road) selatan. Dalam hal pelayanan angkutan penumpang, di Kabupaten Bantul hanya dikembangkan terminal tipe B di Desa Imogiri dan Desa Palbapang serta tidak terdapat terminal tipe A, sehingga posisi terminal tipe A Giwangan cukup strategis karena tidak hanya melayani Kota Yogyakarta, namun juga Kabupaten Bantul. Untuk sistem jaringan kereta api, telah disebutkan bahwa jalur kereta api tidak hanya dikembangkan dalam poros barat – timur namun juga poros utara – selatan. Hal ini

memberikan konsekuensi bahwa Kota Yogyakarta juga harus siap untuk mengembangkan kedua poros tersebut, karena jaringan kereta api tidak mungkin terpisah oleh batas administrasi.

Sistem jaringan sumber daya air Kabupaten Bantul terkait dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kota Yogyakarta yaitu termasuk DAS Opak yang kewenangannya berada di Provinsi dan Balai Besar Wilayah Sungai Progo – Opak – Serang. Namun demikian tetap perlu ada sinergi kebijakan yang terkait dengannya untuk harmonisasi pengelolaan wilayah DAS.

Selain jaringan sumber daya air, terdapat pula kebutuhan pengelolaan infrastruktur Kota Yogyakarta yang selama ini bertumpu pada wilayah kabupaten tetangga seperti sumber produksi air bersih dan pengelolaan sampah serta air limbah dilakukan pembahasan perencanaan dan pelaksanaan bersama. Program dan kegiatan yang akan dilakukan sesuai alokasi anggaran dilakukan pembahasan awal untuk meminimalisir problem teknis yang terjadi di lapangan khususnya wilayah perbatasan. Untuk jaringan air limbah, Kabupaten Bantul telah menetapkan lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik terpusat untuk wilayah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul berada di Kecamatan Sewon yang saat ini sudah terbangun serta direncanakan di Kecamatan Pleret dan Kecamatan Banglipuro. Untuk sistem persampahan regional, ditetapkan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah berada di Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan dan sekitarnya seluas kurang lebih 12 (dua belas) hektar, yang dikelola dengan sanitary landfill untuk sampah residu akhir.

Pola ruang merupakan gambaran rencana penggunaan lahan yang ditetapkan dalam RTRW dan meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Penetapan pola ruang yang terkait dengan Kota Yogyakarta dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Tidak terdapat kawasan lindung alam yang berbatasan dengan Kota Yogyakarta;
- Kawasan lindung budaya yang berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta maupun kawasan yang diindikasikan berada ataupun berdekatan dengan Kawasan Perkotaan Yogyakarta yaitu Masjid Agung Kotagede di Desa Jagalan, Kecamatan Banguntapan serta Situs Ambarbinangun dan Masjid Patok Negara di Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan.

Kawasan permukiman perkotaan Kabupaten Bantul penyebarannya difokuskan pada kecamatan-kecamatan yang berbatasan dengan Kota Yogyakarta maupun yang berada dalam Kawasan Perkotaan Yogyakarta yaitu di wilayah Kecamatan Sewon, Kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Kasihan di samping kecamatan-kecamatan yang tidak berbatasan langsung yaitu Kecamatan Pajangan, Kecamatan Bantul, Kecamatan Pleret dan Kecamatan Piyungan.

Selain itu, Kabupaten Bantul juga menetapkan kawasan strategis Kabupaten salah satunya adalah Kawasan Perkotaan Yogyakarta, sehingga terdapat banyak prioritas

kebijakan-kebijakan yang terkait dengannya terutama berupa penanganan wilayah perbatasan.

6.3.8. Sinergitas Strategi dan Arah Kebijakan dengan RTRW Kabupaten Sleman

Sebagaimana RTRW Kabupaten Bantul, RTRW Kabupaten Sleman sebagai kebijakan tata ruang Kabupaten Sleman perlu dikaji terutama yang terkait dengan wilayah Kota Yogyakarta yaitu dari aspek :

- struktur ruang, pola ruang dan penetapan kawasan strategis pada kawasan yang berbatasan;
- struktur ruang dan pola ruang yang terkait dengan sistem perkotaan maupun sistem regional seperti kawasan lindung dan resapan air, Daerah Aliran Sungai (DAS), infrastruktur regional berupa jaringan drainase serta sistem transportasi;
- kebijakan-kebijakan tata ruang lain yang relevan baik sinergis maupun berbeda.

Kabupaten Sleman memiliki wilayah yang secara fungsional merupakan pemekaran Kota Yogyakarta dan disebut dengan Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY). KPY sebagaimana ditetapkan dalam PP Nomor 26 Tahun 2008 ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang selanjutnya dalam arahan pola ruang ditetapkan sebagai kawasan andalan berupa kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional. Dalam draft RTRW Kabupaten Sleman kawasan yang termasuk sebagai PKN secara rinci dijelaskan sebagai berikut :

- a. kawasan perkotaan Kecamatan Gamping meliputi:
 - 1) Desa Ambarketawang;
 - 2) Desa Banyuraden;
 - 3) Desa Nogotirto; dan
 - 4) Desa Trihanggo.
- b. kawasan perkotaan Kecamatan Godean berada di Desa Sidoarum.
- c. kawasan perkotaan Kecamatan Mlati meliputi:
 - 1) Desa Sendangadi; dan
 - 2) Desa Sinduadi.
- d. kawasan perkotaan Kecamatan Depok meliputi:
 - 1) Desa Caturtunggal;
 - 2) Desa Maguwoharjo; dan
 - 3) Desa Condongcatur.
- e. kawasan perkotaan Kecamatan Ngemplak berada di Desa Wedomartani; dan
- f. kawasan perkotaan Kecamatan Ngaglik meliputi:
 - 1) Desa Sariharjo;
 - 2) Desa Sinduharjo; dan

3) Desa Minomartani.

Sistem jaringan transportasi di Kabupaten Sleman yang terkait dengan Kota Yogyakarta yaitu jaringan jalan, sistem transportasi darat dan sistem transportasi udara. Jaringan jalan di Kabupaten Sleman terhubung dengan baik dan memiliki arteri primer yang tersambung dengan arteri primer Kota Yogyakarta yaitu jalan lingkar (ring road) utara. Dalam hal pelayanan angkutan penumpang, di Kabupaten Sleman hanya dikembangkan terminal tipe B di Kecamatan Mlati, terminal tipe C di Kecamatan Minggir, Godean, Gamping, Depok, Prambanan, Tempel dan Pakemserta tidak terdapat terminal tipe A, sehingga posisi terminal tipe A Giwangan cukup strategis karena tidak hanya melayani Kota Yogyakarta, namun juga Kabupaten Sleman selain Kabupaten Bantul. Untuk sistem jaringan kereta api, telah disebutkan bahwa jalur kereta api tidak hanya dikembangkan dalam poros barat – timur namun juga poros utara – selatan yang menghubungkan Borobudur – Yogyakarta - Parangtritis. Hal ini memberikan konsekuensi bahwa Kota Yogyakarta juga harus siap untuk mengembangkan kedua poros tersebut, disebabkan jaringan kereta api tidak mungkin terpisah oleh batas administrasi.

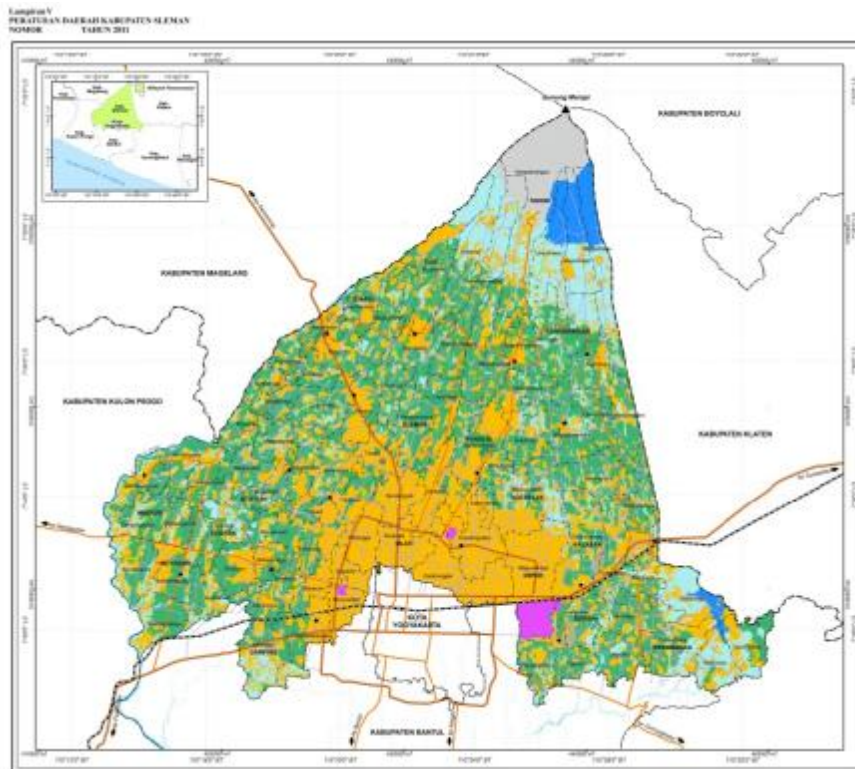
Sistem jaringan sumber daya air Kabupaten Sleman terkait dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kota Yogyakarta yaitu termasuk DAS Opak yang kewenangannya berada di Provinsi dan Balai Besar Wilayah Sungai Progo – Opak – Serang. Namun demikian tetap perlu ada sinergi kebijakan yang terkait dengannya untuk harmonisasi pengelolaan wilayah DAS. Kabupaten Sleman berperan penting dalam penyediaan sumber air baku dan upaya konservasi air tanah di Provinsi DIY terutama untuk Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY). Oleh sebab itu, dalam RTRW Kabupaten Sleman telah ditetapkan berbagai kebijakan dalam perlindungan sumber air baku berupa air tanah, mata air dan embung.

Selain jaringan sumber daya air, jaringan lain yang terkait dengan dengan Kota Yogyakarta adalah jaringan drainase perkotaan, jaringan air limbah dan sistem persampahan. Jaringan drainase perkotaan Kabupaten Sleman diantaranya mempergunakan Sungai Code, Winongo dan Gajahwong sebagai drainase induk saluran.

Untuk jaringan air limbah, Kabupaten Sleman tidak menyebutkan lokasi untuk Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik terpusat, namun tetap terintegrasi dengan jaringan air limbah domestik terpusat KPY sehingga dapat mengacu kepada lokasi IPAL yang ditentukan untuk KPY. Demikian pula untuk sistem persampahan, tidak disebutkan lokasi TPA regional, namun demikian Kabupaten Sleman telah menyiapkan lokasi TPA Kabupaten di Kecamatan Gamping dan Kecamatan Prambanan.

Pola ruang merupakan gambaran rencana penggunaan lahan yang ditetapkan dalam RTRW dan meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Penetapan pola ruang yang terkait dengan Kota Yogyakarta dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Tidak terdapat kawasan lindung alam yang langsung berbatasan dengan Kota Yogyakarta;
- Tidak ada kawasan lindung budaya yang berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta;
- Kawasan permukiman perkotaan Kabupaten Sleman tersebar di seluruh kecamatan hanya pola persebarannya ditentukan melalui lampiran peta kawasan budidaya.



Selain itu, Kabupaten Sleman juga menetapkan kawasan strategis nasional, provinsi dan kabupaten. Terkait dengan wilayah Kota Yogyakarta maka yang termasuk dalam kawasan strategis pertumbuhan ekonomi provinsi yaitu kawasan perkotaan Kabupaten seluas kurang lebih 9.835 (sembilan ribu delapan ratus tiga puluh lima) hektar yang berada di dalam KPY meliputi

- a. Kecamatan Godean, Kecamatan Gamping, Kecamatan Mlati, Kecamatan Depok, Kecamatan Ngemplak, dan Kecamatan Ngaglik.
- b. kawasan koridor Yogyakarta - Piyungan - Wonosari - Rongkop - Sadeng; dan
- c. kawasan koridor Temon - Wates - Yogyakarta - Prambanan.

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Visi dan Misi dalam pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2012-2016 perlu diterjemahkan dalam rumusan kebijakan umum dan program program secara konsisten dan spesifik. Kebijakan umum dan program pembangunan merupakan suatu jembatan konseptual untuk menghubungkan antara rumusan tujuan jangka menengah dengan capaian pembangunan jangka menengah dan tahunan. Kebijakan umum merupakan arah kebijakan yang diambil dalam rangka mencapai sasaran yang terukur dari masing-masing sasaran dalam RPJMD

Sedangkan program pembangunan merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau bersama masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah

Program –program pembangunan yang disusun dalam RPJMD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang terdiri dari 3 jenis program yang dilaksanakan oleh SKPD/Unit kerja yang berwenang sesuai dengan bidang kewenangannya. Program program tersebut adalah :

1. Program SKPD adalah merupakan program yang dirumuskan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD
2. Program lintas SKPD adalah merupakan program yang melibatkan lebih dari satu SKPD untuk mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan
3. Program kewilayahan adalah merupakan program pembangunan daerah untuk terciptanya keterpaduan, keserasian, keseimbangan laju pertumbuhan, dan keberlanjutan pembangunan antarwilayah/ antarkawasan dalam kecamatan di wilayah kota Yogyakarta

Adapun arah kebijakan dan program pembangunan dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan adalah sebagai mana tersebut dalam tabel berikut

Tabel 7.1
Sasaran, Strategi, dan Program Pembangunan Misi 1

Visi : Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, berkarakter dan Inklusif, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan

Misi : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab							
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir										
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan internal SKPD/unit kerja	Meningkatkan kualitas pengelolaan kegiatan internal SKPD/unit kerja yang menyangkut administrasi, kinerja, SDM, sarana prasarana dan keuangan	Capaian kinerja pelayanan internal SKPD/Unit kerja	100%	100%	Program Internal SKPD	Lintas Urusan	Semua SKPD/ unit kerja							
		Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	Mengoptimalkan pelaksanaan analisis jabatan dan memantapkan kelembagaan	Menyediakan pedoman etika penyelenggaraan pemerintahan dan budaya kerja	Prosentase seluruh organisasi perangkat daerah harus sesuai dengan aturan dan tujuan penyusunannya	100%	100%	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	Otda	SKPD Pengampu Kelembagaan						
			Mengembangkan pelayanan publik menuju pencitraan pelayanan prima								Prosentase paket pengadaan yang metode pelaksanaannya dilakukan melalui pelayanan pengadaan barang/jasa yang efisien, akuntabel dan profesional berbasis teknologi informasi	100%	100%	Program pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Otda	SKPD Pengampu Pengadaan Barang dan Jasa
			Memperkuat pelaksanaan tata pemerintahan dan pelayanan berbasis kewilayahan								Prosentase SKPD yang menyusun laporan sesuai ketentuan dan tepat waktu	80%	90%	Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan	Otda	SKPD Pengampu Penyelenggaraan Pemerintahan
		Prosentase dokumen pelaporan daerah yang disusun tepat waktu		80%	100%											
		Peningkatnya indeks kepuasan layanan masyarakat	Meningkatnya indeks kepuasan layanan masyarakat	Meningkatnya indeks kepuasan layanan masyarakat	Meningkatnya indeks kepuasan layanan masyarakat	70	80	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan	Otda	Semua Kecamatan						
		Pewujudan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Pewujudan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Mengoptimalkan penyelesaian persoalan hukum	Penanganan penyelesaian persoalan hukum Pemerintah Kota Yogyakarta	Penanganan penyelesaian persoalan hukum Pemerintah Kota Yogyakarta	100%	100%	Program Penataan Peraturan perundang-undangan dan Pelayanan Hukum	Otda	SKPD Pengampu Hukum					
				Menyebarkan dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk hukum daerah	Seluruh masyarakat Kota Yogyakarta dapat mengakses produk hukum daerah	Seluruh masyarakat Kota Yogyakarta dapat mengakses produk hukum daerah	100%	100%								

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
			Mengoptimalkan pengkajian produk hukum daerah dan data hukum	Tersusunnya produk hukum daerah dan kajian perda sesuai dengan yang direncanakan	100%	100%			
		Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif	Mengintensifkan pembinaan dalam rangka pengendalian internal	prosentase penurunan pelanggaran standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan pemerintahan	4.5%	2%	Program peningkatan sistem pengawasan internal	Otda	SKPD Pengampu Pengawasan Internal
			Mengembangkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di seluruh SKPD	prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	85%	90%			
		Peningkatan pendapatan daerah	Meningkatkan kualitas kebijakan pengembangan pendapatan daerah	Target Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	150 - 155 Milyar Rupiah	225 - 231 Milyar Rupiah	Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perekonomian dan Investasi Daerah	Penanaman Modal	SKPD Pengampu Penanaman Modal
			Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah				Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Pendapatan Daerah	Otda	SKPD Pengampu Kebijakan Pengembangan Pendapatan Daerah
			Melaksanakan intensifikasi pendapatan asli daerah				Program Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah	Otda	SKPD Pengampu Perpajakan
			Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah				Termanfaatkannya aset dan sarana prasarana pemerintah daerah	83%	88%
		Peningkatan efektifitas dan efisiensi belanja daerah	Melaksanakan perencanaan penganggaran belanja berbasis kinerja	Penilaian audit eksternal	Wajar	Wajar	Program Pengelolaan Anggaran Daerah	Otda	SKPD Pengampu Keuangan Daerah
			Melaksanakan pengendalian belanja sesuai dengan dokumen anggaran				Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Perimbangan	Otda	SKPD Pengampu Keuangan Daerah
							Program Penatausahaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai peraturan perundang-undangan yang Berlaku	Otda	SKPD Pengampu Keuangan Daerah
		Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan	Meningkatkan konsistensi perencanaan pembangunan yang partisipatif	Tersedianya dokumen perencanaan memuat tujuan, target dan sasaran yang jelas dan terukur.	100%	100%	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan	SKPD Pengampu Perencanaan Pembangunan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
			Menguatkan jejaring penelitian dan pengembangan pembangunan	Kesesuaian antara muatan RPJPD dengan RPJMD	100%	100%	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Perencanaan Pembangunan	SKPD Pengampu Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Mengembangkan data dan statistik pembangunan	Kesesuaian antara muatan RPJMD dengan RRPD	100%	100%	Program Pengembangan Data/Informasi	Statistik	SKPD Pengampu Data/Informasi
			Mengefektikan pengendalian dan evaluasi pembangunan				Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Perencanaan Pembangunan	SKPD Pengampu Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
				Terlaksananya pengendalian administrasi dan pengendalian operasional kegiatan seluruh SKPD Pemerintah Kota Yogyakarta	90%	94%	Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Otda	SKPD Pengampu Pengendalian Pembangunan
		Peningkatan pelayanan umum, komunikasi dan informasi	Memperluas jangkauan promosi dan publikasi program pembangunan	Prosentase penyampaian informasi program pembangunan melalui semua media komunikasi	100%	100%	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Komunikasi dan Informatika	SKPD Pengampu Komunikasi, Informasi, dan Media Massa
			Mengembangkan teknologi informasi dan aplikasi telematika dalam rangka e-government	Pengelolaan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk e-government	100%	100%	Program Pengembangan Komunikasi, Teknologi Informasi dan Aplikasi Telematika	Komunikasi dan Informatika	SKPD Pengampu Teknologi Informasi dan Aplikasi Telematika
		Meningkatkan pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan, dan keprotokolan pemerintah daerah		Pengelolaan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah, kerumahtanggaan dan penatausahaan bagian	100%	100%	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan	Otda	SKPD Pengampu Kerumahtanggaan Pemkot
				Kelancaran pelaksanaan pelayanan kedinasan kepala daerah, sekda, asisten, staf ahli dan keprotokolan Pemerintah Daerah	78%	93%	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Sekda, Asisten, Staff Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah	Otda	SKPD Pengampu Keprotokolan
		Mengoptimalkan penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Prosentase Arsip Pemerintah Kota dikelola dengan baik, benar dan tertib	100%	100%	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Kearsipan	SKPD Pengampu Kearsipan	
		Mengembangkan dan meningkatkan kualitas kerjasama	Persentase pelaksanaan kerjasama kategori 'baik' dan 'baik perlu ditingkatkan' terhadap seluruh kerjasama yang dievaluasi	93,51%	95,87%	Program Pengembangan Kerjasama Daerah	Otda	SKPD Pengampu Kerjasama Daerah	
		Mengoptimalkan fungsi kesekretariatan DPRD	Fasilitasi kegiatan DPRD	100%	100%	Program Peningkatan Layanan Pada DPRD	Otda	SKPD Pengampu Kesekretariatan DPRD	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
	Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah	Pengelolaan manajemen kepegawaian yang mengacu pada kebutuhan pelayanan prima	Menyediakan regulasi bagi pengembangan manajemen kepegawaian dan pengembangan pola karir	Tersedianya kebijakan dibidang pengembangan manajemen kepegawaian	100%	100%	Program pengembangan manajemen kepegawaian Program pengembangan karier pejabat struktural dan fungsional	Otda	SKPD Pengampu Kepegawaian SKPD Pengampu Kepegawaian
			Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian yang transparan, cepat, tepat dan akuntabel	Percepatan durasi penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian yang transparan, cepat dan akuntabel	100%	100%	Program peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian		SKPD Pengampu Kepegawaian
	Peningkatan kapasitas SDM aparatur	Menata SDM aparatur untuk meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat khususnya di wilayah	Cakupan pembinaan lembaga RT dan RW	100%	100%	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan	Otda	SKPD Pengampu Lembaga Sosial Kemasyarakatan	
		Mengefektifkan penyelenggaraan diklat dan pengiriman tugas belajar	prosentase SDM aparatur yang mengikuti diklat sesuai dengan kebutuhan	51%	61%	Program Peningkatan Kualitas SDM	Otda	SKPD Pengampu Peningkatan Kualitas SDM	
			Meningkatkan kesejahteraan pegawai						

Tabel 7.2
Sasaran, Strategi, dan Program Pembangunan Misi 2

Visi : Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, berkarakter dan Inklusif, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan

Misi : Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab		
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir					
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau	Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Cakupan mutu pelayanan kesehatan dasar	64%	80%	Program Upaya Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	SKPD Pengampu Kesehatan		
				Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%	100%					
			Mengembangkan pelayanan puskesmas 24 jam dan rumah sakit tanpa kelas	Indeks kepuasan layanan rumah sakit	0,66	0,74	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Medis	Kesehatan	SKPD Pengampu Rumah Sakit		
							Program Peningkatan Mutu Pelayanan Penunjang	Kesehatan	SKPD Pengampu Rumah Sakit		
							Program Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan	Kesehatan	SKPD Pengampu Rumah Sakit		
							Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Kesehatan	SKPD Pengampu Rumah Sakit		
			Meningkatkan kualitas ketersediaan sarana prasarana kesehatan dan kefarmasian	Cakupan ketersediaan obat, vaksin, dan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di puskesmas	90%	95%	Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Pengelolaan Alat Kesehatan	Kesehatan	SKPD Pengampu Kesehatan		
			Meningkatkan kesehatan keluarga dan reproduksi	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun 3,5%.	0,35%	0,35%	Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Keluarga Berencana dan keluarga sejahtera	SKPD Pengampu Keluarga Berencana		
							Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif 65%			72,07%	73,50%
							Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) 5%			13,36%	13%
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 70%	82,90%	85%									
Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87%	87,90%	88,50%									

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
				Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan	100%	100%			
				Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap Desa/Kelurahan	100%	100%			
				Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun	100%	100%			
				Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan 100% setiap tahun	100%	100%			
			Meningkatkan perbaikan gizi masyarakat dan pembelian makanan tambahan bagi kelompok rentan dan anak sekolah	Prevalensi kekurangan gizi (gizi buruk dan gizi kurang)	9,8%	8%	Program Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga	Kesehatan	SKPD Pengampu Kesehatan
			Mengurangi jumlah balita gizi buruk dengan penyelenggaraan rumah pemulihan gizi	Cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan	100%	100%			
				cakupan balita ditimbang berat badannya	74%	85%			
				Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	155	<102			
				Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	9,5	6,7			
				Angka kematian balita dari 2,1 menjadi 1,3 per 1000 kelahiran hidup	2,1	1,3			
				Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih (PN) sebesar lebih dari 96 persen	100%	100%			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	Mengendalikan penyebaran penyakit menular dan tidak menular serta meningkatkan kewaspadaan dini terhadap kejadian luar biasa	prosentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	98%	99%	Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Kesehatan	SKPD Pengampu Kesehatan
		Melakukan pengawasan dan pembinaan kesehatan lingkungan		Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (CDR)	71%	75%			
				Proporsi Kasus TB yang Berhasil diobati dalam Program DOTS (Success Rate)	68%	83%			
				Proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS	75%	95%			
				Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100%	100%			
				Persentase Sarana Sanitasi Dasar Memenuhi Syarat	92%	94%			
				Semua kelurahan melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat	27% (12 kelurahan)	100% (45 kelurahan)			
		Penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat	Menyediakan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin	Cakupan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin	100%	100%	Program Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Kesehatan	SKPD Pengampu Jaminan Kesehatan
				Meningkatkan partisipasi jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat menuju universal coverage	Cakupan jaminan kesehatan bagi penduduk rentan miskin	100%			
		Penyediaan regulasi dan sumber daya kesehatan	Melakukan pembinaan dan pelaksanaan regulasi pelayanan kesehatan	Prosentase sarana pelayanan kesehatan yang memenuhi standar mutu minimal	87%	95%	Program Regulasi Pelayanan Kesehatan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kesehatan	SKPD Pengampu Kesehatan
				Peningkatan upaya preventif dan promotif kesehatan	Meningkatkan sumber daya manusia kesehatan Meningkatkan peran serta masyarakat di bidang kesehatan menuju keluarga siaga dan terciptanya PHBS	cakupan keamanan mutu pangan			
		cakupan kelurahan siaga aktif mandiri	55%			80%			
		cakupan rumah tangga yang melaksanakan PHBS	55%			75%			
Indeks Kepuasan Layanan Kesehatan	0,79	0,8	Program Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kesehatan			Kesehatan	SKPD Pengampu Kesehatan		

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
				Seluruh Kejadian Luar Biasa (KLB) bidang Kesehatan dapat dicegah dan ditangani < 24 jam	100%	100%			
	Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai	Peningkatan penataan ruang yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	Meningkatkan cakupan rencana rinci tata ruang dan kawasan strategis kota	Tersedianya informasi mengenai RTRW Kota beserta Rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	100%	100%	Program Pengembangan Rencana Rinci dan Infrastruktur Kawasan	Penataan ruang	SKPD Pengampu Penataan Ruang
			Mengembangkan kawasan citrakota	Tersedianya penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kota Meningkatnya kualitas penerangan jalan umum	100% 90%	100% 95%	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	Pekerjaan Umum	SKPD Pengampu Penerangan Jalan Umum
			Mengoptimalkan penataan kawasan sungai				Program Penataan Kawasan Sungai	Lintas urusan	SKPD Pengampu Penataan Kawasan Sungai
	Peningkatan sarana dan prasarana perkotaan yang berkualitas		Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan	Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota (aksesibilitas)	100%	100%	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum	SKPD Pengampu Jalan dan Jembatan
				Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan (mobilitas)	100%	100%			
				Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat (keselamatan)	100%	100%			
				Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman (kondisi jalan)	100%	100%			
				Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana (kecepatan)	100%	100%			
				Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan	77%	82%			
			Meningkatkan kualitas talud/bronjong dan saluran pengairan	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada Meningkatnya kualitas talud/bronjong dan saluran pengairan	100% 70%	100% 72,5%	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Pengairan	Pekerjaan Umum	SKPD Pengampu Pengairan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab	
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
			Meningkatkan kualitas sistem jaringan drainase	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota	100%	100%	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase	Pekerjaan Umum	SKPD Pengampu Drainase	
			Tidak terjadinya genangan > 2 kali/tahun	100%	100%					
			Meningkatkan kualitas sarana dan prasaran air limbah	Tersedianya sistem air limbah setempat yg memadai	20%	60%	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan SAL	Pekerjaan Umum	SKPD Pengampu Air Limbah	
			Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota	12,5%	18%					
			Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana persampahan	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	15%	30%	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Pekerjaan Umum	SKPD Pengampu Persampahan	
			Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan	74%	80%					
			Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar pemukiman berbasis kewilayahan	Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	100%	100%	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	Perumahan	SKPD Pengampu Sarana Prasarana Permukiman	
				Tersedianya akses air minum yg aman melalui system penyediaan air minum dg jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dg kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari (sangat baik)	100%	100%				
				Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	100%	100%				
				Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar permukiman	60%	78%				
				Meningkatkan pemenuhan kebutuhan bangunan gedung pemerintah sesuai standar kebutuhan khususnya yang ada di wilayah	Meningkatnya pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan	80%	85%	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah	Pekerjaan Umum	SKPD Pengampu Bangunan Gedung Pemerintah
			Peningkatan pelayanan pengendalian bahaya kebakaran serta penanggulangan bencana	Meningkatkan cakupan pelayanan kesiapsiagaan pengendalian bahaya kebakaran serta penanggulangan bencana	cakupan pelayanan kesiapsiagaan dan pengendalian bencana kebakaran	100%	100%	Program Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	Otda	SKPD Pengampu Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab		
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir					
			Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kesiapsiagaan pengendalian bahaya kebakaran serta penanggulangan bencana	cakupan pelayanan kesiapsiagaan dan penanganan bencana alam	100%	100%	Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam	Otda	SKPD Pengampu Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam		
				Persentase (%) korban bencana skala kab/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100%	100%					
		Peningkatan sistem transportasi perkotaan	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perhubungan	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan	66%	86%	Program Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Perhubungan	SKPD Pengampu Perhubungan		
						Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor	100%	100%			
						Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota	50%	100%	Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan	Perhubungan	SKPD Pengampu Perhubungan
						Tersedianya halte yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	26%	100%			
						Tersedianya terminal angkutan penumpang	100%	100%			
						Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	-	100%			
						Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kota.	90%	100%	Program Pengendalian Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas	Perhubungan	SKPD Pengampu Perhubungan
						Meningkatkan penataan parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor	Meningkatnya ketertiban penyelenggaraan perparkiran	70%	90%	Program Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran	Perhubungan
		Terwujudnya pelayanan administrasi publik yang baik	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi publik	Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang sesuai dengan prinsip pelayanan prima	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	96%	100%	Program Pelayanan Dokumen dan Surat-Surat Kependudukan	Kependudukan dan catatan sipil	SKPD Pengampu Kependudukan dan Catatan Sipil	
					Cakupan penerbitan akta kelahiran	92%	94%	Program Pelayanan Permohonan Dokumen Pencatatan Sipil	Kependudukan dan catatan sipil	SKPD Pengampu Kependudukan dan Catatan Sipil	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
				Tingkat ketepatan penyampaian informasi data kependudukan kepada pengguna di Kota Yogyakarta	100%	100%	Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Kependudukan dan catatan sipil	SKPD Pengampu Kependudukan dan Catatan Sipil
	Terwujudnya pendidikan inklusif untuk semua	Peningkatan akses pendidikan melalui pendidikan formal, non formal maupun informal	Menuntaskan wajib belajar 12 tahun dengan basis inklusif Menyediakan jaminan pendidikan	Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS)	74%	97%	Program Wajar 12 Tahun	Pendidikan	SKPD Pengampu Pendidikan

Tabel 7.3
Sasaran, Strategi, dan Program Pembangunan Misi 3

Visi : Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, berkarakter dan Inklusif, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan

Misi : Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dengan gerakan Segoro Amarto

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan Segoro Amarto dalam rangka penanggulangan kemiskinan	Terwujudnya peningkatan kualitas ekonomi masyarakat	Peningkatan ekonomi masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan	Meningkatkan pembinaan koperasi dan lembaga keuangan mikro	Meningkatnya jumlah koperasi aktif	447	481	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro	Koperasi dan usaha kecil dan menengah	SKPD Pengampu Koperasi
			Meningkatkan kualitas sumber daya pelaku UMKM melalui fasilitasi permodalan, promosi, kerjasama usaha dan informasi usaha	Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah	22.091 UMKM	23.341 UMKM	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Koperasi dan usaha kecil dan menengah	SKPD Pengampu UMKM
			Menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan di masyarakat						
			Meningkatkan ketahanan pangan dan pengawasan kualitas bahan makanan	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	80%	90%	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketahanan pangan	SKPD Pengampu Ketahanan Pangan
	Terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat	Peningkatan pemberdayaan masyarakat yang berafirmatif gender	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan	Peningkatan pemberdayaan masyarakat	26%	31%	Program pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat	Pemberdayaan masyarakat dan desa	SKPD Pengampu Pemberdayaan Masyarakat
							Program Pemberdayaan Masyarakat berbasis kewilayahan	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Semua Kecamatan
			Meningkatkan pemberdayaan, kualitas hidup serta perlindungan perempuan dan anak	Terselesaikannya kasus KDRT dan kekerasan terhadap anak yang dilaporkan	50%	90%	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	SKPD Pengampu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan partisipasi perempuan dan anak	22%	25%	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	SKPD Pengampu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Meningkatkan potensi sumber kesejahteraan sosial	Persentase (%) PMKS skala kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	37%	80%	Program Pemberdayaan Sosial	Sosial	SKPD Pengampu Pemberdayaan Sosial
				Persentase (%) panti sosial skala kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100%	100%			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
				Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	50%	60%			
			Meningkatkan rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Persentase (%) PMKS skala kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	50%	80%	Program Rehabilitasi Sosial	Sosial	SKPD Pengampu Rehabilitasi Sosial
				Persentase (%) korban bencana skala kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	100%			
				Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	23%	40%			
			Meningkatkan Gerakan Segoro Amarto dalam rangka penanggulangan kemiskinan	Menurunnya jumlah angka kemiskinan	9,4%	8,4%	Program Penanggulangan kemiskinan	Lintas urusan	SKPD Pengampu Penanggulangan Kemiskinan
		Peningkatan wawasan kebangsaan	Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan menuju bangsa yang berkarakter dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia	Menurunnya Tingkat Intensitas dan Frekuensi Konflik Sosial yang ditimbulkan karena isu SARA dan kesenjangan sosial	47,03%	22,03%	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri	SKPD Pengampu Wawasan Kebangsaan
		Peningkatan kapasitas pemuda, prestasi dan sarana olahraga	Meningkatkan aktifitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pembinaan pengembangan olahraga	Meningkatnya Peran Serta dan Pemberdayaan Pemuda	65,74%	85%	Program Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda	Pemuda dan olahraga	SKPD Pengampu Pemuda
				Meningkatnya Prestasi Olah Raga	87,5%	97,5%	Program Fasilitasi Olahraga	Pemuda dan olahraga	SKPD Pengampu Olahraga

Tabel 7.4
Sasaran, Strategi, dan Program Pembangunan Misi 4

Visi : Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, berkarakter dan Inklusif, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan

Misi : Mewujudkan daya saing daerah yang kuat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
Menguatkan daya saing daerah untuk memajukan kota Yogyakarta	Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul	Peningkatan kualitas pendidikan	Meningkatkan manajemen penyelenggaraan pendidikan berkualitas	Meningkatnya Kelulusan Ujian Nasional (UN/UNPK)	86%	99%	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Dasar	Pendidikan	SKPD Pengampu Pendidikan
			Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dalam menumbuhkan pendidikan karakter				Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Menengah	Pendidikan	SKPD Pengampu Pendidikan
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan				Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan Informal	Pendidikan	SKPD Pengampu Pendidikan
							Program Pengembangan Pendidikan	Pendidikan	SKPD Pengampu Pendidikan
				Jumlah layanan taman pintar	7 layanan	7 layanan	Program Pengembangan Taman Pintar	Pendidikan	SKPD Pengampu Taman Pintar
			Meningkatkan daya tarik perpustakaan dan budaya baca masyarakat	Bertambahnya perpustakaan dan TBM	10%	10%	Program Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca/Literasi	Perpustakaan	SKPD Pengampu Perpustakaan
			Meningkatkan kualitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar sekaligus memberikan perlindungan ketenaga kerjaan	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	11%	75%	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Tenaga kerja	SKPD Pengampu Tenaga Kerja
				Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	11%	60%			
				Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	11%	60%			
				Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	20%	50%	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	Tenaga kerja	SKPD Pengampu Tenaga Kerja
				Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	10%	50%			
				Besaran Pemeriksaan Perusahaan	14%	45%			
Besaran pengujian peralatan di perusahaan	13%	50%							

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
				Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	13%	70%	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Tenaga kerja	SKPD Pengampu Tenaga Kerja
							Program Pengembangan Kawasan transmigrasi	Ketransmigrasian	SKPD Pengampu Ketransmigrasian
	Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat	Pengembangan pariwisata berbasis budaya	Meningkatkan promosi dan kerjasama pariwisata	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	2,5 juta orang	3,041 juta orang	Program Pengembangan Promosi dan Kerjasama Pariwisata	Pariwisata	SKPD Pengampu Pariwisata
			Mengembangkan ODTW dan wisata MICE	Meningkatnya lama tinggal wisatawan	2,59 hari	2,75 hari	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pariwisata	SKPD Pengampu Pariwisata
			Melestarikan nilai-nilai budaya kraton Yogyakarta sebagai modal sosial masyarakat	Meningkatnya jumlah nilai budaya yang dikelola dan dilestarikan	437 BCB/BWB	600 BCB/BWB	Program Pembinaan, Pelestarian, dan Pengembangan Nilai-nilai, Seni dan Cagar Budaya	Kebudayaan	SKPD Pengampu Kebudayaan
		Pengembangan potensi ekonomi daerah	Mengembangkan industri kreatif	Cakupan bina kelompok perajin	28 Kelompok	46 Kelompok	Program Pengembangan Industri Mikro Kecil dan menengah (IMKM)	Industri	SKPD Pengampu Perindustrian
			Meningkatkan revitalisasi pasar tradisional	Meningkatnya jumlah pengunjung pasar tradisional	120.000 orang	200.000 orang	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Pasar	Perdagangan	SKPD Pengampu Pasar
			Meningkatnya Kontribusi Pendapatan pasar terhadap PAD	7.2%	8.0%	Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan Retribusi	Perdagangan	SKPD Pengampu Pasar	
			Meningkatnya Omzet Pedagang pasar	7%	40%	Program Pengembangan Pasar	Perdagangan	SKPD Pengampu Pasar	
			Meningkatkan pertanian perkotaan berbasis rekreatif hobbies	cakupan bina kelompok petani	248	318	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan	Pertanian	SKPD Pengampu Pertanian
			Meningkatkan fasilitasi pengembangan usaha bagi pedagang /usaha informal	cakupan bina kelompok perikanan	59	95	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Kelautan dan perikanan	SKPD Pengampu Perikanan
							Program Peningkatan Perdagangan	Perdagangan	SKPD Pengampu Perdagangan
					Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Perdagangan	SKPD Pengampu Perdagangan		
	Terwujudnya daya dukung pengembangan usaha	Pengembangan lingkungan yang kondusif bagi dunia usaha	Meningkatkan pelayanan perizinan sesuai dengan prinsip pelayanan terpadu yang pro investasi	Penerbitan izin	100%	100%	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Otda	SKPD Pengampu Perizinan
			Tersedianya database yang selalu ter update	100%	100%				
			Tersedianya Regulasi sebagai dasar pelayanan perizinan	100%	100%				

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab				
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir							
			Menciptakan ketenteraman dan ketertiban yang kondusif	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) di Kota Yogyakarta	89,1%	94%	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban	Otda	SKPD Pengampu Ketertiban				
				cakupan petugas perlindungan masyarakat	100%	100%	Program Peningkatan Ketaatan Hukum	Otda	SKPD Pengampu Ketertiban				
							Program Perlindungan Masyarakat	Otda	SKPD Pengampu Perlindungan Masyarakat				
		Peningkatan kualitas lingkungan hidup perkotaan sesuai dengan baku mutu	Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau publik dengan dominasi tanaman perindang	Peningkatan luasan RTH Kota	32,30%	35,30%	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Lingkungan hidup	SKPD Pengampu Ruang Terbuka Hijau				
				Peningkatan pengelolaan ruang terbuka kawasan lingkungan perkotaan	0%	36,5%							
			Meningkatkan pengendalian pencemaran lingkungan hidup		Prosentase usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	60%	100%	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan hidup	SKPD Pengampu Lingkungan Hidup			
					Prosentase usaha dan/atau kegiatan yang menaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak	60%	100%						
					Prosentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	60%	100%						
					Prosentase kelembagaan masyarakat pengelola lingkungan tingkat kelurahan di Kota Yogyakarta	0%	100%				Program Peningkatan Kapasitas dan Akses Informasi Sumber Daya Lingkungan Hidup	Lingkungan hidup	SKPD Pengampu Lingkungan Hidup
					Prosentase parameter kualitas air tanah yang memenuhi baku mutu	60%	65%				Program Konservasi Sumber Daya Alam	Lingkungan hidup	SKPD Pengampu Sumber Daya Alam

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan kemudian disusun program program pembangunan sebagaimana telah disusun dalam bab sebelumnya. Pelaksanaan program dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tanggung jawab kewenangan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun pilihan. Program program yang disusun tersebut merupakan program prioritas pembangunan yang berhubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD.

Masing masing program disertai dengan indikator kinerja program sebagai alat perencanaan dan pengendalian pembangunan setiap tahunnya, sehingga hasil pembangunan akan terukur perkembangannya sampai akhir periode RPJMD. Penyusunan indikator kinerja program berupa hasil (*out comes*) sebagian merupakan indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk urusan-urusan yang telah diatur dengan peraturan menteri sesuai dengan bidang urusannya. Indikator SPM yang belum menjadi indikator sasaran maupun indikator program, akan dicantumkan pada dokumen Perencanaan Strategik (Renstra) SKPD menjadi indikator kegiatan. Indikator kinerja program menjadi acuan utama dalam menyusun kegiatan prioritas yang dilakukan SKPD.

Pencapaian target indikator kinerja program disusun secara rinci untuk setiap tahunnya dan disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk masing masing program. Maksud dari bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. Untuk program yang karena pencapaiannya dilaksanakan oleh beberapa SKPD/lintas SKPD maka pencapaian target hasil dan kerangka pendanaan didistribusi kepada SKPD terkait.

Uraian program sesuai urusan disertai dengan indikator kinerja dan kerangka pendanaannya adalah sebagai berikut :

Tabel 8.1
Indikasi Rencana Program Prioritas dan Rencana Pendanaan
Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

(dalam jutaan rupiah)

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD/Penganggung Jawab
			Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		target	Rp	
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Urusan Wajib															
Pendidikan															
Program Wajar 12 Tahun	AP (Angka Putus Sekolah)	0.035	0.03	26,074	0.25	26,856	0.02	27,661	0.02	28,491	0.01	29,346	0.01	29,346	SKPD pengampu pendidikan
	AM (Angka Melanjutkan)	105%	110%		115%		120%		125%		130,55%		130,55%		
Program Pengembangan Pendidikan	Jumlah Sarpras terstandar	70%	74%	16,733	80%	17,235	85%	17,752	90%	18,285	95%	18,833	95%	18,833	SKPD pengampu pendidikan
	Jumlah Tenaga Kependidikan sesuai kualifikasi	20%	30%		40%		50%		60%		70%		70%		
	Jumlah Sekolah terstandar nasional(SSN)	90%	90,3%		91%		92%		93%		94%		94%		
Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Dasar	Rerata UN SD/SMP	7.60	7.65	1,438	7.70	1,481	7.75	1,525	7.80	1,571	7.85	1,618	7.85	1,618	SKPD pengampu pendidikan
	Jumlah siswa berprestasi Tk. Nasional	0.07%	0.08%		0.09%		0.10%		0.20%		0.30%		0.30%		
	Jumlah guru tersertifikasi	72%	72%		75%		80%		85%		90%		90%		
	Jumlah guru berkualifikasi min S1/D-IV	74%	74%		80%		86%		94%		100%		100%		
Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Menengah	Rerata UN SMA/SMK	7.55	7.55	999	7.65	1,029	7.70	1,060	7.75	1,092	7.80	1,125	7.80	1,125	SKPD pengampu pendidikan
	Jumlah siswa berprestasi Tk. Nasional	0.08%	0.08%		0.09%		0.10%		0.20%		0.30%		0.30%		
	Jumlah guru tersertifikasi	80%	80%		85%		90%		95%		100%		100%		
	Jumlah guru berkualifikasi min S1/D-IV	91%	91%		93%		95%		97%		100%		100%		
Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan Informal	Jumlah PAUD terakreditasi	0.96%	0.96%	751	2%	774	3%	797	4%	821	5%	846	5%	846	SKPD pengampu pendidikan
	Kelulusan UNPK warga belajar	75%	75%		80%		85%		90%		95%		95%		
	Jumlah LKP terakreditasi	6.15%	6.15%		12%		18%		24%		30%		30%		
	Jumlah Sekolah Terakreditasi	90%	90%		92%		94%		96%		98%		98%		
Program Pengembangan Taman Pintar	Meningkatnya kepuasan pengunjung Taman Pintar	75%	76%	2,070	77%	2,132	78%	2,196	79%	2,262	80%	2,329	80%	2,329	SKPD pengampu Taman Pintar
Kesehatan															
Program Upaya Pelayanan Kesehatan	Cakupan mutu pelayanan kesehatan dasar	60%	64%	7,746	68%	7,978	72%	8,218	76%	8,464	80%	8,718	80%	8,718	SKPD pengampu kesehatan
	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Cakupan penanganan kegawatdaruratan	55%	60%		65%		70%		75%		80%		80%		
Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Pengelolaan Alat Kesehatan	Cakupan ketersediaan obat, vaksin dan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas	90%	91%	7,463	92%	7,687	93%	7,918	94%	8,155	95%	8,400	95%	8,400	SKPD pengampu kesehatan
Program Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga	cakupan balita ditimbang berat badannya (MDG's)	73%	74%	1,776	78%	1,829	82%	1,884	85%	1,940	85%	1,999	85%	1,999	SKPD pengampu kesehatan
	Prevalensi balita kekurangan gizi (MDG's)	9%	9%		9%		9%		8%		8%		8%		
	cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin (SPM)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan (MDG's), (SPM)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Prevalensi anemia pada ibu hamil	31%	30%		29%		28%		27%		26%		26%		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	SKPD/Penganggung Jawab	
			Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		target			Rp
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Cakupan kunjungan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar (K4) (SPM)	91%	92%		93%		94%		95%		96%		96%			
	Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih (PN)	91%	92%		93%		94%		95%		96%		96%			
	Cakupan kunjungan bayi (neonatal) lengkap (KN Lengkap) (SPM)	83%	84%		86%		87%		89%		90%		90%			
	Cakupan Peserta KB Aktif (SPM)	73%	74%		75%		76%		77%		78%		78%			
Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap (MDG's)	86%	88%	1,539	91%	1,585	94%	1,633	95%	1,682	95%	1,732	95%	1,732		
	Cakupan imunisasi anak sekolah dasar (SPM)	97,5%	98%		98,5%		99%		99,5%		100%		100%			
	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (SPM)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
	Cakupan Penemuan Pasien Baru TB BTA+ (SPM)	94%	94%		94%		94%		94%		94%		94%			
	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (SPM)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
	Persentase Sarana Sanitasi Dasar Memenuhi Syarat	91%	92%		93%		93%		94%		94%		94%			
	Semua Kelurahan Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (MDG's)	0 kel	12 kelurahan		25 kelurahan		35 kelurahan		45 kelurahan		45 kelurahan		45 kelurahan			
Program Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan	100%	100%	20,035	100%	20,636	100%	21,255	100%	21,892	100%	22,549	100%	22,549		
	Persentase penduduk rentan miskin yang mendapat jaminan kesehatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
Program Regulasi Pelayanan Kesehatan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang Memenuhi Standar Mutu Minimal dari 87 % menjadi 95%	85%	87%	497	89%	512	91%	527	93%	543	95%	559	95%	559		
	Cakupan Keamanan Mutu Pangan dari 64 % menjadi 80 %	60%	64%		68%		72%		76%		80%		80%			
	Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti pendidikan	9	9		18		27		36		45		45			
	Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti pelatihan	100	100		200		300		400		500		500			
Program Pemberdayaan Masyarakat dan promosi Kesehatan	Cakupan Kelurahan Siaga Aktif (Mandiri)	50%	55%	2,779	65%	2,862	70%	2,948	75%	3,036	80%	3,127	80%	3,127		
	Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS	50%	55%		60%		65%		70%		75%		75%			
	Cakupan Penjarangan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat (SPM)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
Program Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kesehatan	persentase pemanfaatan data dan informasi kesehatan	95%	96%	692	97%	713	98%	735	99%	757	100%	779	100%	779		
	Cakupan Desa/ Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam (SPM)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Medis	Pemberian pelayanan kegawat daruratan yang bersertifikasi yang masih berlaku (BPS/PPGD/GELS/ALS)	70%	76%	400	82%	412	88%	424	94%	437	100%	450	100%	450		
	Waktu tunggu di Rawat Jalan	87 menit	81 menit		75 menit		69 menit		63 menit		57 menit		57 menit			
	Waktu tunggu operasi elektif	2,7 hari	2,5 hari		2,3 hari		2,1 hari		1,9 hari		1,7 hari		1,7 hari			
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Penunjang	Meningkatnya Mutu Pelayanan Penunjang	95%	96%	20,030	97%	20,631	98%	21,250	99%	21,887	100%	22,544	100%	22,544		
	Waktu tunggu hasil pelayanan	150 menit	145 menit		140 menit		135 menit		125 menit		115 menit		115 menit			

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		target	Rp		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	kejadian kegagalan pelayanan rontgen karena kerusakan foto	2,4%	2,2%		2%		1,8%		1,6%		1,4%		1,4%			
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan	Meningkatnya Mutu Pelayanan Keperawatan	96%	97%	547	98%	563	98%	580	99%	597	100%	615	100%	615	RS Jogja	
	Kejadian pulang paksa	7%	7%		7%		6%		5%		5%		5%			
	Perawat pemberi layanan di rawat inap minimal D3	94%	95%		96%		97%		98%		100%		100%			
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Meningkatnya kelancaran sarana dan prasarana rumah sakit	80%	84%	1,705	85%	1,756	88%	1,809	90%	1,863	90%	1,919	90%	1,919	RS Jogja	
	Ketepatan waktu penyediaan linen untuk rawat inap	57%	62%		67%		72%		77%		85%		85%			
Pekerjaan Umum																
Program Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	Meningkatnya kualitas penerangan jalan umum	90%	91%	4,069	92%	4,192	93%	4,317	94%	4,447	95%	4,580	95%	4,580	SKPD pengampu penerangan jalan umum	
Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan	77%	78%	14,075	79%	14,497	80%	14,932	81%	15,380	82%	15,842	82%	15,842	SKPD pengampu jalan dan jembatan	
Program Peningkatan dan Pemeliharaan Pengairan	Meningkatnya kualitas saluran pengairan	70%	70,5%	6,569	71%	6,766	71,5%	6,969	72%	7,178	72,5%	7,394	72,5%	7,394	SKPD pengampu pengairan	
Program Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase	Meningkatnya kualitas saluran drainase	87%	87%	4,094	87,09%	4,216	87,18%	4,343	87,27%	4,473	87,36%	4,607	87,36%	4,607	SKPD pengampu drainase	
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan SAL	Meningkatnya kinerja pengelolaan air limbah air limbah	12,5%	13,5%	7,315	14,5%	7,535	16%	7,761	17%	7,994	18%	8,233	18%	8,233	SKPD pengampu SAL	
Program Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan dari 80% menjadi 85%	80%	81%	23,229	82%	23,926	83%	24,644	84%	25,383	85%	26,144	85%	26,144	SKPD pengampu bangunan gedung pemerintah	
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya pemeliharaan kebersihan jalan yang ada di Kota Yogyakarta	267 penggal jalan	328 penggal jalan	8,442	389 penggal jalan	8,696	445 penggal jalan	8,956	500 penggal jalan	9,225	556 penggal jalan	9,502	556 penggal jalan	9,502	SKPD pengampu persampahan	
	Meningkatnya jumlah rumahtangga yang telah melakukan pemilahan sampah	17765 rumah	18700 rumah		20400 rumah		22100 rumah		23800 rumah		25500 rumah		25500 rumah			
	Peremajaan sarana dan prasarana pengangkutan sampah yang tidak layak jalan	25 unit	5 unit		5 unit		5 unit		5 unit		5 unit		5 unit			
	Terkendalinya munculnya pembuangan sampah liar	60 titik	50 titik		40 titik		30 titik		20 titik		10 titik		10 titik			
	Meningkatnya jumlah wajib retribusi kebersihan baru	75000 WR	75100 WR		75350 WR		75600 WR		75850 WR		76100 WR		76100 WR			
Perumahan																
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar permukiman	64%	64%	5,367	68%	5,528	72%	5,694	76%	5,865	78%	6,041	78%	6,041	SKPD pengampu sarpras permukiman	
Penataan Ruang																
Program Pengembangan Rencana Rinci dan Infrastruktur Kawasan	Peningkatan cakupan rencana rinci tata ruang dan kawasan strategis kota	60%	62%	824	64%	848	66%	874	68%	900	70%	927	70%	927	SKPD pengampu penataan ruang	
Perencanaan Pembangunan																
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dalam bentuk PERDA/PERWAL	Ada	Ada	1,151	Ada	1,185	Ada	1,221	Ada	1,258	Ada	1,295	Ada	1,295	SKPD pengampu perencanaan pembangunan	
	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dalam bentuk PERWAL	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		SKPD pengampu perencanaan pembangunan daerah	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Kesesuaian hasil kajian dengan dokumen perencanaan yang ada	100%	100%	318	100%	327	100%	337	100%	347	100%	358	100%	358	SKPD pengampu penelitian dan pengembangan
	Kesesuaian hasil kajian dengan isu strategis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Kesesuaian program terhadap dokumen perencanaan	100%	100%	503	100%	518	100%	533	100%	549	100%	566	100%	566	SKPD pengampu pengendalian dan evaluasi pembangunan
Perhubungan															
Program Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan	4686	4967	4,595	5248	4,733	5529	4,875	5810	5,021	6091	5,172	6091	5,172	SKPD pengampu perhubungan
	Prosentase pengujian kendaraan bermotor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan	Prosentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan	50%	50%	3,689	60%	3,800	75%	3,914	80%	4,031	85%	4,152	85%	4,152	SKPD pengampu perhubungan
	Jumlah halte yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	81	81	150	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
	Jumlah terminal angkutan penumpang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah perusahaan angkutan umum yang memiliki SDM kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan	-	-	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Program Pengendalian Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas	Prosentase angkutan umum yang melayani trayek di dalam kota yang memenuhi standar keselamatan	90%	90%	445	95%	459	100%	473	100%	487	100%	501	100%	501	SKPD pengampu perhubungan
Program Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran	Prosentase Ketertiban penyelenggaraan perparkiran	74%	74%	695	78%	715	82%	737	86%	759	90%	782	90%	782	SKPD pengampu perhubungan
Lingkungan Hidup															
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Tersedianya luasan RTH publik (Keputusan Menteri Pekerjaan Umum : 14/PRT/M/2010 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	17.71%	18.21%	5,850	18.71%	6,026	19.21%	6,206	19.71%	6,392	20.21%	6,584	20.21%	6,584	SKPD pengampu RTH
	Tersedianya luasan RTH privat terhadap luas wilayah Kota Yogyakarta	14.59%	14.69%	14.79%	14.89%	14.99%	15.09%	15.09%	15.09%	15.09%	15.09%	15.09%	15.09%	15.09%	
	Meningkatnya luasan taman kota Bertambahnya jumlah pohon perindang untuk jalur hijau	62305 m2 25737 pohon	63930 m2 29237 pohon	65555 m2 32737 pohon	67180 m2 36237 pohon	68805 m2 39737 pohon	70430 m2 43237 pohon	70430 m2 43237 pohon	70430 m2 43237 pohon	70430 m2 43237 pohon	70430 m2 43237 pohon	70430 m2 43237 pohon	70430 m2 43237 pohon	70430 m2 43237 pohon	
	Tersedianya RTH lingkungan tingkat RW	0 RW	45 RW	90 RW	135 RW	180 RW	225 RW	225 RW	225 RW	225 RW	225 RW	225 RW	225 RW	225 RW	
Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Menurunnya jumlah parameter kualitas air sungai yang tidak memenuhi baku mutu pada 4 sungai di Kota Yogyakarta	17 parameter	15 parameter	1,102	13 parameter	1,135	11 parameter	1,169	9 parameter	1,204	7 parameter	1,240	7 parameter	1,240	SKPD pengampu lingkungan hidup
	Menurunnya jumlah parameter kualitas udara ambien yang tidak memenuhi baku mutu pada 10 lokasi pemantauan	8 parameter	7 parameter	6 parameter	5 parameter	4 parameter	3 parameter	3 parameter	3 parameter	3 parameter	3 parameter	3 parameter	3 parameter		
	Terpantaunya usaha/ kegiatan yang mentaati dokumen lingkungan dan peraturan lingkungan hidup	60 usaha	75 usaha	100 usaha	150 usaha	200 usaha	250 usaha	250 usaha	250 usaha	250 usaha	250 usaha	250 usaha	250 usaha	250 usaha	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	SKPD/Penganggung Jawab	
			Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		target			Rp
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Meningkatnya jumlah usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL, DPL)	321 usaha	350 usaha		375 usaha		400 usaha		425 usaha		450 usaha		450 usaha			
	Terpantaunya usaha/ kegiatan yang mengelola limbah cair sesuai baku mutu Kep Gub DIY Nomor 281/KPTS/1998	55 usaha	60 usaha		70 usaha		80 usaha		90 usaha		100 usaha		100 usaha			
	Prosentase lahan dan/atau tanah yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan (Peraturan MENLH No. 19 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota)	0%	0%		60%		65%		70%		75%		75%			
Program Peningkatan Kapasitas dan Akses Informasi Sumber Daya Lingkungan Hidup	Meningkatnya jumlah kelembagaan masyarakat pengelola lingkungan pada tingkat kelurahan	0 kelurahan	9 kelurahan	867	18 kelurahan	893	27 kelurahan	920	36 kelurahan	948	45 kelurahan	976	45 kelurahan	976	SKPD pengampu lingkungan hidup	
	Terlayannya pengujian parameter kualitas lingkungan di laboratorium pengujian kualitas lingkungan sesuai standar SNI	6 parameter	10 parameter		14 parameter		17 parameter		20 parameter		24 parameter		24 parameter			
	Termanfaatkannya Sistem Informasi Lingkungan Hidup dalam penyajian data dan informasi lingkungan	3 menu	4 menu		5 menu		6 menu		7 menu		8 menu		8 menu			
	Meningkatnya jumlah sekolah berwawasan lingkungan	70 sekolah	101 sekolah		168 sekolah		263 sekolah		285 sekolah		339 sekolah		339 sekolah			
	Terpilihnya sekolah Adiwiyata Kota	3 sekolah	6 sekolah		9 sekolah		12 sekolah		15 sekolah		18 sekolah		18 sekolah			
Program Konservasi Sumber Daya Alam	Terpantaunya kualitas air tanah pada sumur milik usaha/kegiatan dan rumah tangga (domestik)	129 titik	240 titik	859	260 titik	884	280 titik	911	300 titik	938	320 titik	966	10 cm	966	SKPD pengampu sumber daya alam	
	Terkendalinya penurunan permukaan air tanah	10 cm	10 cm		10 cm		10 cm		10 cm		10 cm		10 cm			
Pertanahan																
Program Fasilitasi Pertanahan	Jumlah pengadaan tanah untuk ruang terbuka publik	27 Kel	29 Kel	9,754	31 Kel	10,047	33 Kel	10,348	35 Kel	10,659	37 Kel	10,978	37 Kel	10,978	SKPD pengampu pertanahan	
Kependudukan dan Catatan Sipil																
Program Pelayanan Dokumen dan Surat-Surat Kependudukan	Penerbitan Dokumen dan Surat-surat Kependudukan	100%	100%	1,831	100%	1,886	100%	1,942	100%	2,000	100%	2,060	100%	2,060	SKPD pengampu kependudukan dan catatan sipil	
Program Pelayanan Permohonan Dokumen Pencatatan Sipil	Penerbitan Dokumen pencatatan sipil	100%	100%	309	100%	318	100%	327	100%	337	100%	347	100%	347		
Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	SIAK berfungsi dengan baik	100%	100%	73	100%	76	100%	78	100%	80	100%	83	100%	83		
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu.	100%	100%	262	100%	269	100%	277	100%	286	100%	294	100%	294	SKPD pengampu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD/Penganggung Jawab
			Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		target	Rp		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	50%	55%		62%		70%		75%		80%		80%			
	Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	50%	55%		62%		70%		75%		80%		80%			
	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	80%	85%		90%		95%		100%		100%		100%			
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	35%	45%		60%		75%		90%		100%		100%			
	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	10%	25%		40%		55%		70%		85%		85%			
	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	50%	65%		80%		100%		100%		100%		100%			
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Anak	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dan Anak	22%	23%	274	23,5%	282	24%	291	24,5%	299	25%	308	25%	308	SKPD pengampu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera																
Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Terkendalinya / penurunan angka kelahiran	15.06 CBR	14.85	1,772	14.64	1,826	14.42	1,880	14.212	1,937	14	1,995	14	1,995	SKPD pengampu keluarga berencana	
	Meningkatnya jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I yang mengikuti program KB	71%	71.4%		71.8%		72.2%		72.6%		73%		73%			
Sosial																
Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat	1400 orang	1470 orang	452	1540 orang	466	1610 orang	480	1680 orang	494	1750 orang	509	1750 orang	509	SKPD pengampu pemberdayaan	
	Meningkatnya Jumlah TAGANA	235 orang	263 orang		291 orang		319 orang		347 orang		375 orang		375 orang			
	Cakupan pembinaan Karang Taruna	45	45		45		45		45		45		45			
	Cakupan pembinaan Lembaga/Orsos	176	176		176		176		176		176		176			
	Cakupan pembinaan Pantii Pemerintah	3 pantii	3 pantii		3 pantii		3 pantii		3 pantii		3 pantii		3 pantii			
	Cakupan pembinaan Pantii Swasta	15 pantii	15 pantii		15 pantii		15 pantii		15 pantii		15 pantii		15 pantii			
	Meningkatnya Jumlah Kelompok Peduli Napza	23 kelompok	33 kelompok		43 kelompok		53 kelompok		63 kelompok		73 kelompok		73 kelompok			
	Meningkatnya KUBE-FM	274 kelompok	281 kelompok		288 kelompok		295 kelompok		302 kelompok		309 kelompok		309 kelompok			
	Meningkatnya USEP-KM	56 Kelompok	57 Kelompok		58 Kelompok		59 Kelompok		60 Kelompok		61 kelompok		61 kelompok			
Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya penanganan anak jalanan	20%	21%	2,630	22%	2,709	23%	2,790	24%	2,874	25%	2,960	25%	2,960	SKPD pengampu rehabilitasi sosial	
	Meningkatnya penanganan lansia terlantar	20,52%	20,52%		21,52%		22,52%		23,52%		24,52%		24,52%			
	Meningkatnya penanganan penyandang cacat	8,2%	8,2%		8,2%		8,2%		8,2%		8,2%		8,2%			

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	SKPD/Penganggung Jawab
			Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		target	Rp		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Ketenagakerjaan																
Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Meningkatnya pencari kerja tidak terlatih yang mengikuti pelatihan	5077 pencaker	5577 pencaker	1,546	6077 pencaker	1,592	6577 pencaker	1,640	7077 pencaker	1,689	7577 pencaker	1,740	7577 pencaker	1,740	SKPD pengampu ketenagakerjaan	
Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Menurunnya jumlah penganggur	18241 orang	17821 orang	1,557	17401 orang	1,603	16981 orang	1,651	16561 orang	1,701	16141 orang	1,752	16141 orang	1,752	SKPD pengampu ketenagakerjaan	
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	Menurunnya perusahaan kategori rawan dan setengah rawan	700 perusahaan	686 perush	291	672 perush	299	658 perush	308	644 perush	317	630 perush	327	630 perush	327	SKPD pengampu ketenagakerjaan	
Koperasi dan usaha kecil menengah																
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro	kenaikan omset pertahun	10%	10%	834	10%	859	10%	884	10%	911	10%	938	10%	938	SKPD pengampu koperasi	
	kenaikan aset pertahun	10%	10%		10%		10%		10%		10%		10%			
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	meningkatkan omset	5%	5% (137 M)	847	5% (144 M)	872	5% (151 M)	898	5% (158 M)	925	5% (165 M)	953	5% (165 M)	953	SKPD pengampu UMKM	
	meningkatkan nilai program	10%	10% (1.170,2 M)		10% (1.650 M)		10% (1.900 M)		10% (2.260 M)		10% (2.550 M)		10% (2.550 M)			
Penanaman Modal																
Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perekonomian dan Investasi Daerah	Tersedianya data pendukung kebijakan penanaman modal	100%	100%	271	100%	280	100%	288	100%	297	100%	305	100%	305	SKPD pengampu penanaman modal	
Kebudayaan																
Program Pembinaan, Pelestarian, dan Pengembangan Nilai-nilai, Seni dan Cagar Budaya	Pengelolaan keragaman budaya pada kelompok/organisasi seni dan budaya	120 kelompok seni budaya	120 kelompok seni budaya	969	120 kelompok seni budaya	998	120 kelompok seni budaya	1,028	120 kelompok seni budaya	1,059	120 kelompok seni budaya	1,090	120 kelompok seni budaya	1,090	SKPD pengampu kebudayaan	
	Cakupan kajian seni		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
	Cakupan fasilitasi seni		86%		90%		93%		96%		100%		100%			
	Cakupan gelar seni		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
	Cakupan misi kesenian		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
	Cakupan SDM kesenian		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
	Cakupan tempat kesenian		50%		50%		100%		100%		100%		100%			
	Cakupan organisasi kesenian		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
	Tersosialisasikannya dan teraktualisasikannya nilai-nilai budaya di masyarakat	4 nilai budaya	4 nilai budaya	4 nilai budaya	4 nilai budaya	4 nilai budaya	4 nilai budaya	4 nilai budaya	4 nilai budaya	4 nilai budaya	4 nilai budaya	4 nilai budaya	4 nilai budaya	4 nilai budaya		
Jumlah kekayaan budaya yang ditetapkan menjadi Bangunan Cagar Budaya/Benda Warisan Budaya dari 437BCB/BWB menjadi 600BCB/BWB	70%	75%		80%		85%		90%		100%		100%				
Kepemudaan dan Olahraga																
Program Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda	Cakupan pembinaan organisasi pemuda	138 organisasi pemuda	157 organisasi pemuda	162	162 organisasi	167	162 organisasi	172	162 organisasi	177	162 organisasi	183	162 organisasi	183	SKPD pengampu kepemudaan	
Program Fasilitasi Olahraga	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga yang berprestasi	34 organisasi olahraga	34 organisasi olahraga	1,304	34 organisasi olahraga	1,344	34 organisasi olahraga	1,384	34 organisasi olahraga	1,425	34 organisasi olahraga	1,468	34 organisasi olahraga	1,468	SKPD pengampu keolahragaan	
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri																
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan	360 orang	725 orang	149	750 orang	153	750 orang	158	750 orang	163	750 orang	168	750 orang	168	SKPD pengampu wawasan kebangsaan	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	SKPD/Penganggung Jawab	
			Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		target			Rp
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian																
Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah SKPD yang menyusun laporan sesuai ketentuan dan tepat waktu	48 SKPD	48 SKPD	1,728	48 SKPD	1,780	48 SKPD	1,834	48 SKPD	1,889	48 SKPD	1,945	48 SKPD	1,945	SKPD pengampu penyelenggaraan pemerintahan	
	Jenis Dokumen pelaporan daerah tingkat Pemkot yang disusun tepat waktu	7 jenis	7 jenis		7 jenis		7 jenis		7 jenis		7 jenis		7 jenis			
	Meningkatnya Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat tingkat Kecamatan/Kelurahan	79	80		81		82		83		84		84			
Program Peningkatan kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan	Prosentase regulasi atau peraturan terkait kewilayahan yang terinformasikan kepada lembaga masyarakat	100%	100%	2,037	100%	2,099	100%	2,162	100%	2,226	100%	2,293	100%	2,293	SKPD pengampu lembaga sosial kemasyarakatan	
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Sekda, Asisten, Staf Ahli Dan Keprotokolan Pemerintah Daerah	Jumlah Pendampingan kegiatan Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli	1277	1290	910	1329	1,521	1370	1,567	1425	1,614	1482	1,662	1482	1,662	SKPD pengampu keprotokolan	
	Jumlah Penyelenggaraan Seremonial Kepala Daerah	750	757		765		788		811		843		843			
Program Penataan Peraturan perundang-undangan dan Pelayanan Hukum	Jumlah Raperda/Perwal yang tersusun	8 Raperda dan 118 Perwal	10 Raperda dan 50 Perwal	1,673	10 Raperda dan 50 Perwal	1,724	10 Raperda dan 50 Perwal	1,775	10 Raperda dan 50 Perwal	1,829	10 Raperda dan 50 Perwal	1,884	10 Raperda dan 50 Perwal	1,884	SKPD pengampu hukum	
	Jumlah Produk Hukum yang disosialisasikan	12 Produk Hukum	12 Produk Hukum		12 Produk Hukum		12 Produk Hukum		12 Produk Hukum		12 Produk Hukum		12 Produk Hukum			
	Jumlah penanganan persoalan hukum Pemkot Yogyakarta	6 perkara/sengketa	5 perkara/sengketa		4 perkara/sengketa		4 perkara/sengketa		4 perkara/sengketa		4 perkara/sengketa		4 perkara/sengketa			
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah, dan Kerumahtanggaan	Pelayanan administrasi umum, penatausahaan persuratan dinas, persandian, keuangan sekretariat daerah, kerumahtanggaan, dan administrasi barang sekretariat daerah	100%	100%	1,029	100%	1,060	100%	1,092	100%	1,125	100%	1,158	100%	1,158	SKPD pengampu Kerumahtanggaan Pemkot	
Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Pendapatan Daerah	Tersedianya data realisasi pendapatan asli daerah	100%	100%	1,289	100%	1,328	100%	1,368	100%	1,409	100%	1,451	100%	1,451	SKPD pengampu kebijakan pengembangan pendapatan daerah	
Program Pengembangan Kerjasama Daerah	Realisasi perumusan perikatan kerjasama daerah	20 perikatan	20 perikatan	222	20 perikatan	229	20 perikatan	236	20 perikatan	243	20 perikatan	250	20 perikatan	250	SKPD pengampu kerjasama daerah	
	Terlaksananya evaluasi pelaksanaan kerjasama daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Meminimalkan ketidaksesuaian realisasi keluaran/output kegiatan dengan target kegiatan, pelaksanaan kegiatan dengan rencana tahapan kegiatan, dan pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan yang berlaku	11%	10%	834	9%	859	8%	885	7%	911	6%	939	6%	939	SKPD pengampu pengendalian pembangunan daerah	
Program Pelayanan Pengadaan Barang/jasa	Terpenuhinya pelayanan pengadaan barang/jasa yang efisien akuntabel dan profesional berbasis teknologi informasi	100%	100%	1,082	100%	1,114	100%	1,148	100%	1,182	100%	1,218	100%	1,218	SKPD pengampu pengadaan barang/jasa	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD/Penganggung Jawab
			Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	Jumlah organisasi perangkat daerah yang telah diantab	100%	100%	1,310	100%	1,349	100%	1,389	100%	1,431	100%	1,474	100%	1,474	SKPD pengampu kelembagaan
	Jumlah organisasi perangkat daerah yang telah terevaluasi kelembagaannya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah tata laksana/mekanisme kerja yang bersifat umum/lintas SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah organisasi perangkat daerah yang telah memiliki IKM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah organisasi perangkat daerah yang telah memiliki standar pelayanan	80%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Program Peningkatan Layanan Pada DPRD	Pengelolaan pelayanan kesekretariatan DPRD	100%	100%	14,654	100%	15,094	100%	15,546	100%	16,013	100%	16,493	100%	16,493	SKPD pengampu kesekretariatan DPRD
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	Menurunnya Jumlah temuan Aparatur Pemeriksaan Internal Pemerintah (APIP)	26	26	1,334	24	1,374	22	1,415	20	1,457	18	1,501	18	1,501	SKPD pengampu pengawasan internal
	Prosentase pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti	75%	75%	76%	78%	81%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian	90%	90,2%	1,442	90,4%	1,485	90,6%	1,530	90,8%	1,576	91%	1,623	91%	1,623	SKPD pengampu kepegawaian daerah
Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian	Presentase pemenuhan kebutuhan instrumen manajemen kepegawaian	30%	38%	539	46%	555	54%	572	62%	589	70%	607	70%	607	SKPD pengampu kepegawaian daerah
Program Pengembangan Karier Pejabat Struktural dan Fungsional	Presentase pemenuhan formasi pejabat struktural dan fungsional sesuai kebutuhan	90%	91%	534	92%	550	93%	567	94%	584	95%	601	95%	601	SKPD pengampu kepegawaian daerah
Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Diklat dan Jenjang Pendidikan PNS	51%	53%	1,976	55%	2,035	57%	2,096	59%	2,159	61%	2,224	61%	2,224	SKPD pengampu peningkatan kualitas SDM
	Persentase Perda bersanksi Pidana yang dipahami oleh personel PPNS dan Satpol PP	70%	75%	113	85%	116	90%	120	95%	123	100%	127	100%	127	
Program Pengelolaan Barang Daerah	Meningkatnya kesesuaian dengan standar pelaksanaan prosedur dari 89% menjadi 94%	89%	90%	865	91%	891	92%	917	93%	945	94%	973	94%	973	SKPD pengampu pengelolaan barang daerah
Program Peningkatan Barang Daerah	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan barang daerah sesuai standar kebutuhan dari 80% menjadi 85%	80%	81%	7,016	82%	7,226	83%	7,443	84%	7,667	85%	7,897	85%	7,897	SKPD pengampu pengelolaan barang daerah
Program Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah	Meningkatnya persentase realisasi penerimaan pajak daerah terhadap target penerimaan pajak daerah	0.5%	0.5%	3,436	0.5%	3,539	0.5%	3,645	0.5%	3,755	0.5%	3,867	0.5%	3,867	SKPD pengampu perpajakan
Program Pengelolaan Anggaran Daerah	Terwujudnya pengelolaan anggaran daerah yang tepat waktu transparan dan akuntabel	tepat waktu	tepat waktu	1,653	tepat waktu	1,703	tepat waktu	1,754	tepat waktu	1,807	tepat waktu	1,861	tepat waktu	1,861	SKPD pengampu pengelolaan keuangan daerah
Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Perimbangan	Terwujudnya pengendalian belanja daerah	90%	91%	512	92%	528	93%	543	94%	560	95%	577	95%	577	SKPD pengampu pengelolaan keuangan daerah
Program Penatausahaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai peraturan perundang-undangan yang Berlaku	Terwujudnya laporan keuangan tepat waktu, transparan, akuntabel dan layak diaudit	90%	91%	794	92%	817	93%	842	94%	867	95%	893	95%	893	SKPD pengampu pengelolaan keuangan daerah
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	ketepatan waktu penerbitan Izin	100%	100%	1,491	100%	1,536	100%	1,582	100%	1,629	100%	1,678	100%	1,678	SKPD pengampu perizinan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPDPenganggung Jawab
			Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban	Prosentase penegakan Perda PerUndang-Undangan secara Pro Yustisi	78.21%	79.21%	1,692	80.21%	1,742	81.21%	1,795	82.21%	1,848	83.21%	1,904	83.21%	1,904	SKPD pengampu ketertiban
	Prosentase penegakan Peraturan PerUndang-Undangan secara Non Yustisi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Program Peningkatan Ketaatan Hukum	Penyelesaian penindakan hukum terpadu terhadap pelanggaran peraturan daerah (kasus)	150	160	341	170	351	180	362	190	373	200	384	200	384	SKPD pengampu ketertiban
Program Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	Tercapainya respon time pemadam kebakaran 11 menit (SPM)	100%	100%	2,094	100%	2,157	100%	2,222	100%	2,288	100%	2,357	100%	2,357	SKPD pengampu kesiapsiagaan dan pengendalian bahaya kebakaran
Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam	Tercapainya respon time penanggulangan bencana 30 menit	100%	100%	741	100%	764	100%	787	100%	810	100%	834	100%	834	SKPD pengampu kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana alam
Program Perlindungan Masyarakat	Meningkatnya pemberdayaan perlindungan masyarakat	80%	82%	490	84%	505	86%	520	88%	536	90%	552	90%	552	SKPD pengampu perlindungan masyarakat
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Tegalarjo	Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik	2	10	24	10	25	10	26	10	28	10	29	10	29	Kecamatan Tegalarjo
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Berbasis Wilayah Kecamatan Jetis	Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik	2	10	57	10	59	10	62	10	65	10	69	10	69	Kecamatan Jetis
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Berbasis Wilayah Kecamatan Gondokusuman	Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik	2	10	30	10	32	10	34	10	35	10	37	10	37	Kecamatan Gondokusuman
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Danurejan	Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik	2	10	21	10	22	10	23	10	24	10	26	10	26	Kecamatan Danurejan
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Berbasis Wilayah Kecamatan Gedongtengen	Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik	2	10	20	10	21	10	23	10	24	10	25	10	25	Kecamatan Gedongtengen
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Ngampilan	Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik	2	10	26	1%	27	1%	28	1%	30	1%	31	1%	31	Kecamatan Ngampilan
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Kraton	Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik	2	10	36	10	38	10	40	10	42	10	44	10	44	Kecamatan Kraton
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis wilayah Kecamatan Gondomanan	Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik	2	10	49	10	52	10	54	10	57	10	60	10	60	Kecamatan Gondomanan
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Berbasis Wilayah Kecamatan Pakualaman	Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik	2	10	22	10	23	10	24	10	25	10	26	10	26	Kecamatan Pakualaman
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Berbasis Wilayah Kecamatan Mergangsan	Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik	2	10	18	10	19	10	20	10	21	10	22	10	22	Kecamatan Mergangsan
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Berbasis Wilayah Kecamatan Umbulharjo	Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik	2	10	58	10	61	10	64	10	67	10	70	10	70	Kecamatan Umbulharjo
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Kotagede	Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik	2	10	23	10	25	10	26	10	27	10	28	10	28	Kecamatan Kotagede

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Mantrijeron	Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik	2	10	29	10	31	10	32	10	34	10	36	10	36	Kecamatan Mantrijeron
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Berbasis Wilayah Kecamatan Wirobrajan	Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik	2	10	14	10	15	10	16	10	17	10	17	10	17	Kecamatan Wirobrajan
Ketahanan Pangan															
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	peningkatan konsumsi pangan yg ASUH dan penganekaragaman olahan pangan dg bahan dasar lokal yg diolah di unit usaha pangan yg menerapkan standar higiene-sanitasi	PPH : 90,9; 60 unit usaha; pemotongan sapi: 6205 ekor, kambing/domba 5680 ekor	PPH : 90,9; 60 unit usaha; pemotongan sapi: 6205 ekor, kambing/domba 5680 ekor	822	PPH : 93,9; 90 unit usaha; pemotongan sapi: 6870 ekor, kambing/domba 5780 ekor	847	PPH : 97,0; 120 unit usaha; pemotongan sapi: 7235 ekor, kambing/domba 5880 ekor	872	PPH : 100; 140 unit usaha; pemotongan sapi: 7600 ekor, kambing/domba 5980 ekor	898	PPH : 100; 150 unit usaha; pemotongan sapi: 7965 ekor, kambing/domba 6080 ekor	925	PPH : 100; 150 unit usaha; pemotongan sapi: 7965 ekor, kambing/domba 6080 ekor	925	SKPD pengampu ketahanan pangan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa															
Program pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat	Meningkatnya peran serta masyarakat melalui swadaya masyarakat	26%	27%	503	28%	518	29%	533	30%	549	31%	566	31%	566	SKPD pengampu pemberdayaan masyarakat
Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Tegalrejo	Meningkatnya swadaya masyarakat	32,66%	32,76%	550	32,81%	1,100	32,85%	1,155	32,89%	1,213	32,93%	1,273	32,93%	1,273	Kecamatan Tegalrejo
Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Jetis	Meningkatnya swadaya masyarakat	19,48%	21,48%	374	23,38%	748	25,28%	785	27,18%	825	28,98%	866	28,98%	866	Kecamatan Jetis
Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Gondokusuman	Meningkatnya swadaya masyarakat	24,27%	25,37%	712	26,37%	1,424	27,37%	1,495	28,37%	1,570	29,37%	1,648	29,37%	1,648	Kecamatan Gondokusuman
Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Danurejan	Meningkatnya swadaya masyarakat	21,63%	23,23%	308	24,73%	616	26,23%	647	27,73%	679	29,23%	713	29,23%	713	Kecamatan Danurejan
Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Gedongtengen	Meningkatnya swadaya masyarakat	23,39%	24,59%	258	25,69%	516	26,79%	542	27,89%	569	28,99%	597	28,99%	597	Kecamatan Gedongtengen
Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Ngampilan	Meningkatnya swadaya masyarakat	20,42%	22,12%	232	23,72%	464	25,32%	487	26,92%	512	28,52%	537	28,52%	537	Kecamatan Ngampilan
Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Kraton	Meningkatnya swadaya masyarakat	25,93%	26,93%	328	27,93%	656	28,93%	689	29,93%	723	30,93%	759	30,93%	759	Kecamatan Kraton
Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Gondomanan	Meningkatnya swadaya masyarakat	25,95%	26,95%	228	27,95%	456	28,95%	479	29,95%	503	30,95%	528	30,95%	528	Kecamatan Gondomanan
Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Pakualaman	Meningkatnya swadaya masyarakat	21,77%	23,27%	200	24,67%	400	26,07%	420	27,47%	441	28,87%	463	28,87%	463	Kecamatan Pakualaman
Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Mergangsan	Meningkatnya swadaya masyarakat	23,03%	24,33%	460	25,53%	920	26,73%	966	27,93%	1,014	29,13%	1,065	29,13%	1,065	Kecamatan Mergangsan
Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Umbulharjo	Meningkatnya swadaya masyarakat	39,54%	39,64%	1,094	39,69%	2,188	39,73%	2,297	39,77%	2,412	39,81%	2,533	39,81%	2,533	Kecamatan Umbulharjo
Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Kotagede	Meningkatnya swadaya masyarakat	25,81%	26,81%	474	27,81%	948	28,81%	995	29,81%	1,045	30,81%	1,097	30,81%	1,097	Kecamatan Kotagede

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD/Penganggung Jawab
			Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Mantrijeron	Meningkatnya swadaya masyarakat	36,18%	36,28%	491	36,33%	982	36,37%	1,032	36,41%	1,083	36,45%	1,137	36,45%	1,137	Kecamatan Mantrijeron
Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Wirobrajan	Meningkatnya swadaya masyarakat	22,94%	24,24%	372	25,44%	744	26,64%	781	27,84%	820	29,04%	861	29,04%	861	Kecamatan Wirobrajan
Statistik															
Program Pengembangan Data/Informasi	Ketersediaan data dasar, sektoral, dan wilayah sesuai kebutuhan	75%	80%	950	85%	978	90%	1,008	95%	1,038	100%	1,069	100%	1,069	SKPD pengampu data/informasi
	Ketersediaan informasi pembangunan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Kearsipan															
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan pengelolaan arsip dinamis aktif (SKPB)	20%	20%	259	20%	267	20%	275	20%	283	20%	291	20%	291	SKPD pengampu kearsipan
	Jumlah SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan pengelolaan arsip dinamis inaktif (SKPB)	20%	20%		20%		20%		20%		20%		20%		
	Terlaksananya pengelolaan arsip statis.	20%	20%		20%		20%		20%		20%		20%		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kearsipan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Terlaksananya peningkatan kualitas SDM bidang kearsipan.	30%	30%		30%		30%		30%		30%		30%		
	Kemitraan dengan lembaga kearsipan dan lembaga non-kearsipan	4 lembaga	4 lembaga		4 lembaga		4 lembaga		4 lembaga		4 lembaga		4 lembaga		
	Penyusunan pedoman kearsipan.	3 pedoman	3 pedoman		4 pedoman		4 pedoman		4 pedoman		4 pedoman		4 pedoman		
Komunikasi dan Informatika															
Program Pengembangan Komunikasi, Teknologi Informasi dan Aplikasi Telematika	Meningkatnya jumlah aplikasi telematika yang terkelola	44 aplikasi	46 aplikasi	4,210	48 aplikasi	4,336	50 aplikasi	4,466	52 aplikasi	4,600	54 aplikasi	4,738	54 aplikasi	4,738	SKPD pengampu TIT
	Tertanganinya keluhan telekomunikasi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Kenaikan bandwidth internet	8 mbps	13 mbps		16 mbps		20 mbps		26 mbps		34 mbps		34 mbps		
	Kenaikan bandwidth intranet	1 mbps	1 mbps		1 mbps		1,5 mbps		2 mbps		2,5 mbps		2,5 mbps		
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Diseminasi dan pendistribusian informasi melalui media massa (majalah, radio, dan TV)	500	503	2,041	506	2,102	509	2,166	512	2,231	515	2,297	515	2,297	SKPD pengampu komunikasi, informasi dan media massa
	Diseminasi dan pendistribusian informasi melalui media baru seperti website (internet)	1 kali/hari	1 kali/hari		1 kali/hari		1 kali/hari		1 kali/hari		1 kali/hari		1 kali/hari		
	Diseminasi dan pendistribusian informasi melalui media tradisional seperti pertunjukan rakyat	1 kali/tahun	1 kali/tahun		1 kali/tahun		1 kali/tahun		1 kali/tahun		1 kali/tahun		1 kali/tahun		
	Diseminasi dan pendistribusian informasi melalui media interpersonal seperti sarasehan, ceramah, atau diskusi	1 kali/tahun	1 kali/tahun		1 kali/tahun		1 kali/tahun		1 kali/tahun		1 kali/tahun		1 kali/tahun		
	Diseminasi dan pendistribusian informasi melalui media luar ruang seperti buletin, leaflet, booklet, brosur, atau baliho	73 kali	75 kali		76 kali		77 kali		78 kali		79 kali		79 kali		
Perpustakaan															
Program Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca/Literasi	Jumlah kunjungan pemustaka perpustakaan	naik 10%	naik 10%	320	naik 10%	329	naik 10%	339	naik 10%	349	naik 10%	360	naik 10%	360	SKPD pengampu perpustakaan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		target	Rp		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Rasio jumlah pengguna perpustakaan digital (digital library) terhadap anggota perpustakaan digital	1:05	1:05		1:05		1:05		1:05		1:05		1:05		1:05	
	Jumlah TBM di Kota Yogyakarta	12	12		12		12		12		12		12		12	
	Jumlah perpustakaan khusus/instansi	2 unit	2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit	
	Jumlah pengelola perpustakaan sekolah yang dilatih	60 orang	60 orang		60 orang		60 orang		60 orang		60 orang		60 orang		60 orang	
	Jumlah pedoman perpustakaan	2 jenis	2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis	
Urusan Pilihan																
Pertanian																
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan	Peningkatan pelayanan pembenihan serta jumlah dan kemampuan kelompok	10%: klas kelompok: utama 6, madya 31, lanjut 85 dan pemula 85	10%: klas kelompok: utama 6, madya 31, lanjut 85 dan pemula 85	365	10%: klas kelompok: utama 10, madya 34, lanjut 93 dan pemula 135	376	10%: klas kelompok: utama 16, madya 39, lanjut 101 dan pemula 132	387	10%: klas kelompok: utama 19, madya 45, lanjut 111 dan pemula 133	399	10%: klas kelompok: utama 26, madya 56, lanjut 169 dan pemula 117	411	10%: klas kelompok: utama 26, madya 56, lanjut 169 dan pemula 117	411	SKPD pengampu pertanian	
Pariwisata																
Program Pengembangan Promosi dan Kerjasama Pariwisata	Meningkatnya jumlah sebaran informasi/promosi pariwisata dan kerjasama antardaerah serta jejaring kerja dengan stakeholder	3 daerah pasar wisata potensial	3 daerah pasar wisata potensial	1,089	3 daerah pasar wisata potensial	1,122	3 daerah pasar wisata potensial	1,156	3 daerah pasar wisata potensial	1,190	3 daerah pasar wisata potensial	1,226	3 daerah pasar wisata potensial	1,226	SKPD pengampu pariwisata	
	Meningkatnya kerjasama antardaerah serta jejaring kerja dengan stakeholder	1 daerah kerjasama, 1 Jejaring kerja dg stakeholder	1 daerah kerjasama, 1 Jejaring kerja dg stakeholder		1 daerah kerjasama, 1 Jejaring kerja dg stakeholder		1 daerah kerjasama, 1 Jejaring kerja dg stakeholder		1 daerah kerjasama, 1 Jejaring kerja dg stakeholder		1 daerah kerjasama, 1 Jejaring kerja dg stakeholder		1 daerah kerjasama, 1 Jejaring kerja dg stakeholder		SKPD pengampu pariwisata	
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Meningkatnya jumlah dan varian obyek daya tarik wisata	1 odtw	1 odtw	2,270	1 odtw	2,338	1 odtw	2,408	1 odtw	2,480	1 odtw	2,555	1 odtw	2,555	SKPD pengampu pariwisata	
Program Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata	Naiknya IKM dari 72% menjadi 80%	70%	72%	484	74%	499	76%	514	78%	529	80%	545	80%	545	SKPD pengampu pariwisata	
Kelautan dan Perikanan																
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Peningkatan pelayanan pembenihan serta jumlah dan kemampuan kelompok	32035 kg & pokdakan 59: klas kelompok utama, madya 2, lanjut 12 dan pemula 45	32035 kg & pokdakan 59: klas kelompok utama, madya 2, lanjut 12 dan pemula 45	105	35238 kg & pokdakan 70: klas kelompok utama, madya 2, lanjut 13 dan pemula 55	108	38762,35 kg & pokdakan 80: klas kelompok utama, madya 3, lanjut 14 dan pemula 63	111	42638,585 kg & pokdakan 90: klas kelompok utama 1, madya 3, lanjut 16 dan pemula 70	114	46902,4435 kg & pokdakan 95: klas kelompok utama 2, madya 4, lanjut 18 dan pemula 71	118	46902,4435 kg & pokdakan 95: klas kelompok utama 2, madya 4, lanjut 18 dan pemula 71	118	SKPD pengampu perikanan	
Perdagangan																
Program Peningkatan Perdagangan	meningkatnya kemampuan dan daya saing usaha pedagang kecil	170 kali	171 kali	3,077	172 kali	3,169	173 kali	3,264	174 kali	3,362	175 kali	3,463	175 kali	3,463	SKPD pengampu perdagangan	
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	meningkatnya keamanan konsumen barang dan jasa	340	340	301	340	310	340	319	340	329	340	339	340	339	SKPD pengampu perdagangan	
Program Pengembangan Pasar	Peningkatan jumlah pedagang yang dibina	3675	5325	860	6975	886	8625	912	10275	940	11925	968	11925	968	SKPD pengampu pasar	
	Peningkatan frekuensi promosi	30	32		50		70		90		110		110		SKPD pengampu pasar	
Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Pasar	Meningkatnya sarana prasarana pasar	70%	75%	4,355	80%	4,485	85%	4,620	90%	4,758	95%	4,901	95%	4,901	SKPD pengampu pasar	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	SKPD/Penganggung Jawab	
			Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016				
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Intensitas penanganan sampah pasar	30'	25'		20'		20'		15'		15'		15'		
	Menurunnya pelanggaran perda pasar	55%	50%		45%		40%		35%		30%		30%		
	Menurunnya jumlah kasus kriminalitas di pasar	90	80		64		51		41		33		33		
Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan Retribusi	Optimalisasi lahan pasar	90%	92%	1,192	94%	1,227	96%	1,264	98%	1,302	100%	1,341	100%	1,341	SKPD pengampu pasar
	Optimalisasi pengelolaan retribusi	13 M	14 M		15 M		16 M		17 M		18 M		18 M		
Industri															
Program Pengembangan Industri Mikro Kecil dan Menengah (IMKM)	Jumlah pelaku UMKM yg difasilitasi (di luar PEW)	650 orang	760 orang	1,782	850 orang	1,835	950 orang	1,890	1050 orang	1,947	1200 orang	2,005	1200 orang	2,005	SKPD pengampu perindustrian
	Jumlah pelaku usaha mikro kecil yg difasilitasi	11.000 orang	11.470 orang		13720 orang		13290 orang		14420 orang		14920 orang		14920 orang		
Ketransmigrasian															
Program Pengembangan Kawasan transmigrasi	Prosentase transmigrasi yang berangkat	70	75	198	80	204	85	210	90	216	95	223	95	223	SKPD pengampu ketransmigrasian
Lintas Urusan															
Program Internal SKPD	Meningkatnya kelancaran internal SKPD	100%	100%	86,481	100%	87,099	100%	89,712	100%	92,404	100%	95,176	100%	95,176	Semua SKPD/Unit Kerja
Program Penanggulangan Kemiskinan	Cakupan wilayah penanggulangan kemiskinan	45 Kel	45 Kel	1,000	45 Kel	1,030	45 Kel	1,061	45 Kel	1,093	45 Kel	1,126	45 Kel	1,126	SKPD pengampu penanggulangan kemiskinan
Program Penataan Kawasan Sungai	Cakupan penataan kawasan sungai	3 sungai	3 sungai	1,000	3 sungai	1,030	3 sungai	1,061	3 sungai	1,093	3 sungai	1,126	3 sungai	1,126	SKPD pengampu penataan kawasan sungai
JUMLAH TOTAL				406,621		423,334		436,286		449,640		463,407		463,407	

Matriks 8.2 Arah Prioritas Program

Program Pembangunan	Arah Prioritas Program
PROGRAM SKPD	
Pendidikan	
Program Wajar 12 Tahun	Pelaksanaan Program Wajar 12 Tahun diarahkan pada prioritas pengelolaan JPD, BOS pusat dan daerah, dan memberikan akses kepada warga masyarakat yang berkebutuhan khusus
Program Pengembangan Pendidikan	Pelaksanaan Program Pengembangan Pendidikan diarahkan pada prioritas peningkatan layanan data pendidikan, pengembangan kesiswaan, penerimaan peserta didik baru (PPDB) online, pengembangan tenaga kependidikan dan peningkatan kualitas pegawai
Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Dasar	Pelaksanaan Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Dasar diarahkan pada prioritas pengembangan pengelolaan pembelajaran pendidikan dasar, peningkatan kompetensi guru yang meliputi pedagogik, profesional, sosial, moral pada pendidikan dasar, pembinaan manajemen pendidikan dasar
Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Menengah	Pelaksanaan Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Menengah diarahkan pada prioritas pengembangan siswa, pengembangan model pembelajaran pendidikan menengah, peningkatan kompetensi guru yang meliputi pedagogik, profesional, sosial, moral pendidikan menengah, pembinaan manajemen pendidikan menengah
Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan Informal	Pelaksanaan Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan Informal diarahkan pada prioritas fasilitasi dan penguatan kelembagaan pendidikan anak usia dini, fasilitasi dan penguatan kelembagaan pendidikan masyarakat, penyelenggaraan kegiatan di SKB, dan pendidikan dalam keluarga

Program Pembangunan	Arah Prioritas Program
Program Pengembangan Taman Pintar	Pelaksanaan Program Pengembangan Taman Pintar diarahkan pada prioritas pemeliharaan pengembangan alat peraga dan peningkatan pelayanan kependidikan taman pintar, pengembangan dan keprograman taman pintar, peningkatan pelayanan kehumasan dan pemasaran taman pintar
Kesehatan	
Program Upaya Pelayanan Kesehatan	Pelaksanaan Program Upaya Pelayanan Kesehatan diarahkan pada prioritas peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar & rujukan, pengelolaan operasional Puskesmas se-kota Yogyakarta,
Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Pengelolaan Alat Kesehatan	Pelaksanaan Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Pengelolaan Alat Kesehatan diarahkan pada prioritas peningkatan pelayanan kefarmasian, pengelolaan alat kesehatan
Program Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga	Pelaksanaan Program Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga diarahkan pada prioritas upaya kesehatan keluarga dan reproduksi, penyelenggaraan perbaikan gizi masyarakat & PMT-AS, penyelenggaraan Rumah Pemulihan Gizi (RPG)
Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Pelaksanaan Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan diarahkan pada prioritas pengendalian penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular, pengawasan dan pembinaan kesehatan lingkungan
Program Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Pelaksanaan Program Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan diarahkan pada prioritas penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat
Program Regulasi Pelayanan Kesehatan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pelaksanaan Program Regulasi Pelayanan Kesehatan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan diarahkan pada prioritas pembinaan dan pelaksanaan regulasi pelayanan, pengelolaan sumber daya manusia kesehatan
Program Pemberdayaan Masyarakat dan promosi Kesehatan	Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan promosi Kesehatan diarahkan pada prioritas pengelolaan promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan

Program Pembangunan	Arah Prioritas Program
Program Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kesehatan	Pelaksanaan Program Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kesehatan diarahkan pada prioritas pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan dan Penelitian & Pengembangan Kesehatan, penyelenggaraan surveilans epidemiologi dan penyelidikan KLB
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Medis	Pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Pelayanan Medis diarahkan pada prioritas administrasi pelayanan pasien
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Penunjang	Pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Pelayanan Penunjang diarahkan pada prioritas pelayanan penunjang medis, pelayanan penunjang non medis
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan	Pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan dan peralatan medis, pengadaan linen dan pakaian kerja lapangan
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Pelaksanaan Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit diarahkan pada prioritas peningkatan prasarana dan sarana fisik rumah sakit, pengadaan peralatan kesehatan, pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor, peningkatan sarana dan prasarana RS
Pekerjaan Umum	
Program Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	Pelaksanaan Program Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum diarahkan pada prioritas peningkatan dan pemeliharaan PJU, panel jaringan dan lampu hias, peningkatan PJU Kampung dan PJU Lingkungan
Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Pelaksanaan Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan diarahkan pada prioritas peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, peningkatan dan pemeliharaan bangunan pelengkap jalan
Program Peningkatan dan Pemeliharaan Pengairan	Pelaksanaan Program Peningkatan dan Pemeliharaan Pengairan diarahkan pada prioritas peningkatan dan pemeliharaan saluran pengairan, peningkatan dan pemeliharaan bangunan talud
Program Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase	Pelaksanaan Program Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase diarahkan pada prioritas peningkatan dan pemeliharaan saluran drainase

Program Pembangunan	Arah Prioritas Program
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan SAL	Pelaksanaan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan SAL diarahkan pada prioritas peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana SAL
Program Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah	Pelaksanaan Program Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah diarahkan pada prioritas pembuatan tandon air Kantor PKB Linmas, Pembangunan dan Rehabilitasi bangunan Pemerintah fasilitas kesehatan, pendidikan, sosial, perkantoran, sarana perekonomian, dan sarana prasarana lainnya
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Pelaksanaan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan diarahkan pada prioritas operasional pembersihan sampah, operasional pengangkutan sampah, pembinaan pengelolaan kebersihan dan operasional retribusi, pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan, peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan persampahan, peningkatan kinerja pengelolaan persampahan berbasis masyarakat
Perumahan	
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	Pelaksanaan Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman diarahkan pada prioritas peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar permukiman
Penataan Ruang	
Program Pengembangan Rencana Rinci dan Infrastruktur Kawasan	Pelaksanaan Program Pengembangan Rencana Rinci dan Infrastruktur Kawasan diarahkan pada prioritas peningkatan dan pemeliharaan bangun-bangunan monumental dan asesoris keindahan kota
Perencanaan Pembangunan	
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Pelaksanaan program perencanaan pembangunan daerah diarahkan pada prioritas Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan, Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Penyusunan RDTR Kota Yogyakarta
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Pelaksanaan program penelitian dan pengembangan daerah diarahkan pada prioritas Pengelolaan Jaringan Penelitian, Penelitian dan Pengembangan Aset Daerah
Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Pelaksanaan program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan diarahkan pada prioritas Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan, Pengendalian Strategis

Program Pembangunan	Arah Prioritas Program
Perhubungan	
Program Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Pelaksanaan Program Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan diarahkan pada prioritas pembangunan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan, pemeliharaan sarana prasarana, pemeliharaan alat pengujian kendaraan bermotor
Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan	Pelaksanaan Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan diarahkan pada prioritas optimalisasi perijinan angkutan, manajemen transportasi terminal, manajemen sarana prasarana terminal, survey bidang lalu lintas, pengaturan kendaraan tidak bermotor
Program Pengendalian Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas	Pelaksanaan Program Pengendalian Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas diarahkan pada prioritas pengendalian dan operasional pengaturan lalu lintas, angkutan lebaran, natal dan tahun baru, bimbingan dan keselamatan
Program Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran	Pelaksanaan Program Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran diarahkan pada prioritas operasional dan optimalisasi penyelenggaraan perparkiran
Lingkungan Hidup	
Program Pengelolaan Ruang Terbuka	Pelaksanaan Program Pengelolaan Ruang Terbuka diarahkan pada prioritas peningkatan dan pemeliharaan taman kota, peningkatan dan pemeliharaan jalur hijau, peningkatan kualitas ruang terbuka kawasan lingkungan perkotaan
Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Pelaksanaan Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup diarahkan pada prioritas pemantauan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sungai, pemantauan dan pengendalian pencemaran udara, pengendalian dampak perubahan iklim, pengkajian dokumen dan perizinan lingkungan, pengawasan pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup dan penanganan kasus lingkungan
Program Peningkatan Kapasitas dan Akses Informasi Sumber Daya Lingkungan Hidup	Pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas dan Akses Informasi Sumber Daya Lingkungan Hidup diarahkan pada prioritas peningkatan partisipasi, edukasi dan akses informasi masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup, pengembangan kapasitas, sarana prasarana laboratorium lingkungan, koordinasi penilaian adipura, adiwiyata, kalpataru, kehati, kampung hijau, dan evaluasi lingkungan

Program Pembangunan	Arah Prioritas Program
Program Konservasi Sumber Daya Alam	Pelaksanaan Program Konservasi Sumber Daya Alam diarahkan pada prioritas pengendalian dan konservasi air tanah
Pertanahan	
Program Fasilitas Pertanahan	Pelaksanaan Program Fasilitas Pertanahan diarahkan pada prioritas penyelesaian masalah pertanahan, pelacakan dan pensertifikatan tanah, pengadaan tanah untuk fasilitas publik
Kependudukan dan Catatan Sipil	
Program Pelayanan Dokumen dan Surat-Surat Kependudukan	Pelaksanaan Program Pelayanan Dokumen dan Surat-Surat Kependudukan diarahkan pada prioritas pembuatan KK/KTP dan KIA, peningkatan administrasi kependudukan
Program Pelayanan Permohonan Dokumen Pencatatan Sipil	Pelaksanaan Program Pelayanan Permohonan Dokumen Pencatatan Sipil diarahkan pada prioritas pengelolaan dokumen pencatatan sipil, peningkatan pelayanan pencatatan sipil
Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Pelaksanaan Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan diarahkan pada prioritas pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi administrasi kependudukan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak diarahkan pada prioritas peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, perlindungan perempuan dan anak
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Anak	Pelaksanaan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Anak diarahkan pada prioritas pengembangan partisipasi perempuan dan pengarusutamaan gender (PUG), penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi anak
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	

Program Pembangunan	Arah Prioritas Program
Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera diarahkan pada prioritas peningkatan Keluarga Berencana dan peningkatan Keluarga Sejahtera
Sosial	
Program Pemberdayaan Sosial	Pelaksanaan Program Pemberdayaan Sosial diarahkan pada prioritas bimbingan dan peningkatan kualitas potensi sumber kesejahteraan sosial, peningkatan penanggulangan penyalahgunaan Napza
Program Rehabilitasi Sosial	Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial diarahkan pada prioritas pendataan PMKS dan PSKS, pembinaan dan pemberian santunan kematian pemegang KTP dan KIA, koordinasi pelayanan bantuan sosial, pelayanan gelandangan dan pengemis di Panti Karya Karanganyar, pelayanan jompo terlantar di Panti Wreda Budhi Dharma, pelayanan anak terlantar di Pantai Anak Wiloso Projo, pembinaan pelayanan PMKS, pelayanan dan pembinaan kesejahteraan sosial dalam panti sosial, rehabilitasi dan pelayanan sosial, pemberdayaan fakir miskin
Ketenagakerjaan	
Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Pelaksanaan Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas diarahkan pada prioritas peningkatan kompetensi tenaga kerja dan pengembangan program pelatihan bidang industri, pengembangan dan pemberdayaan lembaga pelatihan kerja
Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Pelaksanaan Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja diarahkan pada prioritas fasilitasi penempatan tenaga kerja, peningkatan pengembangan pasar kerja
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	Pelaksanaan Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja diarahkan pada prioritas fasilitasi hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja, peningkatan pengawasan perlindungan dan penegakan hukum terhadap K3
Koperasi dan usaha kecil menengah	

Program Pembangunan	Arah Prioritas Program
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro	Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro diarahkan pada prioritas pembinaan koperasi, pembinaan koperasi syariah, peningkatan kinerja lembaga keuangan mikro dan BUKP
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK)	Pelaksanaan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah diarahkan pada prioritas pengembangan jaringan kerjasama UMKM dan promosi penanaman modal, fasilitasi operasional pengembangan sumberdaya UMKM, kajian sumberdaya UMKM
Penanaman Modal	
Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perekonomian dan Investasi Daerah	Pelaksanaan program peningkatan kualitas kebijakan pengembangan perekonomian dan investasi daerah diarahkan pada prioritas Pembinaan Pendapatan Asli Daerah, Optimalisasi Barang/Aset Daerah BLUD dan BUMD
Kebudayaan	
Program Pembinaan, Pelestarian, dan Pengembangan Nilai-nilai, Seni dan Cagar Budaya	Pelaksanaan Program Pembinaan, Pelestarian, dan Pengembangan Nilai-nilai, Seni dan Cagar Budaya diarahkan pada prioritas pembinaan, pengembangan dan pelestarian nilai budaya, pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya
Kepemudaan dan Olahraga	
Program Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda	Pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda diarahkan pada prioritas peningkatan peran serta pemuda dan pemberdayaan pemuda
Program Fasilitasi Olahraga	Pelaksanaan Program Fasilitasi Olahraga diarahkan pada prioritas pembinaan dan pengembangan keolahragaan, dan memfasilitasi pengembangan kebugaran dan kesehatan fisik
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Pelaksanaan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan diarahkan pada prioritas peningkatan pemahaman kebangsaan yang berwawasan Bhineka Tunggal Ika

Program Pembangunan	Arah Prioritas Program
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adminstrasi Kuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	
Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan	Pelaksanaan program peningkatan manajemen penyelenggaraan pemerintahan diarahkan pada prioritas Penetapan Kinerja, Laporan Kinerja Pertanggung Jawaban (LKPJ), Pembinaan kecamatan kelurahan, Evaluasi kelurahan, Monografi Kecamatan Kelurahan, Profil kelurahan, LAKIP dan LPPD, Monev pelaksanaan otda
Program Peningkatan kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan	Pelaksanaan program peningkatan kapasitas lembaga sosial kemasyarakatan diarahkan pada prioritas fasilitasi pengembangan kapasitas kebijakan dan penguatan Rukun Tetangga/Rukun Warga.
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Sekda, Asisten, Staf Ahli Dan Keprotokolan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Sekda, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah diarahkan pada prioritas Fasilitasi Pemanduan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta, Penyusunan Naskah Sambutan, Fasilitasi Pemanduan dan Koordinasi Sekda, Asisten dan Staf Ahli
Program Penataan Peraturan perundang-undangan dan Pelayanan Hukum	Pelaksanaan Program Penataan Peraturan perundang-undangan dan Pelayanan Hukum diarahkan pada prioritas Pengolahan data hukum dan pengkajian perda, penyelesaian perkara dan sengketa, pembuatan dan penerbitan lembaran daerah, sosialisasi produk hukum, pelaksanaan rencana aksi nasional HAM, publikasi raperda
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah, dan Kerumahtangaan	Pelaksanaan Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah, dan Kerumahtangaan diarahkan pada prioritas Pengendalian Administrasi Sekretariat Daerah, Pelayanan Kerumahtangaan

Program Pembangunan	Arah Prioritas Program
Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Pendapatan Daerah	Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Pendapatan Daerah diarahkan pada prioritas Pembinaan Pendapatan Asli Daerah, Optimalisasi Barang/Aset Daerah BLUD dan BUMD
Program Pengembangan Kerjasama Daerah	Pelaksanaan Program Pengembangan Kerjasama Daerah diarahkan pada prioritas Pengembangan Kerjasama antar daerah, dengan Lembaga Non Pemerintah, baik untuk sarpras perkotaan maupun sosial, ekonomi dan budaya
Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Pelaksanaan program pengendalian pelaksanaan pembangunan diarahkan pada prioritas pengkoordinasian dan pengendalian administrasi, pengendalian operasional, analisa sistem dan prosedur kegiatan.
Program Pelayanan Pengadaan Barang/jasa	Pelaksanaan program pelayanan pengadaan barang dan jasa diarahkan pada prioritas Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan program peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah diarahkan pada prioritas analisa jabatan dan beban kerja, indeks kepuasan layanan masyarakat, pengembangan pelayanan publik, pemantapan kelembagaan, ketatalaksanaan Pemda
Program Peningkatan Layanan Pada DPRD	Pelaksanaan program peningkatan layanan pada DPRD diprioritaskan pada penjangkaran aspirasi masyarakat, pelayanan kesehatan anggota DPRD dan keluarga, peningkatan kapasitas anggota DPRD, pembahasan rancangan peraturan daerah, pembahasan KUA-PPAS dan RAPBD, evaluasi pengawasan pelaksanaan APBD, kehumasan dan publikasi kegiatan DPRD, pengadaan pakaian dinas bagi anggota DPRD, penyusunan draft rencana kerja DPRD, pengelolaan informasi kegiatan DPRD, penyusunan raperda prakarsa DPRD
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	Pelaksanaan program peningkatan sistem pengawasan internal diarahkan pada prioritas Pemeriksaan reguler, pemeriksaan khusus, inventarisasi temuan, evaluasi LAKIP, monev percepatan pemberantasan korupsi, review laporan keuangan Pemda, monitoring perencanaan kegiatan dan anggaran, pemeriksaan non PKPT, penyusunan statistik pengawasan, SPIP, penelitian dan penelaahan informasi

Program Pembangunan	Arah Prioritas Program
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Pelaksanaan program peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian diarahkan pada prioritas fasilitasi kenaikan pangkat dan mutasi kepegawaian
Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian	Pelaksanaan program pengembangan manajemen kepegawaian diarahkan pada prioritas penilaian kinerja pegawai, identifikasi sumber daya pegawai sesuai kebutuhan lembaga
Program Pengembangan Karier Pejabat Struktural dan Fungsional	Pelaksanaan program pengembangan karier pejabat struktural dan fungsional diarahkan pada prioritas penilaian angka kredit, fasilitasi kegiatan baperjakat dan penataan, pengelolaan data simpeg dan file pegawai
Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas SDM diarahkan pada prioritas penyelenggaraan Diklat, pengiriman tugas belajar, ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah
Program Pengelolaan Barang Daerah	Pelaksanaan program pengelolaan barang daerah diarahkan pada prioritas pengasuransian barang, penghapusan barang bergerak dan tidak bergerak, peningkatan kapasitas inventarisasi dan pemutahiran data barang, penataan status kepemilikan barang daerah, monev pengelolaan barang, optimalisasi pendistribusian dan pemanfaatan barang, penilaian ekonomis barang bergerak, updating data ledger bangunan, penyusunan RKBMD/RKPBMD dan DKBMD DKPBMD
Program Peningkatan Barang Daerah	Pelaksanaan Program Peningkatan Barang Daerah diarahkan pada prioritas penyediaan barang barang kebutuhan SKPD yang dapat berfungsi secara optimal
Program Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah	Pelaksanaan program pengamanan penerimaan pajak daerah diarahkan pada prioritas Pemantauan pemungutan dan pembayaran pajak penerangan jalan; optimalisasi pajak reklame, hotel, restoran, hiburan, parkir, PBB, BPHTB, air tanah dan sarang burung walet; pembinaan penyuluhan, dan pemberian penghargaan wajib pajak

Program Pembangunan	Arah Prioritas Program
Program Pengelolaan Anggaran Daerah	Pelaksanaan program pengelolaan anggaran daerah diarahkan pada prioritas Penyusunan raperda APBD & perubahan APBD, pembinaan pengelolaan administrasi keuangan daerah, pengelolaan anggaran bantuan, penyusunan DPA & DPPA, penyusunan standarisasi harga barang dan jasa, penyusunan profil keuangan daerah, penyusunan anggaran kas
Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Perimbangan	Pelaksanaan program pengendalian belanja daerah dan pengelolaan dana perimbangan diarahkan pada Pengendalian anggaran belanja daerah, pengelolaan belanja tidak terduga, pengelolaan dana perimbangan
Program Penatausahaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai peraturan perundang-undangan yang Berlaku	Pelaksanaan program penatausahaan pembiayaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku diarahkan pada prioritas Penyusunan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, fasilitasi implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pengelolaan Investasi Dana Daerah, Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan BLU
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Pelaksanaan Program Peningkatan Pelayanan Perizinan diarahkan pada prioritas koordinasi dan penelitian lapangan, operasional pelayanan perizinan, pengawasan dan pengaduan perizinan, peningkatan pelayanan informasi perizinan, pengkajian dan sosialisasi pelayanan perizinan, pengelolaan data perizinan, pengembangan pelayanan perizinan
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban	Pelaksanaan Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban diarahkan pada prioritas pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, penjagaan kawasan operasi ketertiban umum, pengamanan khusus, operasi penegakan perda pro yustisi
Program Peningkatan Ketaatan Hukum	Pelaksanaan Program Peningkatan Ketaatan Hukum diarahkan pada prioritas penyelenggaraan operasi penindakan hukum terpadu, penyusunan perencanaan operasional

Program Pembangunan	Arah Prioritas Program
Program Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	Pelaksanaan Program Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran diarahkan pada prioritas peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran, peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana pencegahan kebakaran
Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam	Pelaksanaan Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam diarahkan pada prioritas pencegahan bencana dan kesiapsiagaan tanggap darurat
Program Perlindungan Masyarakat	
Ketahanan Pangan	
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Pelaksanaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan diprioritaskan pada pengembangan ketahanan pangan, pengawasan kualitas bahan makanan
Pemberdayaan Masyarakat Desa	
Program pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat	Pelaksanaan Program pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat diarahkan pada prioritas peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, pendampingan PNPM Mandiri Perkotaan, pembinaan pemberdayaan masyarakat, fasilitasi peningkatan kehidupan beragama
Statistik	
Program Pengembangan Data/Informasi	Pelaksanaan program pengembangan data/informasi diarahkan pada prioritas pengembangan pusat data perencanaan pembangunan, pengelolaan dan informasi data statistik, analisa data
Kearsipan	
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Pelaksanaan Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah diarahkan pada prioritas Pengembangan Arsip Daerah, Pengelolaan Arsip Daerah
Komunikasi dan Informatika	

Program Pembangunan	Arah Prioritas Program
Program Pengembangan Komunikasi, Teknologi Informasi dan Aplikasi Telematika	Pelaksanaan Program Pengembangan Komunikasi, Teknologi Informasi dan Aplikasi Telematika diarahkan pada prioritas Peningkatan dan pengelolaan sistem telekomunikasi, Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Informasi, Pengembangan dan Pengelolaan e_Gov, Pembinaan dan Pengembangan Teknologi Informasi
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Pelaksanaan Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa diarahkan pada prioritas Pengelolaan UPIK, Peningkatan Promosi dan Publikasi, Peningkatan Operasional dan Layanan Kehumasan
Perpustakaan	
Program Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca/Literasi	Pelaksanaan Program Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca/Literasi diarahkan pada prioritas pembinaan perpustakaan, pengembangan budaya literasi
Urusan Pilihan	
Pertanian	
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan	Pelaksanaan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan diarahkan pada prioritas pengembangan pelayanan pertanian
Pariwisata	
Program Pengembangan Promosi dan Kerjasama Pariwisata	Pelaksanaan Program Pengembangan Promosi dan Kerjasama Pariwisata diarahkan pada prioritas pengembangan promosi pariwisata, pengembangan kerjasama kemitraan pariwisata
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata diarahkan pada prioritas pengembangan obyek dan daya tarik wisata, pembinaan dan pengembangan atraksi wisata, pengembangan dan penataan kawasan malioboro

Program Pembangunan	Arah Prioritas Program
Program Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata	Pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata diarahkan pada prioritas pembinaan SDM palaku pariwisata, pembinaan pengembangan usaha jasa pariwisata
Kelautan dan Perikanan	
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Pelaksanaan Program Pengembangan Budidaya Perikanan diarahkan pada prioritas Pengembangan pelayanan perikanan
Perdagangan	
Program Peningkatan Perdagangan	Pelaksanaan Program Peningkatan Perdagangan diarahkan pada prioritas fasilitasi promosi dan pameran bagi UMKM, pembinaan PKL, pelaksanaan PMPS, pengembangan usaha perdagangan
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Pelaksanaan Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan) diarahkan pada prioritas penyelenggaraan perlindungan konsumen dan fasilitasi BPSK, pengawasan dan pengamanan perdagangan
Program Pengembangan Pasar	Pelaksanaan Program Pengembangan Pasar diarahkan pada prioritas pemberdayaan pedagang dan komunitas pasar, pengembangan dan pembuatan media promosi pasar
Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Pasar	Pelaksanaan Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Pasar diarahkan pada prioritas peningkatan kebersihan pasar, peningkatan pengamanan dan penertian pasar, pemeliharaan pasar-pasar se-kota Yogyakarta
Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan Retribusi	Pelaksanaan Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan Retribusi diarahkan pada prioritas operasional peningkatan pendapatan pasar, penataan lahan dan pembinaan pedagang pasar, optimalisasi pemungutan retribusi, pelayanan pasar wilayah I dan II, optimalisasi pengelolaan satwa dan tanaman hias kota Yogyakarta
Industri	

Program Pembangunan	Arah Prioritas Program
Program Pengembangan Industri Mikro Kecil dan menengah (IMKM)	Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Mikro Kecil dan menengah (IMKM) diarahkan pada prioritas pemberdayaan ekonomi berbasis kewilayahan (PEW), fasilitasi penerapan teknologi tepat guna bagi IMKM, pelatihan peningkatan SDM bagi industri mikro dan kecil, penumbuhan wisausaha baru industri mikro dan kecil, fasilitasi penerapan teknologi tepat guna bagi IKM cor alumunium
Ketransmigrasian	
Program Pengembangan Kawasan transmigrasi	Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan transmigrasi diarahkan pada fasilitasi penempatan transmigrasi
PROGRAM STRATEGIS LINTAS SKPD DAN LINTAS URUSAN	
Program Internal SKPD	Pelaksanaan program internal SKPD adalah program yang dilaksanakan oleh semua SKPD yang disesuaikan dengan arahan peraturan perundangan yang berlaku, dan diarahkan pada prioritas pemenuhan keperluan administrasi perkantoran, sarpras aparatur, sumberdaya aparatur, capaian kinerja, dan disiplin aparatur
Program Penanggulangan Kemiskinan	Pelaksanaan Program Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada prioritas koordinasi penanggulangan kemiskinan, penguatan data, kemitraan, pemberdayaan keluarga bidang sosial ekonomi dan fisik
Program Penataan Kawasan Sungai	Pelaksanaan Program Penataan Kawasan Sungai diarahkan pada prioritas penguatan kelembagaan masyarakat, gerakan tertb dan bersih sungai, pembangunan RTH, dan kesiapsiagaan bencana.
PROGRAM KEWILAYAHAN	
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adminstrasi Kuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	

Program Pembangunan	Arah Prioritas Program
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan (semua kecamatan)	Pelaksanaan program peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan diarahkan pada prioritas Fasilitasi pelimpahan kewenangan
Pemberdayaan Masyarakat Desa	
Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan (semua kecamatan)	Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat berbasis kewilayahan diarahkan pada prioritas pemberdayaan masyarakat kecamatan dan pembangunan lingkungan wilayah kelurahan dan mendorong gerakan segoro amarto diantaranya Jam belajar masyarakat

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator kinerja daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kota Yogyakarta Tahun 2012-2016 mempunyai tujuan memberi gambaran keberhasilan pencapaian visi dan misi walikota pada akhir periode masa jabatan. Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD yang diinginkan dilihat pencapaian indikator *outcome* prioritas pembangunan daerah setiap tahun. Pada dasarnya Indikator kinerja daerah secara teknis dirumuskan dengan mengambil indikator sasaran prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*).

Tabel 9.1 Indikator Makro Daerah
Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No.	INDIKATOR MAKRO DAERAH	Kondisi Awal	Prakiraan Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pertumbuhan ekonomi	4,84	4,85- 5,15	4,92- 5,25	4,99- 5,31	5,15- 5,40	5,20-5,50	5,20-5,50
2.	IPM	79,50-79,55	79,52-79,57	79,54-79,59	79,56-79,61	79,58-79,63	79,60-79,65	79,60-79,65
3.	Angka pengangguran terbuka	9,5-6,10	9,25-6,05	8,80-5,95	8,65-5,90	8,40-5,80	8,10-5,75	8,10-5,75

**Tabel 9.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja masing masing Misi
Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016**

No.	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Misi I							
I	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas							
1.1	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah							
	Prosentase seluruh organisasi perangkat daerah harus sesuai dengan aturan dan tujuan penyusunannya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Prosentase paket pengadaan yang metode pelaksanaannya dilakukan melalui pelayanan pengadaan barang/jasa yang efisien, akuntabel dan profesional berbasis teknologi informasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Prosentase SKPD yang menyusun laporan sesuai ketentuan dan tepat waktu	80%	82%	84%	86%	88%	90%	90%
	Prosentase dokumen pelaporan daerah yang disusun tepat waktu	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya indeks kepuasan layanan masyarakat	70	72	74	76	78	80	80
1.2	Pewujudan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik							
	Tersusunnya produk hukum daerah dan kajian perda sesuai dengan yang direncanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Seluruh masyarakat Kota Yogyakarta dapat mengakses produk hukum daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penanganan penyelesaian persoalan hukum Pemerintah Kota Yogyakarta	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.3	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif							

No.	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	prosentase penurunan pelanggaran standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan pemerintahan	4,5%	4,0%	3,5%	3,0%	2,5%	2,0%	2,0%
	prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	85%	86%	87%	88%	89%	90%	90%
1.4	Peningkatan pendapatan daerah							
	Target Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	150 – 155 Milyar	167 - 174 Milyar	172 - 177 Milyar	187 – 192 Milyar	205 – 215 Milyar	225 – 231 Milyar	225 – 231 Milyar
	Termanfaatkannya aset dan sarana prasarana pemerintah daerah	83%	84%	85%	86%	87%	88%	88%
1.5	Peningkatan efektifitas dan efisiensi belanja daerah							
	Penilaian audit eksternal	Wajar	Wajar	Wajar	Wajar	Wajar	Wajar	Wajar
1.6	Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan							
	Tersedianya dokumen perencanaan memuat tujuan, target dan sasaran yang jelas dan terukur.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kesesuaian antara muatan RPJPD dengan RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kesesuaian antara muatan RPJMD dengan RKPDP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya pengendalian administrasi dan pengendalian operasional kegiatan seluruh SKPD Pemerintah Kota Yogyakarta	90%	90%	91%	92%	93%	94%	94%
1.7	Peningkatan pelayanan umum, komunikasi dan informasi							
	Prosentase penyampaian informasi program pembangunan melalui semua media komunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk e-government	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah, kerumahtanggaan dan penatausahaan bagian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kelancaran pelaksanaan pelayanan kedinasan kepala daerah, sekda, asisten, staf ahli dan keprotokolan Pemerintah Daerah	78%	79%	82%	85%	89%	93%	93%

No.	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Prosentase Arsip Pemerintah Kota terkelola dengan baik, benar dan tertib	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase kerjasama katagori baik dan baik perlu ditingkatkan terhadap seluruh kerjasama yang dievaluasi	93,51%	93,97%	94,44%	94,92%	95,39%	95,87%	95,87%
	Fasilitasi kegiatan DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
II	Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah							
2.1	Pengelolaan manajemen kepegawaian yang mengacu pada kebutuhan pelayanan prima							
	Tersedianya kebijakan dibidang pengembangan manajemen kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Percepatan durasi penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian yang transparan, cepat dan akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan pembinaan lembaga RT dan RW	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.2	Peningkatan kapasitas SDM aparatur							
	prosentase SDM aparatur yang mengikuti diklat sesuai dengan kebutuhan	51%	53%	55%	57%	59%	61%	61%
	Misi 2							
I	Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau							
	Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat							
	cakupan mutu pelayanan kesehatan dasar	64%	67%	70%	73%	76%	80%	80%
	cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Indeks kepuasan layanan rumah sakit	0,66	0,70	0,71	0,72	0,73	0,74	0,74
	Cakupan ketersediaan obat, vaksin, dan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di puskesmas	90%	91%	92%	93%	94%	95%	95%
	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%

No.	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	tahun 3,5%.							
	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif 65%	72,07%	72,36%	72,64%	72,93%	73,21%	73,50%	73,50%
	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) 5%	13,36%	13,29%	13,22%	13,14%	13,07%	13,00%	13%
	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 70%	82,90%	83,32%	83,74%	84,16%	84,58%	85,00%	85%
	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87%	87,90%	88,02%	88,14%	88,26%	88,38%	88,50%	88,50%
	Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap Desa/Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan 100% setiap tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Prevalensi kekurangan gizi (gizi buruk dan gizi kurang)	9,8%	9,44%	9,08%	8,72%	8,36%	8,00%	8%
	Cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	cakupan balita ditimbang berat badannya	74%	76,20%	78%	81%	83%	85%	85%
	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	155	144	134	123	113	<102	<102

No.	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	9,5	8,9	8,4	7,8	7,3	6,7	6,7
	Angka kematian balita dari 2,1 menjadi 1,3 per 1000 kelahiran hidup	2,1	1,9	1,8	1,6	1,5	1,3	1,3
	Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih (PN) sebesar lebih dari 96 persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan							
	prosentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	98%	98,2%	98,4%	98,6%	98,8%	99,0%	99%
	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (CDR) (MDG's)	71%	72%	73%	73%	74%	75%	75%
	Proporsi Kasus TB yang Berhasil diobati dalam Program DOTS (Success Rate)	68%	71%	74%	77%	80%	83%	83%
	Proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS	75%	79%	83%	87%	91%	95%	95%
	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Sarana Sanitasi Dasar Memenuhi Syarat	92%	92%	93%	93%	94%	94%	94%
	Semua kelurahan melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat	27% (12 kelurahan)	19	26	33	40	45	100% (45 kelurahan)
	Penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat							
	Cakupan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan jaminan kesehatan bagi penduduk rentan miskin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan regulasi dan sumber daya kesehatan							
	Prosentase sarana pelayanan kesehatan yang memenuhi standar mutu minimal	87%	89%	90%	92%	93%	95%	95%
	cakupan keamanan mutu pangan	64%	67%	70%	74%	77%	80%	80%
	Peningkatan upaya preventif dan promotif kesehatan							
	cakupan kelurahan siaga aktif mandiri	55%	60%	65%	70%	75%	80%	80%

No.	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	cakupan rumah tangga yang melaksanakan PHBS	55%	59%	63%	67%	71%	75%	75%
	Indeks Kepuasan Layanan Kesehatan	0,79	0,792	0,794	0,796	0,798	0,8	0,8
	Seluruh Kejadian Luar Biasa (KLB) bidang Kesehatan dapat dicegah dan ditangani < 24 jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
II	Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai							
2.1	Peningkatan penataan ruang yang sesuai dengan peraturan yang berlaku							
	Tersedianya informasi mengenai RTRW Kota beserta Rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya kualitas penerangan jalan umum	90%	91%	92%	93%	94%	95%	95%
2.2	Peningkatan sarana dan prasarana perkotaan yang berkualitas							
	Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota (aksesibilitas)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan (mobilitas)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat (keselamatan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman (kondisi jalan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana (kecepatan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan	77%	78%	79%	80%	81%	82%	82%
	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya kualitas talud/bronjong dan saluran pengairan	70,0%	70,5%	71,0%	71,5%	72,0%	72,5%	72,5%
	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tidak terjadinya genangan > 2 kali/tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya system air limbah setempat yg memadai	20%	20%	30%	40%	50%	60%	60%
	Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota	12,5%	13,6%	14,7%	15,8%	16,9%	18,0%	18%
	prosentase penyediaan fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	15%	18%	21%	24%	27%	30%	30%
	Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan	74%	75%	76%	77%	78%	80%	80%
	Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya akses air minum yg aman melalui system penyediaan air minum dg jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dg kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari (sangat baik)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar permukiman	60%	64%	67%	71%	75%	78%	78%
	Meningkatnya pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan	80%	81%	82%	83%	84%	85%	85%
2.3	Peningkatan pelayanan pengendalian bahaya kebakaran serta penanggulangan bencana							
	cakupan pelayanan kesiapsiagaan dan pengendalian bencana kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	cakupan pelayanan kesiapsiagaan dan penanganan bencana alam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase (%) korban bencana skala kab/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	prasarana tanggap darurat lengkap							
2.4	Peningkatan sistem transportasi perkotaan							
	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan	66%	70%	74%	78%	82%	86%	86%
	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota	50%	50%	60%	75%	100%	100%	100%
	Tersedianya halte yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	26%	26%	50%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya terminal angkutan penumpang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	-	-	50%	100%	100%	100%	100%
	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kota	90%	90%	95%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya ketertiban penyelenggaraan perparkiran	70%	74%	78%	82%	86%	90%	90%
III	Terwujudnya pelayanan administrasi publik yang baik							
3.1	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi publik							
	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	96%	96%	97%	98%	99%	100%	100%
	Cakupan penerbitan akta kelahiran	92%	92,4%	92,8%	93,2%	93,6%	94%	94%
	Tingkat ketepatan penyampaian informasi data kependudukan kepada pengguna di Kota Yogyakarta	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IV	Terwujudnya pendidikan inklusif untuk semua							
4.1	Peningkatan akses pendidikan melalui pendidikan formal, non formal maupun informal							
	Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS)	74%	89%	91%	93%	95%	97%	97%

No.	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Misi 3							
I	Terwujudnya peningkatan kualitas ekonomi masyarakat							
1.1	Peningkatan ekonomi masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan							
	Meningkatnya jumlah koperasi aktif	447	453	460	467	474	481	481
	Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah	22.091 UMKM	22.341 UMKM	22.591 UMKM	22.841 UMKM	23.091 UMKM	23.341 UMKM	23.341 UMKM
	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	80%	82%	84%	86%	88%	90%	90%
II	Terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat							
2.1	Peningkatan pemberdayaan masyarakat yang berafirmatif gender							
	Peningkatan pemberdayaan masyarakat	26%	27%	28%	29%	30%	31%	31%
	Terselesaikannya kasus KDRT dan kekerasan terhadap anak yang dilaporkan	50%	58%	66%	74%	82%	90%	90%
	Meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan partisipasi perempuan dan anak	22%	23%	23,5%	24%	24,5%	25%	25%
	Persentase (%) PMKS skala kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	37%	45%	54%	63%	71%	80%	80%
	Persentase (%) panti sosial skala kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	50%	52%	54%	56%	58%	60%	60%
	Persentase (%) PMKS skala kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	50%	56%	62%	68%	74%	80%	80%
	Persentase (%) korban bencana skala kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	23%	26%	30%	33%	37%	40%	40%
	Menurunnya jumlah angka kemiskinan	9,4%	9,2%	9%	8,8%	8,6%	8,4%	8,4%
	Peningkatan wawasan kebangsaan							
	Menurunnya Tingkat Intensitas dan Frekuensi Konflik Sosial yang ditimbulkan karena isu SARA dan kesenjangan sosial	47,03%	42,03%	37,03%	32,03%	27,03%	22,03%	22,03%
	Meningkatnya Peran Serta dan Pemberdayaan Pemuda	65,74%	69,74%	73%	77%	81%	85%	85%
	Meningkatnya Prestasi Olah Raga	87,5%	89,5%	91,5%	93,5%	95,5%	97,5%	97,5%
	Misi 4							
I	Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul							
1.1	Peningkatan kualitas pendidikan							
	Meningkatnya Kelulusan Ujian Nasional (UN/UNPK)	86%	87%	90%	93%	96%	99%	99%
	Jumlah layanan taman pintar	7 layanan	7 layanan	7 layanan	7 layanan	7 layanan	7 layanan	7 layanan
	bertambahnya perpustakaan dan TBM	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	11%	24%	37%	50%	62%	75%	75%
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	11%	21%	31%	40%	50%	60%	60%
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	11%	21%	31%	40%	50%	60%	60%
	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	20%	26%	32%	38%	44%	50%	50%
	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	10%	18%	26%	34%	42%	50%	50%
	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	14%	20%	26%	33%	39%	45%	45%
	Besaran pengujian peralatan di perusahaan	13%	20%	28%	35%	43%	50%	50%
	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	13%	25%	36%	47%	59%	70%	70%
II	Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat							

No.	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1	Pengembangan pariwisata berbasis budaya							
	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	2.500.000 orang	2.600.000 orang	2.704.000 orang	2.812.160 orang	2.924.646 orang	3.041.632 orang	3.041.632 orang
	Meningkatnya lama tinggal wisatawan	2,59 hari	2,62 hari	2,65 hari	2,69 hari	2,72 hari	2,75 hari	2,75 hari
	Meningkatnya jumlah nilai budaya yang dikelola dan dilestarikan	437 BCB/BWB	469 BCB/BWB	501 BCB/BWB	534 BCB/BWB	567 BCB/BWB	600 BCB/BWB	600 BCB/BWB
2.2	Pengembangan potensi ekonomi daerah							
	Cakupan bina kelompok perajin	28 kelompok	31,6 kelompok	35,2 kelompok	38,8 kelompok	42,4 kelompok	46 kelompok	46 kelompok
	Meningkatnya jumlah pengunjung pasar tradisional	120.000 orang	136.000 orang	152.000 orang	168.000 orang	184.000 orang	200.000 orang	200.000 orang
	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan pasar terhadap PAD	7,2%	7%	8%	8%	8%	8%	8,0%
	Meningkatnya Omzet Pedagang pasar	7%	14%	20%	27%	33%	40%	40%
	cakupan bina kelompok petani	248	262	276	290	304	318	318
	cakupan bina kelompok perikanan	59	66	73	81	88	95	95
III	Terwujudnya daya dukung pengembangan usaha							
3.1	Pengembangan lingkungan yang kondusif bagi dunia usaha							
	Penerbitan izin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya database yang selalu ter update	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya Regulasi sebagai dasar pelayanan perizinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kota Yogyakarta	89,1%	90%	91%	92%	93%	94%	94%
	cakupan petugas perlindungan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.2	Peningkatan kualitas lingkungan hidup perkotaan sesuai dengan baku mutu							
	Tersedianya luasan RTH Kota	32,3%	32,9%	33,5%	34,1%	34,7%	35,3%	35,3%
	Peningkatan pengelolaan ruang terbuka kawasan lingkungan perkotaan	0%	7,3%	14,6%	21,9%	29,2%	36,5%	36,5%

No.	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Prosentase usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	60%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
	Prosentase usaha dan/atau kegiatan yang menataati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak	60%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
	Prosentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	60%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
	Prosentase kelembagaan masyarakat pengelola lingkungan tingkat kelurahan di Kota Yogyakarta	0%	20%	40%	60%	80%	100%	100%
	Prosentase parameter kualitas air tanah yang memenuhi baku mutu	60%	61%	62%	63%	64%	65%	65%

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN DAERAH

10.1 Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir.

- 1) RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan Kebijakan Umum serta Prioritas Program APBD masa transisi yaitu tahun pertama dibawah kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah pada periode berikutnya.
- 2) RPJMD sebagai pedoman dimaksud pada butir 1) antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota terpilih.
- 3) Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama RPJMD dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya, yang dapat direvisi sesuai dengan RPJMD yang baru.

10.2 Kaidah Pelaksanaan:

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program – program pembangunan daerah diperlukan adanya kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh SKPD/unit kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta agar melaksanakan program program dalam RPJMD Tahun 2012-2016 dengan sebaik-baiknya;

2. Setiap SKPD berkewajiban untuk menyusun Renstra-SKPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dengan berpedoman pada RPJMD ini;
3. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Tahun 2012-2016 untuk setiap tahunnya disusun melalui RKPD Kota Yogyakarta yang dalam penyelenggarakannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);
4. Penyusunan RKPD Kota Yogyakarta dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Kelurahan, Kecamatan, dan Musrenbang Kota;
5. RKPD Kota Yogyakarta menjadi acuan bagi setiap SKPD/unit kerja dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) dengan pendekatan pencapaian hasil (*outcomes*);
6. Berkaitan dengan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, RKPD Kota Yogyakarta merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
7. Renja-SKPD yang disusun menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) dan menjadi kontrak kinerja kepala SKPD/Unit kerja.
8. Untuk menjaga konsistensi dan efektifitas pelaksanaan RPJMD Tahun 2012-2016, Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah maupun tahunan, serta melaporkan hasilnya kepada Walikota .

BAB XI

PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota - Wakil Walikota terpilih, yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005 - 2025, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dalam menyusun RPJMD ini sudah melalui pendekatan perencanaan politis, teknokratis, *topdown-bottom up*, dan partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan. Untuk keberhasilan pencapaian visi, misi dan program yang sudah disusun, pelaksanaan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016 menjadi tanggung bersama baik di lingkungan Pemerintahan, dunia usaha/swasta maupun masyarakat.

Yogyakarta, 20 Juni 2012

WALIKOTA
WALIKOTA YOGYAKARTA

HARYADI SUYUTI

